



LKPJ



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Halaman

	Daftar Isi.....	i
	Kata Pengantar.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	I.1. Dasar Hukum.....	I-1
	I.2. Gambaran Umum Daerah	I-3
	I.2.1 Kondisi Geografis Daerah.....	I-3
	I.2.2 Gambaran Umum Demografis.....	I-13
	I.2.3 Kondisi Ekonomi.....	I-14
	I.2.4 Indikator Kinerja Makro.....	I-24
	I.3. Visi dan Misi.....	I-29
	I.3.1 Visi.....	I-29
	I.3.2 Misi.....	I-30
	I.3.3 Tujuan dan Sasaran.....	I-31
	I.3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	I-35
	I.3.5 Prioritas Daerah.....	I-43
	I.3.6 Sasaran, Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.....	I-46
BAB II	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	II-53
	II.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	II-53
	II.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.....	II-53
	II.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan/Penerimaan Daerah	II-55
	II.2 Pengelolaan Belanja/Keuangan Daerah	II-60
	II.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	II-60
	II.2.2 Target dan Realisasi Belanja	II-61
BAB III	CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	III-67
	III.1 Urusan Wajib.....	III-67
	III.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	III-67
	1. Urusan Pendidikan	III-67
	2. Urusan Kesehatan.....	III-67
	3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III-67
	4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	III-67
	5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.....	III-67
	6. Urusan Sosial	III-67
	III.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Non Pelayanan Dasar.....	III-154
	1. Urusan Tenaga Kerja.....	III-154
	2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III-154
	3. Urusan Pangan.....	III-154

4.	Urusan Pertanahan.....	III-154
5.	Urusan Lingkungan Hidup.....	III-154
6.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	III-154
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-154
8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	III-155
9.	Urusan Perhubungan.....	III-155
10.	Urusan Komunikasi dan Informatika.....	III-155
11.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	III-155
12.	Urusan Penanaman Modal.....	III-155
13.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	III-157
14.	Urusan Statistik.....	III-157
15.	Urusan Persandian.....	III-157
16.	Urusan Kebudayaan.....	III-157
17.	Urusan Perpustakaan.....	III-157
18.	Urusan Kearsipan.....	III-157
III.2.	Urusan Pilihan.....	III-194
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	III-194
2.	Urusan Pariwisata.....	III-194
3.	Urusan Pertanian.....	III-194
4.	Urusan Kehutanan.....	III-194
5.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	III-194
6.	Urusan Perdagangan.....	III-194
7.	Urusan Perindustrian.....	III-194
8.	Urusan Transmigrasi.....	III-195
III.3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerinatahan (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang Lainnya).....	III-243
1.	Perencanaan.....	III-243
2.	Keuangan.....	III-243
3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	III-243
4.	Penelitian dan Pengembangan.....	III-243
5.	Inspektorat.....	III-243
6.	Fungsi Penunjang Lainnya.....	III-243
BAB IV	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	IV-289
IV.1	Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	IV-289
IV.2	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran.....	IV-290
IV.3	Satuan Kerja Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.....	IV-290
BAB V	PENUTUP.....	V-295
	- Lampiran Tabel Realisasi Kinerja <u>Tujuan dan Sasaran</u> Tahun 2019	
	- Lampiran Tabel Program Yang Mendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
	- Lampiran Tabel Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2019	

KATA PENGANTAR

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Akhir Tahun Anggaran 2019 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ ini disusun sebagai salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Ini merupakan salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dan menggambarkan arah kebijakan umum pemerintah daerah sepanjang tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta penyelenggaraan urusan tugas pembantuan. Selain itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini juga menggambarkan kinerja tahunan yang merupakan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan yang ditunjang oleh seluruh *stakeholders*.

Kami menyadari bahwa, selain mendatangkan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2019 masih terdapat hal-hal yang membutuhkan upaya peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang. Untuk itu, catatan strategis dan rekomendasi dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif menjadi bahan perbaikan kinerja eksekutif untuk tahun berikutnya dan merupakan masukan penting bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami berharap semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman serta bahan evaluasi bagi

pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada waktu mendatang. Apresiasi dan penghargaan juga disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, serta semoga seluruh upaya yang dilaksanakan senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridha Allah SWT. Aamiin

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pangkalpinang, Maret 2020

**GOVERNOR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



ERZALDI ROSMAN

An abstract graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping, curved lines in shades of blue and grey, creating a sense of motion and depth.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. DASAR HUKUM

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta pada Pasal 71 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 30 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 21 Seri E).

I.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ke 32 (tiga puluh dua), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal terbentuknya provinsi, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

I.2.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 105°50' sampai 108°30' Bujur Timur dan 1°50' sampai 3°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyau, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

a. Batas Wilayah

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

b. Luas Wilayah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah : 2.950,68 km²
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah : 2.820,61 km²
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah : 2.155,77 km²
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah : 3.607,08 km²
- Kabupaten Belitung luas wilayah : 2.293,61 km²
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah : 2.506,91 km²
- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 89,40 km²

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

c. Topografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan Hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung,

dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

d. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (*quartz*) dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

e. Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

f. Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 67,9 mm sampai dengan 409 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 238,45 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 23,5 °C sampai dengan 32,1 °C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa

lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih detailnya dapat diperhatikan Tabel II.9. Dari seluruh luas lahan, 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel I.1.

Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					2018
	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian Sawah	13.262	15.719	15.719	22.771	25.058	25.093
Tegalan	109.820	113.105	113.105	117.376	99.038	97.930
Ladang	44.085	30.348	30.348	28.147	27.435	30.416
Perkebunan	334.698	441.152	441.152	367.848	391.064	394.408
Hutan Rakyat	71.323	47.753	47.753	42.637	43.315	43.661
Pengembalaan	4.235	1.815	1.815	2.263	3.232	3.232
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	126.272	76.588	76.588	67.415	55.987	59.174
Lain-Lain (pekarangan)	388.068	397.806	397.806	538.195	529.810	519.497
Permukiman	550.651	517.741	517.741	455.762	489.080	490.607
JUMLAH	1.642.414	1.642.027	1.642.027	1.642.414	1.664.018	1.664.018

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 519.497 ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 490.607 Ha dan perkebunan sebesar 394.408 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 3.232 Ha.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

(1) Kawasan hutan produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi dilakukan melalui penataan batas kawasan hutan produksi, identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi), peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan, pengembangan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi (kayu dan bukan kayu), pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.

Penetapan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 436.647,89 Ha, dengan perincian :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan dua) Ha;
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 67.083,52 (enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga koma lima dua) Ha;
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.497,75 (delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) Ha;
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.451,10 (seratus enam ribu empat ratus lima puluh satu koma satu nol) Ha;
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 43.595,77 (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh tujuh) Ha; dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 55.650,83 (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma delapan tiga) Ha.

(2) Kawasan peruntukan pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional, pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya, meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura, mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala, penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya, penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan, penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas

ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar, pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dan membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha, meliputi:
 - a.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha;
 - a.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha;
 - a.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha;
 - a.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha;
 - a.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha;
 - a.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
 - a.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha.
- b. Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi:
 - b.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha;
 - b.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha;
 - b.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha;
 - b.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha;
 - b.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha;
 - b.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha; dan
 - b.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 Ha.
- c. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi:
 - c.1 Perkebunan Besar meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808 Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590 Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908 Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329 Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047 Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188 Ha.

- c.2 Perkebunan rakyat meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120 Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660 Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687 Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326 Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264 Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456 Ha.
- d. Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi:
 - d.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha;
 - d.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha;
 - d.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha;
 - d.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha;
 - d.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha;
 - d.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan
 - d.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha.

(3) Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan, menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap, pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar, pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar, penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan), pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap, dan pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium. Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi untuk pengembangan, meliputi :

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan, dan perikanan tangkap yang telah didukung pelabuhan perikanan (2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan 18 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)).

Dilain pihak pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha, Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

(4) Kawasan pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

- a. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- b. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

(5) Kawasan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung, membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri, membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri, penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan, dan mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan adalah:

- a. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e. Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan

g. Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan, identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh, penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung, revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada, pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi, dan peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a. Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
 - a.1 Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
 - a.2 Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - a.3 Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
 - a.4 Taman wisata laut;
 - a.5 Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - a.6 Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b. Wisata budaya, wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - b.1 Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
 - b.2 Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
 - b.3 Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
 - b.4 Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di kabupaten/kota;
 - b.5 Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b.6 Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.
- c. Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

(7) Kawasan peruntukan permukiman

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan,

penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota, penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan, identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

(8) Kawasan peruntukan lainnya

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

- Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
- Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

Semua kawasan peruntukan ini telah dipetakan kedalam pola ruang Gambar I.1 dan Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gambar I.2.

Gambar I.1

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Gambar I.2

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

I.2.2 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.430.865 orang, dengan laju pertumbuhan 2016-2017 sebesar 2,07 persen. Dalam kurun waktu 2013-2017, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebesar 115.742 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,80 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran.

Tabel I.2

Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014–2018

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	304.485	311.085	317.735	324.305	330.793
Belitung	171.271	175.048	178.721	182.418	186.155
Bangka Barat	192.395	196.598	200.684	204.778	209.011
Bangka Tengah	177.218	180.903	184.720	188.603	192.429
Bangka Selatan	189.492	193.583	197.670	201.782	205.901
Belitung Timur	117.026	119.394	121.971	124.587	127.064
Pangkalpinang	191.994	196.202	200.326	204.392	208.520
Kepulauan Bangka Belitung	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865	1.459.873

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Pada tahun 2014 penduduk Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.343.881 jiwa dan meningkat menjadi 1.449.873 pada tahun 2018. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi.

I.2.3 KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

1. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambután, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel I.3.

Tabel I.3

Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Penggunaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
I.	LAHAN PERTANIAN	1.173.412
I.1.	Lahan Sawah	25.093
	a. Irigasi	4.966
	b. Tadah hujan	17.181
	c. Pasang surut	390
	d. Lebak	2.556
I.2.	Lahan Bukan Sawah	1.148.319
	a. Tegal	97.930
	b. Ladang	30.416
	c. Perkebunan	394.408
	d. Hutan rakyat	43.661
	e. Pengembalaan	3.232
	f. Sementara tidak diusahakan	59.174

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
	g. Lain-lain	519.497
II.	LAHAN BUKAN PERTANIAN	490.607
	a. Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	490.607
	Jumlah	1.664.018

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019

Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 3,55% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%. Gambaran tersebut berarti bahwa upaya pengembangan pembangunan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan melalui perluasan areal tanam dengan penambahan bahan baku lahan dan optimalisasi lahan yang ada.

2. Potensi Kehutanan

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 tercatat 654.561,34 Ha yang terdiri dari 432.883,52 Ha Hutan Produksi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 35.453,89 Ha Hutan Konservasi dan 692,59 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.4.

Tabel I.4

Luas Hutan Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	432.882,82	432.882,82	432.882,82	436.647,89	436.647,89
Hutan Lindung	189.965	189.965	189.965	184.276,95	184.276,93
Hutan Konservasi	35.473	35.473	35.473	35.750,84	35.750,84
Hutan Produksi Konversi	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58
Jumlah	659.014,58	659.014,58	659.014,58	657.378,26	657.378,26

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

3. Potensi Kelautan, Pesisir dan Perikanan

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menyimpan dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondisi desa-desa pantai di wilayah ini di sepanjang pantainya merupakan alam yang memiliki karakteristik pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berbatu, mangrove, hutan pantai, semak belukar dan permukiman.

Pantai berpasir umumnya dikembangkan sebagai daerah wisata terutama disebabkan keindahan alam yang diselingi oleh batu granit. Desa pantai berlumpur terutama yang berada di muara dan disebabkan oleh buangan limbah pertambangan dan perkebunan. Sedangkan desa pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ikan, udang, kepiting dan berbagai biota laut lainnya.

Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada tabel I.5.

Tabel I.5

Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	Potensi Produksi (Ton)					Produksi Tahun (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Perikanan Tangkap	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	203.284,40	139.632,96	196.704,00	208.019,7	228.524,71
2.	Perikanan Budidaya	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	4.198,62	4.305,29	4.618,87	3.844,97	9.340,93

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

a) Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018 tercatat sebesar 9.340,93 ton. Produksi ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.844,97 ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2017 disumbangkan oleh produksi udang vannamei, rumput laut dan kerang-kerangan.

b) Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km² atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 228.524,71 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 sebesar 208.019,7 Ton dimana jumlah produksinya 196.704,00 ton. Hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

4. Potensi Pertambangan

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor

terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel I.9 berikut.

Tabel I.6

Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	(2)	(3)
1	Pasir Kwarsa	1.482.301 ton
2	Pasir Bangunan	666.188,06 ton
3	Kaolin	205.487,50 ton
4	Granit	55.508,29 m3
5	Diabas	89.551,12 m3

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Potensi Pariwisata

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yang baik, secara geografis juga mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar I.3 berikut.

Gambar I.3

Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi Perangkat Daerah dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya Perangkat Daerah tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

Tabel I.7
Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Jumlah Wisatawan Dalam Negeri	369.743	465.554	460.236	362.279	417.818
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	3.020	4.690	6.613	7.143	8.124
3.	Jumlah	372.763	470.244	466.876	369.422	425.942

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan Dalam Negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2014 jumlah wisatawan sebanyak 372.763 orang meningkat di tahun 2018 menjadi 425.942 orang.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang Tahun 2016-2018 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel III.1 menunjukkan trend yang meningkat. Secara nominal PDRB pada Tahun 2016 sebesar Rp 47.848.372 juta, meningkat menjadi sebesar Rp 49.986.847 juta pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 menjadi sebesar Rp 52.212.088.

Tabel I.8

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2018 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.123.187	9.089.992	9.588.864
B.	Pertambangan dan Penggalian	6.490.563	6.634.752	6.562.956
C.	Industri Pengolahan	10.680.473	11.345.075	11.803.244
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	43.742	45.864	49.274
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.567	9.406	8.879
F.	Konstruksi	4.021.606	4.248.461	4.493.147
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	6.727.660	7.253.257	7.445.122
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.752.264	1.892.222	2.021.344
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.086.468	1.136.527	1.207.181
J.	Informasi dan Komunikasi	926.926	1.002.849	1.110.309
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	859.981	881.273	936.324
L.	Real Estate	1.494.629	1.572.154	1.702.532
M, N.	Jasa Perusahaan	120.419	127.462	135.984
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.478.742	2.604.173	2.843.213
P.	Jasa Pendidikan	1.139.292	1.183.252	1.289.760
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	559.444	605.202	632.789
R, S, T, U	Jasa Lainnya	334.409	354.926	381.166
PDRB		47.848.372	49.986.847	52.212.088

Sumber: 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

Dilihat dari perkembangan sektoral, kecuali sektor pertambangan dan penggalian dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, hampir seluruh sektor PDRB mengalami peningkatan. Sektor informasi dan komunikasi yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, dari Rp 1.002.849 juta pada Tahun 2017, meningkat menjadi Rp 1.110.309 juta pada Tahun 2018 diikuti oleh sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dari Rp 2.604.173 juta pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 2.843.213 juta pada Tahun 2018.

Tahun 2018 sektor dengan kontribusi PDRB terbesar diperoleh dari sector industri pengolahan sebesar Rp 11.803.244 juta, diikuti sector pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp 9.588.864 juta, sector perdagangan besar dan eceran Rp 7.445.122 juta, dan sector pertambangan Rp 6.562.956 juta. Kontribusi keempat sector tersebut sebesar Rp 35.400.186 juta atau sebesar 67,8%. Kontribusi sektor lainnya sebesar Rp 16.811.902 juta atau sebesar 32,2%.

Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan

dan kemajuan dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang Tahun 2016-2018 juga menunjukkan peningkatan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada Tahun 2016 sebesar Rp 25.027.249 juta rupiah meningkat menjadi sebesar Rp 26.300.217 juta pada Tahun 2017 dan sebesar Rp 27.794.140 juta pada Tahun 2018.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada Tahun 2016 nilai ekspor mencapai sebesar Rp19.416.749 juta menurun menjadi sebesar Rp25.592.322 juta pada Tahun 2017, namun menurun menjadi sebesar Rp25.021.253 juta pada Tahun 2018.

Tabel I.9

PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2018 (Juta rupiah)

No	Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.027.249	26.300.217	27.794.140	29.402.381	30.730.837
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	302.278	319.466	345.741	365.216	392.460
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.868.523	5.030.469	5.119.335	5.347.394	5.684.683
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.450.945	11.111.056	11.779.865	12.526.294	13.095.276
5	Perubahan Inventori	509.575	341.149	389.331	414.272	439.281
6	Ekspor Luar Negeri	19.416.749	25.592.322	25.021.253	25.385.049	26.827.887
7	Impor Luar Negeri	2.091.352	1.414.959	2.007.892	2.655.109	3.127.145
8	Net Ekspor Antar Daerah	(10.635.595)	(17.292.873)	(16.229.685)	(16.276.512)	(17.082.529)
	PDRB	47.848.372	49.986.847	52.212.088	54.508.985	56.960.750

Sumber: 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

Untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami peningkatan sepanjang periode Tahun 2016-2018, yaitu masing-masing sebesar Rp 10.450.945 juta pada Tahun 2016, sebesar Rp 11.111.056 juta pada Tahun 2017 dan sebesar Rp 11.779.865 juta pada Tahun 2018. Sejalan dengan peningkatan komponen investasi, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan sepanjang periode yang sama, yaitu sebesar Rp 4.868.523 juta pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp 5.030.469 juta pada Tahun 2017 dan kembali meningkat menjadi sebesar Rp 5.119.335 juta pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2019 dan 2020 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada Tahun 2019 dan 2020 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *rowmaterials* sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia. Penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 dan 2020 diperkirakan mulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

I.2.4 INDIKATOR KINERJA MAKRO

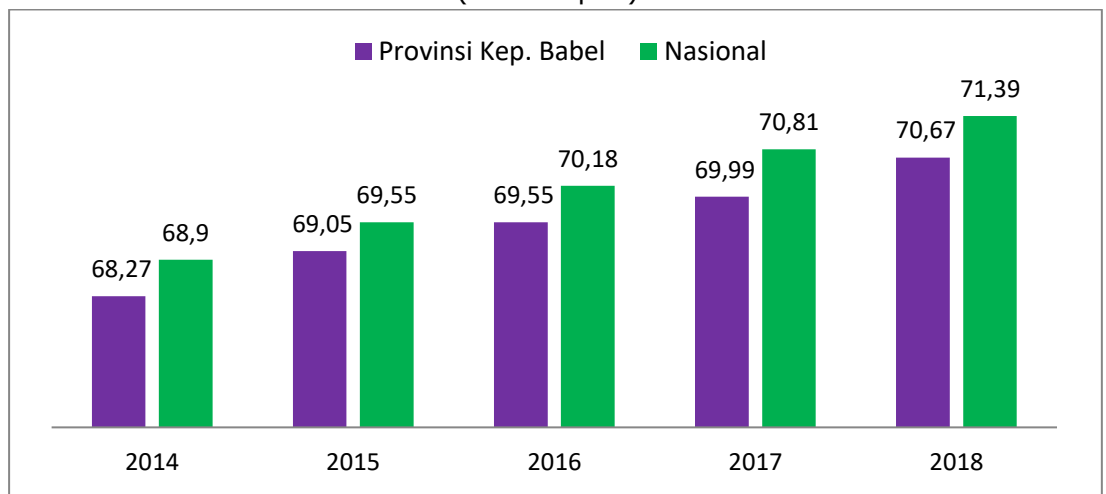
a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata

besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berikut ini gambar I.5 merupakan data capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2018 yang disandingkan dengan capaian IPM Nasional Tahun 2016-2018 dengan kecenderungan capaian yang terus meningkat tiap tahunnya.

Gambar I.4
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2018
(dalam Rupiah)



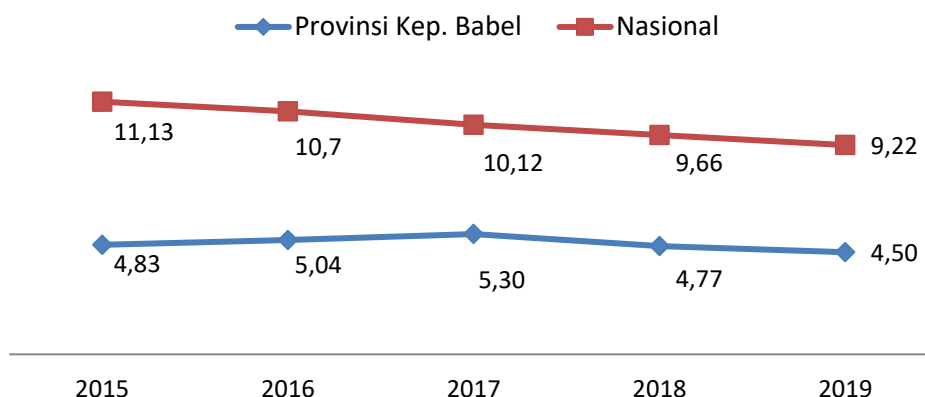
Sumber : 2014-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

b. Angka Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneedsapproach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2015 - 2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 4,83 persen dari total jumlah penduduk, turun menjadi 4,50 persen pada tahun 2019.

Gambar I.5
Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019
(dalam persen)

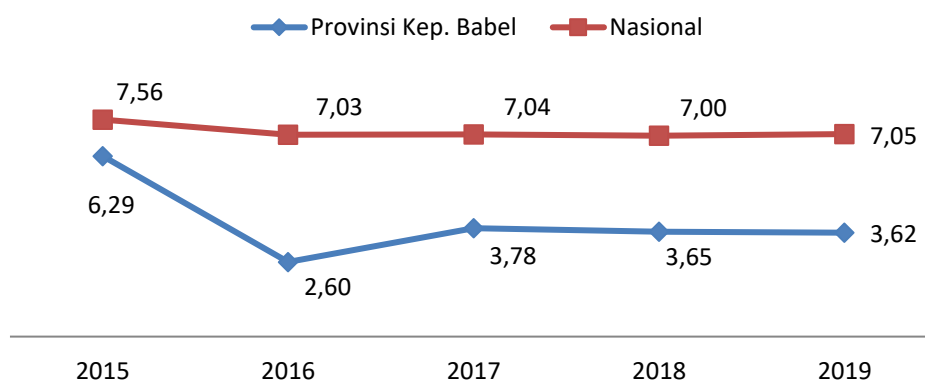


Sumber : 2015 – 2019 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung

c. Angka Pengangguran

Persentase pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2018 sebesar 3,65 persen. Mengalami penurunan sebesar 0,13 persen dari kondisi Tahun 2017 yang semula berada di angka 3,78. Sedangkan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 3,62. Angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui upaya penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan usaha diarahkan untuk menciptakan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja diharapkan akan berdampak pada penyerapan angkatan kerja. Demikian juga pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata, kelautan serta membaiknya infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan listrik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap peningkatan angkatan kerja.

Gambar I.6
Pengangguran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019
(dalam persen)



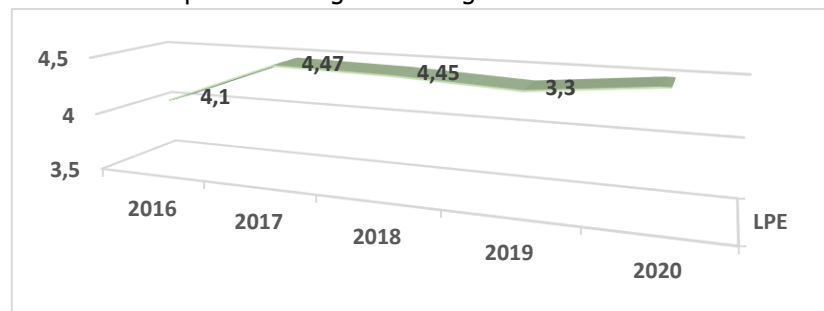
Sumber : 2015 – 2019 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung

d. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode Tahun 2016-2019 sebagaimana diperlihatkan pada gambar I.7 berfluktuasi, dimana pada Tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 4,47 persen meningkat dari Tahun 2016 sebesar 4,1 persen dan melambat menjadi sebesar 4,45 persen pada Tahun 2018 serta 3,3 pada tahun 2019.

Gambar I.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2019



Sumber : 2016-2019 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

Struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha tahun 2019 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni Industri Pengolahan (19,59 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (17,94 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,79 persen), Konstruksi (10,37 persen) serta Pertambangan dan Penggalan (9,49 persen).

Tabel I.10

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2019

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,27	-0,36	5,49	2,89
B.	Pertambangan dan Penggalan	0,51	2,19	(1,08)	0,87
C.	Industri Pengolahan	2,77	6,31	4,04	1,17
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	12,44	4,85	7,44	6,55
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	5,52	9,79	(5,60)	3,41
F.	Konstruksi	6,95	5,73	5,76	7,08
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	5,08	7,91	2,65	1,76
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,41	7,99	6,82	2,23

I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,99	4,61	6,22	9,62
J.	Informasi dan Komunikasi	9,18	8,19	10,72	13,78
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,44	2,48	6,25	4,97
L.	Real Estate	3,67	5,20	8,29	1,36
M, N.	Jasa Perusahaan	0,06	5,85	6,69	1,26
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	5,06	9,18	8,13
P.	Jasa Pendidikan	7,59	3,86	9,00	7,11
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,82	8,19	4,56	10,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,79	6,14	7,39	10,83
PDRB		4,11	4,51	4,45	3,32

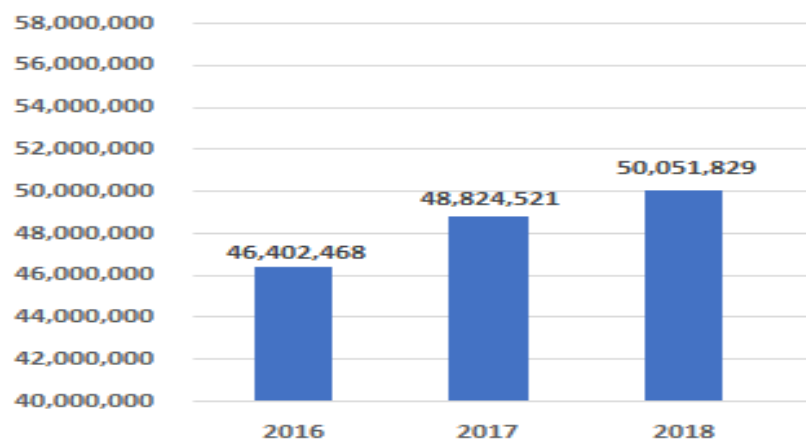
Sumber : 2016-2019 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita adalah gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

Dalam kurun waktu 2016-2018, sebagaimana diperlihatkan pada gambar I.4 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016, PDRB perkapita sebesar Rp 46.402.468,- meningkat menjadi sebesar Rp 48.824.521,- pada Tahun 2017 dan menjadi sebesar Rp 50.051.829,- pada Tahun 2018. Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh positif, PDRB perkapita pada Tahun 2019-2020 diperkirakan akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 53.015.000,- dan sebesar Rp 55.401.000,-.

Gambar I.7
PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016-2018
(dalam Rupiah)



Sumber : 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

f. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada table I.11, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 sebesar 0,295 hingga tahun 2019 sebesar 0,262. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecenderungan relatif rendah dimana semakin mendekati 0 distribusi pendapatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin merata.

Tabel I.11

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2014–2019)

Tahun	Koefisien Gini
(1)	(2)
2014	0,295
2015	0,275
2016	0,288
2017	0,276
2018	0,272
2019	0,262

Sumber: 2013-2019 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung 2019

I.3. VISI DAN MISI

I.3.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi".

Ada lima makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

I.3.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Konektifitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

Kesehataan Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehataan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana

b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

I.3.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan :
 - a. Meningkatnya Persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
 - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
 - Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
 - Meningkatnya produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian
 - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan
 - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan.
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
 - b. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Menurunnya angka pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Pengangguran
 - Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
 - Menurunnya angka Inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)
 - Ketersediaan Air Baku (M3)
 - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
 - b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
 - Persentase kawasan permukiman yang tertata
 - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
 - c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
 - Persentase armada pengangkutan
 - Persentase jalan kondisi mantap

Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat.

Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
 - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai rata-rata delapan area perubahan
 - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)
 - Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek hak-hak politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas Bencana Daerah.
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Air
 - Indeks Udara
 - Indeks Tutupan Lahan
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

I.3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, refoisasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan antar lain sebagai berikut :

a) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan arah kebijakan penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - c. Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
 - d. Peningkatan standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - e. Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah.
- 3) Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
 - c. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
 - d. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan

b) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
- 2) Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
 - b. Peningkatan produksi, kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan
 - c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
 - e. Pengembangan produk kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
- 3) Mengembangkan kawasan sentra kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - d. Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
 - e. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
 - f. Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

c) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
 - b. Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
 - c. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
 - d. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan

- e. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
 - f. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
 - g. Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
- 2) Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
 - b. Pengembangan kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
 - c. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
 - d. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
 - e. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata kawasan Kota Tua Mentok
 - f. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata kawasan Gunung Permisan Simpang Rimba
 - g. Pengembangan kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
 - h. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Gunung Menumbing
- 3) Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
- a. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
 - b. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

d) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral.
- b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk sumber daya mineral.
- c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral.
- d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertambangan khususnya sektor sumber daya mineral.

- e. Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral.

e) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pembangunan berbasis industri dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Mengembangkan kawasan industri berbasis potensi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
- b. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
- c. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
- d. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
- e. Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
- f. Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri

f) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya kemandirian energi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah dengan arah kebijakan pemenuhan energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;

g) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya belanja publik pemerintah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan arah kebijakan Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

h) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Pengangguran dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penciptaan peluang kesempatan kerja
- b. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan

i) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka kemiskinan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Penganggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan

mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

j) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Inflasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengendalian tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
- b. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi.

k) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

l) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian dengan arah kebijakan peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
2. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku

m) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
2. Meningkatkan penataan kawasan permukiman dengan arah kebijakan Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.

n) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut dengan arah kebijakan peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
2. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat dengan arah kebijakan peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung jalan dan terminal
3. Meningkatkan aksesibilitas dengan arah kebijakan peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan

o) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan mutu layanan pendidikan.
 - b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
 - c. Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

p) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
- b. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
- d. Meningkatkan pengendalian penyalahgunaan Napza

q) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
2. Peningkatan tata kelola pengawasan dengan arah kebijakan peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel

3. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja dengan arah kebijakan peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan arah kebijakan peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
5. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan dengan arah kebijakan peningkatan penataan peraturan perundang-undangan
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan arah kebijakan peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa

r) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
2. Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

s) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
 - b. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
 - c. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
 - d. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
 - e. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - f. Menjamin hak anak dalam pembangunan

t) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pemberian kesempatan kebebasan sipil kepada masyarakat
 - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
3. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi dengan arah kebijakan Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

u) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana dengan arah kebijakan peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan pengelolaan kawasan rawan bencana alam
 - b. Pengembangan pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur.

v) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas air dengan arah kebijakan pengendalian kualitas air
2. Meningkatkan kualitas Udara dengan arah kebijakan pengendalian kualitas udara
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan tutupan lahan
 - b. Pengembangan Perhutanan Sosial
4. Meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - b. Pengembangan kawasan TPA Regional

I.3.5 PRIORITAS DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk program dan kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city*.

4. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

6. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

7. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU

sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

8. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel

9. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

10. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di Pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

11. PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

12. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

13. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

I.3.6 SASARAN, TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

A. SASARAN

Tahun 2019 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022. Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017-2022 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya Visi Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, maka pembangunan daerah tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahap kedua Tahun 2017-2022 diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan: meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat, serta meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah. Hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan pada Tabel I.12 sebagai berikut:

Tabel I.12

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan RPJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan
			Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan
			Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata
			Meningkatnya Produksi sektor pertambangan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			Meningkatnya pembangunan berbasis industri
			Terwujudnya kemandirian energi
			Meningkatnya belanja pemerintah Daerah
			Menurunnya angka Pengangguran
			Menurunnya angka kemiskinan
			Menurunnya angka Inflasi
			Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
	Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah
			Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
			Meningkatnya konektivitas antar wilayah
	Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat
	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
			Birokrasi yang efektif dan efisien
			Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas
		Terwujudnya pembangunan demokrasi	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
	Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Berdasarkan Tabel I.12 di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 didukung dengan 6 Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari capaian indikator sasaran pembangunan.

Indikator sasaran pembangunan daerah harus selaras dengan indikator sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam Tabel I.13 berikut ini :

Tabel I.13
Target Sasaran Pembangunan Nasional dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019

Indikator	Tahun 2019	
	Nasional	Babel
1	2	3
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,6	3,5
Tingkat Kemiskinan %	8,5-9,5	4,75
Tingkat Pengangguran %	4,8-5,2	3,64
Gini Ratio	0,38-0,39	0,272
IPM	71,98	70,7
Laju Inflasi (%)	2,4-4,5	4,5

Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2019, Rancangan RKP 2019, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Sumatera dan Nasional yang akan dicapai Target sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022. Dokumen RKPD Tahun 2019 sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut. Adapun sasaran dan target sasaran tahun 2019 yang akan dicapai, disajikan pada Tabel I.14

Tabel I.14
Matriks Sasaran dan Target Sasaran RKPD Tahun 2019

Sasaran Pokok	Indikator	Target RPJMD 2017-2022	Target RKPD 2019
1	2	3	4
Meningkatnya ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB	4,4	3,5
	PDRB per kapita ADHK (000)	35.800	35.800
	PDRB per kapita ADHB (000)	53.015	50.100
	TPT	5,6	3,64
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,33	70,7
	Angka Harapan Hidup	70,16	70,20
	Rata-Rata Lama Sekolah	7,83	7,86
	Harapan Lama Sekolah	11,94	11,9
	Pengeluaran per kapita (000)	12.680	12.680
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	75,24	73,45
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	65,37	64,00
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,245	0,20
	Indeks Gini	0,269	0,272
	% penduduk miskin	5,15	4,75
	Jumlah penduduk miskin	72.452	72.452
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,96	62,11

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

B. TEMA

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 yaitu "Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas". Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program dan Pendekatan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial (THIS).

Pembangunan daerah tahun 2019 diarahkan pada upaya pemantapan ekonomi masyarakat dengan kemandirian dan keadilan diberbagai kawasan yang sehingga terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan di tahun kelima juga diarahkan terwujudnya pemerataan pembangunan antar daerah, antar kawasan pedesaan dan perkotaan.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan sasaran/arrah kebijakan serta

target kinerja pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. Sasaran pembangunan daerah tahun 2019 yang hendak dicapai adalah sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dari visi, misi dan program unggulan Gubernur, Wakil Gubernur terpilih 2017-2022 yang telah tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2019 sebagai dokumen rencana tahunan. Namun demikian, seiring dengan kondisi dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah (efisiensi anggaran, percepatan pencapaian target indikator kinerja utama dalam RPJMD yang belum tercapai) maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dilakukan penyesuaian-penyesuaian melalui Perubahan RKPD 2019.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 tetap mengacu pada arah kebijakan Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan yang semula pada RKPD 2019 sebanyak 5 Prioritas Pembangunan daerah menjadi 5 Prioritas pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (tidak ada perubahan). Lima prioritas RKPD tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2017-2022 yang akan dilaksanakan tahun 2019 untuk mewujudkan visi Babel Sejahtera, provinsi unggul dibidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi.



Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman saat Musrenbang RKPD 2019 di Ballroom, Novotel, Kabupaten Bangka Tengah

Untuk perubahan prioritas RKPD 2019 dapat dilihat pada tabel I.15 berikut ini :

Tabel I.15
Perubahan Prioritas RKPD 2019

No	Prioritas RKPD 2019	Perubahan Prioritas RKPD 2019
(1)	(2)	(3)
1	Pengembangan Pembangunan Agropolitan	Pengembangan Pembangunan Agropolitan
2	Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Pariwisata
3	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan
5	Pembangunan Demokrasi	Pembangunan Demokrasi

Sumber : Bappeda Provinsi (RKPD 2019 dan RPJMD 2017-2022)

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2019;
- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Tabel I.6
Target dan Proyeksi Perubahan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

No	Indikator	RKPD 2019	Perubahan RKPD 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,50
2	PDRB per kapita (Rp)	53.018.000	50.100.000
3	Inflasi (%)	6,31	4,00
4	Pengangguran (%)	5,60	3,64
5	Kemiskinan (%)	5,20	4,75

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019 (diolah)

Prioritas program dalam perubahan RKPD tahun 2019 ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
2. Memiliki korelasi terhadap pencapaian sasaran/arrah kebijakan RPJPD 2005-2025 dan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022;
3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2019;
4. Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
5. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
6. Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.



BAB II KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

II.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

II.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 11 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan aturan tersebut, setiap daerah mempunyai hak untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Dana Perimbangan;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sedangkan didalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pajak Daerah Provinsi diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang masih perlu diintensifkan pemungutannya meliputi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- c) Pajak Air Permukaan (PAP);
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000), potensi pajak daerah provinsi yang mengalami perubahan juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

- a) Adanya penambahan objek pajak baru yang dikelola Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Rokok;
- b) Dikenakannya Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Dinas;
- c) Adanya pengalihan pengelolaan terhadap Pajak Air Bawah Tanah, maka Pemerintah Provinsi hanya mengelola Pajak Air Permukaan saja;
- d) Penyerahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat/Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian juga dengan retribusi daerah, mengingat potensinya yang sangat besar sehingga memungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi. Oleh karena itu instansi pemungut diharapkan dapat merumuskan dan mengajukan Peraturan Daerah tentang Retribusi berdasarkan potensi dan aturan yang berlaku. Strategi yang dilakukan secara tepat dan dengan kebijakan yang efektif akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk memenuhi kewajibannya selaku warga negara yang baik.

Dalam upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah diperlukan suatu tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dari setiap UPTD/Samsat pada kab/kota serta Seksi terkait pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya peningkatan PAD;
- b) Mengupayakan sumber-sumber objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial lainnya melalui pendataan;
- c) Mengusulkan dan menetapkan payung hukum sebagai dasar pemungutan atas sumber-sumber PAD;
- d) Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai dasar pemungutan atas sumber-sumber pendapatan yang telah menjadi obyek PAD;
- e) Mengintensifkan penagihan kepada wajib pajak yang telah terdata sebagai wajib pajak daerah;
- f) Merencanakan kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah kedepan.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan pada tahun 2019, meliputi:

- a) Meningkatkan kinerja petugas pendataan dan penagih pajak daerah untuk lebih intensif melakukan pendataan dan penagihan;
- b) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk membahas permasalahan yang ada serta solusinya dengan seluruh UPTD terhadap upaya pencapaian target pajak daerah;
- c) Melakukan evaluasi dengan instansi terkait terhadap penerimaan retribusi daerah per triwulan, per semester dan per tahun;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap usaha intensif penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh UPTD BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e) Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
- f) Melaksanakan rapat koordinasi mengenai PBB, BPHTB dan PPh;

- g) Sosialisasi Perda Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pada tahun 2019 upaya-upaya yang dilakukan BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah, antara lain:

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah dan
- b) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

II.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan/Penerimaan Daerah

Berdasarkan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 setelah perubahan APBD, target penerimaan pendapatan daerah tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.762.433.155.880,37 dengan realisasi sebesar Rp 2.695.111.736.771,27 atau 97,56 %. Adapun rincian penerimaan pendapatan daerah tersebut, sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019, berdasarkan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019 telah direncanakan dengan target sebesar Rp 884.562.215.880,37 dan sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp 826.888.372.498,27 atau sebesar 93,48 % dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari penerimaan PAD Tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2019 Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Pajak Rokok secara keseluruhan ditargetkan Rp 790.139.435.584,04 dengan realisasi sebesar Rp 750.814.242.494,42 atau 95,02 %.

Secara keseluruhan penerimaan dari sektor Pajak Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2019, dan semua pajak daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

- 2) Retribusi Daerah Pada Tahun Anggaran 2019, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 9.315.527.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.726.344.417,00 atau 93,67%.
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta. Pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 5.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.442.309.381,71 atau 98,95 %.
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2019 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp 79.607.253.146,33 dengan realisasi sebesar Rp 61.905.476.205,14 atau 77,76 %.

b. Dana Perimbangan

Sumber Penerimaan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

- 1) Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak
- 2) Dana Alokasi Umum;
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2019 direncanakan penerimaannya sebesar Rp 1.766.282.638.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.743.152.363.799,00 atau 98,69 % dari target yang telah ditetapkan. Adapun secara rinci penerimaan dari Dana Perimbangan, sebagai berikut:

- 1) Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 228.805.440.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 204.413.867.656,00 atau 89,34 %.
- 2) Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.046.862.622.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 960.343.039.000,00 atau 91,73 %.
- 3) Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 490.614.576.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 578.395.457.143.00 atau 117,89 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- 1) Dana Hibah;
- 2) Dana Darurat;
- 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
- 4) Sumbangan Pihak Ketiga
- 5) Pendapatan Lainnya

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 111.588.302.000,00 terealisasi sebesar Rp. 125.071.000.474,00 terdiri dari pendapatan hibah terealisasi sebesar Rp 99.585.198.474,00, dari dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 25.485.802.000,00.atau 112,08 % Adapun secara rinci penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah, pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 86.102.500.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp 99.585.198.474,00 atau 115,66 %
- 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 25.485.802.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp 25.485.802.000,00 atau 100 %

Daftar target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, secara rinci sebagaimana terdapat dalam Tabel berikut ini.

Tabel II.1
Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

No.	ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH	%
1	2	3	4	5	6
4.1	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	884.562.215.880,37	826.888.372.498,27	(57.673.843.382,10)	93,48%
1.1.1	PAJAK DAERAH	790.139.435.584,04	750.814.242.494,42	(39.325.193.089,62)	95,02%
1.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (R2/R4)	225.491.911.500,00	229.852.320.591,00	4.360.409.091,00	101,93%
1.1.1.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	215.418.895.600,00	187.411.088.300,00	(28.007.807.300,00)	87,00%
1.1.1.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	242.368.932.896,02	236.631.144.377,00	(5.737.788.519,02)	97,63%
1.1.1.06	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	10.338.309.004,02	12.509.180.548,42	2.170.871.544,40	121,00%
1.1.1.07	Pajak Rokok	96.521.386.584,00	84.410.508.678,00	(12.110.877.906,00)	87,45%
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	9.315.527.150,00	8.726.344.417,00	(589.182.733,00)	93,68%
1.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.247.100.000,00	3.039.143.000,00	(207.957.000,00)	93,60%
1.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	700.000.000,00	720.983.000,00	20.983.000,00	103,00%
1.1.2.01.03	Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta	1.700.000.000,00	1.528.000.000,00	(172.000.000,00)	89,88%
1.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pendidikan	847.100.000,00	790.160.000,00	(56.940.000,00)	93,28%
1.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.188.340.000,00	5.175.768.039,00	(12.571.961,00)	99,76%
1.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.082.340.000,00	4.720.141.339,00	637.801.339,00	115,62%
1.1.2.02.03	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	60.000.000,00	75.430.000,00	15.430.000,00	125,72%
1.1.2.02.05	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	80.000.000,00	89.600.000,00	9.600.000,00	112,00%
1.1.2.02.08	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	700.000.000,00	229.255.000,00	(470.745.000,00)	32,75%
1.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	880.087.150,00	511.433.378,00	(368.653.772,00)	58,11%
1.1.2.03.01	Retribusi Izin Trayek	80.000.000,00	137.530.000,00	57.530.000,00	171,91%
1.1.2.03.02	Retribusi Izin Usaha Perikanan	100.087.150,00	118.465.378,00	18.378.228,00	118,36%
1.1.2.03.04	Retribusi Perpanjangan IMTA	700.000.000,00	255.438.000,00	(444.562.000,00)	36,49%
1.1.3	HASIL PMD DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.500.000.000,00	5.442.309.381,71	(57.690.618,29)	98,95%
1.1.3.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	5.500.000.000,00	5.442.309.381,71	(57.690.618,29)	98,95%
1.1.3.03.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Swasta	5.500.000.000,00	5.442.309.381,71	(57.690.618,29)	98,95%
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	79.607.253.146,33	61.905.476.205,14	(17.701.776.941,19)	77,76%
1.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	0,00%

No.	ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH	%
1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.19	Penjualan Aset Daerah	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	0,00%
1.1.4.02	Jasa Giro	6.861.413.721,68	5.945.853.992,68	(915.559.729,00)	86,25%
1.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	6.861.413.721,68	5.918.146.215,68	(943.267.506,00)	86,25%
1.1.4.03	Pendapatan Bunga	6.747.219.912,00	10.355.555.175,19	3.608.335.263,19	146,98%
1.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank BRI	6.747.219.912,00	9.917.063.677,19	3.169.843.765,19	146,98%
1.1.4.04	Tuntutan Ganti Rugi	145.212.332,98	506.448.684,53	361.236.351,55	348,76%
1.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah (TGR)	145.212.332,98	506.448.684,53	361.236.351,55	348,76%
1.1.4.06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	73.948.219,80	593.798.401,46	519.850.181,66	802,99%
1.1.4.06.03	Denda Bidang Pekerjaan Umum	73.948.219,80	593.798.401,46	519.850.181,66	802,99%
1.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	7.764.386.000,00	13.058.118.320,00	5.293.732.320,00	168,18%
1.1.4.07.01	Denda PKB	6.900.000.000,00	11.799.628.370,00	4.899.628.370,00	171,01%
1.1.4.07.02	Denda BBNKB	864.386.000,00	1.258.489.950,00	394.103.950,00	145,59%
1.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	31.192.146.478,67	1.370.568.867,02	(29.821.577.611,65)	4,39%
1.1.4.10.07	Pendapatan dari Pengembalian Bendahara Pengeluaran (UUDP)	31.192.146.478,67	1.370.568.867,02	(29.821.577.611,65)	4,39%
				-	
1.1.4.15	Lain - Lain Penerimaan	1.072.926.481,20	11.346.501.377,67	10.273.574.896,47	1057,53 %
1.1.4.15.02	Setoran PT. Taspen	64.126.567,20	91.000.208,00	26.873.640,80	141,91%
1.1.4.15.03	Setoran PT. Jasa Raharja	960.000.000,00	996.000.000,00	36.000.000,00	103,75%
1.1.4.15.04	Setoran KUPEM	48.799.914,00	20.459.049,67	(28.340.864,33)	41,92%
1.1.4.15.04	Setoran Lainnya	-	10.239.042.120,00	10.239.042.120,00	
1.1.4.16	Pendapatan BLUD	22.750.000.000,00	18.731.429.239,59	(4.018.570.760,41)	82,34%
1.1.4.16.02	Pendapatan BLUD	22.750.000.000,00	18.731.429.239,59	(4.018.570.760,41)	82,34%
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.766.282.638.000,00	1.743.152.363.799,00	(23.130.274.201,00)	98,69%
2.1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	228.805.440.000,00	204.413.867.656,00	(24.391.572.344,00)	89,34%
2.1.01	BAGI HASIL PAJAK	55.616.230.000,00	43.367.824.425,00	(12.248.405.575,00)	77,98%
1.2.1.01.01	Pajak Bumi Dan Bangunan	21.853.007.000,00	29.862.535.225,00	8.009.528.225,00	136,65%
2.1.01.06	PPh Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21/25)	33.763.223.000,00	13.505.289.200,00	(20.257.933.800,00)	40,00%
2.1.02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA	173.189.210.000,00	161.046.043.231,00	(12.143.166.769,00)	92,99%
2.1.02.01	Bagi Hasil Iuran Hak Penguasaan Hutan	-	-	-	0,00%
2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.259.391.000,00	52.767.000,00	(2.206.624.000,00)	2,34%

No.	ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	-	-	-	0,00%
2.1.02.04	Bagi Hasil dari luran tetap (Land Rent)	-	-	-	0,00%
2.1.02.05	Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-	0,00%
2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi (SDA Migas)	-	-	-	0,00%
2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Minerba	170.929.819.000,00	160.993.276.231,00	(9.936.542.769,00)	94,19%
2.2	DANA ALOKASI UMUM	1.046.862.622.000,00	960.343.039.000,00	(86.519.583.000,00)	91,67%
2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.046.862.622.000,00	959.624.039.000,00	(87.238.583.000,00)	91,67%
2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	1.046.862.622.000,00	959.624.039.000,00	(87.238.583.000,00)	91,67%
2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	490.614.576.000,00	578.395.457.143,00	87.780.881.143,00	117,89%
2.3.01	Dana Alokasi Khusus	490.614.576.000,00	578.395.457.143,00	87.780.881.143,00	117,89%
2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus	490.614.576.000,00	578.395.457.143,00	87.780.881.143,00	117,89%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	111.588.302.000,00	125.071.000.474,00	(13.482.698.474,00)	112,08%
3.1	Pendapatan Hibah	86.102.500.000,00	99.585.198.474,00	(13.482.698.474,00)	115,66%
3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	86.102.500.000,00	99.585.198.474,00	(13.482.698.474,00)	115,66%
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25.485.802.000,00	25.485.802.000,00	-	100,00%
3.4.02	Dana Otonomi Khusus	25.485.802.000,00	25.485.802.000,00	-	100,00%
JUMLAH TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH		2.762.433.155.880,37	2.695.111.736.771,27	(67.321.419.109,10)	97,56%

Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d. Permasalahan dan Solusi Dalam Pendapatan Daerah

Permasalahan yang ada serta solusi dalam peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pada Tahun 2019, antara lain sebagai berikut :

Tabel II.2
Inventarisasi Permasalahan Pendapatan Daerah dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat	<ul style="list-style-type: none">• Pada tahun 2019 memaksimalkan Samsat keliling atau Samsat <i>Corner</i> yang telah diadakan untuk menjangkau wilayah yang jauh dari Samsat dan wilayah strategis yang mudah dijangkau masyarakat.• Pada tahun 2019 akan dilaksanakan sosialisasi melalui iklan di media lokal untuk mengajak masyarakat Bangka Belitung untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.• Membangun pos pembantu pelayanan Samsat pada gerai Bank Sumselbabel yang ada di kecamatan-kecamatan.
2	Petugas di UPT kesulitan mendata alat berat di lapangan	<ul style="list-style-type: none">• Telah dilakukan Sosialisasi PKB dan BBNKB atas Alat Berat/Besar dengan mengundang para pemilik alat berat, asosiasi alat berat dan instansi terkait lainnya.• Telah dilaksanakan MoU dengan pihak Kejaksaan untuk menagih pajak alat berat yang telah lewat masa pajaknya.
3	Masih banyaknya kendaraan asal luar daerah yang belum melakukan mutasi BBNKB.	<ul style="list-style-type: none">• Telah diadakan pengurangan BBNKB asal luar daerah dan pembebasan sanksi administrasi bagi kendaraan asal luar daerah.• Pada tahun 2019 akan dilaksanakan razia PKB dan BBNKB roda dua dan roda empat bekerjasama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya.• Pada tahun 2019 akan dilaksanakan sosialisasi melalui iklan di media lokal untuk mengajak pemilik kendaraan asal luar daerah untuk memutasikan kendaraannya.

II.2 PENGELOLAAN BELANJA/KEUANGAN DAERAH

II.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tahun 2019 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022. Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017-2022 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022, yaitu:

'BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI”.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6(enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

II.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 3.064.703.819.549,99 dengan realisasi sebesar Rp 2.785.051.756.383,58 atau 90,88%. Adapun rincian belanja daerah dapat uraian sebagai berikut:

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1.667.747.481.777,99 dan dari jumlah tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp 1.578.026.530.537,28 atau 94,62% dengan sisa anggaran sebesar Rp 89.720.951.240,71 atau 5,38 % yang dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 831.673.001.025,99 dengan realisasi sebesar Rp 769.910.380.379,01 atau 92,57 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 61.762.620.646,98 atau 7,43 %.

(2) Belanja Bunga

Belanja Bunga dalam APBD Tahun 2019 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

(3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dalam APBD Tahun 2019 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

(4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 289.082.219.060,00 dengan realisasi sebesar Rp 295.620.904.060,00 atau 102,26 % dengan melebihi anggaran sebesar Rp 6.538.685.000,00 atau 2,26 %.

(5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 441.515.000,00 atau 58,87 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 308.485.000,00 atau 41,13 %.

(6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp 446.568.577.113,00 dengan realisasi sebesar Rp 423.625.933.450,93 atau 94,86 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 22.942.643.662,07 atau 5,14%.

(7) Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 95.095.479.172,00 dengan realisasi sebesar Rp 88.427.797.647,34 atau 92,99 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 6.667.681.524,66 atau 7,01 %.

(8) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 4.578.205.407,00 dan tidak terealisasi.

Tabel II.3

Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALI SASI FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	
				KEUANGAN (Rp)	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
1	Belanja Pegawai	831.673.001.025,99	100	769.910.380.379,01	92,57	(61.762.620.646,98)	-7,43
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	289.082.219.060,00	100	295.620.904.060,00	102,26	6.538.685.000,00	2,26
5	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	100	441.515.000,00	58,87	(308.485.000,00)	-41,13
6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	446.568.577.113,00	100	423.625.933.450,93	94,86	(22.942.643.662,07)	-5,14
7	Belanja Bantuan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	95.095.479.172,00	100	88.427.797.647,34	92,99	(6.667.681.524,66)	-7,01
8	Belanja Tidak Terduga	4.578.205.407,00	100	-	-	(4.578.205.407)	-100
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.667.747.481.777,99	100	1.578.026.530.537,28	94,62	(89.720.951.240,71)	-5,38

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b) Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 1.396.956.337.772,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.207.025.225.846,30 atau 86,40 % dengan uraian sebagai berikut :

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp68.572.393.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 64.737.516.208,00 atau 94,41 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 3.834.876.792,00 atau 5,59 %.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 850.980.385.728,00 dengan realisasi sebesar Rp 700.956.706.797,44 atau 82,37% dengan sisa anggaran sebesar Rp 150.023.678.930,56 atau 17,63 %.

(3) Belanja Modal

Belanja Modal dalam APBD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 477.403.559.044,00 dengan realisasi sebesar Rp 441.331.002.840,86 atau 92,44% dengan sisa anggaran sebesar Rp 36.072.556.203,14 atau 7,56 %.

Tabel II.4

Realisasi Belanja Langsung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	BELANJA LANGSUNG					
2.1	Belanja Pegawai (belanja honor pegawai)	68.572.393.000,00	64.737.516.208,00	94,41	(3.834.876.792,00)	-5,59
2.2	Belanja Barang dan Jasa	850.980.385.728,00	700.956.706.797,44	82,37	(150.023.678.930,56)	-17,63
2.3	Belanja Modal	477.403.559.044,00	441.331.002.840,86	92,44	(36.072.556.203,14)	-7,56
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.396.956.337.772,00	1.207.025.225.846,30	86,40	(189.931.111.925,70)	-13,60

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c) Surplus/Defisit

Dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 defisit dianggarkan sebesar Rp 302.270.663.669,62 dengan realisasi defisit sebesar Rp 89.940.019.612,31 atau 29,75 %.

d) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 302.270.663.669,62 dengan realisasi sebesar Rp 302.308.282.366,62 atau 100,01 %, dengan uraian sebagai berikut:

(1) Pembiayaan Penerimaan

Pada APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu dianggarkan sebesar Rp 302.270.663.669,62 dengan realisasi sebesar Rp 302.308.282.366,62 atau 100,01%.

(2) Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan Pengeluaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi.

(3) SILPA Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp 212.368.262.754,31.

Jumlah SILPA tersebut di atas dapat berubah mengingat angka-angka yang disajikan merupakan angka-angka sementara yang belum diperiksa BPK-RI (*unaudited*).

Tabel II.5

Realisasi Pembiayaan Daerah, Pengeluaran dan SILPA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III	PEMBIAYAAN DAERAH				
1	Penerimaan pembiayaan Daerah				
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	302.270.663.669,62	302.308.282.366,62	-	100,01
1.1					
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah 1	302.270.663.669,62	302.308.282.366,02	-	100,01
2	Pengeluaran pembiayaan Daerah				
	Pembentukan Dana Cadangan				
2.1	Penyertaan Modal (Investasi Pemda)	-	-	-	-
2.2					
2.3	Pembayaran Pokok Utang				
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah 2	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	302.270.663.669,62	302.308.282.366,62	37.618.697,00	0,01
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	212.368.262.754,31	212.368.262.754,31	-
3					

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.6
Rekapitulasi Target dan Realisasi APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) :				
1.1.1	Pajak Daerah	790.139.435.584,04	750.814.242.494,42	(39.325.193.089,62)	-95,02
1.1.2	Retribusi Daerah	9.315.527.150,00	8.726.344.417,00	(589.182.733,00)	-93,68
1.1.3	Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.500.000.000,00	5.442.309.381,71	(57.690.618,29)	-98,95
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	79.607.253.146,33	61.905.476.205,14	(17.701.776.941,19)	-77,76
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.	884.562.215.880,37	826.888.372.498,27	(57.673.843.382,10)	-93,48
1.2	Dana Perimbangan :				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	228.805.440.000,00	204.413.867.656,00	(24.391.572.344,00)	-89,34
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.046.862.622.000,00	960.343.039.000,00	(86.519.583.000,00)	-91,67
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	490.614.576.000,00	578.395.457.143,00	87.780.881.143,00	3,83
	Jumlah Dana Perimbangan 2	1.766.282.638.000,00	1.743.152.363.799,00	(23.130.274.201,00)	-98,69
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :				
1.3.1	Hibah	86.102.500.000	99.585.198.474,00	13.482.698.474,00	115,66 %
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25.485.802.000,00	25.485.802.000,00	-	100%-
1.3.5	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3	111.588.302.000,00	125.071.000.474,00	13.482.698.474,00	112,08
	Total Pendapatan / Penerimaan Daerah (1+2+3)	2.762.433.155.880,37	2.695.111.736.771,27	(67.321.419.109,10)	-97,56
II	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	831.673.001.025,99	769.910.380.379,01	(61.762.620.646,98)	-7,43
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	289.082.219.060,00	295.620.904.060,00	6.538.685.000,00	2,28
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	441.515.000,00	(308.485.000)	-41,13
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi/Kab/Kota/Desa	446.568.577.113,00	423.625.933.450,93	(22.942.643.662,07)	-5,14
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/Desa	95.095.479.172,00	88.427.797.647,34,00	(6.667.681.524,66)	-7,01
2.1.8	Belanja tak terduga	4.578.205.407,00	-	(4.578.205.407)	-100
	Jumlah Belanja Tidak Langsung 1	1.667.747.481.777,99	1.578.026.530.537,28	(89.720.951.240,71)	-5,69
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai	68.572.393.000,00	64.737.516.208,00	(3.834.876.792)	-5,59
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	850.980.385.728	700.956.706.797,44	(150.023.678.930,56)	-17,63
2.2.3	Belanja Modal	477.403.559.044,00	441.331.002.840,86	(36.072.556.203,14)	-7,56
	Jumlah Belanja Langsung 2	1.396.956.337.772,00	1.207.025.225.846,30	(189.931.111.925,70)	-13,60

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total Belanja Daerah (1 + 2)	3.064.703.819.549,99	2.785.051.756.383,58	(279.652.063.166,41)	-9,12
	Surplus / (Defisit) (Belanja - Pendapatan)	(302.270.663.669,62)	(89.940.019.612,31)	212.330.644.057,31	70,25
III	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Daerah				
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran			-	-
3.1.1	(SILPA) Tahun Lalu	302.270.663.669,62	302.308.282.366,62		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	100,01
	Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah	-	-	-	-
3.1.3	yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah 1	302.270.663.619,62	302.308.282.366,62	-	100,01
3.2	Pengeluaran pembiayaan Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Pemda)	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah 2	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	302.270.663.669,62	302.308.282.366,62	37.618.697	0,01
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	212.368.262.754,31	212.368.262.754,31	-

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



BAB III

CAPAIAN KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN

BAB III

CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

III.1. URUSAN WAJIB

III.1.1 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan urusan pendidikan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 298.561.371.902,00 dan realisasi keuangan Rp 247.898.798.099,00 setara dengan 84,21%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan pendidikan sebagaimana terlampir pada tabel III.1.

2). Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan urusan kesehatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 201.077.227.560,00 dan realisasi Rp 172.921.277.354,11 setara dengan 86,00%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan kesehatan sebagaimana terlampir pada tabel III.1.

3). Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 312.587.113.000,00 dan realisasi keuangan Rp 298.911.599.139,26 setara dengan 95,63%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana terlampir pada tabel III.1.

4). Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 16.016.685.810,00 dan realisasi keuangan Rp 15.089.620.994,23 setara dengan 94,21%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana terlampir pada tabel III.1.

5). Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 16.076.114.630,00 dan realisasi Rp 14.761.976.650,00 setara dengan 91,83%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana terlampir pada tabel III.1.

6). Urusan Sosial

Program dan kegiatan urusan sosial dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp 20.209.180.900,00 dan realisasi Rp 17.722.327.556,00 setara dengan 87,69%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan sosial sebagaimana terlampir pada tabel III.1.

TABEL III.1
Capaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase SMA terakreditasi A dengan target 42,42 %	61,4	-	-
				Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin dengan target 100 %	100	-	-
				Rata-rata nilai UN SMA dengan target 6,5 point	5,3	-	-
				APK SMA, dengan target 38,88 %	33,53		
			1. Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	Jumlah RKB SMA Terbangun dengan target 2 ruang	2	-	
				Tersediany Meubelair SMA dengan target 150 unit	150	-	
				Pagar Sekolah Terbangun dengan target 4 sekolah	4	-	
				Lab. SMA Terbangun dengan target 2 ruang	2	-	
				Tersedianya Peralatan Lab. SMA dengan target 65 paket	65	-	
				Ruang SMA yang direhabilitasi dengan target 6 paket	6	-	
			2. Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	Terlaksananya Pendidikan Karakter Siswa SMA dengan target 271 siswa	271	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Terlaksananya Lomba-lomba siswa SMA dengan target 9 jenis	9	-	
				Terlaksananya Kegiatan Kesiswaan di SMA dengan target 67 sekolah	67	-	
			3. Pengembangan Kurikulum SMA	SMA melaksanakan pendidikan karakter dengan target 67 sekolah	67	-	
				SMA melaksanakan UNBK dengan target 67 sekolah	67	-	
				Guru SMA mengikuti pelatihan Kurikulum dengan target 67 sekolah	67	-	
			4. Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa dengan target 2.485 siswa	2.485	-	
			5. Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	Tersedianya peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesenian, sarana seni budaya dan terbangunnya rumah dinas guru beserta perabotnya dengan target 48 paket	48	-	
				Terbangunnya ruang laboratorium IPA beserta perabotnya dengan target 2 ruang	2	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Terbangunnya ruang kelas baru beserta perabotannya dengan target 8 ruang	8	-	
				Terlaksananya rehabilitasi ruang sekolah dengan target 28 ruang	28	-	
				Terbangunnya toilet/jamban siswa/guru beserta sanitasinya dengan target 8 unit	8	-	
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMK (Persen) 38,38	53,58		
				Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin dengan target 100 %	100		
				Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal dengan target 100 %	100		
				Persentase SMK Pariwisata Terkreditasi A dengan target 100 %	25		
				Persentase SMK Kelautan dan perikanan Terkreditasi I A dengan target 100 %	25		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan Terkreditasi A dengan target 100 %	100		
				Persentase SMK Pertanian Terkreditasi A dengan target 100 %	25	Rendahnya Nilai Standar GTK dan Sarana Prasarana di Penilaian Akreditasi	Pemenuhan GTK dan Sarana Prasarana SMK sesuai standar yang telah ditetapkan
				Rata-rata nilai UN SMK sdengan target 6,5 Poin	5		
			1. Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	Tersedianya Peralatan Praktek Siswa dengan target 15 paket	15	-	
				Tersedianya Meubelair SMK dengan target 15 set	15	-	
				Sekolah yang siap diakreditasi dengan target 100 %	100	-	
				Terlaksananya Rehabilitasi SMK dengan target 20 paket	20	-	
				Tersedianya Bengkel Produktif SMK dengan target 2	2	-	
				Terbangunnya RPS SMK dengan target 7 ruang	7	-	
				Terbangunnya RKB SMK dengan target 10 ruang	10	-	
				Terlaksananya Gebyar SMK dengan target 1 kali	1	-	
				Terlaksananya Revitalisasi Prodi SMK	57	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dengan target 57 sekolah			
			2. Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	Terlaksananya pembinaan kesiswaan SMK dengan target 57 sekolah	57	-	
				Pelaksanaan Lomba-lomba Siswa SMK dengan target 3 jenis	3	-	
				Sekolah melaksanakan pendidikan karakter dengan target 57 sekolah	57	-	
			3. Pengembangan Kurikulum SMK	SMK memiliki TUK dengan target 15 sekolah	12	-	
				Tersedianya Bank Soal Penilaian SMK dengan target 1 dokumen	1	-	
				Tersedianya analisis instrumen kurikulum SMK dengan target 1 dokumen	1	-	
				Terlaksananya pengembangan kurikulum SMK dengan target 57 sekolah	57	-	
				SMK melaksanakan UNBK dengan target 57 sekolah	57	-	
				Tersedianya Asesor dengan target 30 orang	30	-	
			4. Pemberian Beasiswa Siswa SMK	Jumlah Siswa Tidak Mampu terbiayai dengan target 1.809 siswa	1.145	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			5. Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	Tersedianya peralatan Praktik Siswa dengan target 100 %	100	-	
				Ruang Praktik Siswa dengan target 54 ruang	54	-	
				WC/Kamar Mandi Siswa dengan target 16 paket	16	-	
				Terlaksananya Manajemen DAK dengan target 7 ruang	7	-	
			PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK SLB dengan target 26,21 %	62,85		
				Persentase SLB terakreditasi A dengan target 100 %	33,33	Kurangnya tenaga pendidik serta sarana dan prasarana	Melakukan recruitment tenaga kependidikan yang berlatar pendidikan Sarjana Pendidikan Luar Biasa
			1. Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	Tersedia pagar, mushola, mobil operasional dengan target 4	4	-	
			2. Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya lomba-lomba siswa dan GTK SLB dengan target 3 jenis	3	-	
			3.	Terbinanya kegiatan kesiswaan di SLB dengan target 9 sekolah	9	-	
			4. Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2006 dengan target 9 sekolah	9	-	
			5.	Jumlah SLB melaksanakan pendidikan keluarga	9	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dengan target 9 sekolah			
			6. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	Terlaksananya pelayanan Pusat Layanan Autis dengan target 12 bulan	12	-	
			7. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	Tersedianya sarana prasarana SLB dengan target 24 paket	24	Pengadaan sarana belajar ini, jenis barang yang diadakan sudah diatur di dalam juknis Permendikbud dan pengajuan usulan barang yang dibutuhkan untuk diadakan oleh sekolah, sehingga penyerapan dananya sesuai harga barang yang diadakan	Dinas memenuhi kebutuhan barang yang diadakan berdasarkan usulan Sekolah
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4, dengan target 97 %	91,26	-	
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik dengan target 40 %	60,76	-	
				Persentase guru dengan Nilai Rata-rata Kompetensi Guru minimal 50 dengan target 90 %	81,89	-	
			1. Peningkatan Mutu PTK SMA	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih dengan target 150 orang	150	-	
				Jumlah Guru SMA menerima Beasiswa S1 dan S2 dengan target 8 orang	8	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah guru SMA menerima beasiswa PPG dengan target 15 orang	15	-	
				Tersedianya analisis kebutuhan Guru SMA dengan target 1 dokumen	1	-	
			2. Peningkatan Mutu PTK SMK	Tersedianya analisis kebutuhan Guru SMK dengan target 1 dokumen	1	1. Guru Berprestasi Tidak semua cabang lomba ada pesertanya dan jumlah peserta tiap cabang lomba tidak maksimal sehingga tersisa dana akomodasi dan transportasi. 2. Diklat Calon Pengawas Sulitnya koordinasi dan mendapatkan respon pelaksanaan dengan LPPKS sebagai unit Kemdikbud yang diberi kewenangan pelaksanaan diklat calon pengawas ini 3. Beasiswa S2 Terbatasnya jumlah guru yang memenuhi syarat administrasi sebagai calon peserta tugas belajar S2 dan yang mengikuti tidak lulus TPA dan TOELF 4. PPG Tidak terserapnya dana transportasi karena yang di bantu hanya biaya akademik	1. Sosialisasi lebih intens kepada guru dan tenaga kependidikan 2. Mendorong pelatihan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam penulisan karya ilmiah 3. Koordinasi lebih awal dan intens yang di lakukan secara langsung dengan LPPKS 4. Sosialisasi ke sekolah tentang program Beasiswa S2
				Jumlah guru SMK menerima beasiswa PPG dengan target 15 orang	15		
				Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih dengan target 150 orang	150		
				Jumlah Guru SMK menerima Beasiswa S1 dan S2 dengan target 2 orang	2		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Peningkatan Mutu PTK SLB	Jumlah analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SLB dengan target 1 dokumen	1		
				Jumlah Terlatihnya Guru Sekolah Inklusi dengan target 50 orang	20		
				Jumlah Guru SLB menerima Beasiswa S1 dengan target 2 orang	-	Tidak ada guru SLB yang memenuhi persyaratan umur untuk mengikuti Beasiswa S1	
				Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB Terlatih dengan target 150 orang	130		
			PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK NON FISIK)	Persentase sekolah penerima BOS dengan target 100 %	100	-	
			1. Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			2. Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			3. Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			4. Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			5. Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			7. Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			8. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			9. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			10. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			11. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			12. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			13. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			14. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			15. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			16. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			17. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			18. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			19. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			20. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			21. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			22. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			23. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			24. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			25. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			26. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			27. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			28. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			29. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			30. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			31. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			32. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			33. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			34. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			35. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			36. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			37. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			38. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			39. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			40. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			41. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			42. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			43. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			44. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			45. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			46. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			47. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			48. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			49. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			50. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			51. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			52. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			53. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			54. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			55. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			56. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			57. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			58. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			59. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			60. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			61. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			62. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			63. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			64. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			65. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			66. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			67. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			68. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			69. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			70. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			71. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			72. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			73. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			74. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			75. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			76. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			77. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			78. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			79. Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			80. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			81. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			82. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			83. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			84. Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			85. Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			86. Pengelolaan Dana BOS di SMA Keberbakatan Olahraga	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			87. Pengelolaan Dana BOS Afirmasi	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			88. Pengelolaan Dana Bos Kinerja	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan dengan target 100 %	100	-	
			PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH PANGKALPINANG DAN BANGKA	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka (Persen) 79,29	100		
			1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Jumlah sekolah terlayani dengan target 26 sekolah	100	-	-
			2. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani dengan target 797 siswa	100	-	-
			3. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 2 Pangkalpinang terlayani dengan target 1.500 siswa	100	-	-
			4. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 3 Pangkalpinang terlayani dengan target 593 siswa	100	-	-
			5. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 4 Pangkalpinang terlayani dengan target 518 siswa	100	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani dengan target 372 siswa	100	-	-
			7. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalpinang terlayani dengan target 797 siswa	100	-	-
			8. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 2 Pangkalpinang terlayani dengan target 743 siswa	100	-	-
			9. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 3 Pangkalpinang terlayani dengan target 827 siswa	100	-	-
			10. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 4 Pangkalpinang terlayani dengan target 631 siswa	100	-	-
			11. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Jumlah siswa SLB N Pangkalpinang terlayani dengan target 260 siswa	100	-	-
			12. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Sungailiat terlayani dengan target 1.082	100	-	-
			13. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 2 Sungailiat, Bangka terlayani dengan target 691 siswa	100	-	-
			14. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Mendo Barat, Bangka terlayani dengan target 321 siswa	100	-	-
			15. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Belinyu, Bangka terlayani dengan target 364 siswa	100	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			16. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Bakam, Sungailia terlayani dengan target 281 siswa	100	-	-
			17. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Bakam, Kabupaten Bangka terlayani dengan target 281 siswa	100	-	-
			18. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Belinyu, Kabupaten Bangka terlayani dengan target 514 siswa	100	-	-
			19. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka terlayani dengan target 520 siswa	100	-	-
			20. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka terlayani dengan target 207 siswa	100	-	-
			21. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Merawang, Kabupaten Bangka terlayani dengan target 448 siswa	100	-	-
			22. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Pemali, Kabupaten Bangka terlayani dengan target 800 siswa	100	-	-
			23. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka terlayani dengan target 521 siswa	100	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			24. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Riau Silip terlayani dengan target 338 siswa	100	-	-
			25. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka terlayani dengan target 889 siswa	100	-	-
			26. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka terlayani dengan target 160 siswa	100	-	-
			27. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Jumlah siswa SLB N Sungailiat terlayani dengan target 106 siswa	100	-	-
			PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA BARAT	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat dengan target 79,29 %	100		
			1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan	Jumlah sekolah terlayani dengan target 12 sekolah	100	-	-
			2. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	Jumlah siswa SMKN 1 Mentok, Bangka Barat terlayani dengan target 697 siswa	100	-	-
			3. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	Jumlah siswa SMKN 1 Kelapa, Bangka Barat terlayani dengan target 586 siswa	100	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	Jumlah siswa SMKN 1 Parittiga, Bangka Barat terlayani dengan target 639 siswa	100	-	-
			5. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	Jumlah siswa SMKN 1 Tempilang, Bangka Barat terlayani dengan target 332 siswa	100	-	-
			6. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	Jumlah siswa SMKN 1 Simpang Teritip, Bangka Barat terlayani dengan target 128 siswa	100	-	-
			7. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMAN 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat terlayani dengan target 626 siswa	100	-	-
			8. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa SMAN 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat terlayani dengan target 633 siswa	100	-	-
			9. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMAN 1 Muntok, Kabupaten Bangka barat terlayani dengan target 614 siswa	100	-	-
			10. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMAN 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat terlayani dengan target 439 siswa	100	-	-
			11. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMAN 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat terlayani dengan target 623 siswa	100	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			12. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMAN 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat terlayani dengan target 374 siswa	100	-	-
			13. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	Jumlah siswa SLB N Muntok, terlayani dengan target 85 siswa	100	-	-
			PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan dengan target 79,29 %	79,29		
			1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Jumlah sekolah terlayani dengan target 28 sekolah	100	-	-
			2. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	Jumlah siswa SMK N 1 Koba, terlayani dengan target 697 siswa	100	-	-
			3. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	Jumlah siswa SMK N 2 Koba, Bangka Tengah terlayani dengan target 770 siswa	100	-	-
			4. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Katis, Bangka Tengah terlayani dengan target 792 siswa	100	-	-
			5. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalan Baru, Bangka Tengah	100	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				terlayani dengan target 900 siswa			
			6. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	Jumlah siswa SMK N 1 Sungai Selan, Bangka Tengah terlayani dengan target 255 siswa	100	-	-
			7. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Koba, Bangka Tengah terlayani dengan target 694 siswa	100	-	-
			8. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Lubuk Besar, Bangka Tengah terlayani dengan target 454 siswa	100	-	-
			9. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Namang, Bangka Tengah terlayani dengan target 449 siswa	100	-	-
			10. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalan Baru, Bangka Tengah terlayani dengan target 499 siswa	100	-	-
			11. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Sungai Selan, Bangka Tengah terlayani dengan target 264 siswa	100	-	-
			12. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah		100	-	-
			13. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Jumlah siswa SMA Laskar Pelangi terlayani dengan target 96 siswa	100	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			14. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	Jumlah siswa SLB N Koba, Bangka Tengah terlayani dengan target 70 siswa	100	-	-
			15. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Toboali, Bangka Selatan terlayani dengan target 787 siswa	100	-	-
			16. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Payung, Bangka Selatan terlayani dengan target 345 siswa	100	-	-
			17. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Pulau Besar, Bangka Selatan terlayani dengan target 121 siswa	100	-	-
			18. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan terlayani dengan target 345 siswa	100	-	-
			19. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Simpangrimba, Bangka Selatan terlayani dengan target 126 siswa	100	-	-
			20. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Air Gegas, Bangka Selatan terlayani dengan target 406 siswa	100	-	-
			21. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Air Gegas, Bangka Selatan terlayani dengan target 614 siswa	100	-	-
			22. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar	Jumlah siswa SMA N 1 Lepar Pongok,	100	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan terlayani dengan target 270 siswa			
			23. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Kep. Pongok, Bangka Selatan terlayani dengan target 225 siswa	100	-	-
			24. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Payung, Bangka Selatan terlayani dengan target 621 siswa	100	-	-
			25. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Pulau Besar, Bangka Selatan terlayani dengan target 177 siswa	100	-	-
			26. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Rimba, Bangka Selatan terlayani dengan target 428 siswa	100	-	-
			27. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Toboali, Bangka Selatan terlayani dengan target 900 siswa	100	-	-
			28. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 2 Toboali, Bangka Selatan terlayani dengan target 510 siswa	100	-	-
			29. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SLB N Toboali, Bangka Selatan terlayani dengan target 90 siswa	100	-	-
			PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR	Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur dengan target 79,29 %			
			1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	Jumlah sekolah terlayani dengan target 21 sekolah	100	-	-
			2. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	Jumlah siswa SMK N 1 Tanjungpandan, Belitung terlayani dengan target 1.100 siswa	100	-	-
			3. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	Jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan, Belitung terlayani dengan target 802 siswa	100	-	-
			4. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	Jumlah siswa SMK N 3 Tanjungpandan, Belitung terlayani dengan target 532 siswa	100	-	-
			5. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	Jumlah siswa SMK N 1 Badau, Belitung terlayani dengan target 523 siswa	100	-	-
			6. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	Jumlah siswa SMK N 1 Selat nasik, Belitung terlayani dengan target 164 siswa	100	-	-
			7. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 1 Membalong, Belitung terlayani dengan target 496 siswa	100	-	-
			8. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 1 Sijuk, Belitung	100	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				terlayani dengan target 507 siswa			
			9. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani dengan target 723 siswa	100	-	-
			10. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 2 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani dengan target 789 siswa	100	-	-
			11. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SLB N Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani dengan target 140 siswa	100	-	-
			12. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani dengan target 694 siswa	100	-	-
			13. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur terlayani dengan target 541 siswa	100	-	-
			14. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Dendang, Belitung Timur terlayani dengan target 170 siswa	100	-	-
			15. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Simpang renggang, Belitung Timur terlayani dengan target 180 siswa	100	-	-
			16. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Damar, Belitung Timur terlayani	100	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dengan target 355 siswa			
			17. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Gantung, Belitung Timur terlayani dengan target 657 siswa	100	-	-
			18. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur terlayani dengan target 466 siswa	100	-	-
			19. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Manggar, Belitung Timur terlayani (siswa)	100	-	-
			20. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Simpang pesak, Belitung Timur terlayani dengan target 483 siswa	100	-	-
			21. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SLB N 1 Manggar, Belitung Timur terlayani dengan target 110 siswa	100	-	-
2	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	<p>1. Persentase Kab/Kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru pertahun, dengan target 80%</p> <p>2. Angka kematian ibu per kelahiran</p>	<p>1. Persentase Kab/Kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru pertahun, dengan realisasi 57,14%</p> <p>2. Angka kematian ibu per kelahiran</p>		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				hidup, dengan target 22/KH 3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, dengan target 7,18/KH 4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen), dengan target 14,30% 5. Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat, dengan target 81,96% 6. Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga, dengan target 65%	hidup, dengan realisasi 36/KH 3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, dengan realisasi 7,17/KH 4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen), dengan realisasi 5,62% 5. Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat, dengan realisasi 89,2% 6. Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga, dengan realisasi 100%		
			1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah laporan Gerakan Masyarakat Desa Membangun (GMDM), target 7 dokumen laporan 2. Jumlah masyarakat yang	1. Jumlah laporan Gerakan Masyarakat Desa Membangun (GMDM), dengan realisasi 7 dokumen laporan 2. Jumlah masyarakat yang	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				berpartisipasi pada germas, dengan target 1000 orang 3. Jumlah informasi promosi kesehatan melalui media KIE, dengan target 4 paket promosi 4. Jumlah laporan kegiatan saka bakti husada (SBH), dengan target 2 dokumen kegiatan	berpartisipasi pada germas, dengan realisasi 1000 orang 3. Jumlah informasi promosi kesehatan melalui media KIE, dengan realisasi 4 paket promosi 4. Jumlah laporan kegiatan saka bakti husada (SBH), dengan realisasi 2 dokumen kegiatan		
			2. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga	1. Jumlah petugas puskesmas yang terorientasi kesehatan lansia dan geriatri, dengan target 150 nakes PKM dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 2. Jumlah laporan puskesmas yang melakukan akselerasi UKS dan sekolah yang melakukan penjangkaran tingkat SMU dan sederajat, dengan target 7 dokumen 3. Jumlah desa yang melakukan penanganan	1. Jumlah petugas puskesmas yang terorientasi kesehatan lansia dan geriatri, dengan realisasi 150 nakes PKM dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 2. Jumlah laporan puskesmas yang melakukan akselerasi UKS dan sekolah yang melakukan penjangkaran tingkat SMU dan sederajat, dengan realisasi 7 dokumen 3. Jumlah desa yang melakukan penanganan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				stunting, dengan target 10 desa dan 4 laporan 4. Jumlah pengelola program kesga yang ditingkatkan pengetahuan melalui bimtek terintegrasi, dengan target 1 dokumen	stunting, dengan realisasi 27 desa dan 4 laporan 4. Jumlah pengelola program kesga yang ditingkatkan pengetahuan melalui bimtek terintegrasi, dengan realisasi 1 dokumen		
			3. Penurunan Kematian Ibu	1. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program kesehatan reproduksi catin, dengan target 7 dokumen laporan hasil kegiatan 2. Jumlah petugas yang tersosialisasi deteksi risiko ibu hamil, dengan target 240 orang 3. Jumlah petugas yang ditingkatkan kemampuannya dalam pelayanan kesehatan maternal neonatal di fasyankes primer, dengan target 80 orang 4. Jumlah petugas kesehatan dan kader yang tersosialisasi pembinaan teknis UKS dan PKPR,	1. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program kesehatan reproduksi catin, dengan realisasi 7 dokumen laporan hasil kegiatan 2. Jumlah petugas yang tersosialisasi deteksi risiko ibu hamil, dengan realisasi 230 orang 3. Jumlah petugas yang ditingkatkan kemampuannya dalam pelayanan kesehatan maternal neonatal di fasyankes primer, dengan realisasi 80 orang 4. Jumlah petugas kesehatan dan kader yang tersosialisasi pembinaan teknis UKS dan PKPR,	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dengan target 120 orang 5. Jumlah hasil skrenning ibu hamil yang terdeteksi resiko, dengan target 400 ibu hamil 6. Jumlah pengelola program kesga yang ditingkatkan pengetahuan melalui bimtek program dan pelacakan kasus kematian ibu dan anak, dengan target 1 dokumen 7. Jumlah petugas yang dievaluasi cakupan program kesehatan keluarga dengan target 1 dokumen	dengan realisasi 120 orang 5. Jumlah hasil skrenning ibu hamil yang terdeteksi resiko, dengan realisasi 400 ibu hamil 6. Jumlah pengelola program kesga yang ditingkatkan pengetahuan melalui bimtek program dan pelacakan kasus kematian ibu dan anak, dengan realisasi 1 dokumen 7. Jumlah petugas yang dievaluasi cakupan program kesehatan keluarga dengan realisasi 1 dokumen		
			4. Penurunan Angka Kematian Bayi	1. Jumlah petugas kesehatan dalam SDIDTK, dengan target 80 orang 2. Jumlah petugas kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya dalam tata laksana SHK, dengan target 60 orang	1. Jumlah petugas kesehatan dalam SDIDTK, dengan realisasi 80 orang 2. Jumlah petugas kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya dalam tata laksana SHK, dengan realisasi 60 orang	-	-
			5. Peningkatan Kesehatan Gizi Anak dan Keluarga	1. Jumlah pemberian bantuan makanan	1. Jumlah pemberian bantuan makanan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				sehat lokal (makanan olahan) untuk pemulihan ke balita dengan target 200 paket 2. Jumlah fasilitator yang terlatih dalam pemberian makanan bayi dan anak, dengan target 20 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 3. Jumlah kader yang diorientasi PMBA, dengan target 160 kader dan 4 dokumen laporan hasil kegiatan 4. Jumlah peserta seminar gizi kesehatan, dengan target 250 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 5. Jumlah peserta yang dievaluasi program gizi lintas program dan lintas sektor, dengan target 560 orang dan 7 dokumen laporan hasil 6. Jumlah peserta sosialisasi IMD dan ASI eksklusif, dengan target	sehat lokal (makanan olahan) untuk pemulihan ke balita, diefisiensi 2. Jumlah fasilitator yang terlatih dalam pemberian makanan bayi dan anak, dengan realisasi 20 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 3. Jumlah kader yang diorientasi PMBA, dengan realisasi 135 kader dan 4 dokumen laporan hasil kegiatan 4. Jumlah peserta seminar gizi kesehatan, dengan realisasi 250 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 5. Jumlah peserta yang dievaluasi program gizi lintas program dan lintas sektor, dengan realisasi 541 orang dan 7 dokumen laporan hasil 6. Jumlah peserta sosialisasi IMD dan ASI eksklusif, dengan realisasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>200 orang dan 4 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>7. Jumlah peserta yang tersosialisasi pemberian tablet tambah darah (Fe) bagi remaja dan ibu hamil, dengan target 280 orang dan 4 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>8. Jumlah peserta yang tersosialisasi pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS), dengan target 400 orang, dan 4 laporan hasil kegiatan</p> <p>9. Jumlah peserta yang tersosialisasi program balita sehat sejahtera, dengan target 84 peserta dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p>	<p>141 orang dan 2 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>7. Jumlah peserta yang tersosialisasi pemberian tablet tambah darah (Fe) bagi remaja dan ibu hamil, dengan realisasi 280 orang dan 4 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>8. Jumlah peserta yang tersosialisasi pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS), diefisiensi</p> <p>9. Jumlah peserta yang tersosialisasi program balita sehat sejahtera, dengan target 77 peserta dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p>		
			6. Peningkatan Penyehatan Lingkungan	<p>1. Jumlah petugas terorientasi penyehatan air dan sanitasi dasar (PASD), dengan target 518 orang</p> <p>2. Jumlah Kesepakatan program</p>	<p>1. Jumlah petugas terorientasi penyehatan air dan sanitasi dasar (PASD), dengan realisasi 402 orang</p> <p>2. Jumlah Kesepakatan program</p>	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				kabupaten/kota, dengan target 1 rekomendasi kesepakatan 3. Jumlah rekomendasi kesepakatan pengelola limbah medis fasyankes, dengan target 7 rekomendasi kesepakatan 4. Jumlah petugas kab/kota yang dilokakarya, dengan target 105 petugas	kabupaten/kota, di efisiensi 3. Jumlah rekomendasi kesepakatan pengelola limbah medis fasyankes, dengan realisasi 7 rekomendasi kesepakatan 4. Jumlah petugas kab/kota yang dilokakarya, dengan realisasi 92 petugas		
			7. Peningkatan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	1. Jumlah rekomendasi kesepakatan program kesehatan kerja, dengan target 7 rekomendasi 2. Jumlah petugas yang tersosialisasi program kesehatan olahraga, dengan target 100 petugas dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 3. Jumlah peserta yang dilakukan pemeriksaan kebugaran, dengan target 600 pegawai, 1 dokumen laporan hasil kegiatan	1. Jumlah rekomendasi kesepakatan program kesehatan kerja, dengan realisasi 7 rekomendasi 2. Jumlah petugas yang tersosialisasi program kesehatan olahraga, diefisiensi 3. Jumlah peserta yang dilakukan pemeriksaan kebugaran, dengan realisasi 205 pegawai, 1 dokumen laporan hasil kegiatan	- - Kegiatan ini telah dilaksanakan, akan tetapi tidak mencapai target, karena waktu pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan yang lain	- - Meningkatkan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			8. Bok Provinsi (DAK Non Fisik)	1. Jumlah dokumen laporan evaluasi BOK provinsi dan Kabupaten dengan target 2 dokumen 2. Jumlah peserta yang tersosialisasi dan terevaluasi dana BOK dan jampersal dengan target 195 orang 3. Jumlah kabupaten yang melaksanakan program desa GMDM terintegrasi dengan kampung KB dengan target 7 kabupaten/kota 4. Jumlah kabupaten yang melaksanakan inovasi program tomatmentah dengan target 7 kabupaten/kota 5. Terlaksananya pencaangan minum tablet Fe bagianak sekolah dengan target 1 dokumen 6. Jumlah rekomendasi/kese pakatan program P2P, Yankes dan	1. Jumlah dokumen laporan evaluasi BOK provinsi dan Kabupaten dengan realisasi 2 dokumen 2. Jumlahpeserta yang tersosialisasi dan terevaluasi dana BOK dan jampersal dengan realisasi 195 orang 3. Jumlah kabupaten yang melaksanakan program desa GMDM terintegrasi dengan kampung KB dengan realisasi 7 kabupaten/kota 4. Jumlah kabupaten yang melaksanakan inovasi program tomatmentah dengan realisasi 7 kabupaten/ kota 5. Terlaksananya pencaangan minum tablet Fe bagianak sekolah dengan realisasi 1 dokumen 6. Jumlah rekomendasi/kese pakatan program P2P, Yankes dan Kesmas dengan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>Kesmas dengan target 1 dokumen</p> <p>7. Jumlah pembinaan pengelola BOK tingkat kabupaten dengan target 7 laporan</p> <p>8. Jumlah kesepakatan tentang intervensi daerah di lokus stunting dengan target 1 dokumen</p> <p>9. Jumlah dokumen sosialisasi program pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan dengan target 1 dokumen</p> <p>10. Jumlah dokumen pembinaan desa GMDM dengan target 1 dokumen</p> <p>11. Jumlah pembinaan desa lokus stunting dengan target 10 desa</p> <p>12. Jumlah media KIE dengan target 1 dokumen</p>	<p>realisasi 1 dokumen</p> <p>7. Jumlah pembinaan pengelola BOK tingkat kabupaten dengan realisasi 7 laporan</p> <p>8. Jumlah kesepakatan tentang intervensi daerah di lokus stunting dengan realisasi 1 dokumen</p> <p>9. Jumlah dokumen sosialisasi program pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan dengan realisasi 1 dokumen</p> <p>10. Jumlah dokumen pembinaan desa GMDM dengan realisasi 1 dokumen</p> <p>11. Jumlah pembinaan desa lokus stunting dengan realisasi 10 desa</p> <p>12. Jumlah media KIE dengan realisasi 1 dokumen</p>		
			9. Pengadaan Makanan Tambahan Ibu Hamil (DAK Fisik)	Jumlah laporan pengadaan makanan tambahan ibu hamil	Jumlah laporan pengadaan makanan tambahan ibu hamil	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dengan target 1 dokumen	dengan realisasi 1 dokumen		
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	<p>1. Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85%, dengan target 85,70%</p> <p>2. Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko, dengan target <10%</p> <p>3. Persentase penanganan penyakit menular lainnya, dengan target sebesar 87%</p> <p>4. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara, dengan target 22,50%</p> <p>5. Persentase pencegahan dan pengendalian</p>	<p>1. Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85%, dengan realisasi 89,69%</p> <p>2. Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko, dengan realisasi 0,39%</p> <p>3. Persentase penanganan penyakit menular lainnya, dengan realisasi 100%</p> <p>4. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara, dengan realisasi 38,56%</p> <p>5. Persentase pencegahan dan pengendalian</p>	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>penyakit tidak menular lainnya, dengan target 86%</p> <p>6. Persentase Kab/Kota yang 20 % Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, dengan target 80%</p> <p>7. Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon, dengan target 80%</p>	<p>penyakit tidak menular lainnya, dengan realisasi 125,43%</p> <p>6. Persentase Kab/Kota yang 20 % Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, dengan realisasi 100%</p> <p>7. Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon, dengan realisasi 96,71%</p>		
			1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TB	<p>1. Jumlah peserta yang tersosialisasi intensifikasi penemuan kasus TB, dengan target 30 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>2. Jumlah peserta seminar TB day, dengan target 100 orang dan 1 dokumen laporan kegiatan</p> <p>3. Jumlah kasus yang dilakukan tatalaksana TB oleh petugas</p>	<p>1. Jumlah peserta yang tersosialisasi intensifikasi penemuan kasus TB, dengan realisasi 30 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>2. Jumlah peserta seminar TB day, dengan realisasi 96 orang dan 1 dokumen laporan kegiatan</p> <p>3. Jumlah kasus yang dilakukan tatalaksana TB oleh petugas</p>	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				fasyankes, dengan target 14 kasus	fasyankes, dengan realisasi 14 kasus		
			2. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian HIV	1. Jumlah populasi beresiko yang sosialisasi program penanggulangan HIV AIDS dan IMS pada populasi beresiko, dengan target 210 orang, 1 dokumen laporan hasil kegiatan 2. Jumlah cetak media promosi pencegahan pengendalian HIV AIDS dan IMS, dengan target 2000 lembar leaflet, 1500 pcs souvenir 3. Jumlah pengadaan rapid test pemeriksaan HIV, dengan target 5000 test 4. Jumlah cetak formulir pencatatan dan pelaporan HIV dan IMS di Fasyankes, dengan target 20.000 lembar 5. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	1. Jumlah populasi beresiko yang sosialisasi program penanggulangan HIV AIDS dan IMS pada populasi beresiko, dengan realisasi 210 orang, 1 dokumen laporan hasil kegiatan 2. Jumlah cetak media promosi pencegahan pengendalian HIV AIDS dan IMS, dengan realisasi 2000 lembar leaflet, 1500 pcs souvenir 3. Jumlah pengadaan rapid test pemeriksaan HIV, dengan realisasi 5000 test 4. Jumlah cetak formulir pencatatan dan pelaporan HIV dan IMS di Fasyankes, dengan realisasi 20.000 lembar 5. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>pelaksanaan program HIV dan IMS di fasyankes Kab/Kota, dengan target 7 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>6. Jumlah petugas layanan kesehatan yang terlatih dalam pelaksanaan triple eliminasi, dengan target 50 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>7. Jumlah penduduk usia produktif (15-49th) yang mengikuti seminar hari Aids sedunia (HAS), dengan target 200 peserta dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p>	<p>pelaksanaan program HIV dan IMS di fasyankes Kab/Kota, dengan realisasi 7 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>6. Jumlah petugas layanan kesehatan yang terlatih dalam pelaksanaan triple eliminasi, dengan realisasi 48 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>7. Jumlah penduduk usia produktif (15-49th) yang mengikuti seminar hari Aids sedunia (HAS), dengan realisasi 157 peserta dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p>		
			3. Penanganan Penyakit Menular Lainnya (Hepatitis, ISPA, Diare, Kusta, Filariasis, DBD, Zoonosis)	<p>1. Jumlah cetak form RR dan media KIE, dengan target 3 PT</p> <p>2. Jumlah dokumen kegiatan supervisi monitoring dan evaluasi program DBD & Filariasis, dengan target 14 Dokumen laporan hasil kegiatan</p>	<p>1. Jumlah cetak form RR dan media KIE, dengan target 3 PT</p> <p>2. Jumlah dokumen kegiatan supervisi monitoring dan evaluasi program DBD & Filariasis, keluaran ini tidak dilaksanakan karena terjadi kealpaan pada</p>	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>3. Jumlah dokumen pemantauan jentik berkala (PJB) dan angka Bebas Juntik (ABJ) DBD, dengan target 7 Dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>4. Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensi pada bimtek pengendalian penyakit zoonosis, dengan target 14 petugas pengelola program dan 7 laporan kegiatan</p> <p>5. Jumlah pengadaan rapid test hepatitis, jumlah peralatan penunjang pemeriksaan hepatitis, dengan</p>	<p>saat penginputan dokumen pelaksanaan anggaran</p> <p>3. Jumlah dokumen pemantauan jentik berkala (PJB) dan angka Bebas Juntik (ABJ) DBD, keluaran ini tidak dilaksanakan karena terjadi kealpaan pada saat penginputan dokumen pelaksanaan anggaran</p> <p>4. Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensi pada bimtek pengendalian penyakit zoonosis, keluaran ini tidak dilaksanakan karena terjadi kealpaan pada saat penginputan dokumen pelaksanaan anggaran</p> <p>5. Jumlah pengadaan rapid test hepatitis, jumlah peralatan penunjang pemeriksaan hepatitis, dengan target 8000 test</p>		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>target 8000 test dan 1 paket bahan habis pakai (BHP)</p> <p>6. Jumlah dokumen laporan kegiatan monev deteksi dini hepatitis, dengan target 7 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>7. Jumlah dokumen kegiatan monev program P2 ISPA & diare, dengan target 7 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>8. Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensi dalam pengendalian hepatitis, dengan target 50 nakes, 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>9. Jumlah peserta seminar aksi peduli hepatitis dalam rangka</p>	<p>dan 1 paket bahan habis pakai (BHP)</p> <p>6. Jumlah dokumen laporan kegiatan monev deteksi dini hepatitis, keluaran ini tidak dilaksanakan karena terjadi kealpaan pada saat penginputan dokumen pelaksanaan anggaran</p> <p>7. Jumlah dokumen kegiatan monev program P2 ISPA & diare, keluaran ini tidak dilaksanakan karena terjadi kealpaan pada saat penginputan dokumen pelaksanaan anggaran</p> <p>8. Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensi dalam pengendalian hepatitis, dengan target 50 nakes, 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>9. Jumlah peserta seminar aksi peduli hepatitis dalam rangka HHS, dengan</p>		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>HHS, dengan target 100 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>10. Jumlah petugas yang mendapatkan sosialisasi tentang triple eliminasi (HIV, sifilis, hepatitis), dengan target 100 orang, 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>11. Jumlah peserta seminar hari kusta, dengan target 100 orang, 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>12. Jumlah dokumen kegiatan monev P2 kusta, dengan target 7dokumen</p>	<p>target 100 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>10. Jumlah petugas yang mendapatkan sosialisasi tentang triple eliminasi (HIV, sifilis, hepatitis), dengan target 100 orang, 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>11. Jumlah peserta seminar hari kusta, dengan target 100 orang, 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>12. Jumlah dokumen kegiatan monev P2 kusta, dengan target 7dokumen</p>		
			4. Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kanker	<p>1. Jumlah peserta penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit kanker serviks dan payudara, dengan target 50 orang dan 30 orang</p> <p>2. Jumlah dokumen koordinasi, pencatatan dan pelaporan,</p>	<p>1. Jumlah peserta penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit kanker serviks dan payudara, dengan realisasi 50 orang dan 36 orang</p> <p>2. Jumlah dokumen koordinasi, pencatatan dan pelaporan,</p>	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dengan target 2 dokumen 3. Jumlah agent pencegahan dan pengendalian FR kanker serviks dan payudara, dengan target 100 orang 4. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana, dengan target 1 Paket	dengan realisasi 2 dokumen 3. Jumlah agent pencegahan dan pengendalian FR kanker serviks dan payudara, dengan realisasi 100 orang 4. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana, dengan realisasi 1 Paket		
			5. Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menulr Lainnya (Tekanan Darah Tinggi, Obesitas, Diabetes Mellitus)	1. Jumlah peserta yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM, dengan target 200 orang, 1 dokumen laporan kegiatan 2. Jumlah masyarakat yang melakukan faktor risiko PTM, dengan target 150 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 3. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana, dengan target 7 paket, 1 unit 4. Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, pencatatan dan	1. Jumlah peserta yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM, dengan realisasi 237 orang, 1 dokumen laporan kegiatan 2. Jumlah masyarakat yang melakukan faktor risiko PTM, dengan realisasi 202 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 3. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana, dengan realisasi 7 paket, 1 unit 4. Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, pencatatan dan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				pelaporan, dengan target 1 dokumen 5. Jumlah agent pencegahan dan pengendalian FR PTM, dengan target 100 orang, 1 dokumen laporan kegiatan	pelaporan, dengan realisasi 1 dokumen 5. Jumlah agent pencegahan dan pengendalian FR PTM, dengan realisasi 98 orang, 1 dokumen laporan kegiatan		
			6. Peningkatan Penanganan Pelayanan Kesehatan Jiwa	1. Jumlah agent pencegahan dan pengendalian FR masalah keswa dan NAFZA, dengan target 1 laporan hasil kegiatan 2. Jumlah deteksi dini FR keswa dan NAFZA, , dengan target 300 orang 1 dok laporan kegiatan 3. Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, pencatatan dan pelaporan, dengan target 1 dokumen laporan hasil kegiatan	1. Jumlah agent pencegahan dan pengendalian FR masalah keswa dan NAFZA, dengan realisasi 1 laporan hasil kegiatan 2. Jumlah deteksi dini FR keswa dan NAFZA, , dengan realisasi 300 orang dan 1 dok laporan kegiatan 3. Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, pencatatan dan pelaporan, dengan realisasi 1 dokumen laporan hasil kegiatan	-	-
			7. Peningkatan Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Situasi Khusus	1. Jumlah penyediaan jarum, safety box, dan logistik program imunisasi, dengan target 5 paket	1. Jumlah penyediaan jarum, safety box, dan logistik program imunisasi, dengan realisasi 5 paket	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				2. Jumlah dokumen pelaksanaan imunisasi, dengan target 2 paket 3. Jumlah dokumen pelaksanaan surveilen PD3i dan penyakit potensial KLB, dengan target 2 dokumen 4. Persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji, dengan target 80 % dan 4 dokumen 5. Jumlah alat dan logistik krisis kesehatan, dengan target 3 paket 6. Jumlah kasus yang dilakukan kewaspadaan dini dan respon (SKDR), dengan target 23 kasus 7. Jumlah pencapaian cakupan desa/kelurahan UCI, dengan target 381 desa/kelurahan dan 1 dokumen	2. Jumlah dokumen pelaksanaan imunisasi, dengan realisasi 2 paket 3. Jumlah dokumen pelaksanaan surveilen PD3i dan penyakit potensial KLB, dengan realisasi 2 dokumen 4. Persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji, dengan realisasi 80 % dan 4 dokumen 5. Jumlah alat dan logistik krisis kesehatan, dengan realisasi 3 paket 6. Jumlah kasus yang dilakukan kewaspadaan dini dan respon (SKDR), dengan realisasi 23 kasus 7. Jumlah pencapaian cakupan desa/kelurahan UCI, dengan realisasi 381 desa/kelurahan dan 1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				8. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kesiapsiagaan krisis kesehatan, dengan target 8 dokumen 9. Jumlah dokumen pelaksanaan kewaspadaan dini PIE, dengan target 6 dokumen 10. Jumlah dokumen laporan pelayanan kekarantina kesehatan, dengan target 2 dokumen	8. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kesiapsiagaan krisis kesehatan, dengan realisasi 8 dokumen 9. Jumlah dokumen pelaksanaan kewaspadaan dini PIE, dengan realisasi 6 dokumen 10. Jumlah dokumen laporan pelayanan kekarantina kesehatan, dengan realisasi 2 dokumen		
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	1. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi, dengan target 38 kecamatan 2. Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional, dengan target 10 RSUD 3. Persentase kepesertaan	1. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi, dengan realisasi 47 kecamatan 2. Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional, dengan realisasi 18 RSUD 3. Persentase kepesertaan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				JKN, dengan target 65,5% 4. Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional, dengan target 75%	JKN, dengan realisasi 81,43% 4. Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional, dengan realisasi 98,44%		
			1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	1. Jumlah bantuan pelayanan kesehatan (P3K) yang dilakukan oleh tim kesehatan, dengan target 15 event dan 1 dokumen laporan kegiatan 2. Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensi dalam pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar puskesmas, dengan target 140 nakes dan 7 dokumen laporan kegiatan 3. Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian berprestasi di 21 FKTP kab/Kota (dengan 3 FKTP terpilih sebagai	1. Jumlah bantuan pelayanan kesehatan (P3K) yang dilakukan oleh tim kesehatan, dengan realisasi 15 event dan 1 dokumen laporan kegiatan 2. Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensi dalam pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar puskesmas, dengan realisasi 140 nakes dan 7 dokumen laporan kegiatan 3. Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian berprestasi di 21 FKTP kab/Kota (dengan 3 FKTP terpilih sebagai	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>pemenang) dengan target 21 FKTP (3 pemenang)</p> <p>4. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesepakatan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK), dengan target 54 Puskesmas, 7 kesepakatan Rakor PIS-PK</p> <p>5. Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan review terhadap program perkesmas, dengan target 45 nakes dan 1 dokumen</p> <p>6. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan ramah anak, dengan target 14 puskesmas, 1 dokumen laporan</p> <p>7. Jumlah akreditasi Puskesmas yang dilakukan evaluasi dan pembinaan dengan target 63</p>	<p>pemenang) dengan realisasi 21 FKTP (3 pemenang)</p> <p>4. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesepakatan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK), dengan realisasi 54 Puskesmas, 7 kesepakatan Rakor PIS-PK</p> <p>5. Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan review terhadap program perkesmas, dengan realisasi 45 nakes dan 1 dokumen</p> <p>6. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan ramah anak, dengan realisasi 14 puskesmas, 1 dokumen laporan</p> <p>7. Jumlah akreditasi Puskesmas yang dilakukan evaluasi dan pembinaan dengan realisasi 63 puskesmas,</p>		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				puskesmas, dan 3 dokumen laporan	dan 3 dokumen laporan		
			2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Jumlah rumah sakit tersosialisasi pedoman penyusunan Renstra, dengan target 11 Rumah sakit 2. Jumlah rumah sakit mampu meningkatkan penyusunan Renstra, dengan target 11 rumah sakit pemerintah 3. Jumlah nakes yang ditingkatkan kapasitas dalam pelayanan penunjang di rumah sakit, dengan target 60 nakes, 1 dokumen 4. Jumlah laporan validasi data pelaksanaan SPM rumah sakit sesuai standar, dengan target 10 laporan SPM RS 5. Jumlah bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dengan target 7	1. Jumlah rumah sakit tersosialisasi pedoman penyusunan Renstra, dengan realisasi 11 Rumah sakit 2. Jumlah rumah sakit mampu meningkatkan penyusunan Renstra, dengan realisasi 11 rumah sakit pemerintah 3. Jumlah nakes yang ditingkatkan kapasitas dalam pelayanan penunjang di rumah sakit, dengan realisasi 54 nakes, 1 dokumen 4. Jumlah laporan validasi data pelaksanaan SPM rumah sakit sesuai standar, dengan realisasi 10 laporan SPM RS 5. Jumlah bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dengan realisasi 7	— — — — —	— — — —

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>dokumen, 1 laporan</p> <p>6. Terbentuknya pembina tim pokja BLUD rumah sakit, dengan target 1 dokumen, 1 laporan</p> <p>7. Jumlah rekomendasi kesepakatan dalam pelaksanaan pembina dan pengawasan RS, dengan target 4 rekomendasi kesepakatan</p> <p>8. Jumlah laporan hasil konsultasi dan monev badan pengawas rumah sakit (BPRS) ke RS se provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan target 8 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>9. Jumlah laporan pengaduan masyarakat di Rumah sakit ke BPRS, dengan target 5 laporan</p>	<p>dokumen, 1 laporan</p> <p>6. Terbentuknya pembina tim pokja BLUD rumah sakit, dengan target 1 dokumen, 1 laporan</p> <p>7. Jumlah rekomendasi kesepakatan dalam pelaksanaan pembina dan pengawasan RS, dengan realisasi 4 rekomendasi kesepakatan</p> <p>8. Jumlah laporan hasil konsultasi dan monev badan pengawas rumah sakit (BPRS) ke RS se provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan realisasi 8 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>9. Jumlah laporan pengaduan masyarakat di Rumah sakit ke BPRS, dengan realisasi 0 laporan</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>Untuk output ini tidak terealisasi karena tidak ada laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit yang disampaikan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit.</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>Mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah klaim jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu, dengan target 59.926 jiwa 2. Jumlah kesepakatan lintas sektor dalam pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat (JKM), dengan target 1 kesepakatan 3. Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan JKN, dengan target 1 laporan pemantauan 4. Jumlah pasien rujukan, pemulasaran jenazah masyarakat, tenaga kesehatan pendamping pasien rujukan, dan keluarga pendamping pasien rujukan, dengan target 30 pasien rujukan, 7 jenazah, 30 keluarga pendamping	1. Jumlah klaim jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu, dengan realisasi 55.984 jiwa 2. Jumlah kesepakatan lintas sektor dalam pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat (JKM), dengan realisasi 1 kesepakatan 3. Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan JKN, dengan realisasi 1 laporan pemantauan 4. Jumlah pasien rujukan, pemulasaran jenazah masyarakat, tenaga kesehatan pendamping pasien rujukan, dan keluarga pendamping pasien rujukan, dengan realisasi 27 pasien rujukan, 3 jenazah, 27 keluarga pendamping		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>pasien, dan 30 tenaga kesehatan</p> <p>5. Jumlah petugas JKN yang ditingkatkan kemampuannya dalam pengelolaan JKN, dengan target 73 orang, 1 laporan</p>	<p>pasien, dan 2 tenaga kesehatan</p> <p>5. Jumlah petugas JKN yang ditingkatkan kemampuannya dalam pengelolaan JKN, diefisiensi</p>		
			4. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional	<p>1. Jumlah desa GMDM yang sudah dibina asuhan mandiri dalam pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA), dengan target 6 desa GMDM, 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>2. Jumlah kelompok asuhan mandiri yang terbina program pelayanan kesehatan tradisional, dengan target 3 DTPK, 3 pedesaan, 3 perkotaan, 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>3. Jumlah ramuan yang sudah diteliti dan teridentifikasi di kabupaten/ kota, dengan</p>	<p>1. Jumlah desa GMDM yang sudah dibina asuhan mandiri dalam pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA), dengan realisasi 6 desa GMDM, 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>2. Jumlah kelompok asuhan mandiri yang terbina program pelayanan kesehatan tradisional, dengan realisasi 1 DTPK, 3 pedesaan, 2 perkotaan, 1 dokumen laporan hasil kegiatan</p> <p>3. Jumlah ramuan yang sudah diteliti dan teridentifikasi di kabupaten/ kota, dengan</p>	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				target 1 ramuan yang ada di 7 kab/kota, 1 dokumen laporan hasil kegiatan 4. Jumlah petugas yang ditingkatkan kemampuan pada pemanfaatan tanaman obat keluarga (toga), dengan target 10 petugas, 1 dokumen laporan hasil kegiatan	realisasi 1 ramuan yang ada di 7 kab/kota, 1 dokumen laporan hasil kegiatan 4. Jumlah petugas yang ditingkatkan kemampuan pada pemanfaatan tanaman obat keluarga (toga), dengan realisasi 10 petugas, 1 dokumen laporan hasil kegiatan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif), dengan target 4028 orang 2. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, dengan target 94% 3. Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat, dengan target 91%	1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif), dengan realisasi 2049 orang 2. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, dengan realisasi 96,88% 3. Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat, dengan realisasi 82,05%	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan/SDMK	1. Jumlah nakes yang ditingkatkan kemampuan pada jabatan fungsional bidan terlatih, dengan target 30 nakes dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 2. Jumlah pelatihan yang terakreditasi dengan target 15 pelatihan, 1 dokumen laporan hasil kegiatan 3. Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan pendidikan berkelanjutan, dengan target 10 orang 4. Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, kefarmasian, gizi, kesmas, kesling dan labkes), dengan target 27 nakes, 1 dokumen laporan kegiatan 5. Jumlah tenaga kesehatan khusus	1. Jumlah nakes yang ditingkatkan kemampuan pada jabatan fungsional bidan terlatih, keluaran ini tidak dilaksanakan karena terjadi kealpaan pada saat penginputan dokumen pelaksanaan anggaran 2. Jumlah pelatihan yang terakreditasi dengan realisasi 6 pelatihan, 1 dokumen laporan hasil kegiatan 3. Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan pendidikan berkelanjutan, dengan realisasi 7 orang 4. Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, kefarmasian, gizi, kesmas, kesling dan labkes), dengan realisasi 21 nakes, 1 dokumen laporan kegiatan 5. Jumlah tenaga kesehatan khusus	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				di klinik provinsi dan bidan PTT (dokter umum 2 orang, bidan 7 orang, perawat 3 orang, apoteker 2 perawat mahir 3 orang), dengan target 17 nakes PTT dan 1 dokumen laporan kegiatan	di klinik provinsi dan bidan PTT (dokter umum 2 orang, bidan 7 orang, perawat 3 orang, apoteker 2 perawat mahir 3 orang), dengan realisasi 16 nakes PTT dan 1 dokumen laporan kegiatan		
			2. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	1. Jumlah obat buffer stok Provinsi, dengan target 1 paket 2. Jumlah rencana kebutuhan obat (RKO) kab/Kota dan Provinsi, dengan target 8 dokumen data RKO dan 1 laporan kegiatan 3. Jumlah sarana kefarmasian yang diberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kefarmasian, dengan target 70 sarana dan 1dokumen laporan hasil kegiatan 4. Jumlah petugas dan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dilakukan	1. Jumlah obat buffer stok Provinsi, dengan realisasi 1 paket 2. Jumlah rencana kebutuhan obat (RKO) kab/Kota dan Provinsi, dengan realisasi 8 dokumen data RKO dan 1 laporan kegiatan 3. Jumlah sarana kefarmasian yang diberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kefarmasian, dengan realisasi 70 sarana dan 1dokumen laporan hasil kegiatan 4. Jumlah petugas dan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dilakukan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				pembinaan dan pengawasan, dengan target 300 IRTP dan 1 dokumen	pembinaan dan pengawasan, dengan realisasi 300 IRTP dan 1 dokumen		
			3. Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT	1. Jumlah peserta yang tersosialisasi penggunaan alkes dan PKRT dalam negeri, dengan target 42 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 2. Jumlah sarana fasyankes yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan alkes dan PKRT di fasyankes, dengan target 14 fasyankes dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 3. Persentase produk alkes dan PKRT dalam negeri yang tersedia pada instalasi farmasi kab/kota, dengan target 50%	1. Jumlah peserta yang tersosialisasi penggunaan alkes dan PKRT dalam negeri, dengan realisasi 80 orang dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 2. Jumlah sarana fasyankes yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan alkes dan PKRT di fasyankes, dengan realisasi 15 fasyankes dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan 3. Persentase produk alkes dan PKRT dalam negeri yang tersedia pada instalasi farmasi kab/kota, dengan realisasi 50%	-	-
			PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Jumlah pelayananpemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar, dengan	Jumlah pelayananpemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar, dengan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				target 2200 sampel	realisasi 3825 sampel		
			Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	1. Jumlah petugas labor yang ditingkatkan kompetensi teknis, dengan target 20 orang 2. Jumlah bahan pengujian laboratorium, dengan target 7 paket 3. Jumlah sertifikasi alat laboratorium yang ditingkatkan mutu sesuai standar, dengan target 96 sertifikat 4. Jumlah tenaga labor yang ditingkatkan kemampuan pengujian dan mutu lab, dengan target 19 orang dan 2 dokumen 5. Jumlah sertifikasi mutu pelayanan labkes, dengan target 5 sertifikat 6. Jumlah buku standarisasi laboratorium yang	1. Jumlah petugas labor yang ditingkatkan kompetensi teknis, keluaran ini tidak dilaksanakan karena terjadi kealpaan pada saat penginputan dokumen pelaksanaan anggaran 2. Jumlah bahan pengujian laboratorium, dengan realisasi 7 paket 3. Jumlah sertifikasi alat laboratorium yang ditingkatkan mutu sesuai standar, dengan realisasi 42 sertifikat 4. Jumlah tenaga labor yang ditingkatkan kemampuan pengujian dan mutu lab, dengan realisasi 30 orang dan 1 dokumen 5. Jumlah sertifikasi mutu pelayanan labkes, dengan realisasi 2 sertifikat 6. Jumlah buku standarisasi laboratorium yang	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				tersedia, dengan target 15 buku 7. Jumlah laporan hasil supervisi, dengan target 2 dokumen 8. Jumlah alat pengujian laboratorium, dengan target 1 paket 9. Jumlah alat laboratorium yang dipelihara (maintance), dengan target 9 unit	tersedia, dengan realisasi 7. Jumlah laporan hasil supervisi, keluaran ini tidak dilaksanakan karena terjadi kealpaan pada saat penginputan dokumen pelaksanaan anggaran 8. Jumlah alat pengujian laboratorium, dengan realisasi 1 paket 9. Jumlah alat laboratorium yang dipelihara (maintance), dengan realisasi 4 unit		
		RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	PROGRAM PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	75 %	75 %		
			1. Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dikarenakan survey akreditasi sudah dilaksanakan awal oktober 2019 dan jadwal narasumber sangat padat sehingga rencana kegiatan inhouse Training, komunikasi efektif, pencampuran obat di Instalasi farmasi batal dilaksanakan.	Direncanakan akan dilakukan inhouse training terkait komunikasi efektif tahun 2020
			2. Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan	5 Dokumen	5 Dokumen	Pengadaan di sesuaikan dengan kebutuhan	Pengadaan di sesuaikan dengan kebutuhan
			3. Kegiatan Peningkatan Etika Keperawatan	80 Orang	80 Tenaga Perawat di Setiap Unit	Narasumber di rencanakan 2 orang,	Menyesuaikan pagu anggaran transportasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						terkait persediaan honor dan tiket melebihi pagu anggaran yang bisa diakomodir hanya satu orang narasumber	dan akomodasi yang terkini
			PROGRAM PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	75 %	75%		
			1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3 Paket	3 Paket	Kekosongan Stok Barang di penyediaan	Pengadaan akan di perbanyak di awal tahun
			2. Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat	194 Orang	194 Orang	Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga PHL yang menjadi kewenangan BKPSDMD yang mengalami keterlambatan menyebabkan anggaran tidak terserap dengan maksimal	1.mengusulkan percepatan pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga PHL 2.mengusulkan pelaksanaan seleksi penerimaan PHL secara mandiri
			3. Kegiatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2 Kemitraan	4 Kemitraan	1. Kegiatan sister hospital terhambat karena renovasi kamar operasi 2. Kegiatan sister hospital terhambat karena RSUD Dr.(H.C) Ir. SOEKARNO fokus mempersiapkan survey akreditasi 3. Jadwal tenaga ahli yang sangat padat di rumah sakit masing- masing	Kedepan akan diusahakan kegiatan sister hospital anak berjalan rutin 1 bulan sekali

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Kegiatan Penyusunan Standar Kesehatan dan Evaluasi Standar Kesehatan	-	-	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	85 %	85 %		
			1. Kegiatan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	8 Paket	9 Paket	Pengadaan rutin seperti belanja habis pakai dibelanjakan sesuai kebutuhan di pengadaan lainnya karena adanya selisih penawaran	Perencanaan ke depan lebih diperhitungkan
			2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	10 Paket	10 Paket	Kegiatan pemeliharaan alat kesehatan terbentur dengan proses pelaksanaan kalibrasi	Proses pelaksanaan kalibrasi dilakukan dengan tepat waktu
			3. Kegiatan Pembangunan Gedung B	1 Gedung Lanjutan	1 Gedung Lanjutan	Pagu yang diusulkan tidak sesuai dengan kotrak pembangunan gedung B sehingga serapan pagu tidak maksimal dengan jumlah pagu dpa	Perencanaan ke depan lebih di maksimalkan serapan anggaran
			4. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)	10 Paket	9 Paket	1. Pengadaan alat kesehatan tidak sesuai dengan permenkes 2. Alat kesehatan.tidak terdaftar di e katalog	1. Ganti dengan produk yang lain 2. Diganti dengan instalasi permanen
			5. Kegiatan Pembangunan Pagar Rumah Sakit	-	-	-	-
			6. Kegiatan Perencanaan Gedung C	1 Dokumen	1 Dokumen	Pagu yang diusulkan sesuai dengan kotrak perencanaan gedung C sehingga serapan pagu tidak maksimal dengan jumlah pagu dpa	Perencanaan ke depan lebih di maksimalkan serapan anggaran
			7. Kegiatan Pembangunan Masjid	-	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			8. Kegiatan Pembangunan Gedung Jenazah Rumah Sakit	-	-	-	-
			9. Kegiatan Pembangunan Gedung Laundry Rumah Sakit	1 Gedung	1 Gedung	Pagu yang diusulkan sesuai dengan kotrak gedung laundry sehingga serapan pagu tidak maksimal dengan jumlah pagu dpa	Perencanaan ke depan lebih di maksimalkan serapan anggaran
			10. Kegiatan Pembangunan Gedung Dapur Rumah Sakit	1 Unit Gedung	1 Unit Gedung	Pagu yang diusulkan sesuai dengan kotrak gedung dapur sehingga serapan pagu tidak maksimal dengan jumlah pagu dpa	Perencanaan ke depan lebih di maksimalkan serapan anggaran
			11. Kegiatan Pembangunan IPAL	1 Unit Gedung IPAL	1 Unit Gedung IPAL	Pagu yang diusulkan sesuai dengan kotrak pembangunan IPAL sehingga serapan pagu tidak maksimal dengan jumlah pagu dpa	Perencanaan ke depan lebih di maksimalkan serapan anggaran
			12. Kegiatan Pembangunan Sumur Bor	-	-	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUDP	90 %	90%		
			Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	700 Orang	849 Orang	Untuk membantu masyarakat terhadap pembiayaan layanan kesehatan	Memenuhi pembiayaan pelayanan kesehatan
		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	PROGRAM TEKNIS MEDIS KEJIWAAN NAPZA	100	100		
			1. Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGJ	100%	100%		
			2. Penjangkauan Bebas Pasung	55 orang	3 orang	Kegiatan berdasarkan laporan dari Puskesmas ada/ tidak ada ODGJ yang di pasung	Meningkatkan koordinasi ke Puskesmas, Dinas Sosial dan Dinas

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Kesehatan terkait pasien pasung
			3. Promosi Kesehatan Jiwa	80%	80%		
			4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	100%	100%		
			5. Survey Kepuasan Masyarakat	82%	82%		
			PROGRAM PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	15	15		
			1. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	5500 kali	6073 kali		
			2. Penyediaan Pelayanan Kesehatan jiwa Berbasis Kepulauan dan Home Visite	40 Kali	18 Kali		
			3. Penilaian Akreditasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
			4. Jambore Nasional Kesehatan Jiwa	1.000 Orang	1.000 Orang		
			5. Penyusunan Asuhan Keperawatan Anak dan Remaja Psikogeriatik	1 Buku	1 Buku		
			6. Audit Mutu Pelayanan Keperawatan	2 Laporan	2 Laporan		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Rumah Sakit Jiwa	90%	90%		
			1. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit	1 tahun	1 tahun		
			2. Peningkatan Pemanfaatan sarana dan prasarana promosi kesehatan	4 Promosi	4 Promosi		
			3. Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100 Persen	100 Persen		
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)	1 tahun	1 tahun		
			5. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	1 tahun	1 tahun		
			6. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit	1 tahun	1 tahun		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			7. Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	34 kali	3 kali		
			8. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	1 paket	1 paket		
			9. Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen	400 pcs	400 pcs		
			10. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	1 paket	1 paket		
			11. Pengembangan SIMRS	1 paket	1 paket		
			12. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	10 item	10 item		
			13. Penyusunan Formularium	1 Dokumen	1 Dokumen		
			PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSJ	100	100		
			Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD				
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM KEBINAMARGAAN	PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP 0,942	PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP 0,9223		
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN	6 Dokumen	6 Dokumen		
			1. AMDAL Trans Belitung	1 Dokumen	1 Dokumen		
			2. DED Pembangunan Jalan Citra Land - RE. Martadinata	1 Dokumen	1 Dokumen		
			3. AMDAL Jalan Balunijuk (UBB) – Pelempang	1 Dokumen	1 Dokumen		
			4. AMDAL JALAN PANGKALPINANG - BATU BERIGA – SADAI	1 Dokumen	1 Dokumen		
			5. AMDAL Trans Bangka	1 Dokumen	1 Dokumen		
			6. Reviw DED Pembangunan Jalan Junction Membalong	1 Dokumen	1 Dokumen		
			PEMBANGUNAN JALAN	33,8 KM	33,8 KM		
			1. Peningkatan Jalan Lubuk Besar - Tanjung Berikat	1 Km	1 Km		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Peningkatan Jalan Perawas – Buding	1 Km	1 Km		
			3. Peningkatan Jalan Simpang Renggang – Gantung	1 Km	1 Km		
			4. Peningkatan Jalan Gantung - Simpang Padang	1,5 Km	1,5 Km		
			5. Peningkatan Jalan Badau – Dendang	1 Km	1 Km		
			6. Peningkatan Jalan Dendang – Gantung	1 Km	1 Km		
			7. Peningkatan Jalan Junction - Membalong Paket 1 (Phnjd)	4 Km	4 Km		
			8. Peningkatan Jalan Junction - Membalong Paket 2 (Phnjd)	5 Km	5 Km		
			9. Peningkatan Jalan Junction - Membalong Paket 3 (Phnjd)	4 Km	4 Km		
			10. Peningkatan Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin	1 Km	1 Km		
			11. Peningkatan Jalan Sangku - Simpang Tempilang; Sungai Dua - Dam Iii – Sangku	1,4 Km	1,4 Km		
			12. Peningkatan Jalan Simpang Gedong - Payung; Payung - Air Bara	1,5 Km	1,5 Km		
			13. Peningkatan Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru	2 Km	2 Km		
			14. Peningkatan Jalan Sungai Selan - Lampur - Simpang Gedong; Puput - Simpang Gedong	1,5 Km	1,5 Km		
			15. Peningkatan Jalan Penagan - Tanjung Tedung	1,5 Km	1,5 Km		
			16. Peningkatan Jalan Koba - Lubuk Besar	1,5 Km	1,5 Km		
			17. Peningkatan Jalan A. Yani	0,5 Km	0,5 Km		
			18. Peningkatan Jalan Semabung - Sampur (U-Ditch & Pedestrian)	0,5 Km	0,5 Km		
			19. Peningkatan Jalan Semabung - Sampur (Simpang Kantor	1,25 Km	1,25 Km		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Gubernur - Jembatan Kolong Kepoh)				
			20. Peningkatan Jalan Payung - Air Bara	1,5 Km	1,5 Km		
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN	2 DOKUMEN	1 DOKUMEN		
			1. Pra Studi Kelayakan Jalur Penghubung Bangka Sumatera	1 Dokumen	1 Dokumen		
			2. Fs Jembatan Rangkui 2	1 Dokumen	-	Terkendala waktu sehingga tidak dapat terlaksana	
			PEMBANGUNAN JEMBATAN	2 UNIT	2 UNIT		
			1. Pembangunan Jembatan Air Niur	1 Unit	1 Unit		
			2. Pembangunan Jembatan Simpang	1 Unit	1 Unit		
			PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	6 UNIT	0	Alat tersebut tidak tersedia di e-katalog, gagal lelang dan untuk dilelang kembali waktu yg tersedia tidak mencukupi	
			Inspeksi Kondisi Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Inspeksi Kondisi Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	784,5 Meter	784,5 Meter		
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan	1 Paket	1 Paket		
			PEMBANGUNAN JALAN (DAK)	4 KM	4 KM		
			Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Empat (Sijuk)-Buding	4 Km	4 Km		
			PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	8,62 KM	8,62 KM		
			1. Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis - Sungai Selan	1,2 Km	1,2 Km		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Pemeliharaan Berkala Jalan Bantan – Pelulusan	1 Km	1 Km		
			3. Pemeliharaan Berkala Jalan Sungailiat - Puding Besar	1,5 Km	1,5 Km		
			4. Pemeliharaan Berkala Jalan Trem - RE. Martadinata – Sumberejo	1 Km	1 Km		
			5. Pemeliharaan Berkala Jalan Ibul - Parit Tiga	1 Km	1 Km		
			6. Pemeliharaan Berkala Jalan Air Gegas - Bedengung; Bedengung - Batu Betumpang; Payung – Bedengung	1,689 Km	1,689 Km		
			7. Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalpinang - Batas Kota (Sp. Katis)	1,232 Km	1,232 Km		
			PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	6 UNIT	6 UNIT		
			PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	799,87 KM	799,87 KM		
			1. Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang - Batas Kota (Simpang Katis); A. Yani; Simpang Semabung - Sampur; Trem; Re. Martadinata; Sumberejo; Sp. Pasir Padi - Alexander; Ppi; Sp. Alexander - Sp. Lingkar Timur	21,83 Km	21,83 Km		
			2. Pemeliharaan Rutin Jalan Kompleks Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Sp. Pulau Bangka - Sampur	17,81 Km	17,81 Km		
			3. Pemeliharaan Rutin Jalan Sungailiat - Puding Besar	28,37 Km	28,37 Km		
			4. Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Timur; Rebo - Tanjung Pesona - Jeliti - Simpang Perahu	36,03 Km	36,03 Km		
			5. Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin; Sungai Dua - Dam Iii - Sangku	37,44 Km	37,44 Km		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur	35,94 Km	35,94 Km		
			7. Pemeliharaan Rutin Jalan Ibul - Parit Tiga	28,48 Km	28,48 Km		
			8. Pemeliharaan Rutin Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru	25,06 Km	25,06 Km		
			9. Pemeliharaan Rutin Jalan Kelapa - Kayu Arang; Sangku - Simpang Tempilang	37,3 Km	37,3 Km		
			10. Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis; Simpang Katis - Sungai Selan	32,85 Km	32,85 Km		
			11. Pemeliharaan Rutin Jalan Namang - Puput; Puput - Simpang Katis; Puput - Simpang Gedong; Sungai Selan - Lampur - Sp. Gedong	33,26 Km	33,26 Km		
			12. Pemeliharaan Rutin Jalan Penagan - Tanjung Tedung	15,05 Km	15,05 Km		
			13. Pemeliharaan Rutin Jalan Koba - Lubuk Besar	32,7 Km	32,7 Km		
			14. Pemeliharaan Rutin Jalan Lubuk Besar - Tanjung Berikat	26,04 Km	26,04 Km		
			15. Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Gedong - Payung	32,3 Km	32,3 Km		
			16. Pemeliharaan Rutin Jalan Payung - Air Bara	27,5 Km	27,5 Km		
			17. Pemeliharaan Rutin Jalan Payung - Bedengung - Bedengung - Batu Betumpang	33,68 Km	33,68 Km		
			18. Pemeliharaan Rutin Jalan Air Gegas - Bedengung	24,4 Km	24,4 Km		
			19. Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjung Pandan; Tanjungpandan - Simpang Empat (Sijuk)	30,45 Km	30,45 Km		
			20. Pemeliharaan Rutin Jalan Junction - Membalong (Phnjd)	26,35 Km	26,35 Km	Sudah dikerjakan pada Paket Kegiatan Long segment Peningkatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Jalan Junction - Membalong Paket 1, 2 dan 3 (PHNJD 2019) terhitung tanggal addendum kontrak yaitu tgl 27 Mei 2019	
			21. Pemeliharaan Rutin Jalan Perawas - Buding	34,04 Km	34,04 Km		
			22. Pemeliharaan Rutin Jalan Badau - Dendang; Bantan – Pelulusan	29,31 Km	29,31 Km		
			23. Pemeliharaan Rutin Jalan Dendang - Gantung	45,49 Km	45,49 Km		
			24. Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Renggiang - Gantung; Gantung - Simpang Padang	35,96 Km	35,96 Km		
			25. Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Empat (Sijuk) - Buding (Phnjd)	28,38 Km	28,38 Km		
			26. Pemeliharaan Rutin Jalan Buding - Manggar (Phnjd)	43,85 Km	43,85 Km		
			PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	3119,37 Meter	3119,37 Meter		
			1. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Pulau Bangka	1.775,32 M	1.775,32 M		
			2. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Pulau Bangka	1.344,05 M	1.344,05 M		
			PEMBANGUNAN JALAN (DAK REGULER)	4,7 Km	4,7 Km		
			1. Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Gantung - Simpang Padang	3,8 Km	3,8 Km		
			2. Peningkatan Jalan Sp. Alexander - Sp. Lingkar Timur	0,9 Km	0,9 Km		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	PERSENTASE PENYEDIAAN AIR BAKU 0,10%	PERSENTASE PENYEDIAAN AIR BAKU 0,19%		
				Rasio Jaringan Irigasi 7%	Rasio Jaringan Irigasi 7,02%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air 5,70%	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air 6,06%		
			PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN Pengerukan SUNGAI/KALI BANJIR	4.600 M	19.300 M		
			1. Pengerukan Saluran Lingkungan Pohin Bokor Kecamatan Pemali	900 M	4000 M		
			2. Normalisasi Saluran Banjir Gang Semuntok Desa Mekar Jaya Kec. Manggar	400 M	800 M		
			3. Normalisasi Saluran Banjir Desa Badau Kec. Badau	700 M	3000 M		
			4. Normalisasi Saluran Banjir Desa Membalong Kec. Membalong	900 M	4000 M		
			5. Normalisasi Saluran Banjir Sungai Nyirih Desa Delas Kec. Air Gegas	1100 M	5000 M		
			6. Normalisasi Saluran Banjir Simpang Gedong Kec. Simpang Katis	600 M	2500 M		
			PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	1000 M	853,94 M'		
			1. Pembangunan Talud Saluran Desa Kace Timur	200 M	173,94 M		
			2. Pembangunan Talud Maria Goretti Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat	500 M	400 M		
			3. Pembangunan Talud Pengaman Pantai Pering Kec. Kelapa Kampit	300 M	280 M		
			PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR	4 Kelompok	4 Kelompok		
			PERENCANAAN TURAP / TALUD / BRONJONG	1 Dokumen	1 Dokumen		
			DED Pemecah Ombak Pantai Dusun Basun Desa Sinar Surya	1 Dokumen	1 Dokumen		
			KONSERVASI SUMBER AIR	1 Hektar	2 Hektar		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Konservasi Sumber Air Kecamatan Air Gegas	1 Hektar	2 Hektar		
			PEMBERSIHAN /REHABILITASI/NORMALISASI /SUNGAI/KALI	5.500 M	2.1602 M		
			1. Peningkatan Pembersihan/ Pengerukan Sungai/Kali Kota Pangkalpinang	1800 M	6200 M		
			2. Peningkatan Pembersihan/ Pengerukan Sungai/Kali Kabupaten Bangka	1400 M	4900 M		
			3. Peningkatan Pembersihan/ Pengerukan Sungai/Kali Kabupaten Bangka Tengah	200 M	1500 M		
			4. Peningkatan Pembersihan/ Pengerukan Sungai/Kali Kabupaten Bangka Selatan	700 M	2700 M		
			5. Peningkatan Pembersihan/ Pengerukan Sungai/Kali Kabupaten Bangka Barat	500 M	2400 M		
			6. Peningkatan Pembersihan/ Pengerukan Sungai/Kali Pulau Belitung	900 M	3902 M		
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA	1 DOKUMEN	6 DOKUMEN		
			1. Reviu DED Jaringan Irigasi D.I Buleng	1 Dokumen	1 Dokumen		
			2. Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Tentang Irigasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
			3. Penyusunan UKL/UPL Dir Serdang Pergam	1 Dokumen	1 Dokumen		
			4. Penyusunan Ded Jaringan Irigasi D.I Paya Benua	1 Dokumen	1 Dokumen		
			5. Penyusunan Ded Jaringan Irigasi D.I .R Jelutung II	1 Dokumen	1 Dokumen		
			6. Penyusunan DED Pengendalian Banjir D.I.R Jelutung II	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA REALISASI BIDANG SUMBER DAYA AIR	1 Laporan	3 Laporan		
			1. Penyusunan DED Kolam Retensi dan Long Storage Sungai Muntok	1 Laporan	1 Laporan		
			2. Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Sempadan Sungai	1 Laporan	1 Laporan		
			3. Penyusunan Ded Saluran Banjir Kampung Amau	1 Laporan	1 Laporan		
			REHABILITASI JARINGAN IRIGASI (DAK)	250 Ha	200 Ha		
			1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kimak	75 Ha	50 Ha		
			2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Serdang Pergam	175 Ha	150 Ha		
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	KETAATAN TERHADAP RTRW 40%	KETAATAN TERHADAP RTRW 33,33%		
			1. Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Dokumen	2 Dokumen		
			2. Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	1 Laporan	-	Tidak ditemukan jadwal yang cocok dengan Tim Teknis bagian Pemetaan yang ada BIG	Agar dilakukan penentuan jadwal beberapa bulan sebelumnya dan dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak pemetaan BIG yang mengeluarkan rekomendasi
				30 Peserta	-	Jadwal narasumber yang ada di BIG tidak dapat memenuhi kegiatan Pelatihan GCP terkait penyusunan RRTR	Surat permohonan narasumber disampaikan secara langsung sehingga dapat ditentukan jadwal terkait pelatihan dan ketersediaan narasumber dari BIG

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	1 Laporan		
			4. Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen		
			PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE TENAGA AHLI KONSTRUKSI YANG BERSERTIFIKAT 20%	PERSENTASE TENAGA AHLI KONSTRUKSI YANG BERSERTIFIKAT 20%		
			1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Provinsi	3 layanan	3 layanan		
			2. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	150 Orang	208 Orang		
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN				
			1. Penyusunan Dokumen Kawasan Permukiman	8 Dokumen	1 Dokumen	Pada Tahun 2020 akan direncanakan kegiatan Pembangunan Gedung Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Gedung Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Gedung Yayasan Anak Cacat (YPAC), Masjid MAN IC Bangka Tengah, Gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Masjid IAIN SAS Bangka Belitung, Gedung PMI Kepulauan Bangka Belitung, sehingga perencanaannya dilakukan di tahun anggaran 2019. Namun setelah dilakukan	Pada tahun selanjutnya untuk perencanaan kegiatan harus dilakukan secara matang dari mulai usulan kegiatan sampai dan berpedoman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						pembahasan antara executive dan legislative keputusan akhir bahwa kegiatan pembangunan gedung-gedung tersebut sehingga perencanaan tidak dilaksanakan.	
			2. Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	150 SR	150 SR	-	-
			3. Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	3.781 Meter	3.781 Meter	-	-
			4. Pembangunan / Peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh	1 Unit	1 Unit	-	-
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT				
			1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	76 Unit	76 Unit	-	-
			2. Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	69 Unit	69 Unit	-	-
			3. Sosialisasi Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	79 KK	79 KK	-	-
			4. Rapat Koordinasi Bidang Perumahan	50 Orang	50 Orang	-	-
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	16,23%	23,80%		
			1. Kegiatan Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Apartur;	12 orang	12 orang	-	-
			2. Pembinaan Peningkatkan Personil Bagi Satuan Polisi Pamong Praja;	770 orang	770 orang	-	-
			3. Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;	50 orang	50 orang	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	100%	100%	-	-
			1. Penata Kelolaan Sekretariat PPNS Prov.Kep.Babel	4 kali kegiatan/rapat	3 kali Kegiatan/rapat	Perubahan peraturan yang mengakibatkan terjadinya pergantian PPTK	Memaksimalkan waktu yang ada dalam pelaksanaan kegiatan
			2. Bimtek Pemberkasan PPNS Penegak Perda Se- Prov.Kep.Babel	20 orang PPNS	20 orang PPNS	-	-
			3. Rapat Koordinasi Satpol PP se Provinsi Kep. Babel dengan PPNS di Lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	30 orang	30 orang	-	-
			4. Penindakan Yustisial Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	10 penyelidikan dan 2 penyidikan	10 penyelidikan dan 0 penyidikan	Tidak adanya kasus yang ditingkatkan sampai dengan tingkat penyidikan/ pemberkasan	Meningkatkan koordinasi dengan Korwas PPNS, dan kasus selesai dalam tahap penyelidikan dan pembinaan
			5. Pembinaan dan Penindakan Non Yustisial Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	302 Orang	612 Orang	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	100%	100%		
			1. Patroli	1.080 kali	1.080 kali	-	-
			2. Gelar Pasukan Dalam Rangka Peningkatan Penyelenggaraan Tibumtranmas & Linmas serta Kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran	600 orang	-	-	-
			3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	12 bulan	12 bulan	-	-
			4. Penyelenggaraan Deteksi Dini Pelanggaran Tibumtranmas	6 kali	0 kali	Kebijakan penganggaran yang kurang tepat karena perjalanan dinas diletakan pada kegiatan rutin sekretariat,	Melakukan deteksi dini secara mandiri oleh Satpol PP dan meningkatkan koordinasi internal terutama terkait

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						kemudian pertemuan tim intelegen belum terlalu urgen	dengan realisasi perjalanan dinas
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5,74%	2,25%	-	-
				6,05%	2,81%	-	-
			1. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60 orang Satlinmas	60 orang Satlinmas	-	-
			2. Bimtek Pengamanan Pemilu dan Pemilukada bagi Satlinmas se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80 satlinmas	80 satlinmas	-	-
			3. Pendidikan dan Pelatihan Bencana dan Kebakaran Bagi Satlinmas	100 satlinmas	100 satlinmas	-	-
			4. Pengurangan Resiko Bencana dan Kebakaran	12 kali	12 kali	Tidak terjadinya bencana yang besar, dan kemudian kebijakan penganggaran yang kurang tepat karena perjalanan dinas diletakan pada kegiatan rutin sekretariat	Memanfaatkan sumber daya/ tenaga yang ada dalam rangka membantu pengurangan resiko bencana
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/ kota dengan target 9%	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/ kota realisasi 9%		
			1. Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung.	4 Laporan	4 Laporan	-	-
			2. Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA.	2 Laporan	2 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Penguatan Kewaspadaan dan deteksi Dini serta pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung.	4 Laporan	4 Laporan		
			4. Penyelenggaraan penanganan konflik sosial.	5 peringkat	-	Peringkat baru di rilis pada bulan Maret	
			PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase Kasus terhadap Simbol Negara yang dapat diantisipasi dengan target 0%	Persentase Kasus terhadap Simbol Negara yang dapat diantisipasi realisasi 0%		
				Persentase Kasus Konflik Sara yang Dapat diantisipasi 2%	Persentase Kasus Konflik Sara yang dapat diantisipasi 0%		
			1. Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.	14 sekolah	14 sekolah		
			2. Pembentukan, Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara.	44 Orang	44 Orang		
			3. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi		
			4. Forum dialog penguatan ideologi bangsa (4 Konsensus Kebangsaan) dalam rangka mencegah budaya dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila .	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
			5. Gerakan Revolusi Mental di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	3 Aksi	3 Aksi		
			6. Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	5000 Orang	5000 Orang		
			PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah dengan Target 7 Jumlah	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah dengan Realisasi 7 Jumlah		
				Persentase Rekomendasi	Persentase Rekomendasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengembangan Berdemokrasi yang ditindaklanjuti dengan Target 50%	Pengembangan Berdemokrasi yang ditindaklanjuti Realisasi 50%		
			1. Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada.	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
			2. Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah.	4 Laporan	4 Laporan		
			3. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik.	280 Orang	280 Orang		
			4. Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi		
			5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik.	100 Orang	70 Orang		
			6. Peningkatan Kualitas Peran dan Fungsi Parpol dalam rangka Penguatan Leadership dan kaderisasi.	15 Parpol	11 Parpol	Setelah Pemilihan anggota legislatif pada Tahun 2019 hanya 11 parpol yang menduduki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			7. Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP).	10 Dokumen	10 Dokumen		
			8. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik.	11 Parpol	11 Parpol		
			9. Sosialisasi Undang-Undang Mengenai Politik.	500 Orang	492 Orang		
			PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN.	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan Target 35%	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan Reallisasi 35%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Jumlah Sanggar/ Paguyuban Yang Melestarikan Seni Dan Budaya Target 40%	Persentase Jumlah Sanggar/ Paguyuban Yang Melestarikan Seni Dan Budaya Realisasi 40%		
				Pertumbuhan Masyarakat Yang Sadar Bahaya Napza Target 500 Orang	Pertumbuhan Masyarakat Yang Sadar Bahaya Napza Realisasi 50 Orang		
			1. Evaluasi dan Verifikasi Data Ormas.	12 Ormas	29 Ormas		
			2. Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama.	3 Rekomendasi	7 Rekomendasi		
			3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas.	80 Orang	78 Orang		
			4. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika.	150 Orang	150 Orang		
			5. Evaluasi Data dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako di Daerah.	4 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Laporan yang semula dibuat per triwulan, setelah APBDP Dokumen Laporan di buat per semester	
6	SOSIAL	DINAS SOSIAL	6. Workshop Optimalisasi peran Aparatur, Ormas dan Masyarakat dalam Menjaga Seni dan Budaya.	90 Orang	45 Orang		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	485 PMKS / PSKS	485 PMKS / PSKS		
			1. Pemberdayaan Keluarga	75 Orang	75 Orang		
			2. Penyuluhan Sosial	275 Orang	275 Orang		
			3. Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	30 Lembaga	30 Lembaga		
			4. Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	100 Orang	100 Orang		
				1 TMP	1 TMP		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			5. Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Keluarga Pionir	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	102 PMKS / PSKS	102 PMKS / PSKS		
			1. Pelayanan Psikososial bagi PMKS dipanti Sosial Bina Serumpun	50 Orang	50 Orang		
			2. Peningkatan kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS	10 Paket	10 Paket		
			3. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Warga Binaan Sosial di PSBS	20 Orang	20 Orang		
			4. Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial	20 Orang	20 Orang		
			5. Rehabilitasi Ringan Sarana Prasarana Panti	1 Tahun	1 Tahun		
			6. Pembangunan Prasarana Panti	1 Paket	1 Paket		
			PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	71 PMKS / SKS	64 PMKS / PSKS		
			1. Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien	10 Orang	10 Orang		
			2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti	20 Orang	18 Orang	Jumlah Penerima Manfaat belum mencapai kuota maksimal dan SPJ menggunakan metode perhitungan Real Cost.	
			3. Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	20 Orang	15 Orang	Jumlah Penerima Manfaat belum mencapai kuota maksimal dan SPJ menggunakan metode perhitungan Real Cost.	
			4. Penyediaan Bantuan UEP bagi eks Penghuni Panti	4 Orang	4 Orang		
			5. Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti	1 Tahun	1 Tahun		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti	16 Orang	16 Orang		
			7. Pembangunan Prasarana Panti	- Paket		Rasionalisasi	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.574 PMKS/ PSKS	1.549 PMKS/ PSKS		
			1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	358 Orang	358 Orang		
				3 Orang Kader	3 Orang Kader		
				10 Pendamping	10 Pendamping		
			2. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	270 Anak	355 Anak		
			3. Pembinaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	200 Orang	200 Orang		
			4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	100 Orang	100 Orang		
			5. Pembinaan Sosial Tuna Sosial	140 Orang	351 Orang		
			6. Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA	5 Orang	9 Orang		
			7. Pendampingan dan Advokasi Sosial Klien bagi Anak Berhadapan dengan Hukum	10 Orang	10 Orang		
			8. Optimalisasi Kinerja Komda Lansia	8 Komda	3 Komda	SK komda lansia di tingkat kab/kota belum terpenuhi seluruhnya, hanya ad 2 kab yg membentuk SK komda lansia, dikarenakan kurang responsif terhadap komda lansia dan koordinasi yg kurang intensif	
				470 Lansia	150 Lansia		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	46.545 PMKS / PSKS	46.762 PMKS / PSKS		
			1. Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	Adanya 2 orang petugas posko dan bencana yang mengundurkan diri	
				KK	10 KK		
				16 Orang	14 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		
				9 KK	9 KK		
				15 Orang	15 Orang		
			3. Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	1.445 Orang	1.700 Orang		
				55 Orang	Orang	Sub Kegiatan Bantuan Santunan Kematian tidak terealisasi karena : a. Rasionalisasi b. Belum adanya Peraturan yang mengatur tentang Santunan Kematian kepada keluarga miskin	
			4. Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH	45.000 Orang	45.000 Orang		
			PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	43.898 PMKS / PSKS	43.898 PMKS / PSKS		
			1. Stimulan Penguatan Ekonomi Keluarga Fakir Miskin di Wilayah Pedesaan	210 Kube	210 Kube		
			2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Bantuan Rastra BPNT Kepada Keluarga Miskin	43.458 KK	43.458 KK	Realisasi target kinerja tercapai 100 % dengan menggunakan alokasi anggaran APBN. Kemudian untuk sub kegiatan monitoring dan evaluasi didalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Bantuan Rastra BPNT Kepada Keluarga Miskin itu dialokasikan pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa untuk Belanja Perjalanan Dinas diseluruh kegiatan pada seluruh OPD disatupintukan di Kegiatan Pelayanan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Administrasi Perkantoran, sehingga untuk sub Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Bantuan Rastra BPNT Kepada Keluarga Miskin sudah terealisasi 100 % dalam upaya mendukung kinerja Output kegiatan sebanyak 43.458 KK.	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	74%	74%		
			1. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100 Orang	100 Orang		
			2. Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	100 Orang	100 Orang		
			3. Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah Aparatur Desa/Kelurahan dan Masyarakat	100 Orang	100 Orang		
			4. Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	10 Media	10 Media		
			5. Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
			6. Kajian Daerah Rawan Bencana di 7 Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
			PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	75 %	75 %		
			1. Bimbingan Teknis Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat	40 Orang	40 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pasca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi				
			2. Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana	40 Orang	40 Orang		
			3. Pemeliharaan Jembatan Portable	1 Unit	1 Unit		
			4. Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable	1 Unit	1 Unit		
			5. Monitoring dan Evaluasi Pascabencana ke Kabupaten/Kota	1 Laporan	- Laporan	Minimnya anggaran kegiatan	Merencanakan kegiatan tahun berikutnya
			6. Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Aparatur Provinsi, Kab/Kota	40 Orang	40 Orang		
			PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	80 %	80 %		
			1. Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	12 Bulan		
			2. Pengerahan dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		
			3. Pengadaan/Penyediaan Logistik Untuk Penanggulangan Bencana	3 Item Barang	3 Item Barang		
			4. Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana	10 Item Peralatan	10 Item Peralatan		
			5. Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	10 Jenis Peralatan PB	10 Jenis Peralatan PB		
			6. Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	4 Item Barang	4 Item Barang		
			7. Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50 Orang	50 rang		

III.1.2. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

Program dan kegiatan urusan tenaga kerja dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 11.171.497.174,00 dan realisasi Rp 9.894.506.381,00 setara dengan 88,57%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan tenaga kerja sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp 5.051.674.250,00 dan realisasi Rp 4.313.915.114,00 setara dengan 85,40%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

3. Urusan Pangan

Program dan kegiatan urusan pangan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.661.191.500,00 dan realisasi Rp 5.773.930.472,00 setara dengan 86,68%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan pangan sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

4. Urusan Pertanahan

Program dan kegiatan urusan pertanahan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 1.881.797.725,00 dan realisasi sebesar Rp 1.675.792.804,00 atau sekitar 89,05%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan pertanahan terlampir pada tabel III.2.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp 9.798.836.500,00 dan realisasi Rp 8.428.403.477,00 setara dengan 86,01%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan lingkungan hidup sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 1.914.966.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.671.535.113,00 atau sekitar 87,29%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar sebesar Rp 7.212.369.063,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.617.919.796,00 atau sekitar 91,76%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 997.365.818,00 dan realisasi Rp 897.233.788,00 setara dengan 89,96%. Indikator kinerja program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

9. Urusan Perhubungan

Program dan kegiatan urusan perhubungan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp 21.010.717.243,00 dan realisasi Rp 19.033.156.978,26,00 setara dengan 90,59%. Indikator kinerja program dan kegiatan urusan perhubungan sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp 15.989.428.430,00 dan realisasi Rp 14.319.229.125,00 setara dengan 89,55%. Indikator kinerja program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan kegiatan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 adalah sebesar Rp 17.290.282.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.068.262.700,00 atau sekitar 92,93%. Indikator kinerja program dan kegiatan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

12. Urusan Penanaman Modal

Program dan kegiatan urusan penanaman modal dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar sebesar Rp 9.910.377.950,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.217.915.201,00 atau sekitar 93,01%. Indikator kinerja program dan kegiatan urusan penanaman modal sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 14.911.527.263,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.329.891.709,89,00 atau sekitar 82,69%. Indikator kinerja program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

14. Urusan Statistik

Program dan kegiatan urusan statistik dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 1.431.917.785,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.057.824.416,00 atau sekitar 73,87%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan statistik sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

15. Urusan Persandian

Program dan kegiatan urusan persandian dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 12.633.785,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000,00 atau sekitar 7,92%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan persandian sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

16. Urusan Kebudayaan

Program dan kegiatan urusan kebudayaan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 15.528.212.875,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.456.792.631,00 atau sekitar 73,78%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan kebudayaan sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

17. Urusan Perpustakaan

Program dan kegiatan urusan perpustakaan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 4.218.603.698,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.779.733.666,19 atau sekitar 89,60%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan perpustakaan sebagaimana terlampir pada tabel III.2

18. Urusan Kearsipan

Program dan kegiatan urusan kearsipan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar sebesar Rp 333.191.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 223.664.138,00 atau sekitar 67,13%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan kearsipan sebagaimana terlampir pada tabel III.2.

TABEL III.2
Capaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Non Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN TENAGA KERJA, PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN JAMINAN SOSIAL				
			1. Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3 Perusahaan	3 Perusahaan		
			2. Perlindungan Tenaga Kerja	100 Perusahaan	100 Perusahaan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Bimtek Penerapan Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja	15 Orang	15 Orang		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA				
			Pengujian Lingkungan Kerja	7 Perusahaan/ UMKM	7 Perusahaan/ UMKM	Waktu yang dibutuhkan untuk mengkalibrasi alat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan (habis masa anggaran)	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI				
			1. Pelatihan Pariwisata dan Otomotif Bagi Lulusan SMK	640 Orang	640 Orang		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pelayanan dan Peningkatan produktivitas	50 Orang yang dilaksanakan di : Kecamatan Kelapa Kab.Bangka Barat , sebanyak 25 orang. Kecamatan Air Bara, Kab. Bangka Selatan sebanyak 25 orang.	50 Orang yang dilaksanakan di : Kecamatan Kelapa Kab.Bangka Barat , sebanyak 25 orang. Kecamatan Air Bara, Kab. Bangka Selatan sebanyak 25 orang.		
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan Perempuan dilembaga Publik sebesar 10,2%	11,6%		
				Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat dan Berbasis Gender sebesar 14,7%	15,36%		
				Persentase Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang diberdayakan sebesar 9,47%	10,66%		
				Persentase Perempuan yang Tidak Bekerja sebesar 7,75%	15,365%		
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Dalam APBD sebesar 3,55%	3,61%		
			1. Pembinaan Organisasi Perempuan	12 Bulan	12 Bulan	1. Belum semua OPD Provinsi kabupaten/Kota memahami tentang penyusunan anggaran yang responsif gender (PPRG) melalui analisis GAB dan GBS	1. Memberikan advokasi dan penguatan kapasitas PUG dan PPRG kepada OPD 2. Memberikan advokasi, bimbingan dan penguatan kepada
			2. Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	500 Orang	500 Orang		
			3. Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	315 Orang	315 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan Perempuan di Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	2. Masih 5 Kabupaten/kota lagi yang belum meraih APE dan 2 Kabupaten serta Provinsi perlu meningkatkan kategori penghargaan 3. Belum terpenuhinya keterwakilan perempuan di legislatif	kabupaten/kota dalam meraih APE 3. Memberikan advokasi tentang pentingnya keterwakilan perempuan
			5. Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	40 Orang	40 Orang		
			6. Pemetaan Industri Rumahan di Kab/Kota	40 Orang	40 Orang		
			7. Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif	40 Orang	30 Orang		
			8. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender	50 Orang	48 Orang		
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi sebesar 17,82%	17,82%		
				Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 10.000 Anak Usia 0-18 Tahun Tingkat Daerah Provinsi sebesar 2,41%	2,41%		
				Persentase Kab/Kota Layak Anak Sebesar 71,43%	71,43%		
			1. Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Forum Anak)	70 Orang	70 Orang	1. Masih banyak Organisasi Perangkat Daerah yang belum bersinergisitas dalam melaksanakan	1. Agar melaksanakan Advokasi dan pendampingan serta KIE
			2. TOT Bagi Aktifis PATBM Tk. Kab/Kota	140 Orang	140 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Kep. Babel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Pemenuhan Hak Anak dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak Untuk menunjang terbentuknya Provinsi Layak Anak (PROVILA) 2. Belum terbentuknya UPTD di kab/Kota, sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap pr dan anak yg memerlukan perlindungan khusus belum optimal	kabupaten/Kota Layak Anak ke seluruh Kabupaten/kota. 2. Agar segera dibentuk UPTD di Kab/Kota, agar penanganan kasus terhdpr dan anak yg memerlukan perlindungan khusus dapat lebih fokus
			4. Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	1 Kegiatan	1 Kegiatan (80 Orang)		
			5. Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		
			6. Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	800 Orang	800 Orang		
			7. Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	60 Orang	60 Orang		
			8. Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		
3	PANGAN	DINAS PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	81 Skor PPH Konsumsi	81 Skor PPH Konsumsi		
			1. Promosi Konsumsi Dan Keamanan Pangan Termasuk Gerakan Makan Sayur, Buah, Kacang-Kacangan Dan Ayam Merawang (Gema Sabuk Amang)	3 Kali	3 Kali		
			2. Pengembangan Produk Pangan Lokal Hasil Pertanian (One Village One Product)	30 Kelompok	30 Kelompok		
			3. Gelar Pangan Daerah Dan Lomba Cipta Menu Pangan B2sa Provinsi Dan Nasional	2 Event	2 Event		
			4. Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pada Kelompok Masyarakat	42 Kelompok	42 Kelompok		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			5. Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	7 Kali	7 Kali		
			6. Penguatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	7 Jenis	7 Jenis		
			7. Identifikasi Dan Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			8. Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (Krpl) Tingkat Provinsi	1 Event	1 Event		
			9. Penguatan Kerjasama Dalam Investigasi Pengawasan Penyelenggaraan Keamanan Pangan Daerah (Tim Jejaring Keamanan Pangan)	1 Kali	1 Kali		
			10. Pemberdayaan Lahan Pekarangan Masyarakat Melalui Program Kampung/Desa Krpl	7 Kelompok	7 Kelompok		
			11. Penilaian Pelaku Usaha Dalam Memperoleh Sertifikat Produk Pertanian (Prima 3, Prima 2 Dan Nomor Registrasi Psat)	50 Komoditi	50 Komoditi		
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	81.90 Skor PPH Ketersediaan	81.90 Skor PPH Ketersediaan		
			1. Promosi Konsumsi Dan Keamanan Pangan Termasuk Gerakan Makan Sayur, Buah, Kacang-Kacangan Dan Ayam Merawang (Gema Sabuk Amang)	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
			2. Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 Hari Kehidupan	360 Orang	360 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Penyusunan Dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			4. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen		
			5. Pemantauan Dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		
			6. Penyusunan Data Daerah Rawan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			7. Koordinasi Peningkatan Produktivitas Komoditi Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			8. Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	1 Kali	1 Kali		
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILISASI DAN CADANGAN PANGAN	CV Beras 5%, CV Cabai 25%, CV Daging 10% dan Cadangan Pangan Pemerintah 2.60%	CV Beras 5%, CV Cabai 25%, CV Daging 10% dan Cadangan Pangan Pemerintah 2.60%		
			1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (Pupm)	5 Gapoktan	5 Gapoktan		
			2. Pengendalian Distribusi Pangan	4 Pengawasan	4 Pengawasan		
			3. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			4. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	2 Kali	2 Kali		
			5. Database Harga Dan Stok Pangan Di Tingkat Distributor	7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota		
			6. Pengembangan Cadangan Pangan	50 Ton	50 Ton		
			7. Penindakan Hukum Terhadap Penyimpangan Pangan	1 Kasus	1 Kasus		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			8. Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah Dan Beras	1 angkatan	1 angkatan		
4	PERTANAHAN	BIRO PEMERINTAHAN	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
			1. Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.	30 Bidang	102 Bidang	Realisasi melebihi target dikarenakan pada Dokumen Anggaran Perubahan target yang telah ditetapkan sebanyak 90 bidang tidak bertambah	Meningkatkan lagi koordinasi dengan tim anggaran
			2. Pembinaan Penanganan Masalah Konflik Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1 Dokumen	-	-	
5	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP				
			1. Penyusunan Dokumen KLHS (KLHS Rivi RPJMD)	1 Dokumen	1 Dokumen		
			2. Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup	1 Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLH)	1 Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLH)		
				1 Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
			3. Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	8 Usaha/Kegiatan	25 Usaha/Kegiatan		
			4. Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			5. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota	7 Rekomendasi	1 Rekomendasi	<p>1. Dari 7 Rekomendasi yang ditargetkan, terdapat 1 Rekomendasi yang dikeluarkan terkait Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan selain hanya terdapat satu KLHS RPJMD Perubahan Belitung Timur yang mengajukan permohonan validasi, KLHS yang disusun oleh Kabupaten/Kota yang telah melakukan asistensi pra validasi masih melakukan perbaikan sesuai berita acara dan belum memasukkan permohonan untuk di validasi oleh Provinsi</p> <p>2. Masih kurangnya kompetensi dan pemahaman Kabupaten/Kota dalam penyusunan KLHS berdasarkan PP No.46 Tahun 2016 beserta pengkajian Kebijakan Rencana dan/ atau Program, rata-rata KLHS yang disusun untuk RTRW dan</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat leaflet pada tahun anggaran 2019 yang dapat digunakan sebagai panduan penyusunan dan proses validasi sehingga diharapkan, paling tidak tahapan penyusunan KLHS telah dilaksanakan oleh penyusun KLHS Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Membuat surat percepatan proses validasi untuk pencapaian target realisasi kegiatan dengan surat Nomor 660/1481/DLH Tanggal 15 November 2019 perihal pemberitahuan segera melaksanakan validasi dokumen KLHS Kabupaten/Kota Tahun 2019.</p> <p>3. Mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan Kapasitas melalui</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						turunannya hanya mengkaji pola ruang namun struktur ruang belum dikaji 3. Belum terlihat jelas pengkajian dan analisis muatan KLHS yang disusun termasuk analisis muatan dan proses penyusunan rekomendasi serta proses integrasi KLHS yang disusun.	Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS oleh PSLH Universitas. 4. Melaksanakan fungsi pembinaan dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan KLHS.
			6. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Strategis Provinsi KIPT Tanjung Ular	1 Dokumen	1 Dokumen		
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP				
			1. Pengendalian Beban Pencemaran Air	1 Dokumen	1 Dokumen		
			2. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	70 Usaha/Kegiatan	85 Usaha/Kegiatan		
			3. Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21 Titik Pantau	21 Titik Pantau		
			4. Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45 Titik Pantau	81 Titik Pantau		
			5. Penerimaan, Penelaahan dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat	14 Kasus	17 Kasus		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Penguatan Upaya Peningkatan Kualitas Air Sungai Berbasis Kinerja Tim Pokja	1 Dokumen	1 Dokumen		
			PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS				
			1. Inventarisasi Emisi gas Rumah Kaca	1 Dokumen	1 Dokumen		
			2. Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35 Kader/Kelompok	35 Kader/Kelompok		
			3. Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	14 Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi	13 Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi	Hanya ada 13 sekolah yang diusulkan Kab/Kota yang memenuhi syarat untuk menjadi sekolah adiwiyata tingkat Provinsi	Meningkatkan Pembinaan Adiwiyata pada tahun berikutnya
				3 Penghargaan Kalpataru	3 Usulan	Penerima penghargaan Kalpataru ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi hanya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan calon penerima penghargaan Kalpataru	Meningkatkan Pembinaan Kalpataru pada tahun berikutnya
				3 Kampung Iklim	3 Usulan	Penerima penghargaan kampung iklim ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi hanya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan	Meningkatkan pembinaan kampung iklim pada tahun berikutnya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						calon penerima penghargaan Kalpataru	
				4 Kabupaten/Kota Penerima Adipura	4 Kabupaten/Kota usulan	Hasil Penilaian adipura tahun 2019 belum dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
			4. Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung	1 Dokumen kajian pra study kelayakan lokasi TPA regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Bangka dan Pulau Belitung.	1 Dokumen kajian pra study kelayakan lokasi TPA regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pulau di Bangka dan Pulau Belitung	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				
			1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	1.225 Sampel	2.233 Sampel		
			2. Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	32 Parameter	34 Parameter		
			3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	2 Paket	2 Paket		
			4. Peningkatan Kapasitas SDM UPT Laboratorium	40 Orang	32 Orang	a. Adanya mutasi pegawai di UPT Laboratorium DLH Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebanyak 5 pegawai dan 1 orang pegawai laboratorium yang mengikuti tugas belajar b. Jumlah pegawai pengendali dampak lingkungan ada 5 pegawai, namun hanya 3 orang yang	Melibatkan laboratorium kabupaten/Kota untuk mengikuti Bimtek

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	1 Paket	1 Paket	dapat mengikuti kegiatan Bimtek.	
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Penyediaan Database Kependudukan Tk. Provinsi yang Akurat sebesar 100%	100%		
				Persentase Pemanfaatan NIK Data Base Kependudukan dan KTP_EI Oleh OPD Provinsi sebesar 15,62%	21,88%		
				Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran sebesar 85%	92,12%		
				Persentase Masyarakat yang Mempunyai KTP sebesar 92%	103,21%		
				Persentase Masyarakat yang Memiliki Akte Kematian sebesar 67%	78,18%		
			1. Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	1 Laporan	Belum optimalnya OPD Provinsi dalam pemanfaatan data kependudukan baik secara kuantitas maupun kualitas	Melakukan percepatan penandatanganan PKS bagi OPD Provinsi dan ditindaklanjuti dengan pembuatan juknis dalam pemanfaatan data kependudukan.
			2. Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk.	70 Orang	70 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
			3. Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)	5 Kali Pertemuan	5 Kali Pertemuan		
			4. Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL di Kab/Kota (DAK)	4 Kali Rapat	4 Kali Rapat		
			5. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	40 Buku Profil dan 70 Buku Agregat	40 Buku Profil dan 70 Buku Agregat		
			6. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1 Paket	1 Paket		
			7. Pengembangan Bank Data Kependudukan	1 Aplikasi	1 Aplikasi		
			8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota	7 Paket	7 Paket		
			9. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	50 Orang	50 Orang		
			10. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)	7 Kali	7 Kali		
			11. Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk	500 Orang	500 Orang		
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA	Persentase Kawasan Perdesaan yang diintervensi 0,86 %	0,86 %		
			1. Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	61 Desa	61 Desa		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	75 Orang	75 Orang		
			3. Kegiatan Penataan Kewenangan Desa	12 Desa/Kel	12 Desa/Kel		
			4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa Melalui Sikeudes	34 Aparatur Desa, Kabupaten dan Provinsi	34 Aparatur Desa, Kabupaten dan Provinsi		
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Sarpras Penunjang Peningkatan Pemdes 12,32 %, Persentase PKK aktif 3,07%, Persentase Posyandu aktif 9,33%	Persentase Sarpras Penunjang peningkatan Pemdes 12,32 %, Persentase PKK aktif 3,07%, Persentase Posyandu aktif 9,33%		
			1. Kegiatan Pendampingan Kelembagaan Desa	50 Pokjanal Posyandu	50 Pokjanal Posyandu		
			2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12 Kelompok PKK	12 Kelompok PKK		
			3. Kegiatan Capacity Building usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa	9 Unit	9 Unit		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase KPM yang aktif 3,24%, Persentase Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan 14,48%, Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian 8,51%	3,24% 14,48% 8,51%		
			1. Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	30 Peserta	30 Peserta		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	60 Pengurus BUMDesa	60 Pengurus BUMDesa		
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase Kawasan Perdesaan yang diintervensi 0,65 %	0,65 %		
			Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kali (6 Kabupaten)	1 Kali (6 Kabupaten)		
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Persentase Gran Design Kependudukan sebesar 12,5%	57,14%		
				Prevalensi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera I sebesar 10,08%	6,32%		
				Unmeet Need sebesar 7,48%	8,3%		
				Persentase Desa/Kampung yang menjadi Kampung KB sebesar 44,5%	76,62%		
			1. Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga)	3 Pemenang	3 Pemenang	Terjadinya Peningkatan angka putus kebesertaan KB (DO) yang menyebabkan Unmeet Need meningkat.	Melakukan advokasi dan KIE kebesertaan KB lebih intensif lagi kepada OPD terkait di Kabupaten/Kota dan lintas sektoral serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi PLKB di Kab/Kota agar dapat berfungsi Optimal dalam mengadvokasi PUS di Kab/Kota
			2. Advokasi dan KIE Program KKBPK	70 Orang	70 Orang		
			3. Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	45 Orang	45 Orang		
			4. Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	3 Pemenang	3 Pemenang		
			5. Pemutakhiran Grand Design Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			6. Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya	60 Orang	60 Orang		
9	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT				
			1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Propinsi	20 %	20 %	-	-
			2. Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	4 Dokumen	-	Jarak Tempuh ke Lokasi Andalalin Jauh, Terkendala Biaya Transportasi	Biaya Perjalanan di Kembalikan ke Kegiatan masing-masing
			3. Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	75 %	75 %		
			4. Pengadaan dan Pemasangan LPJU	83 unit	-	Rencana di anggarkan menggunakan Skema KPBU, tetapi tidak dapat di laksanakan, sehingga Pengadaan dan Pemasangan LPJU tidak terlaksana karena tidak ada anggaran.	-
			5. Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu LiIntas	3 Dokumen	-	Jarak Tempuh ke Lokasi MRLL Jauh, Terkendala Biaya Transportasi	Biaya Perjalanan di Kembalikan ke Kegiatan masing-masing
			6. Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Propinsi	4 Kab./Kota	-	Tidak terlaksana karena JUKLAK dan JUKNISnya tidak ada dari Kementerian Perhubungan	-
			7. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan	14 orang	14 orang	-	-
			8. Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30 peserta	30 peserta	-	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			1. DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Tersedianya Dokumen DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 2 Dokumen	2 Dokumen	Cuaca dan musim yang kurang mendukung, jarak ke pelabuhan penyeberangan yang cukup jauh, dan tidak adanya lampu penerangan jalan selama perjalanan darat di malam hari setelah penyeberangan.	Melengkapi masing-masing alat yang dibutuhkan selama penyeberangan.
			2. Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan / Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung Serta Pulau – Pulau Kecil	Tersedianya Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Penyeberangan (Trans Tiga Babel) 1 Dokumen	1 Dokumen	Jarak titik simpul terjauh dan akses jalan sebagian belum ada, dan sebagian lahan masih milik warga	Akan dilakukan diskusi lebih lanjut tentang pembebasan lahan.
			3. DED dan SID Pembangunan Pelabuhan / Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung Serta Pulau – Pulau Kecil	Tersedianya Dokumen SID dan DED Pelabuhan/ Dermaga Pulau Gresik, Pulau Seliu, Pulau Mendanau 3 Dokumen	3 Dokumen	Jarak antara pelabuhan cukup Jauh	Pengangkutan alat-alat masing Pelabuhan
			4. Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Terpeliharanya Alat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Sebanyak 1 Paket	1 Paket	Pelaksanaan pekerjaan terkendala oleh faktor cuaca dan musim yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan terhambat dikarenakan lokasi SBNP yang berlokasi di laut, sehingga pelaksanaan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air.	Jadwal pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan musim dan penjadwalan dan metode kerja menyesuaikan dengan kondisi faktor pasang surut air laut sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai target.
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPERASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			1. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan	3 Hari Besar keagamaan	3 Hari Besar keagamaan (14 hari posko lebaran 10 hari Nataru)	Keberadaan dan fungsi posko belum dirasakan	Penambahan anggaran, penambahan fasilitas dan penempatan lokasi yang tepat
			2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	600 unit Kendaraan	600 unit kendaraan diperiksa	Ketiadaan kendaraan jenis Hilux Single Cabin atau sejenis engkel guna membawa peralatan timbangan	Pengadaan kendaraan pengangkut peralatan pendukung pengendalian di jalan raya
			3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir	100 %	100%		
			4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir	1 paket	-	Rasionalisasi pagu pada APBD-P, kegiatan diganti menjadi konsultasi perencanaan desain interior	
			5. Pengadaan dan Pemasangan X-Ray	1 set	1 set		
			6. Pemeliharaan dan Pengoperasian Gedung VIP Bandara Depati Amir	3 bulan	1 bulan		
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rasio Intensitas Informasi Berkaitan dengan Pemasaran Pariwisata Periode Satu Tahun sebanyak 5 Jenis	5 Jenis		
				Persentase Jumlah Sektor yang ada dengan yang dipublikasikan sebanyak 13 Jenis	13 Jenis / 100%		
			1. Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	1 saluran yang dikelola dan 9 saluran yang di fasilitasi	4 saluran		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.358 berita/informasi dari berbagai media, dan 1 kali pameran	554 berita		
			3. Pengelolaan Kemitraan	50 Kemitraan, 4 kali pertemuan, 2 kali rakornas, 2 kali pameran, dan 1 kali kegiatan tuan rumah SAIK Nasional	20 mitra, 2 pertemuan, 1 kali kegiatan tuan rumah SAIK		
			4. Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	200 orang			
			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase Kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi sebanyak 5 Jaringan	5 Jaringan / 90%		
				Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT/ Ada	Ada/90 %		
			1. Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	2 Paket internet, 1 paket co-location, 1 paket data center	Pembayaran paket internet 12 bulan, pembayaran paket colocation 12 bulan, 5 lisensi firewall DC,		
			2. Layanan Publik dan Pemerintah berbasis e-Government	1 aplikasi mobile, 5 lisensi aplikasi	Monitoring jaringan internet, 2 aplikasi mobile, lisensi aplikasi, aplikasi integrasi, aplikasi pendidikan		
			3. Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	20 radio access point, 10 radio point to point, 20 manage switch, 20 SPF module	Pemasangan 4 radio access, Pembangunan tower mini, maintenance 2 manage switch, terlaksananya pemeliharaan jaringan komunikasi data.	Untuk belanja modal tidak terlaksana dikarenakan gagal lelang	Jadwal penentuan proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa (lelang) sebaiknya rencanakan pada triwulan pertama sehingga apabila kegiatan dalam proses penyedia gagal masih bisa diulang kembali

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							sesuai dengan yang ditentukan
			4. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	0 insiden	0 insiden (Tidak ada serangan yang masuk ke sistem)		
			5. Perumusan kebijakan teknis dan SDM Keamanan Informasi	1 kebijakan, 3 SDM keamanan informasi, 40 peserta yang tersosialisasi perihal informasi security awareness	7 SDM keamanan informasi, 1 kali sosialisasi keamanan informasi (peserta seluruh OPD)		
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Birokrasi sebanyak 6 Kabupaten	6 Kabupaten		
			Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	20 layanan, 1 kali festival tik	20 layanan, 1 kali festival tik	1. Kondisi kendaraan Operasional M-CAP abtuan dari Kementrian Kominfo tahun 2009 yang sudah krops dan sering mengalami masalah/rusak (mogok, kelistrikan/, lampu sering mati dan kecepatan berkurang) 2. Koneksi internet yang kurang baik (dekat blankspot / sinyal jelek)	1. Rutin melakukan servis kendaraan sehingga disiapkan anggarannya, atau dibutuhkan kendaraan operasional baru (Kemenkominfo tidak ada bantuan mobil lagi) 2. Survei lokasi untuk menentukan titik koneksi yang bagus dalam mendukung operasional M-CAP.
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	- Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif sebanyak 15,50%	- Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif sebanyak 15,50%		
				- Persentase Pertumbuhan Kelembagaan	- Persentase Pertumbuhan Kelembagaan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koperasi sebanyak 12,70%	Koperasi sebanyak 12,70%		
				- Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas sebanyak 6,60%	- Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas sebanyak 6,60%		
			1. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	1. 80 Koperasi yang meningkatnya pemahaman nilai-nilai dan prinsip perkoperasian 2. 1.500 orang Peserta Rakornas Penguatan Kelembagaan Koperasi. 3. 14 Koperasi pembuatan akta notaris. 4. 120 Peserta Sosialisasi kepada Kelompok Strategis. 5. 40 Peserta yang meningkatnya kualitas dan kuantitas Rapat Anggota Tahunan (RAT)	1. 40 Koperasi yang meningkatnya pemahaman nilai-nilai dan prinsip perkoperasian 2. 1.500 orang Peserta Rakornas Penguatan Kelembagaan Koperasi. 3. 10 Koperasi pembuatan akta notaris. 4. 120 Peserta Sosialisasi kepada Kelompok Strategis. 5. 40 Peserta yang meningkatnya kualitas dan kuantitas Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Kesulitan mencari peserta	Pendataan Peserta lebih awal
			2. Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	1. 35 ART dan Persus Peserta Rapat Koordinasi Evaluasi terhadap Kegiatan Penerapan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus (Persus) Tahun 2018. 2. 35 ART dan Persus Peserta yang	1. 20 ART dan Persus Peserta Rapat Koordinasi Evaluasi terhadap Kegiatan Penerapan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus (Persus) Tahun 2018.	Karena kesibukan masing – masing anggota sehingga sulit untuk mengumpulkan anggota Koperasi melakukan rapat anggota, ART, Persus dan Buku wajib Koperasi	Menyusun jadwal rapat yang disepakati bersama anggota untuk mengoptimalkan Rapat anggota setiap tahun .

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				<p>mengikuti Kegiatan Penerapan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus (Persus).</p> <p>3. 35 Koperasi mengikuti Kegiatan Penerapan Buku Wajib Koperasi bagi Koperasi.</p>	<p>2. 20 ART dan Persus Peserta yang mengikuti Kegiatan Penerapan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus (Persus).</p> <p>3. 25 Koperasi Kegiatan Penerapan Buku Wajib Koperasi bagi Koperasi.</p>		
			3. Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	<p>1. 3 Koperasi Berprestasi tingkat Provinsi.</p> <p>2. 2 Tokoh Penggerak Koperasi tingkat Provinsi.</p> <p>3. 30 Peserta yang mengikuti Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi.</p> <p>4. 60 Koperasi yang dinilai Kesehatan Koperasinya.</p> <p>5. 30 Pengawasan terhadap Koperasi di 3 Kabupaten</p>	<p>1. 3 Koperasi Berprestasi tingkat Provinsi.</p> <p>2. 2 Tokoh Penggerak Koperasi tingkat Provinsi.</p> <p>3. 30 Peserta yang mengikuti Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi.</p> <p>4. 38 Koperasi yang dinilai Kesehatan Koperasinya.</p> <p>5. 30 Pengawasan terhadap Koperasi di 3 Kabupaten</p>	Efisiensi Anggaran Dilaksanakan dengan dana APBN	Tahun 2020 dianggarkan lagi
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	- Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi sebanyak 11%	- Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi sebanyak 11%		
				- Persentase Peningkatan Investasi Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan sebanyak 4%	- Persentase Peningkatan Investasi Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan sebanyak 4%		
				- Persentase Peningkatan Investasi Koperasi	- Persentase Peningkatan Investasi Koperasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sektor Pariwisata sebanyak 7%	Sektor Pariwisata sebanyak 7%		
			1. Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	1. 7 MoU Koperasi yang melakukan kerjasama/ kemitraan 2. 0 Koperasi Pengembangan usaha koperasi produktif 3. 5 Koperasi Pengembangan Jaringan pemasaran produk. 4. 35 Koperasi yang difasilitasi Pendampingan akses pembiayaan koperasi	1. 7 MoU Koperasi yang melakukan kerjasama/kemitraan 2. 0 Koperasi Pengembangan usaha koperasi produktif 3. 5 Koperasi Pengembangan Jaringan pemasaran produk. 4. 30 Koperasi yang difasilitasi pendampingan akses pembiayaan koperasi	Realisasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan	
			2. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	1. 60 Pengurus/ Pengawas Koperasi yang mengikuti Bimtek SPI 2. 35 Pengurus Koperasi yang mengikuti Bimtek Koperasi Komoditi perikanan. 3. 35 Pengurus Koperasi yang mengikuti Bimtek Komoditi Unggulan	1. 56 Pengurus/ Pengawas Koperasi yang mengikuti Bimtek SPI 2. 31 Pengurus Koperasi yang mengikuti Bimtek Koperasi Komoditi perikanan. 3. 32 Pengurus Koperasi yang mengikuti Bimtek Komoditi Unggulan	Karena peserta tidak hadir	Akan dilakukan pendataan dan melakukan pemanggilan peserta akan dilakukan lebih awal
			3. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	1. 6 Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan. 2. 105 Pembina Koperasi dan PPKL yang mengikuti	1. 4 Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan. 2. 105 Pembina Koperasi dan PPKL yang mengikuti	Karena 2 orang Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) mengundurkan diri	Akan diadakan rekrutmen Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) untuk TA 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Bimbingan Teknis Perkoperasian	Bimbingan Teknis Perkoperasian		
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	- Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Pelaku Usaha Kecil sebanyak 15%	- Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Pelaku Usaha Kecil sebanyak 15%		
				- Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Kecil sebanyak 15%	- Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Kecil sebanyak 15%		
				- Persentase Pertumbuhan Produk Usaha Kecil yang dikembangkan sebanyak 4%	- Persentase Pertumbuhan Produk Usaha Kecil yang dikembangkan sebanyak 4%		
				- Pertumbuhan Produk Usaha Kecil yang Tersertifikasi sebanyak 20%	- Pertumbuhan Produk Usaha Kecil yang Tersertifikasi sebanyak 20%		
			1. Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	1. 50 Pelaku Usaha yang difasilitasi akses promosi dan pemasaran produk usaha kecil melalui Pameran didalam dan diluar daerah. 2. 2.500 Pelaku Usaha yang difasilitasi pendampingan perizinan bagi usaha kecil dan wirausaha pemula	1. 50 Pelaku Usaha yang difasilitasi akses promosi dan pemasaran produk usaha kecil melalui Pameran didalam dan diluar daerah. 2. 1.581 Pelaku Usaha yang difasilitasi pendampingan perizinan bagi usaha kecil dan wirausaha pemula	Karena menggunakan system OSS (Online Single Submission) Sehingga banyak UKM belum memahami dan mengetahui dalam menggunakan aplikasi tersebut	Melakukan Sosialisasi kepada pelaku UKM mengenai aplikasi OSS (Online Single Submission)
			2. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	1. 1 Rapat Koordinasi 2. 1 dokumen data usaha kecil 3. 250 Sertifikat Halal 4. 1 MoU Kerjasama Pelaku Usaha antar daerah	1. 1 Rapat Koordinasi (kesepakatan bersama) 2. 1 dokumen data usaha kecil 3. 247 Sertifikat Halal dan 3 mendapatkan	Sistem proses produksi harus beres di tempat bersama dengan penjualan produk	Terus melakukan koordinasi supaya UMKM dapat mengaplikasinya.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					surat Keterangan gagal halal 4. 1 MoU Kerjasama Pelaku Usaha antar daerah (Kemitraan dengan folating Market Bandung)		
			3. Peningkatan kualitas Kewirausahaan	1. 20 wirausaha Pemula yang mengikuti magang 2. 10 Pelaku Usaha berprestasi tingkat provinsi. 3. 300 Peserta Fasilitas Babel Academy	1. 20 wirausaha Pemula yang mengikuti magang 2. 5 Pelaku Usaha berprestasi tingkat provinsi. 3. 300 Peserta Fasilitas Babel Academy	Karena kewenangan Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan berada di kabupaten Kota	Tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kewenangan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	- Persentase SDM Koperasi Terlatih sebanyak 10,32%	- Persentase SDM Koperasi Terlatih sebanyak 10,32%		
				- Persentase SDM Usha Kecil Terlatih 1,2%	- Persentase SDM Usha Kecil Terlatih 1,2%		
			1. Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM	19 aparatur yang terlayani selama 12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana 19 aparatur selama 12 Bulan	Realisasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan	
			2. Penyelenggaraan Pelatihan Perkopersian dan UKM (DAK)	1. 450 Peserta Pelatihan bidang Koperasi terlatih. 2. 510 Peserta Pelatihan bidang UMKM terlatih	1. 450 Peserta Pelatihan bidang Koperasi terlatih. 2. 510 Peserta Pelatihan bidang UMKM terlatih	Realisasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan	
			3. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	1. 150 Peserta Pelatihan bidang Perkoperasian yang terlatih 2. 390 Peserta Pelatihan bidang Usaha Kecil yang terlatih 3. 24 SOP yang diimplementasikan	1. 129 Peserta Pelatihan bidang Perkoperasian yang terlatih 2. 387 Peserta Pelatihan bidang Usaha Kecil yang terlatih 3. 24 SOP yang diimplementasikan	Karena sebagian peserta yang diundang untuk mengikuti pelatihan sudah pernah mengikuti pelatihan yang sama.	Pendataan Peserta lebih awal dan selektif.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 4. 1 sertifikat ISO 9001:2015. 5. 5 kurikulum dan silabus pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan yang disusun	dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 4. 1 sertifikat ISO 9001:2015. 5. 5 kurikulum dan silabus pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan yang disusun		
			PROGRAM PENINGKATAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KUMKM	Pertumbuhan Produk Parekraf sebanyak 10%	Pertumbuhan Produk Parekraf sebanyak 10%		
			Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	1. 70 UKM yang didampingi 2. 7 Sentra Usaha yang disurvei 3. 500 Pelaku Usaha yang didampingi pada Klinik usaha terpadu 4. 30 Peserta Bimtek pemanfaatan aplikasi keuangan bagi Koperasi 5. 30 Peserta Bimtek Produktifitas dan daya saing	1. 70 UKM yang didampingi 2. 7 Sentra Usaha yang disurvei 3. 500 Pelaku Usaha yang didampingi pada Klinik usaha terpadu 4. 30 Peserta Bimtek pemanfaatan aplikasi keuangan bagi Koperasi 5. 30 Peserta Bimtek Produktifitas dan daya saing	Realisasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan	
12	PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	-	-
			1. Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Inventasi Daerah (SIPID)	6 Elemen data SIPID	6 Elemen data SIPID	-	-
			2. Workshop Pengembangan Usaha Daerah	1 UMKM	1 UMKM	-	-
			3. Pelaksanaan Matchmaking Daerah	1 UMKM	1 UMKM	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Daerah	1 Permasalahan	1 Permasalahan	-	-
			5. Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKP3MD)	1 Usulan	1 Usulan	-	-
			6. Studi Kelayakan Potensi Investasi	1 Kajian	1 Kajian	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	3 Investor Sektor Pertanian	6 Investor Sektor Pertanian	-	-
			1. Penyelenggaraan Pameran Investasi	5 Pameran	5 Pameran	-	-
			2. Pembuatan Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	-	-
			3. Business Gathering Investment	110 Peserta (65 Laki-laki dan 45 Perempuan)	110 Peserta (65 Laki-laki dan 45 Perempuan)	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	0.44%	83.33%	-	-
			1. Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	50 Perusahaan	89 Perusahaan	-	-
			2. Sosialisasi Peraturan Terkait Penanaman Modal	40 Perusahaan	40 Perusahaan	-	-
			3. Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	50 Perusahaan (36 Laki-laki dan 14 Perempuan)	50 Perusahaan (36 Laki-laki dan 14 Perempuan)	-	-
			4. Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal	110 Data	110 Data	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	79%	65%	-	-
			1. Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov.Kep.Babel	1100 Izin	1091 Izin	Ditarik kembali kewenangan penerbitan izin STRTTK oleh Dinas	Lebih meningkatkan kualitas pelayanan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kesehatan Prov.Kep.Babel sehingga target keluaran jumlah izin 1100 menjadi 1091 izin.	perizinan di sektor perizinan yang lain
			2. Rakor Forum PTSP se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100 Peserta (70 Laki-laki dan 30 Perempuan)	77 Peserta (50 Laki-laki dan 27 Perempuan)	Peserta yang hadir tidak 100% dikarenakan anggaran perjalanan dinas Kabupaten/ Kota terbatas	Agar Kabupaten/ Kota dapat menganggarkan perjalanan dinas yang cukup untuk mengantisipasi pelaksanaan Rakor di Provinsi
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA				
			1. Pemberdayaan Peran serta Pemuda	48	24	Kegiatan ini terkendala oleh anggaran yang hanya tersedia untuk 24 peserta.	-
			2. Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berdidikasi dan Berprestasi	10	18	-	-
			3. Pengembangan, Pemberian dan pelatihan Generasi Pemuda	261	261	-	-
			4. Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	47	52	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA				
			1. Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahrgaan dan Klub Olahraga	48	65	-	-
			2. Penyelenggaraan Kujuraan Olahraga	142	142	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	156	84	1. Kegiatan ini tidak tercapai target kinerjanya dikarenakan Adanya pengurangan cabang olahraga yang awalnya 20 cabang olahraga menjadi 10 cabang olahraga dimana Provnsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mengikuti 7 cabang olahraga saja. 2. Adanya perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan dari pusat	-
			4. Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	8	8	-	-
			5. Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Layanan Khusus	60	186	-	-
			6. Bangka Belitung Sport Tourism	1000	410	Kegiatan ini diadakan untuk mendukung kegiatan olahraga SEABA (kejuaraan Bola Basket Junior Se ASIA TENGGARA) dan Evergreen Intercity Bola Basket. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak memenuhi target dikarenakan SEABA batal dilaksanakan. Dan untuk kegiatan Evergreen Inercity Bola Basket dilaksanakan hanya saja dana yang terserap tidak maksimal.	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARAN DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
			1. Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	1	0	Kegiatan yang dilaksanakan tidak maksimal ini dikarenakan terdapat perubahan anggaran sehingga menyebabkan perubahan pekerjaan.	-
			2. Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasaran Kepemudaan dan Olahraga	3	3	-	-
			3. Standarisasi, akreditasi dan Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga Standar Nasional	1	1	-	-
14	STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	-	-		
			1. Inventarisasi dan Pengelolaan Data sektoral	8 Kelompok Parameter	8 Kelompok Parameter	1. Ada akun yang tidak bisa dicairkan seluruh pagunya 2. Keterlambatan OPD dalam mengumpulkan data 3. Kurangnya SDM di dalam seksi statistik dalam pengelolaan data OPD	1. Untuk rancangan RKA tahun berikutnya dibuat serinci mungkin anggaran sesuai kebutuhan 2. Perlunya diberikan honorarium kepada pengelola OPD dalam rangka memacu pengelolaan data agar optimal 3. Perlunya ditambah SDM ASN memiliki latar belakang pendidikan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							statistik/ pranata komputer dalam hal kemampuan mengelola data OPD.
			2. Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan format dashboard	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran	Adanya kewenangan dalam tugas dan fungsi bidang teknis untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan sehingga kegiatan ini tidak direalisasikan.
			3. Pengembangan, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan data/informasi/statistik daerah	200 buku	(170 buku) 85 buku DDA, 85 buku PDRB	Harga pada pagu anggaran tidak sesuai dengan harga buku yang dicetak karena harga buku tergantung ketebalan dan adanya isi buku yang berwarna sehingga harga buku lebih tinggi dari pagu.	Anggaran tidak menicantumkan dalam bentuk satuan akan tetapi dalam bentuk paket.
15	PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Rasio Kualitas Layanan Persandian yang Dimanfaatkan Untuk Pengamanan Informasi Berklasifikasi dan Strategis Milik Pemerintah Daerah dilingkungan Pemprov. Babel dengan Target 100%	80%		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	4 Layanan	-	Kegiatan tidak terlaksana dikarenakan tidak sinkron jadwal antar pusat dan daerah untuk narasumber. Untuk narasumber tidak boleh selain dari BSSN	Hendaknya jadwal/matrik kegiatan sudah direncanakan secara matang sehingga apabila terjadi pergeseran jadwal ataupun

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						dikarenakan bersifat teknis.	keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal pihak BSSN dan Daerah.
16	KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	100%	100%		
			1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	-	-
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	90%	-	-
			3. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah	500 buku	-	Kegiatan ini di drop dikarenakan Pihak BPS sebagai Instansi Penyelenggara tidak bisa melaksanakan kerjasama tersebut disebabkan oleh pada Tahun 2019 BPS juga melakukan kegiatan yang hampir sama yaitu melakukan penelitian dan penyusunan tingkat pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung	Agar disesuaikan kembali dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh BPS sebagai instansi penyelenggara
			4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15 orang	10 orang	Untuk Jabatan fungsional Tertentu sebanyak 5 orang tidak mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dikarenakan tidak dikenakan biaya kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihannya.	
			5. Peningkatan Pengembangan Sistem	5 dokumen	5 dokumen	Tidak ada permasalahan dalam penyusunan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan			dokumen pelaporan dan capaian kinerja	
			6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK	3 kawasan	3 kawasan	Dalam pelaksanaannya ada 3 kawasan yang menjadi kewenangan dewan kawasan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yaitu 1 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang dan 2 usulan Kawasan Ekonomi Khusus, Hanya saya dari 3 kawasan yang ditargetkan 2 kawasan belum ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sehingga menjadi salah penghambat tidak terlaksananya kegiatan ini secara maksimal.	Agar segera ditetapkannya 2 usulan KEK yaitu Usulan KEK Tanjung Gunung dan usulan KEK Pantai Timur Sungailiat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
			7. Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	90%	90%	-	-
			8. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	7 dokumen	7 dokumen	Tidak ada permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran	-
			9. Pembelian Rumah Peninggalan Sejarah	1 unit	-	Tidak dapat dilakukan pembelian dikarenakan harga yang ditawarkan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan nilai appraisal yang ditetapkan oleh Tim Appraisal dalam menentukan besaran nilai rumah / bangunan tersebut belum bisa	Perlu adanya standar harga dalam penentuan besaran nominal pembelian rumah peninggalan sejarah yang berdasarkan nilai appraisal yang telah ditetapkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						diterima oleh pihak pemilik rumah tersebut	
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	29,37%	29,37%	-	-
			1. Kajian Tradisi Bangka Belitung	1 kajian	1 kajian	Tidak ada kendala	-
			2. Penulisan Sejarah Bangka Belitung	1 kajian	1 kajian	Tidak ada kendala	-
			3. Partisipasi dan penghargaan serta kerjasama di bidang budaya	30 dukungan event budaya	48 dukungan event budaya	Proposal yang diajukan oleh Masyarakat, Kabupaten/Kota dan pihak lain – lain terkadang pengajuan yang diminta tidak sesuai dengan uraian belanja yang tersedia didalam DPA OPD sehingga yang terakomodir adalah usulan proposal yang memenuhi criteria yang ditetapkan	-
			4. Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	256 orang	243 orang	Kabupaten/Kota mengirimkan calon peserta untuk mengikuti seleksi audisi Gita Bahana tidak memenuhi kuota yang dipersyaratkan seharusnya 8 orang per Kab/Kota	-
			5. Pengelolaan Cagar Budaya	5 orang	5 orang	Tidak ada kendala	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung	50 cagar budaya	202 cagar budaya	Pada awal inventarisasi dan pengumpulan data di Kabupaten/Kota ditemukan data cagar budaya baru sebanyak 50 cagar budaya tetapi pada saat melakukan registrasi di lapangan terdapat perubahan jumlah cagar budaya yang ada di Kabupaten / Kota yang layak untuk diregistrasi sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan	Akan dilakukan pendataan dan inventarisasi data ulang terhadap cagar budaya yang ada di Kabupaten/Kota
			7. Pendokumentasian dan Publikasi Koleksi Cagar Budaya	100 buku	100 buku	Tidak ada kendala	-
			8. Festival Budaya Melayu	1 festival/ event	1 festival/ event	Tidak terdapat kendala	-
			9. Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah	4 event	4 event	Tidak terdapat kendala	-
			10. Pentas Seni Budaya	137 pentas	100 pentas	Terjadinya rasionalisasi anggaran pada kegiatan Pentas Seni Budaya yang mana alokasi anggaran diperuntukan untuk persiapan Pemecahan Rekor Muri Senam Bedincak	Agar disesuaikan kembali dengan perencanaan awal
			11. Pembinaan drum band serumpun sebalai	80 orang	80 orang	Tidak ada kendala	-
17	PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	350 Judul	350 Judul	-	-
				11.500 Orang	10.345 Orang	-	-
				1.020 Buku	1.020 Buku	-	-
			1. Penyusunan Bibliografi Induk Daerah Dan Katalog Induk Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Pelestarian Dan Pengelolaan Bahan Pustaka	430 Bahan Pustaka	430 Bahan Pustaka	-	-
			3. Pelayanan Perpustakaan Keliling	7200 Orang	6868 Orang	1. Rekening Perjalanan Dinas Disatukan Dengan Rekening Sekretariat Sehingga Sulit Mengadakan Perjalanan Dinas Untuk Pelayanan Perpustakaan Keliling 2. Pada Triwulan II Rekeningbbm Tidak Boleh Dicairkan dikarenkan Melekat Pada DPA Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Sehingga Menjadikan Terputus Menjalankan Kegiatan Tersebut	1. Untuk tahun selanjutnya penganggaran belanja perjalan dinas dikembalikan ke kegiatan masing-masing (DPA Kegiatan) 2. Belanja BBM untuk tahun selanjutnya melekat pada kegiatan sekretariat
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	18%	20%	-	-
				40 Orang	50 Orang	-	-
			1. Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi	7 Orang	7 Orang	-	-
			2. Penyusunan Profil Perpustakaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			3. Akreditasi Perpustakaan	4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	20%	20%	-	-
18	KEARSIPAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1. Arsip masuk desa	25 desa/kelurahan	25 desa/kelurahan	-	-
			2. Lomba kearsipan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35 orang	35 orang	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Pengawasan kearsipan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 OPD	4 OPD	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP	350 arsip	1.428 arsip	-	-
			1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	200 arsip	200 arsip	-	-
			2. Pameran arsip statis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	300 pengunjung	1.000 pengunjung	-	-
			3. Penerapan e-arsip	40 OPD	40 OPD	-	-

III.1.3. PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 24.922.576.240,00 dan realisasi Rp 15.986.438.766,00 setara dengan 64,14%.

Indikator kinerja program dan kegiatan untuk urusan kelautan dan perikanan sebagaimana terlampir pada tabel III.3.

2. Urusan Pariwisata

Program dan kegiatan urusan pariwisata dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.826.866.650,00 dan realisasi Rp 9.106.618.717,00 setara dengan 84,11%.

Indikator kinerja program dan kegiatan untuk urusan pariwisata sebagaimana terlampir pada tabel III.3.

3. Urusan Pertanian

Program dan kegiatan urusan pilihan pertanian dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp 35.849.890.275,00 dan realisasi Rp 34.039.819.123,00 setara dengan 94,95%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan pertanian sebagaimana terlampir pada tabel III.3.

4. Urusan Kehutanan

Program dan kegiatan urusan kehutanan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 14.367.281.900,00 dan realisasi Rp 11.186.727.242,98 setara dengan 77,86%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan kehutanan sebagaimana terlampir pada tabel III.3.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program dan kegiatan urusan pilihan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 9.513.111.000,00 dan realisasi Rp 6.510.240.739,15,00 setara dengan 68,43%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana terlampir pada tabel III.3.

6. Urusan Perdagangan

Program dan kegiatan urusan pilihan perdagangan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 5.878.844.300,00 dan realisasi Rp 4.706.859.084,17 setara dengan 80,06%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan perdagangan sebagaimana terlampir pada tabel III.3.

7. Urusan Perindustrian

Program dan kegiatan urusan perindustrian dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 5.371.506.400,00 dan realisasi Rp 5.146.505.485,65 setara dengan 95,81%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan perindustrian sebagaimana terlampir pada tabel III.3.

8. Urusan Transmigrasi

Program dan kegiatan urusan pilihan transmigrasi dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 150.020.000,00 dan realisasi Rp 145.070.000,00 setara dengan 96,70%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan transmigrasi sebagaimana terlampir pada tabel III.3.

TABEL III.3
Capaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	820.077 Ha; 65 %; 2,13 %	595.182,01Ha 0% 0%		
			1. Kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty	1 Jetty dan 6 Dokumen DED	0 Jetty dan 4 Dokumen DED	1. Terdapat kesalahan dalam penulisan pekerjaan pengadaan Jasa Kontrusi di DPA tertulis pekerjaan pengadaan Konsultasi Dermaga Jety/Tambatan Perahu kabupaten Bangka Tengah (Kurau Barat) 2. Untuk Belanja Konsutansi, yaitu belanja jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan berada dalam satu mata anggaran, seharusnya terpisah dengan masing-masing mata anggaran. 3. Antara Kegiatan Perencanaan berupa jasa konsultasi perencanaan dengan kegiatan pembangunan (Fisik) berada dalam satu DPA Tahun Anggaran yang sama, seharusnya berada dalam tahun anggaran yang berbeda,, hal ini akan berpengaruh terhadap proses lelang sehingga apabila dilaksanakan akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian	Penganggaran kembali dan perbaikan DPA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						pekerjaan pembangunan dermaga Jety tambatan perahu.	
			2. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	7 Rekomendasi	0 Rekomendasi	Belum bisa mengeluarkan rekomendasi izin dikarenakan RZWP3K masih dalam proses penyelesaian; Hasil masih berupa Draft Pergub izin lokasi dan pengelolaan perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum sampai ke menjadi PerGub enunggu mengesahan Perda RZWP3K	Percepatan proses pengesahan PerDA RZWP3K Prov. Babel
			3. Kegiatan Identifikasi dan Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut	7 Rekomendasi Izin	0 Rekomendasi	Belum bisa mengeluarkan rekomendasi izin dikarenakan RZWP3K masih dalam proses penyelesaian; Hanya terlaksanakan untuk kegiatan di Pulau Bangka dikarenakan tidak cukupnya anggaran untuk perjalanan tenaga penyelam dan survei untuk Pulau Belitung sehingga 1.honor penyelam dan tenaga survey tidak dibayarkan semua 2. Honor narasumber, transportasi akomodasi dan moderator tidak dibayarkan .	Percepatan proses pengesahan PerDA RZWP3K Prov. Babel
			4. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	544.000 Ha	595.182,01Ha	Keluaran kegiatan adalah adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/927/DKP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						dan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Taman Wisata Perairan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung.	
			5. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Daerah (DAK)	5 Alat selam	5 Alat selam		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	215.300 Ton; 6,82 %; 386 Juta Rupiah; 2.750 Ton; 19.500 Ton; 33.000 Ton; 15.000 Ton; 109 Indeks; 10.000 Ton	237.796,07 Ton* 2,89 % 262,35 Juta		
			1. Kegiatan Fungsi Syahbandar Pelabuhan Perikanan	12 bulan	12 bulan		
			2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1434 unit	0 unit	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena di DPA tidak tercantum By Name By Address Calon Penerima Bantuan	a. Terkait proses pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Tahun 2019, kami telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor surat : 523/895/DKP tanggal 22 Mei 2019 perihal Mohon arahan terhadap

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							<p>Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019. Arahan tersebut dimaksudkan karena terdapat kelalaian dalam penginputan DPA yang telah diterbitkan, yang mana tidak tercantum Nama dan Alamat (By Name By Address) Koperasi Calon Penerima Bantuan dalam DPA tersebut, (DPA dan Surat terlampir).</p> <p>b. Kami telah menerima tanggapan dari Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Nota Dinas dengan Nomor : 903/521/BAKUDA tanggal 10 Juni 2019 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							<p>Dalam arahnya Badan Keuangan Daerah Pemprov Bangka Belitung menyampaikan selayaknya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019 untuk tidak dilaksanakan karena ada tahapan perencanaan yang tidak dilakukan serta selanjutnya dapat dilaksanakan pada Perubahan APBD TA 2019 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,(Nota Dinas terlampir)</p> <p>c. Memperhatikan poin 1 dan 2 diatas maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>d. Mengacu pada Pasal 11 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana terakhir telah</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							<p>diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Mengacu pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Tahun 2019 tidak bisa kami lanjutkan pelaksanaannya karena DPA yang terbit tidak tercantum Nama dan Alamat Koperasi Calon Penerima Bantuan.</p> <p>e. Jika Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap ini tetap dilanjutkan dengan</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							mencantumkan Nama dan Alamat Koperasi Calon Penerima Bantuan melalui APBD Perubahan (APBD-P), Kegiatan ini juga tetap tidak bisa dilaksanakan mengingat proses APBD-P dan proses pelelangan pada ULP membutuhkan waktu yang cukup panjang yaitu kurang lebih 3 bulan sedangkan saat ini sudah memasuki Triwulan 3 Tahun 2019.
			3. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	-	-
			4. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan PPI	1 PPI	1 PPI	a. Untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPI Kurau ada 3 kegiatan (Rehab Pos Jaga, Rehab Gedung Pertemuan dan Pembangunan MCK Umum). Kegiatan ini RAB/HPS sudah dimasukkan kedalam aplikasi LPSE, Dokumen Lelang sudah disampaikan dengan ULP namun dari hasil kaji ulang dengan memperhatikan Kompleksitas dari	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						<p>pekerjaan ini dan mengingat waktu sehingga kegiatan ini untuk tidak dilanjutkan, dengan Pagu Anggaran Rp. 570.000.000,00</p> <p>b. Untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPI Sungai Selan ada 4 kegiatan (Rehab MCK, Pembangunan Pintu Gerbang, Pembuatan Papan Nama dan Pembuatan Kios sebanyak 8 unit). Kegiatan ini RAB/HPS sudah dimasukkan kedalam Aplikasi LPSE, dengan memperhatikan kompleksitas dari pekerjaan ini dan mengingat waktu sehingga kegiatan ini untuk tidak dilanjutkan. Dengan pagu anggaran Rp. 596.000,00</p> <p>c. Untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPI Sadai ada 4 kegiatan (Rehab MCK, Rehab Rumah Dinas, Rehab Kios sebanyak 8 unit dan Rehab Gedung TPI). Kegiatan ini RAB/HPS sudah dimasukkan kedalam Aplikasi LPSE, dengan memperhatikan kompleksitas dari</p>	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						pekerjaan ini dan mengingat waktu sehingga kegiatan ini untuk tidak dilanjutkan. Dengan pagu anggaran Rp. 595.000,00	
			5. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Perikanan Tangkap	50 Orang	120 Orang	Kegiatan berupa sosialisasi Pasca Sehat di PPI Sadai dan Tanjungpandan @40 orang dan Sosialisasi Kelembagaan Usaha di Bangka Barat dengan peserta 40 orang	-
			6. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan	25 orang	280 orang	Kegiatan sosialisasi Logbook di 7 kab/kota @40 orang peserta, dimana banyak honor narasumber dan moderator yang tidak dicalirkan karena berasal dari SKPD Provinsi serta sewa ruang kegiatan yang tidak dicalirkan karena pelaksanaan kegiatan di PPI milik Provinsi.	
			7. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	120 Orang	60 Orang	Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi Kampung nelayan di Kab Bangka dan Bangka Barat @30 orang peserta, 'Untuk sosialisasi asuransi nelayan tidak bisa dilaksanakan karena kurangnya anggaran makmin peserta dan uang saku peserta tidak tersedia krn berlaku sistem cost sharing utk keg.asnel , dan pihak Jasindo tdk bisa membantu	Berkoordinasi dengan inspektorat dan bakuda agar kegiatan Asnel bisa dijalankan
			8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap	300 rekomendasi	327 Rekomendasi	1. Sosialisasi perizinan perikanan tangkap tidak dilaksanakan karena kegiatan dengan output yang sama telah dilakukan oleh	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Batam dengan mengundang seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pendataan perikanan tangkap tidak dilaksanakan karena pendataan statistik perikanan tangkap sudah dilakukan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan RI (kegiatan <i>one data</i>)	
			9. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (DAK)	5 PPI	0 PPI	<p>a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Komplek PPI Manggar, PPI Selat Nasik dan PPI Kurau belum bisa dilaksanakan karena ada kesalahan di dalam DPA yang mana harga satuan dan volume masih tertulis PAKET seharusnya METER PERSEGI sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan permasalahan karena tidak sesuai dengan output kegiatan ini.</p> <p>b. Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor di PPI Sungai Selan, PPI Selat Nasik, PPI Manggar dan PPI Sadai tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan Sumur Bor yang sudah dilakukan Kontrak Kerja dengan CV. Dua Panglima mengalami kegagalan air (Air yang dihasilkan Payau di</p>	Terkait kesalahan di dalam DPA yang mana harga satuan dan volume masih tertulis PAKET seharusnya METER PERSEGI, sudah dilakukan komunikasi melalui surat kepada Inspektorat daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan arahan dari Pihak Inspektorat untuk tidak dilanjutkan karena akan menimbulkan permasalahan dengan satuan yang tidak sesuai dengan output kegiatan ini.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						kedalaman 120 Meter) sehingga Kegiatan yang ada di PPI lainnya hampir dipastikan gagal (Karateristik PPI di berada di pinggir laut)	
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	12.120 Ton;54 Kg/Org/Thn;21.110 Ton;1,14 %;22,22 %;120 Ton;220 Ton;121 Ton;121 Ton	237.796,07 Ton* 2,89 % 262,35 Juta		
			1. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	5 Kegiatan	100% (5 Laporan Kegiatan)		
			2. Kegiatan Pembinaan Pasar Hasil Perikanan Se-Bangka Belitung	7 Pasar	100% (7 Pasar yang dibina)		
			3. Kegiatan Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	3 Promosi	100% (3 Pameran yang dilaksanakan)		
			4. Kegiatan Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	30 Pelaku Usaha	100% (30 Pelaku Usaha)		
			5. Kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	2 Paket	100% (2 Koperasi)		
			6. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil ikan	4 Paket	100% (4 Studi Kelayakan Pembangunan Cold Storage)		
			7. Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	14 Paket	28,57% (3 Paket Rehab Sarpras UPI)	Kegiatan ini hanya terlaksana sebanyak 3 paket dari 14 paket yang harus dilaksanakan, hal ini dikarenakan 11 UPI dimana paket rehab tersebut seharusnya dilaksanakan tidak memenuhi petunjuk	Melaksanakan survey dan pemetaan sehingga UPI yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan rehab sarpras UPI sesuai dengan petunjuk

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						teknis (JUKNIS) untuk pelaksanaan rehab sarpras UPI seperti bidang usaha yang dilaksanakan UPI tersebut tidak memenuhi JUKNIS.	teknis (JUKNIS) yang berlaku,
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	70%	90%		
			1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	50 Hari Operasi 35 Pelaku Usaha	46 Hari Operasi 52 pelaku usaha	a. Pelaksanaan operasi/patroli kelautan terkendala dengan cuaca yang ekstrim sehingga pelaksanaan operasi/patroli kelautan belum maksimal b. Terbatasnya galangan kapal untuk pemeliharaan melalui docking sehingga pelaksanaan docking menjadi terhambat	a. Melakukan update informasi cuaca saat pelaksanaan operasi/patroli pengawasan sumberdaya kelautan. b. Merencanakan docking untuk pemeliharaan di awal-awal tahun karena padatnya kapal yang melakukan docking digalangan
			2. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	30 Kelompok Pokmaswas 35 Pelaku Usaha	30 Kelompok Pokmaswas 22 Pelaku Usaha	-	-
			3. Kegiatan Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	3 Berkas 1 Dokumen	3 Berkas 9 Dokumen	Penyerapan kegiatan APBD Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tidak terserap maksimal (15,29%). Hal tersebut dikarenakan tidak diakomodir/ ditandatangani Pengajuan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus Penyidikan.	Melakukan Pengajuan Kembali Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus Penyidikan.
			4. Kegiatan Peningkatan Fungsi Boost Centre	12 bulan	12 bulan	Minimnya anggaran untuk melakukan monitoring dan perawatan ke stasiun BOOST	Monitoring dan perawatan terhadap stasiun BOOST Centre

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						yang ada di Kab/Kota. Sehingga sulit untuk ke lapangan apabila terjadi permasalahan seperti stasiun mati, dll	diharapkan dapat selalu dilakukan secara rutin minimal 3 (tiga) kali dalam setahun agar dapat segera melakukan tindakan apabila terjadi permasalahan dilapangan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	84%	94%		
			1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Laboratorium Penguji dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	12 bulan	12 Bulan	-	-
			2. Kegiatan Pembinaan Supervisi dan Sosialisasi Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	75 UPI	35 UPI	Jumlah anggaran yang belum memadai untuk membina 75 UPI	Memenuhi jml anggaran yang mencukupi utk pembinaan 75 UPI ke seluruh wilayah Bangka Belitung
			3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penguji Mutu Hasil Produk Kelautan dan Perikanan	650 Sampel	930 sampel	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	9,63 Juta Ekor; 26,25 Juta Rupiah	437 Ribu Ekor 146,8 Juta Rupiah		
			1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau) Tanjung Krasak	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	-	-
			2. Kegiatan Peningkatan Produksi UPTD Balai Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	9,63 Juta ekor	437.000	Belum Standarnya Sarana dan Prasarana Pembenihan, sebagai berikut :	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan fasilitas

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						<ul style="list-style-type: none"> - Sistem inlet (suplay air) dan outlet (buangan air) yang terlalu dekat sehingga kualitas air tidak dapat dikontrol dimana dimungkinkan banyaknya organisme penyakit. - Belum standarnya Rumah alga/bak pakan alami sehingga rentan kontaminan baik hama maupun penyakit. - Belum standarnya Ruang Pemeliharaan Larva dimana atap tertalu tinggi sehingga tidak pernah diperoleh suhu optimum untuk metabolisme/kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisme. Kondisi ruang pemeliharaan larva yang lembab juga memberikan potensi tumbuhnya jamur pada media pemeliharaan. - Minimnya Sarana Pokok dan peralatan laboratorium, baik laoratorium pakan alami maupun laboratorium hama penyakit ikan. - Kurangya SDM terampil pembenihan baik dari ASN maupun tenaga teknis/honorar. 	budidaya ikan air payau Tanjung Kerasak meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Drainase, Pembuatan Kolam IPAL, Pengadaan Kontruksi Jaringan Instalasi Air Laut/Tawar, Pembangunan Rumah Sortir/Panen Hasil Pembesaran Udang, Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor), Pembangunan Rumah Algae (Pakan Alami), Pembangunan Hatchery/Indoor Larva, Pembangunan Rumah Pemeliharaan Induk, Pembangunan Gudang Pakan Pembesaran, Pembangunan Gudang Bahan Kimia Dan Obar-Obatan, Pembangunan Rumah Blower, Pembangunan Rumah Kultur Cacing Laut, Penambahan Daya 80 Kw (80.000

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Watt), Peningkatan Pemagaran Lokasi Balai (Pagar), Pembangunan Asrama Siswa/Mahasiswa Magang, Pembangunan Pos Jaga. - Penambahan SDM terampil pembenihan baik dari ASN maupun tenaga teknis/honorer, atau penggaran untuk tenaga pendamping/tenaga ahli pembenihan.
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR LAUT	0,065 Juta Ekor;82,5 Juta Rupiah	0,02 Juta Ekor		
			1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut) Tanjung Rusa	12 Bulan Layanan	-	-	-
			2. Kegiatan Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	0,065 Juta Ekor	0,02 juta ekor	1. Bangunan produksi direhab total, praktis kegiatan produksi tahun 2019 efektif hanya 5 (lima) bulan. 2. Produktifitas induk ikan laut sudah menurun	1. Mengalihkan kegiatan produksi ke laut/pembesaran di keramba jaring apung 2. Mengadakan calon induk ikan laut baru
			3. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	2 paket	1 paket	Satu paket, yaitu Paket Pengadaan Alat-Alat Perikanan Budidaya tidak dilelang oleh ULP	Berkoordinasi dengan ULP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Balai Pemuliaan Ikan (air Laut) Tanjung Rusa				
2	PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	44,44%	25,00%		
			1. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	5 desa wisata 5 pokdarwis	4 desa wisata 5 pokdarwis	Terdapat Kabupaten yang tidak mengirimkan peserta dalam lomba desa dengan alasan belum siapnya desa tersebut sebagai salah satu calon peserta perlombaan desa wisata	Kegiatan tetap dilaksanakan dengan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan tersebut
			2. Pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	Masih banyaknya dokumen pendukung dari stakeholder terkait yang kurang memadai	Agar para pihak stakeholder dapat mendukung dengan menyampaikan dokumen pendukung yang akurat
			3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata	3 dokumen	3 dokumen	Masih terdapat Kabupaten dan OPD Provinsi tidak hadir dalam pertemuan tersebut yang bertujuan untuk menyepakati pengembangan destinasi pariwisata	Agar Kabupaten/Kota dan OPD terkait dapat mengikuti
			4. Penyusunan Interpretasi berbasis Geowisata	1 dokumen	-	Kegiatan di drop dikarenakan tidak tersediannya anggaran dan waktu yang cukup jika dilaksanakan pada APBD-P Tahun 2019	Agar dalam perencanaan lebih terarah dan terukur
			5. Penyusunan Paket Wisata	3 dokumen	3 dokumen	Belum siapnya Daya Tarik Wisata (DTW) untuk dijual oleh industri pariwisata hal tersebut dikarenakan permasalahan dukungan fasilitasi dan SDM	Agar pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mendukung penyediaan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar dan SDM Pariwisata yang professional dan handal

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata	20 units	21 unit	Belum tersedianya fasilitas penunjang operasional (listrik) pada papan informasi berupa neon box	Perlunya dukungan pihak dari Kabupaten/Kota sebagai pengguna dalam mempergunakan fasilitas penunjang tersebut
			7. Sosialisasi Paket Wisata Edukatif dan Kreatif di Desa Wisata Pulau Belitung	1 Kegiatan	-	Tidak dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	435.976	392.662	Rilis Kunjungan Wisatawan oleh BPS baru menyampaikan realisasi sampai dengan November 2019	-
			1. Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung	10 bahan promosi	10 bahan promosi	Sulitnya mendapatkan data kepariwisataan dan penyampaian bahan materi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Agar adanya komitmen bersama dalam upaya penyampaian data lebih terarah dan terukur
			2. Pelayanan Informasi Pariwisata	4 TIC	4 TIC	Tidak Ada Kendala	-
			3. Pemanfaatan Informasi Teknologi untuk Pemasaran Pariwisata	2 website dan 2 penyedia telekomunikasi	2 website dan 2 penyedia telekomunikasi	Tidak Ada Kendala	-
			4. Pembuatan Bahan Publikasi	2 materi publikasi	2 materi publikasi	Tidak Ada Kendala	-
			5. Kajian Pemasaran Pariwisata	1 dokumen	1 dokumen	Tidak Ada Kendala	-
			6. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	4 event	4 event	Masih kurangnya partisipasi Kabupaten /Kota dan Industri Pariwisata untuk mengikuti pameran	Perlunya kesepakatan antar stakeholder pariwisata
			7. Partisipasi event promosi pariwisata	20 event	50 event	Dalam setiap pengajuan proposal dukungan banyak terdapat permintaan yang tidak ada teralokasikan dalam mata belanja yang tercantum	Agar adanya sosialisasi bentuk dukungan yang akan diberikan dan melakukan pengajuan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						dalam DPA sehingga realisasi melebihi target dikarenakan terakomodirnya usulan proposal yang disampaikan	kepada BUMN, Perusahaan swasta dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
			8. Pelaksanaan Fam Trip	12 orang	12 orang	Waktu pelaksanaan fam trip yang terlalu lama sehingga menjadi kendala bagi travel agent	Agar diatur manajemen waktu penyelenggaraan
			9. Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui Media	2 media	3 media	Materi publikasi yang akan dipublikasi sering terlambat disampaikan oleh Kabupaten/Kota	Agar ada komitmen bersama dalam hal penyampaian data materi publikasi dengan ketentuan minimal 2 bulan sebelum penyelenggaraan event dilaksanakan
			10. Pelaksanaan Promosi Geowisata	120 orang	120 orang	Tidak ada kendala	-
			11. Pengembangan Promosi Wisata Edukatif, Kreatif dan Minat Khusus Bahari	1 event	1 event	Pelaksanaan kegiatan ini di gabungkan dengan kegiatan event Kawasan Ekonomi Khusus	-
			12. Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus	3 event	3 event	Tidak ada kendala	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	100%	100%		
			1. Partisipasi Event Festival Nusantara	15 dukungan event	8 dukungan event	Dengan pola transaksi non tunai menjadi kendala bagi para pengusul bantuan yang melalui proposal dikarenakan peserta tidak memiliki alokasi anggaran untuk mengikuti event tersebut	Peserta menyiapkan dana pendukung awal

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata	340 orang	338 orang	Terdapat peserta yang tidak mengikuti proses kegiatan sampai dengan selesai sehingga tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh panitia	Agar peserta memberikan komitmen dalam mengikuti sertifikasi dalam rangka peningkatan kompetensi yang bersangkutan
			3. Penyelenggaraan Pemilihan Putra Putri Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60 orang	55 orang	Dalam pelaksanaa pemilihan Putri Indonesia tidak terlaksana dengan baik dikarenakan banyak peserta yang tidak memenuhi syarat baik fisik dan non fisik yang memenuhi criteria 3 B (beauty, brain dan behavior)	Agar dapat mencari kader dan bibit calon putri – putri yang memiliki persyaratan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Yayasan Putri Indonesia
			4. Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Kuliner	50 orang	50 orang	-	-
			5. Pengembangan Industri Perfilman, animasi, video dan fotografi	70 orang	70 orang	-	-
			6. Peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah	3 naskah	3 naskah	-	-
			7. Forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-
3	PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	43.135 Ton	43.135 Ton		
			1. Pengembangan Komoditi Hortikultura Melalui Penerapan Budidaya Tanaman yang Baik	13 Hektar	13 Hektar		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Pengembangan Komoditi Pangan dengan Penerapan GP-PTT (Padi Dan Jagung)	100 Hektar	100 Hektar		
			3. Pengembangan Komoditi Hortikultura Lokal yang Unggul	6 Hektar	6 Hektar		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	15 %	15 %		
			1. Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	500 Hektar	500 Hektar		
			2. Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Penyusunan Perda	1 Dok	1 Dok		
			3. Pembangunan Gudang Alsintan	4 Unit	4 Unit		
			4. Pengembangan Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	100%	100%		
			5. Peningkatan Kapabilitas Penyuluhan dan SDM Pertanian	100%	100%		
			6. Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian	100%	100%		
			7. Pemberian Asuransi Peternakan	2000 Ekor Sapi	2000 Ekor Sapi		
			8. Fasilitasi Asuransi Pertanian	2.500 Hektar	2.500 Hektar	1. Kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi di daerah, terutama daerah endemi/rawan puso. 2. Target dan realisasi kepesertaan AUP dan kemauan Petani membayar premi swadaya yang rendah.	1. Penyusunan pedoman sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan AUP; 2. Sosialisasi pedoman keseluruh

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						3. Kurangnya dukungan dan peran aktif petugas terkait AOTP di daerah. 4. Kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi di daerah, terutama daerah endemi/rawan puso. 5. Target dan realisasi kepesertaan AOTP dan kemauan Petani membayar premi swadaya yang rendah. 6. Kurangnya dukungan dan peran aktif petugas terkait AOTP di daerah.	stakeholders terkait; 3. Pendampingan dan pengawalan dari para petugas di daerah dalam pelaksanaan AOTP
			9. Pengembangan Optimasi Lahan	1.00 IP	1.00 IP		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	43.577 Ton	43.577 Ton		
			1. Intensifikasi Tanaman Perkebunan	1.500 Hektar	1.500 Hektar		
			2. Penanganan Pasca Panen Tanaman Perkebunan	3 Unit	3 Unit	Masih rendahnya kualitas produk, baik secara primer maupun sekunder. Hal ini mengakibatkan permasalahan dalam pemasaran, serta mempengaruhi harga yang diterima petani.	Dilakukan penerapan standard mutu dimulai dari kegiatan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan demi meningkatkan daya saing produk perkebunan
			3. Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	200 Hektar	200 Hektar	1. Masih kurangnya pemandu lapang, sehingga 2 pemandu lapang harus melatih 2 kelompok, idealnya 2 pemandu untuk satu kelompok;	1. Diusulkan melalui kegiatan Dinas Pertanian untuk ditambahkan pemandu lapang sesuai kebutuhan.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						2. Kegiatan PPHPT tidak dilakukan secara kontinyu, dengan pelaksanaan di berbagai lokasi dan kelompok tani	2. Kegiatan PPHT diusulkan untuk selalu menjadi kegiatan rutin dalam program pengembangan perkebunan
			4. Pelayanan Informasi Pemasaran Hasil Perkebunan	1 Dok	1 Dok	1. Masih terdapat perusahaan yang belum disiplin mengirimkan data. 2. Belum ada pengujian kembali rendemen kelapa sawit	1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan agar ketepatan waktu pelaporan data yang akurat dapat selalu terjaga; 2. Diusulkan melalui kegiatan program bidnag perkebunan agar dilakukan pengujian kembali rendemen kelapa sawit sebagai factor penentu harga Tandan buah Segar kelapa sawit.
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	14.399 Ekor	14.399 Ekor		
			1. Peningkatan Populasi Ternak	6%	6%		
			2. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Subsektor Peternakan	100%	100%		
			3. Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	100%	100%	Terbatasnya SDM yang mempunyai background pendidikan di bidang Kedokteran hewan	Melibatkan staf pelaksana di bidang peternakan dalam pelaksanaan kegiatan secara bertahap

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							dalam melakukan kegiatan
			4. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Strategis Zoonosis dan Gangguan Reproduksi	100%	100%	Terbatasnya SDM yang mempunyai background pendidikan di bidang Kedokteran hewan/ paramedic veteriner	Melibatkan staf pelaksana di bidang peternakan dalam pelaksanaan kegiatan secara bertahap dalam melakukan kegiatan seperti : pengambilan sampel darah ternak, pengujian PCR Jembrana, Uji RBT dan lainnya
			5. Sosialisasi Pengawasan Mutu Hasil Ternak Sapi di RPH	80%	80%	1. Beberapa pelaku usaha tidak bersedia melakukan pemotongan di RPH 2. Sarana dan prasarana RPH masih belum memadai	1. Perlunya pengusulan terkait perbaikan fasilitas RPH dan bersama aparat mendorong pelaku usaha agar wajib melakukan pemotongan di RPH; 2. Diperlukan Mou secara jelas antara pelaku usaha dengan pemerintah terhadap penggunaan RPH
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	1.310.000 Polybag	1.310.000 Polybag		
			1. Pengawasan Peredaran Benih dan Pembinaan Produsen	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		
			2. Sertifikasi Benih Pertanian/Perkebunan	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal Daerah	3 Varietas	3 Varietas		
			4. Peningkatan Fungsi Pelayanan Uptd Bpsmb	1 UPTD	1 UPTD		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	5%	5%		
			1. Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	5%	5%		
			2. Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman	12 Bulan	12 Bulan		
			3. Pengadaan Alat Laboratorium Balai Proteksi Tanaman (DAK)	100 %	100 %		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	1 Dok/Unit	1 Dok/Unit		
			1. Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian	1 UPTD	1 UPTD		
			2. Penyediaan Benih Sumber dan Benih Sebar	10 Ha Jagung	10 Ha Jagung		
			3. Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia	1 Paket	1 Paket	1. Terjadinya musim kemarau yang tidak mendukung percepatan realisasi; 2. Adanya kesalahan pada volume dan harga satuan di DPA, dan revisi memerlukan waktu; 3. Terbatasnya perusahaan yang terdaftar di LPSE untuk penyedia pakan ternak sapi, sehingga menunda proses pengadaan barang dan jasa.	1. Diusulkan melalui kegiatan terkait dengan pasokan air dalam rangka antisipasi kemarau panjang; 2. Lebih cermat dalam pengajuan perencanaan kegiatan ke depannya agar tidak memerlukan revisi;

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Integrasi Jagung dan Sapi	10 Hektar	10 Hektar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh cuaca saat proses penanaman dan panen 2. Terjadinya keterlambatan masa panen karena puasa dan Hari Raya Idul Fitri 	Lebih cermat dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan masa tanam dan panen dengan didukung ramalan musim dan cuaca terkini dari BMKG
			5. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Pertanian	1 Paket	1 Paket	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pembangunan konstruksi/gedung, penyusunan perencanaan/DED dilakukan dalam satu tahun anggaran sehingga proses pengadaan fisik harus menunggu penyusunan perencanaan terlebih dahulu. 2. Belum adanya tenaga teknis khusus konstruksi sehingga pengawasan konstruksi masih melibatkan tenaga dari luar sehingga perlu pengaturan dan penyesuaian waktu tenaga tersebut. 3. Servis dan pergantian suku cadang alat dan mesin pertanian terjadi sewaktu-waktu tanpa diketahui waktunya. Sehingga ada beberapa alat dan mesin pertanian yang sementara tidak digunakan sambil menunggu anggaran untuk perbaikan dan penggantian suku cadang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para PPTK diwajibkan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan mengajukan jadwal pelaksanaan pekerjaan di awal Tahun Anggaran selanjutnya 2. Melalui perencanaan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan pihak terkait pada saat perencanaan kegiatan agar pada saat pelaksanaan berjalan efektif 3. Service dan suku cadang alsintan diajukan dalam perencanaan kegiatan rutin

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						4. Belum adanya kendaraan angkut roda empat sehingga terkendala apabila diperlukan untuk operasional keluar.	
			6. Pembangunan Kandang Sapi	1 Paket	1 Paket	1. Dalam pembangunan konstruksi/gedung, penyusunan perencanaan/DED dilakukan dalam satu tahun anggaran sehingga proses pengadaan fisik harus menunggu penyusunan perencanaan terlebih dahulu. 2. Belum adanya tenaga teknis khusus konstruksi sehingga pengawasan konstruksi masih melibatkan tenaga dari luar sehingga perlu pengaturan dan penyesuaian waktu tenaga tersebut.	1. Para PPTK diwajibkan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan mengajukan jadwal pelaksanaan pekerjaan di awal Tahun Anggaran selanjutnya 2. Melalui perencanaan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan pihak terkait pada saat perencanaan kegiatan agar pada saat pelaksanaan berjalan efektif
			7. Pembangunan Gudang Pakan Ternak dan Penyediaan Excavator Mini	1 Paket	1 Paket	1. Dalam pembangunan konstruksi/gedung, penyusunan perencanaan/DED dilakukan dalam satu tahun anggaran sehingga proses pengadaan fisik harus menunggu penyusunan perencanaan terlebih dahulu. 2. Belum adanya tenaga teknis khusus konstruksi	1. Para PPTK diwajibkan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan mengajukan jadwal pelaksanaan pekerjaan di awal Tahun Anggaran selanjutnya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						sehingga pengawasan konstruksi masih melibatkan tenaga dari luar sehingga perlu pengaturan dan penyesuaian waktu tenaga tersebut.	2. Melalui perencanaan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan pihak terkait pada saat perencanaan kegiatan agar pada saat pelaksanaan berjalan efektif
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1 PAKET	1 PAKET		
			Pengendalian Kekeringan di Daerah Persawahan	1 Paket	1 Paket		
4	KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN	PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU DENGAN TARGET 5%	5 %		
			1. Pemanfaatan Kawasan Hutan	95% Dokumen Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan hasil kegiatan : Termonitornya kegiatan IUPHHK HTI terhadap 8 pemegang izin (8 Dokumen), 2. Termonitornya kegiatan IUPJLWA terhadap pemohon (7 pemohon) dan pemegang izin (3 pemegang izin).		
			2. Pengembangan HasilHutan Bukan Kayu	2 Unit Terlaksananya pengujian inokulan dan pengembangan teh dan kandungan pucuk serta daun tanaman Gaharu dan Pelawan	Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengujian inokulan dan pengembangan teh dan kandungan pucuk serta daun pada tanaman Gaharu dan pelawan.		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	8 Dokumen pengelolaan Kawasan hutan	Keluaran kegiatan ini adalah terkelolanya semua wilayah kawasan hutan di KPHP/KPHL dan tersusunnya RPHJP KPHP/KPH.		
			4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	20 Orang Jumlah wasganis/ganis yang mendapatkan sertifikat ulang	Keluaran kegiatan ini adalah Pemegang izin, pelaku usaha dibidang hasil hutan mitra kerja dapat memahami dan melaksanakan sistem penatausahaan hasil hutan dan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) serta pelaku usaha bidang kehutanan dapat memahami dan melaksanakan sistem penatausahaan hasil hutan, dengan hasil kegiatan 12 Izin TPKRT 25 Peserta Sosialisasi.		
			5. Expo Pengembangan dan Promosi HasilHutan	1 kali terlaksananya keikutsertaan dalam Expo pengembangan dan Promosi HasilHutan	Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan dan promosi hasil hutan, dengan hasil kegiatan terpublikasinya promosi produk hasil hutan kayu dan bukan kayu. Promosi berupa produk kayu yang tumbuh di Kepulauan Bangka Belitung, seperti Nyatoh, Meranti. Sedangkan produk hasil bukan kayu yang dipromosikan adalah gaharu, madu, rotan, dan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					produk olahan seperti kopiah resam.		
			6. Pengadaan Kendaraan roda dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan)	2 unit tersedianya alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor UPTD KPH	Tersedianya 2 unit alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor UPTD KPH		
			7. Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	20 Hektar Terbangunnya sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	Terbangunnya 20 Hektar sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan		
			8. Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	2 unit Terbangunnya kantor resort UPTD KPH	Terbangunnya 2 unit kantor resort UPTD KPH		
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	PERSENTASI KAWASAN EKOSISTEN ESSENSIAL (KEE) DENGAN TARGET 20%	PERSENTASI KAWASAN EKOSISTEN ESSENSIAL (KEE) DENGAN TARGET 20%		
			1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pindan Kehutanan	2 berkas perkara Berkurangnya tindak pidana kehutanan	Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya upaya perlindungan hutan, dengan hasil kegiatan 2 kasus dapat ditindaklanjuti sampai keputusan pengadilan.		
			2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan LaHektarn	30% Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan laHektarn	Terkendalinya kebakaran hutan dan terselenggaranya sosialisasi peraturan dibidang perlindungan hutan di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan dengan peserta masing-masing 30 orang.		
			3. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyampaikan informasi kegiatan kehutanan di Daerah	Terselenggaranya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan, dengan hasil kegiatan meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyampaikan informasi kegiatan kehutanan di daerah.		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	90% Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan oleh POLHUT	Terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan, dengan hasil kegiatan berkurangnya tindak pidana kehutanan.		
			5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan	15 Orang Tersedianya tenaga pendukung perlindungan hutan dan Hasilhutan yang responsif Gender	Terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan, dengan hasil kegiatan berkurangnya tindak pidana kehutanan		
			6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	2 Kawasan Jumlah Kawasan Ekosistem Essensial yang terbentuk dan terjaga	Jumlah ekosistem yang terbentuk dan terjaga dengan hasil kegiatan berupa laporan untuk pembentukan kawasan ekosistem esensial.		
			7. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH- Kehutanan)				
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 DOKUMEN DAN 20 HEKTAR TERCAPAI KUALITAS BIBIT DAN SUMBER BENIH YANG BERKUALITAS DAN PENGELOLAAN REHEKTARBILITASI YANG TERTATA			
			1. Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	200 Hektar TereHektarbilitasi DAS yang kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Keluaran kegiatan ini adalah tercapainya luasan penanaman Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH dan masyarakat secara responsif gender, dengan hasil kegiatan terealisasi DAS yang kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung luas 202,70 Hektar.		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	6 Pemegang IPPKH Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemenuhan kewajiban ReHektarbitasi DAS	Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS dengan hasil kegiatan Terlaksananya kewajiban bagi para Pemegang IPPKH dalam rangka Pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS.		
			3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 dokumen dan 20 HektarTerlaksananya pengembangan kualitas perbenihan tanaman hutan dan rencana pengelolaan RHL	Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengembangan kealitan perbenihan tanaman hutan dan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan hasil kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan kualitas bibit dari sumber benih yang dipakai adalah bibit dan sumber benih yang berkualitas (20) hektar dan Rencana Pengelolaan RHL Kabupaten Bangka Selatan (1 Dokumen		
			4. Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	33 Orang dan 1 kali Meningkatnya kesejahteraan	Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat sekitar hutan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan	dan kelestarian lingkungan dengan hasil kegiatan peningkatan Koordinasi teknis penyuluhan Kehutanan sejumlah 26 orang dan terselenggaranya Lomba Wana Lestari tingkat Provinsi dengan prestasi meraih juara 1 Nasional Kelompok HKm.		
			5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	80 Hektar Terlaksananya reHektarbilisasi hutan dan laHektarn di dalam kawasan dan luar kawasan hutan dan aksi puncak penanaman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Keluaran kegiatan ini adalah lahan kritis yang terehabilitasi dengan hasil kegiatan 80 Hektar terealisasi dengan melibatkan stakeholder lainnya selain kegiatan yang bersumber dari Dinas Kehutanan terdiri dari 2 hektar berlokasi di Desa Lenggang Kabupaten Belitung Timur, 25 Hektar berlokasi di Desa Teru Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah dan 53 Hektar merupakan penghijauan yang dilakukan oleh Instansi terkait.		
			6. Pengembangan Perhutanan Sosial	6 KTH, 5HTR, 5HKm, 3 HD dan 1 Pokja Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial yan responsif Gender	Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Peningkatan pemberdayaan masyarakat sebanyak 6 Kelompok Tani Hutan (KTH), 5 Hutan Kemasyarakatan (HKm), 5 Hutan Tanaman Rakyat		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					(HTR), 3 Hutan Desa (HD), dan 1 Kelompok Kerja (Pokja) dengan hasil kegiatan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di dalam pemberdayaan 6 KTH, persentase HKM, 5 HTR, dan 3 HD.		
			7. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)	2 unit Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	2 unit Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif		
			8. ReHektarbitasi Hutan dan LaHektarn (DBH-DR KEHUTANAN)	5 Hektar terlaksananya RHL diluar kawasan Hutan	5 Hektar terlaksananya RHL diluar kawasan Hutan		
			9. ReHektarbitasi Hutan dan LaHektarn di KPHP Bubus Panca (DBH-DR KEHUTANAN)	2,2 Hektar terlaksananya RHL diluar kawasan Hutan	2,2 Hektar terlaksananya RHL diluar kawasan Hutan		
			10. ReHektarbitasi Hutan dan LaHektarn di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR KEHUTANAN)	5 Hektar terlaksananya RHL di dalam kawasan Hutan	5 Hektar terlaksananya RHL di dalam kawasan Hutan		
			11. ReHektarbitasi Hutan dan LaHektarn di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR KEHUTANAN)	21 Hektar terlaksananya RHL di dalam kawasan Hutan	21 Hektar terlaksananya RHL di dalam kawasan Hutan		
			12. ReHektarbitasi Hutan dan LaHektarn di KPHP Muntai Palas (DBH-DR KEHUTANAN)	10 Hektar terlaksananya RHL di dalam kawasan Hutan	10 Hektar terlaksananya RHL di dalam kawasan Hutan		
			13. ReHektarbitasi Hutan dan LaHektarn di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR KEHUTANAN)	5 Hektar terlaksananya RHL di dalam kawasan Hutan	5 Hektar terlaksananya RHL di dalam kawasan Hutan		
			14. ReHektarbitasi Hutan dan LaHektarn di KPHP Jebu Bembang Antar (DBH-DR KEHUTANAN)	6 Hektar terlaksananya RHL di dalam kawasan Hutan	6 Hektar terlaksananya RHL di dalam kawasan Hutan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			15. ReHektarbitasi Hutan dan LaHektarn di KPHP Belantu Mendanau (DBH-DR KEHUTANAN)	30 Hektar terlaksananya RHL di luar kawasan Hutan	30 Hektar terlaksananya RHL di luar kawasan Hutan		
			16. ReHektarbitasi Hutan dan LaHektarn di KPHP Gunung Duren (DBH-DR KEHUTANAN)	14 Hektar terlaksananya RHL di luar kawasan Hutan	14 Hektar terlaksananya RHL di luar kawasan Hutan		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA KEHUTANAN	PERSENTASE PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN OLEH UPTD KPH DENGAN TARGET 50%	50%		
			Penyelesaian Usulan PerubaHektarn Status kawasan hutan/TORA	50% Penyelesaian Usulan PerubaHektarn Status kawasan hutan/TORA	Tidak dilaksanakan pada tahun Anggaran 2019	Dikarenakan sudah dilaksanakan oleh BPKH Wilayah XIII	
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH				
			1. Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 Data Penyelidikan Kebumian	4 Data Penyelidikan Kebumian	-	-
			2. Dukungan Percepatan Pembangunan Geopark	10 Obyek	15 Obyek	1. Belum tersedianya data deliniasi batas geosite yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Geopark Pulau Belitung(Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur) sehingga Dinas ESDM berkoordinasi dengan Pemda Kab. Belitung untuk melaksanakan deliniasi pada beberapa geosite yang sudah ada pengelolanya. 2. Belum adanya kejelasan status lahan pada beberapa geosite untuk Geopark Nasional Belitung.	Kegiatan deliniasi dan FGD harus dilanjutkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						3. Belum adanya pengelola pada beberapa geosite sehingga menyulitkan bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan deliniasi. 4. Belum tersosialisasinya Geopark kepada masyarakat. 5. Keterbatasan anggaran perjalanan dinas FGD selanjutnya di Belitung tidak terlaksana 6. Tidak hadirnya narasumber pusat yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran narasumber pusat.	
			3. Pembinaan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30 Titik Pemanfaatan Air Tanah	30 Titik Pemanfaatan Air Tanah	1. Masih rendahnya kesadaran penggunaan air tanah untuk memenuhi kewajiban perizinan air tanah. 2. Masih rendahnya kepatuhan pemegang izin SIPA untuk memasang meteran air sebagai alat hitung besaran pajak air tanah. 3. Masih kurangnya peran stake holder terkait berkenaan dengan perizinan air tanah. 4. Jumlah SDM seksi air tanah kurang. 5. Untuk pembinaan dan supervise pemanfaatan air tanah di dalam Kabupaten/Kota yang tidak	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						<p>diakomodir dengan SPPD atau kendaraan Dinas mengalami kesulitan untuk melakukan survei.</p> <p>6. Kendala di lapangan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemilik/petugas yang mengurus air tanah tidak berada di tempat b. Pemilik/petugas tidak mau menunjukkan lokasi sumur c. Pemilik/petugas tidak mengakui usaha menggunakan air sumur d. Tempat usaha sedang tutup atau jam istirahat 	
			4. Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Air Tanah	15 Perusahaan	15 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kepatuhan pemegang izin SIPA untuk memperpanjang izin yang telah jatuh tempo. 2. Masih belum dipenuhinya kewajiban selaku pemegang SIPA. 3. Adanya pergantian pegawai/operator yang bertanggung jawab atas sumur, menyebabkan kesulitan memperoleh data teknis sumur. 4. Untuk kegiatan verifikasi di dalam Kabupaten/Kota yang tidak diakomodir dengan SPPD atau kendaraan Dinas 	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						mengalami kesulitan untuk melakukan survey lapangan.	
			5. Survey Geofisika Aplikasi Metoda Geolistrik Untuk Pendugaan Keberadaan Lapisan Akuifer Bawah Permukaan	4 Desa	4 Desa	-	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM				
			1. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	120 Perusahaan	145 Perusahaan	1. Tidak semua pemegang IUP menyampaikan RKAB 2. Banyak IUP yang sudah tidak aktif 3. Tidak ada kendaraan dinas untuk operasional pengawasan ke lapangan	Mengajukan pengadaan kendaraan operasional
			2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	80 M	119.6 M	Asumsi dinas untuk PNBP melebihi target	Menyusun asumsi dinas untuk PNBP lebih akurat
			3. Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-
			4. Pembinaan Pengembangan dan Pernerdayaan Masyarakat Sekitar (Community Developmen and Carporate Sosial Responsibility/CD-CSR)	20 Perusahaan	12 Perusahaan	Hanya ada beberapa perusahaan pemegang IUP yang mengajukan RKAB sehingga kegiatan produksi pun terbatas hanya dilakukan oleh perusahaan tersebut saja.	Melaksanakan sosialisai secara continyu
			5. Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam	25 Rekomendasi Perusahaan	6 Rekomendasi Perusahaan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Pembinaan Produksi dan Pemasaran Mineral Logam	20 Perusahaan	8 Perusahaan	-	-
			7. Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan Pertambangan	1 Doukumen Kajian	1 Doukumen Kajian	-	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN				
			1. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	200 IUP	167 IUP	Realisasi keuangan ada pada kegiatan lain	-
			2. Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 Nominator	3 Nominator	-	-
			3. Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	-	-
			4. Pertemuan Tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	190 Peserta	133 Peserta	Peserta banyak tidak hadir sesuai dengan undangan karena kegiatan di akhir tahun anggaran	Pelaksanaan diawal tahun anggaran
			5. Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP OP	40 Perusahaan	40 Perusahaan	-	-
			6. Pelatihan Teknis RKAB	100 Peserta	120 Peserta	-	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI				
			1. Pembangunan Penerangan Jalan Umum	120 Unit	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			(PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat (Kementrian ESDM Dirjen EBTKE) terkait pemasangan PJU mengunakan tenaga surya sehingga Dinas ESDM mengembalikan alokasi anggaran ke Kas Negara.	
			2. Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	85 Perusahaan	85 Perusahaan	-	-
			3. Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	440 Ribu Barel Lifting Migas	358.011,36 Barel	Ada beberapa kegiatan Rapat Kerja yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan ADPM bersamaan dengan demonstrasi pelaksanaan Pemilu 2019 di Jakarta.	Tidak mengikuti kegiatan tersebut karena terkendala faktor keamanan. Berdasarkan Surat keputusan Menteri ESDM RI No. 1987 K/80/MEM/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Daerah penghasil dan Dasar Perhtiungan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Minyak dan gas Bumi untuk tahun 2019 sebesar 449,36 ribu barel.
			4. Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	60 Perusahaan	75 Perusahaan	1. HET LPG Tabung 3 kg di Pulau Belitung lebih tinggi dari HET LPG Tabung 3 kg di Pulau Bangka yang disebabkan oleh belum adanya Stasiun Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Pulau Belitung dimana untuk pendistribusian LPG	1. Untuk segera membangun SPBE di Pulau Belitung. 2. Penerbitan Surat Edaran Gubernur Kep. Babel No. 541/1043/IV/2019 tanggal 11 November 2019

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						<p>Tabung 3 kg tersebut dipasok oleh SPBE yang ada di Pulau Bangka sehingga menambah biaya angkutan laut.</p> <p>2. Terjadinya antrian di SPBU-SPBU yang disebabkan oleh adanya pengerit.</p> <p>3. Masih minimnya anggaran sehingga pembinaan dan pengendalian terhadap BBM dan Gas di Provinsin Kepulauan Bangka Belitung kurang maksimal.</p>	<p>tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu /Solar Subsidi dan Jenis bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan/Bensin RON 88 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana terhitung tanggal 2 Desember 2019 untuk pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT)/Solar bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode pembayaran cashless dengan fuelcard Kerja Sama antara Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dengan Bank BRI, PT. Pertamina (Persero), Hiswana Migas Kepulauan Bangka Belitung, Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Korem 045</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Garuda Jaya Bangka Belitung. 3. Agar dilakukan penambahan anggaran pada tahun 2020.
			5. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 Unit	-	Tidak adanya perusahaan yang sanggup untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut dikarenakan selain pergantian Sparepart, lokasi pemasangan PJUTS yang sudah di pelihara akan di pindahkan ketempat lain yang lebih aman dan safety	
			6. Penyusunan PERDA dan Sosialisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Draft Perda	1 Perda	Untuk sosialisasi PERDA RUED Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengesahan PERDA RUED tersebut dilakukan pada akhir tahun 2019 sehingga tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.	Agar Sosialisasi PERDA RUED Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tahun 2020
6	PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	PERTUMBUHAN VOLUME EKSPOR 862.000 TON	PERTUMBUHAN VOLUME EKSPOR 619.141,19 TON	1. Jumlah Eksportir Timah Untuk Tahun 2019 Sebanyak 4 Perusahaan .Penurunan Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Ekspor Tersebut Karena Masih Banyak Perusahaan Yang Belum Dapat Memenuhi Ketentuan Tentang Cpi (Competent Person Of Indonesia)	1. Meningkatkan Promosi Untuk Menemukan Pasar Baru Bagi Komoditi Dan Produk Ekspor Bangka Belitung 2. Rebranding Produk Ekspor Bangka Belitung .
				PERSENTASE PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (18 BAHAN POKOK) 83 %	PERSENTASE PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (18 BAHAN POKOK) 83 %		
				PERTUMBUHAN NILAI RESI GUDANG YANG DITERBITKAN 20%	PERTUMBUHAN NILAI RESI GUDANG YANG DITERBITKAN 20%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PERSENTASE PENINGKATAN PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI 10 %	PERSENTASE PENINGKATAN PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI 10 %	2. Penyebab Lain Penurunan Nilai Ekspor Adalah Penurunan Nilai Komoditi Ekspor Bangka Belitung Di Pasar Dunia, Terutama Komoditi Lada Dan Timah.	
			1. Pelaksanaan Pasar Murah	30 kali jumlah pelaksanaan	41 kali jumlah pelaksanaan		
			2. Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya mineral	45 Pelaku Usaha	37 Pelaku Usaha	1. Dari 32 Eksportir Timah yang terdaftar hanya 4 perusahaan yang melakukan Ekspor Balok Timah. 2. Informasi Pelaksanaan Stuffing dari PT. BGR sering kali mendadak sehingga tidak dapat disiapkan petugas kelapangan dan ada kegiatan stuffing yang dilaksanakan pada hari libur.	Melakukan Koordinasi dengan PT. BGR untuk dapat menginformasikan kegiatan Stuffing dengan lebih cepat.
			3. Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	1 Sistem Resi Gudang	1 Sistem Resi Gudang		
			4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha		
			5. Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	3 Kali Jumlah Keikutsertaan	3 Kali Jumlah Keikutsertaan		
			6. Informasi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya Data Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya 20 Komoditi	Tersedianya Data Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya 20 Komoditi		
			7. Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	10 Orang	10 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			8. Partisipasi Pepper Day	Terlaksananya Kegiatan Partisipasi 11 Orang	Terlaksananya Kegiatan Partisipasi 17 Orang		
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	PERSENTASE PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA (112 BARANG SNI WAJIB; 140 PELAKU USAHA TERTIB NIAGA) 14 %	PERSENTASE PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA (112 BARANG SNI WAJIB; 140 PELAKU USAHA TERTIB NIAGA) 14 %		
				JUMLAH INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN (KET : SADAR =0-20, PAHAM= 21-40, MAMPU = 41-60, KRITIS = 61-80, BERDAYA = 81-100) 22 INDEKS	JUMLAH INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN (KET : SADAR =0-20, PAHAM= 21-40, MAMPU = 41-60, KRITIS = 61-80, BERDAYA = 81-100) 43,34 INDEKS		
			1. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	10 Barang dan Jasa	10 Barang dan Jasa		
			2. Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	100 orang	100 orang		
			3. Pos Layanan Pengaduan Konsumen	36 Jumlah Pengaduan Konsumen	36 Jumlah Pengaduan Konsumen		
			4. Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	400 Orang Jumlah Konsumen	400 Orang Jumlah Konsumen		
			5. Pengawasan Tertib Niaga	14 Kali Jumlah Pengawasan	14 Kali Jumlah Pengawasan		
			6. Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelanggaran dalam Rangka Pengawasan Barang beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	1 Kasus	-	Karena anggaran untuk kegiatan penegakan hukum tidak ada lagi maka tidak dapat dilakukan kegiatannya, alasannya Penyidikan tidak dilakukan karena harus dilakukan Pengawasan Pengamatan Pengumpulan Barang keterangan	Harus ada dukungan anggaran dalam Penegakan Hukum dan akan ditindak lanjuti pada Tahun Anggaran 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						(Wasmatcapulbaket),kasus tersebut harus dilakukan penyelidikan secara matang sehingga tidak terkendala Pra Peradilan atas Kasus saat dilakukan kegiatan penyidikan	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	PERSENTASE KOMODITI UNGGULAN DAERAH DIUJI YANG MEMENUHI STANDAR PENGUJIAN 18%	PERSENTASE KOMODITI UNGGULAN DAERAH DIUJI YANG MEMENUHI STANDAR PENGUJIAN 18%		
			1. Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	26 orang	26 orang		
			2. Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	3 Ruang Lingkup Akreditasi	2 Ruang Lingkup Akreditasi	1. Adanya Penyesuaian dari SNI ISO/IEC 17025;2005 ke SNI ISO 17025;2017 sehingga untuk ruang lingkup akreditasi hanya 2 (dua) ruang lingkup akreditasi yang terpelihara status akreditasinya yaitu Komoditi Lada dan CPO, sedangkan untuk penambahan ruang lingkup status akreditasi tidak tercapai pada tahun 2019. 2. Kurangnya Kompetensi Personil UPTD BPSMB dan Sarana dan Prasarana Penunjang untuk Penambahan ruang lingkup pengujian 3. Masih adanya temuan ketidak sesuaian Assesmen Re Akreditasi	1. Untuk Penambahan ruang lingkup status akreditasi laboratorium diharapkan laboratorium UPTD BPSMB dapat meningkatkan kompetensi personil dengan menganggarkan biaya pelatihan personil dan sarana dan prasarana pendukung laboratorium. 2. Laboratorium harus mulai mempersiapkan tahapan-tahapan penting sebagai langkah menuju pengembangan ruang lingkup serta mendapatkan pengakuan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							kompetensi dari pihak ketiga yang berwenang menerbitkan kompetensi laboratorium (akreditasi)
			3. Monitoring Mutu Pengujian	1 Laporan Mutu Komoditi	1 Laporan Mutu Komoditi		
			4. Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	10 Orang Personil Terlatih	10 Orang Personil Terlatih		
			5. Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah	200 Peserta	200 Peserta		
7	PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	1 KAWASAN STRATEGIS/KAWASAN INDUSTRI/KAWASAN SENTRA	1 KAWASAN STRATEGIS/KAWASAN INDUSTRI/KAWASAN SENTRA		
				15 INDUSTRI YANG MEMENUHI STANDAR INDUSTRI	18 INDUSTRI YANG MEMENUHI STANDAR INDUSTRI		
			1. Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	1 Dokumen yang tersusun	1 Dokumen yang tersusun		
			2. Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	1 Unit Industri Besar dan SIKIM yang teregistrasi	9 Unit Industri Besar dan SIKIM yang teregistrasi		
			3. Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	2 Lokasi Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	2 Lokasi Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri		
			4. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	50 Industri yang diawasi	50 Industri yang diawasi		
			5. Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri	60 Peserta yang memahami Standar Produk Industri	60 Peserta yang memahami Standar Produk Industri		
			6. Pendataan Perizinan Industri	1 Buku yang disusun	1 Buku yang disusun		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER	PERSENTASE TENAGA KERJA INDUSTRI	PERSENTASE TENAGA KERJA INDUSTRI		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	TERHADAP TOTAL TENAGA KERJA 5,17%	TERHADAP TOTAL TENAGA KERJA 5,17%		
				PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,7%	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,7%		
				PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI INDUSTRI PARIWISATA 0,319%	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI INDUSTRI PARIWISATA 0,319%		
				PERSENTASE INDUSTRI YANG MEMILIKI INFORMASI KANDUNGAN NUTRISI OLAHAN PANGAN 4,68%	PERSENTASE INDUSTRI YANG MEMILIKI INFORMASI KANDUNGAN NUTRISI OLAHAN PANGAN 4,68%		
				PERTUMBUHAN INDUSTRI PADA SEKTOR PERTANIAN 1.499 UNIT	PERTUMBUHAN INDUSTRI PADA SEKTOR PERTANIAN 1.499 UNIT		
				PERSENTASE TENAGA KERJA INDUSTRI PADA SEKTOR PERTANIAN 10,28%	PERSENTASE TENAGA KERJA INDUSTRI PADA SEKTOR PERTANIAN 10,28%		
				PERTUMBUHAN INDUSTRI TURUNAN POTENSI SUMBER DAYA MINERAL YANG DIKEMBANGKAN 4 UNIT	PERTUMBUHAN INDUSTRI TURUNAN POTENSI SUMBER DAYA MINERAL YANG DIKEMBANGKAN 4 UNIT		
				PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI BIDANG INDUSTRI TURUNAN PERTAMBANGAN 1,035%	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI BIDANG INDUSTRI TURUNAN PERTAMBANGAN 1,035%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			1. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Jumlah SDM yang Terlatih 80 Pelaku Industri/Masyarakat	Jumlah SDM yang Terlatih 80 Pelaku Industri/Masyarakat		
			2. Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 700 Pelaku Industri	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 700 Pelaku Industri		
			3. Pemberdayaan Dekranasda	500 Pelaku Industri/Masyarakat	500 Pelaku Industri/Masyarakat		
			4. Rumah Pengembangan Produk	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 400 Pelaku Industri	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 400 Pelaku Industri		
			5. Lomba Industri Kreatif	30 Produk Kreatif	30 Produk Kreatif		
			6. Promosi/Gelar Produk Industri	9 Event	15 Event		
			7. Pembinaan dan Pengembangan OVOP	9 OVOP	9 OVOP		
			8. Fasilitasi Uji Nutrisi	120 Produk yang memiliki informasi nutrisi	120 Produk yang memiliki informasi nutrisi		
8	TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
			1. Perencanaan Pembangunan kawasan transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
			2. Peningkatan kapasitas SDM bidang Transmigrasi	25 orang di kawasan Transmigrasi (25 orang Perempuan). Di Kabupaten Selinsing Kabupaten Belitung Timur.	25 orang di kawasan Transmigrasi (25 orang Perempuan). Di Kabupaten Selinsing Kabupaten Belitung Timur.		

III.1.4 PENYELENGARA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan

Program dan kegiatan urusan perencanaan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.120.849.700,00 dan realisasi keuangan Rp 8.568.910.528,23 setara dengan 84,67%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan perencanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana terlampir pada tabel III.4.

2. Keuangan

Program dan kegiatan urusan keuangan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 30.010.560.507,00 dan realisasi keuangan Rp 25.036.742.220,46 setara dengan 83,43%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan keuangan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana terlampir pada tabel III.4.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program dan kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar sebesar Rp 23.283.227.324,00 dan realisasi keuangan Rp 21.188.559.727,00 setara dengan 91,00%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana terlampir pada tabel III.4.

4. Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar sebesar Rp 1.383.921.500,00 dan realisasi keuangan Rp 822.901.289,00 setara dengan 59,46%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan penelitian dan pengembangan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana terlampir pada tabel III.4.

5. Pengawasan

Program dan kegiatan urusan pengawasan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 8.124.852.900,00 dan realisasi keuangan Rp 7.474.041.344,00 setara dengan 91,99%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana terlampir pada tabel III.4.

6. Fungsi Penunjang Lainnya

Program dan kegiatan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 194.903.787.760,00 dan realisasi keuangan Rp 163.974.642.661,00 setara dengan 84,13%.

Indikator kinerja program dan kegiatan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana terlampir pada tabel III.4.

Tabel III.4
Capaian Program dan Kegiatan Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
			2. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	-	-
			3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	16 Laporan	16 Laporan	-	-
			4. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-
			5. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1000 Elemen Data	100 Elemen Data	-	-
			6. Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	-
			7. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	-
			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
			1. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	4 Rekomendasi/ Kesepakatan	4 Rekomendasi/ Kesepakatan	-	-
			2. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	4 Rekomendasi/ Kesepakatan	4 Rekomendasi/ Kesepakatan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	-
			4. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			5. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				
			1. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	1 Rekomendasi/ Laporan	1 Rekomendasi/ Laporan	-	-
			2. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	4 Rekomendasi/ Laporan	4 Rekomendasi/ Laporan	-	-
			3. Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	-	-	-	-
			4. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			5. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN				
			1. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	4 Rekomendasi/ Laporan	4 Rekomendasi/ Laporan	-	-
			2. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	4 Rekomendasi/ Laporan	4 Rekomendasi/ Laporan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			4. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			5. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		BADAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH				
			1. Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	100%	108,15%		
			2. Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	100%	100%		
			3. Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	100%	100%		
			4. Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	100%	100%		
			5. Sosialisasi Pajak Daerah	100%	96,67%		
			6. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	100%	100%		
			7. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	100%	100%		
			8. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			9. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	100%	100%		
			10. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	100%	100%		
			11. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	100%	100%		
			12. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	100%	100%		
			13. Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Pajak Daerah	0%	100%		
			14. Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	100%	100%		
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH				
			1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain	100%	100%	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, dikarenakan efisiensi belanja keikutsertaan (biaya kontribusi) rapat kerja ADPM (ASOSIASI DAERAH PENGHASIL MIGAS) dan sedikitnya voklume keikutsertaan dari instansi yang mengadakan rapat kerja ADPM.	Harus sering menghadiri menginformasi agar dapat pelajari

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Rapat Kerja Restribusi Daerah Dan Pendapatan Lain-Lain	100%	100%		
			3. Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	100%	100%		
			4. Tim Pengawasan Peningkatan Pendapatan Daerah	100%	100%		
			5. Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah	100%	100%	Bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan regulasi/kebijakan bidang Tata Kelola Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain realisasi fisiknya telah terlaksana 100% dengan terbitnya Peraturan Gub Kep. Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pungutan Retribusi Perizinan Tertentu, untuk realisasi keu/belanja penyerapan anggaran sebesar 25,84% dikarenakan telah dilakukan efisiensi atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan juga dilakukannya Efisiensi anggaran belanja pengadaan fotocopy kegiatan.	
			PROGRAM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD				
			2. Evaluasi Raperda Kab/Kota Tentang APBD	100%	100%	Karena tidak ada pencairan honorarium dan administrasi pengadaan	
			3. Rapat-Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	Untuk Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Hapuskan Karena hanya untuk Biaya Jasa Narasumber TA. 2019	
			4. Penyusunan Raperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	0,00%	Karena Aturan Teknis Penyusunan Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang "Pengelolaan Keuangan Daerah" belum ditetapkan , sehingga Penyusunan Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan tersebut Belum Dapat dilaksanakan	Kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari pengganti/perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang "Pengelolaan Keuangan Daerah"
			5. Penyusunan KUA Dan PPAS	100%	100%		
			6. Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Anggaran	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			7. Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD	100%	87,00%		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AKUTANSI DAN PELAPORAN				
			1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%		
			2. Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA keuangan	100%	100%		
			3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100%	100%	Dikarenakan sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 masih terdapat OPD yang belum dapat menyelesaikan Laporan LO, Neraca & LPE Semester I sehingga untuk belanja cetak LO, Neraca dan LPE tidak dapat dilaksanakan	Perlu adanya komitmen dari masing-masing OPD untuk dapat menyelesaikan laporan keuangan semester tepat waktu
			4. Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%		
			5. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	100%		
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ASET DAERAH				
			1. Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan	100%	114,29%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
			2. Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	100%	100%	<p>1. Bahwa terdapat alokasi belanja perawatan kendaraan bermotor pada kegiatan pengamanan dan pengawasan barang milik daerah.terdiri dari belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas dengan uraian ganti oli kendaraan yang diserahkan kepengelola sebesar Rp.50,000,000,00 dan belanja surat tanda nomor kendaraan dengan uraian bayar pajak kendaraan bermotor yang diserahkan ke pengelola sebesar Rp. 200,000,000,00</p> <p>2. Bahwa kendaraan dinas yang diserahkan ke pengelola melalui badan keuangan daerah Prov.kep babel pada bulan</p>	<p>Bahwa dari sejumlah kendaraan dinas tersebut telah ditindak lanjuti dengan penetapan status penggunaan keperangkat daerah. Pemindah tangan melalui hibah serta pemanfaatan melalui pinjam pakai, sehingga untuk belanja perawatan kendaraan bermotor tidak di realisasikan karena perawatan kendaraan bermotor tersebut berada dipihak yang menggunakan kendaraan, penerimaan hibah dan yang meminjam pakai.</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						januari 2019 sebanyak 199 unit, terdiri dari 54 kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 145 kendaraan dinas roda 2 (dua)	
			3. Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	100%		
			4. Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	100%		
			5. Penyusunan laporan barang milik daerah	100%	100%		
			6. Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	100%	70%		
			7. Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan	100%	100%		
			8. Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	100%	100%		
			9. Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	100%	100%		
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI				
			1. Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran Dan PPK SKPD (PPRG)	100%	90,83%	Teknis bendahara pengeluaran dan PPK - SKPD dianggarkan dalam DPA dan sudah terlaksana dan terealisasi Rp. 39,175,000,00 atau 27,29% semua keg ini diperuntukkan untuk	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						bendahara pengeluaran, PPK dan Staf pengelola keu di lingkungan OPD, namun karena adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Prov. sehingga mereka meminta kepada Bakuda untuk memfasilitasi hal tersebut dalam kegiatan Pembinaan Teknis bagi Bendahara Pengeluaran, Pembantu Sekolah, PPK dan staf pengelola keu, namun dalam Perubahan APBD TA 2019 kami tidak dapat mengajukan pengurangan dana tersebut karena kegiatan tersebut bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) sehingga tidak dapat di ubah (dikurangi) besaran pagu tersebut	
			2. Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan	100%	124,00%	Kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV sesuai dengan rencana anggaran kas yg terdapat di DPA, sosialisasi ini dihadiri oleh OPD yang memiliki UPTD/UPTB yg dihadiri oleh 120 peserta dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						yg tidak hadir 80 orang, ketidak hadiran mereka dikarenakan kegiatan akhir tahun dan untuk itu mereka tidak dapat mengakomodir undangan tersebut dan pembiayaan SPPD mereka pun sudah tidak memungkinkan lagi.	
			3. Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah	100%	100%		
			4. Peningkatan Fungsi Pelayanan Dan Pemeliharaan Sistem Penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	100%		
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI, PROMOSI, DAN KEPANGKATAN	Persentase Pegawai ASN yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi 74%; Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi 87%; Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat waktu 92%	Persentase Pegawai ASN yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi 100%; Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi 26,6%; Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat waktu 100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			1. Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan (25 Orang)	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan (27 Orang)		
				Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN (150 Orang)	Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN (0 Orang)	Dalam tahap seleksi CASN/ASN sesuai dengan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/v205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019	Pelaksanaan tahap seleksi CASN/ASN akan dilaksanakan sesuai dengan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/v205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019
			2. Perencanaan ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan ASN (1 Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan ASN (5 Dokumen)		
			3. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun (900Orang)	Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun (1.303Orang)		
			4. Promosi dan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang di Promosi / Mutasi (250 Orang)	Jumlah ASN yang di Promosi / Mutasi (302 Orang)		
				Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment (300 Orang)	Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment (179 Orang)		
			PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu 65%; Persentase Akurasi Data dan informasi Kepegawaian 84%;	Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu 63,23%; Persentase Akurasi Data dan informasi Kepegawaian 84%;		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang 0,15%; Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan 2,19%	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang 0,11%; Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan 10%		
			1. Pembinaan ASN	Jumlah ASN Yang Terbina (6.907 Orang)	Jumlah ASN Yang Terbina (4.633 Orang)		
			2. Pengembangan Profesi ASN	Jumlah ASN Yang Dikembangkan Profesinya (4.000 Orang)	Jumlah ASN Yang Dikembangkan Profesinya (3.657 Orang)		
			3. Peningkatan Kesejahteraan ASN	Jumlah ASN Yang Sejahtera (2.776 Orang)	Jumlah ASN Yang Sejahtera (4.537 Orang)		
			4. Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK (280 Buku)	Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK (250 Buku)		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial 96%; Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional 42%; Nilai Akreditasi Diklat 81; Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Pendidikan	Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial 96%; Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional 42%; Nilai Akreditasi Diklat 85,88; Persentase Pegawai ASN		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Formalnya 39,90%	Yang Meningkatkan Pendidikan Formalnya 25,33%		
			1. Ujian Dinas dan Seleksi Diklatpim III dan IV	Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas (140 Orang)	Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas (149 Orang)		
			2. Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan (40 Orang)	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan (80 Orang)		
				Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar (360 Orang)	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar (444 Orang)		
			3. Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional (660 Orang)	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional (1.077 Orang)		
			4. Peningkatan Pendidikan Formal	Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing (40 Orang)	Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing (45 Orang)		
			5. Peningkatan Mutu Kediklatan	Nilai akreditasi diklat (81 Nilai)	Nilai akreditasi diklat (85,88 Nilai)		
				Jumlah Dokumen (2 Dokumen)	Jumlah Dokumen (2 Dokumen)		
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
			1. Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	3 Penelitian	3 Penelitian	-	-
			2. Penguatan Jaringan Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan	-	-
			3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
			4. Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	6 Rekomendasi	5 Rekomendasi	Adanya perubahan pada SK PPTK dan kurang aktifnya keanggotaan Dewan	Mengganti anggota Dewan Riset Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Riset Daerah karena kesibukan pada profesi masing-masing	
		INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Prosentase tingkat capaian OPD dengan Laporan Kinerja BAIK dengan target 100 %	85 %	-	-
			1. Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4 Laporan	-	Pelaksanaan terhadap kegiatan yang secara realisasi keuangan 0% dikarenakan dari DPA/DPPA kegiatan tersebut hanya berupa belanja cetak dan penggandaan	Melakukan penyesuaian kode rekening pada DPA/DPPA terhadap kegiatan tersebut
			2. Kegiatan Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4 Laporan	-	Pelaksanaan terhadap kegiatan yang secara realisasi keuangan 0% dikarenakan dari DPA/DPPA kegiatan tersebut hanya berupa belanja cetak dan penggandaan	Melakukan penyesuaian kode rekening pada DPA/DPPA terhadap kegiatan tersebut
			3. Kegiatan Penanganan Whistle Blower System	12 Laporan	-	Pelaksanaan terhadap kegiatan yang secara realisasi keuangan 0% dikarenakan dari DPA/DPPA kegiatan tersebut hanya berupa belanja cetak dan penggandaan	Melakukan penyesuaian kode rekening pada DPA/DPPA terhadap kegiatan tersebut
			4. Kegiatan Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	-	Pelaksanaan terhadap kegiatan yang secara realisasi keuangan 0% dikarenakan dari DPA/DPPA kegiatan tersebut hanya berupa	Melakukan penyesuaian kode rekening pada DPA/DPPA terhadap kegiatan tersebut

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						belanja cetak dan penggandaan	
			5. Kegiatan Penilaian Internal Zona Integritas	5 Doukmen	5 Dokumen		
			6. Kegiatan Monev Laporan Gratifikasi	12 Laporan	12 Laporan		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat 100 %	95 %		
			1. Kegiatan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR	15 %	-	Pelaksanaan Kegiatan akan dipindahkan ke BAKUDA Provinsi Kep. Bangka Belitung	Tupoksi sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016
			2. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	150 Obrik	150 Obrik		
			3. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	1 PKPT	1 PKPT		
			4. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	150 Obrik	150 Obrik		
			5. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Laporan	2 Laporan		
			6. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	15 Laporan	15 Laporan		
			7. Kegiatan Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	100 %	100 %		
			8. Kegiatan Bimbingan Teknis E-LHKPN	300Orang	300 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAAN, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	Peningkatan Capaian Level Maturitas SPIP (level 3)	level 3		
			1. Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah		
			2. Kegiatan Konsultasi Audit	42 Perangkat Daerah	-	Pelaksanaan terhadap kegiatan yang secara realisasi keuangan 0% dikarenakan dari DPA/DPPA kegiatan tersebut hanya berupa belanja cetak dan penggandaan	Melakukan penyesuaian kode rekening pada DPA/DPPA terhadap kegiatan tersebut
			3. Kegiatan Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	-	-	Kegiatan sudah dilaksanakan di BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			4. Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi SPIP	4 Kali	-	Pelaksanaan terhadap kegiatan yang secara realisasi keuangan 0% dikarenakan dari DPA/DPPA kegiatan tersebut hanya berupa belanja cetak dan penggandaan	Melakukan penyesuaian kode rekening pada DPA/DPPA terhadap kegiatan tersebut
		SEKRETARIAT DAERAH					
		BIRO PEMERINTAHAN	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
			1. Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.	30 Bidang	102 Bidang	Realisasi melebihi target dikarenakan pada Anggaran Perubahan target yang telah ditetapkan sebanyak 90 bidang tidak bertambah	Meningkatkan lagi koordinasi dengan tim anggaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Internal Biro Pemerintahan.	6 Dokmen	6 Dokmen	-	-
			3. Pembinaan Penanganan Masalah Konflik Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			4. Penyusunan Sistem Informasi Data Administrasi Kewilayahan.	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-
			5. Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi.	4 Gesetir Nama - Nama Pulau dan Updating Data	4 Gesetir Nama - Nama Pulau dan Updating Data	1. Sebagian Kabupaten/ Kota tidak menganggarkan kegiatan pemuktahiran data rupa bumi 2. SDM Kabupaten/ Kota yang belum menguasai teknis pembuatan nama unsur rupa bumi	1. Memerintahkan Kabupaten/ Kota (Bagian Pemerintahan) untuk melaksanakan edaran dari Mendagri untuk mengakomodir kegiatan Pemuktahiran Data Rupa Bumi dalam APBD Kabupaten/ Kota 2. Mengarahkan Kabupaten/ Kota untuk meningkatkan kompetensi agar menguasai teknis toponimi
			6. Penegasan Batas Daerah.	2 Segmen Batas Daerah	2 Segmen Batas Daerah	Pengalihan status asset pilar batas daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi ke Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan karena sebagian Kabupaten/Kota belum menyepakati dan menganggarkan dana untuk kegiatan tersebut	Meningkatkan upaya fasilitasi antar Kabupaten/Kota agar diperoleh kesepakatan terkait batas daerah yang dapat diimplementasikan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH		-	-	
			1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).	1 Laporan	1 Laporan		
			2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	7 Dokumen	7 Dokumen		
			3. Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov.Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri.	60 Surat Izin	48 Surat Izin	Surat pengajuan izin keluar negeri yang disampaikan ke Kemendagri melewati batas maksimal 10 hari sebelum keberangkatan	Melakukan sosialisasi tentang rekomendasi perjalanan dinas bagi Kepala Daerah, anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah
			4. Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1 Dokumen	1 Dokumen		
			5. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019.	7 Kabupaten / Kota			
			6. Verifikasi Berkas Calon Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	80 %	100 %	Realisasi melebihi target dikarenakan semua berkas Calon Anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terverifikasi	-
			7. Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	Penerapan dan capaian SPM Pemprov. Kep	Perangkat Daerah masing-masing urusan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.			Babel Tahun 2019 belum terlaksana secara optimal, dikarenakan secara umum Perangkat Daerah pengampu SPM 6 (enam) urusan belum mempunyai kegiatan khusus dengan target indikator yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.	mengoptimalkan capaian kegiatan yang telah ada untuk mencapai target pelaksanaan SPM. Melibatkan Bappeda dan Inspektorat Provinsi dalam optimalisasi revisi dokumen perencanaan maupun usulan penganggaran dalam program/kegiatan.
			8. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH				
			1. Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	-	-
			2. Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	1 Kali Iuran dan Rakernas	1 Kali Iuran dan Rakernas	-	-
			3. Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	2 Kali Iuran dan Pertemuan BKS	2 Kali Iuran dan Pertemuan BKS	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	6 Rekomendasi Kerjasama / Perjanjian	6 Rekomendasi Kerjasama / Perjanjian	-	-
			5. Kegiatan Inventarisasi Potensi Kerjasama	1 laporan	1 laporan	-	-
			6. Verifikasi dan Validasi Bantuan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD.	5 Proposal	3 Proposal	Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung sehingga tidak semua proposal yang masuk bisa diakomodir	-
			7. Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat.	4 Kali pertemuan	1 Kali Pertemuan	Efisiensi anggaran	-
		BIRO HUKUM	PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
			1. Penyusunan Produk Hukum Daerah	70 Peraturan Gubernur dan 900 Keputusan Gubernur	72 Peraturan Gubernur dan 1576 Keputusan Gubernur	1. Banyaknya Keputusan Gubernur yang seharusnya dapat diselesaikan ditataran Perangkat Daerah (Pengguna Anggaran) akan tetapi dalam teknis pelaksanaannya tetap diusulkan untuk ditandatangani oleh Kepala Daerah (Gubernur) sehingga hal tersebut menambah intensitas beban kerja pada Biro Hukum	1. Biro Hukum akan menyampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan baik berupa Surat Edaran Gubernur atau Sekretaris Daerah atau bentuk naskah dinas lainnya terkait dengan hal tersebut 2. Biro Hukum terus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat menambah tenaga legal drafter khususnya tenaga perancang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						2. Kurangnya tenaga legal drafting pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyusunan produk hukum daerah 3. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten pada Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam penyusunan produk hukum daerah yang akan disampaikan ke Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sulitnya proses koordinasi antara Biro Hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa	peraturan perundang-undangan dan analisis hukum 3. Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa agar berperan aktif dalam penyusunan produk hukum daerah sehingga produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			2. Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	100 Naskah Hukum Lainnya	323 Naskah Hukum Lainnya	-	-
			3. Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	12 Raperda	11 Raperda	Lambannya hasil evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri sehingga menghambat proses evaluasi Raperda tersebut	Biro Hukum selalu proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh hasil evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak menghambat pelaksanaan Perda tersebut di Kabupaten/Kota

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Penyusunan Propemperda dan Rancangan Peraturan Daerah	1 Usulan Propemperda dan 10 Raperda	1 Usulan Propemperda dan 8 Raperda	<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Pemrakarsa belum melakukan Pembentukan Raperda yang sudah dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Belum optimalnya sinergitas penganggaran antara Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masih kurangnya sumber daya manusia baik di Perangkat Daerah Pemrakarsa maupun di Subbag Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik kualitas maupun 	<ol style="list-style-type: none"> Dengan tidak dilakukan pembentukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa maka Rancangan Peraturan Daerah tidak dapat dilakukan pembahasan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan mekanisme penyusunan Propemperda dan melakukan koordinasi agar Perangkat Daerah Pemrakarsa sebelum mengajukan Propemperda telah melakukan pembentukan di tahun sebelumnya Adanya sinergitas penganggaran antara Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Cukupnya sumber daya manusia daerah baik di Perangkat Daerah Pemrakarsa maupun di Subbagian Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik kualitas maupun kuantitas dalam ketersediaan data perencanaan pembangunan sesuai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						<p>kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakannya</p> <p>4. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang tertib administrasi di Subbagian Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>5. Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah</p>	<p>dengan beban kerja yang dilaksanakannya</p> <p>4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang tertib administrasi di Subbagian Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah</p>
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH				
			1. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	2 Kasus	3 Kasus	Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten pada Subbagian Sengketa Hukum dalam menangani atau menyelesaikan sengketa perdata Pemerintah Daerah	Terus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar menambah sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani atau menyelesaikan sengketa perdata Pemerintah Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	2 Kasus	15 Kasus	Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten pada Subbagian Sengketa Hukum dalam menangani atau menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara	Terus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar menambah sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani atau menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
			3. Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	1 Laporan	-	-
			4. Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 Laporan	4 Laporan	-	-
			5. Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40 Orang	70 Orang	-	Tingginya minat masyarakat terhadap informasi hukum dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LBH secara gratis.
			PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM				
			1. Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	80 Peraturan Perundang-undangan, 50 Artikel dan 150 Buku	80 Peraturan Perundang-undangan, 0 Artikel dan 150 Buku	-	OPD banyak membuat regulasi tambahan yang mengatur berbagai hal untuk menunjang pelaksanaan roda pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	-
		BIRO UMUM	PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH				
			1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	92,99%.	Adanya efesiensi dalam penggunaan anggaran	-
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	86,60%.	Adanya efesiensi dalam penggunaan anggaran	-
			3. Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	96,82%.	Adanya efesiensi dalam penggunaan anggaran	-
		BIRO HUMAS	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI MEDIA DAN IT	100%	100%	-	-
			1. Publikasi Media Massa/Cetak	154 Tayang	154 Tayang		
			2. Publikasi Media Elektronik/IT	120 Tayang	120 Tayang		
			3. Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	30 Tayang	30 Tayang		
			4. Penerbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi	1.300 Eks	1.300 Eks		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PROTOKOLER	100%	100%		
			1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.700 Bh	1.700 Bh		
			2. Workshop Bidang Keprotokolan	75 Org	75 Org		
			PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.500 Eks	17.500 Eks		
			2. Pengumpulan, Penyaringan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah dirubah menjadi Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	185 Kali	185 Kali	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan peliputan kehumasan, layanan keprotokolan dan kegiatan dukungan kehumasan lainnya.	Menggunakan anggaran yang ada di Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
			3. Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	23 OPD	23 OPD		
			4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	3.668 Bh	3.668 Bh	Anggaran yang ada terbatas untuk penyediaan souvenir bagi seluruh OPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Melakukan pergeseran anggaran pada saat APBD Perubahan TA 2019.
		BIRO ORGANISASI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTA ANALISIS JABATAN	100 %	100 %		
			1. Evaluasi Kelembagaan UPTD/Cabdin Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	1 Dokumen		
			2. Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	1 Laporan		
			3. Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Validasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Dokumen	2 Dokumen		
			5. Validasi Standar Kopetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	1 Dokumen		
			6. Validasi evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	1 Dokumen		
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	100 %	100 %		
			1. Penyusunan Profil Aparatur Jabatan Struktural	15 Laporan	15 Laporan		
			2. Forum Sekretariat Daerah Provinsi Babel	1 Dokumen	1 Dokumen		
			3. Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Laporan	1 Laporan		
			4. Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	1 Laporan	1 Laporan		
			5. Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja	50 Orang	50 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
			6. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	1 Dokumen		
			7. Penyusunan Standar Capaian Kinerja Individu ASN	43 OPD	43 OPD		
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	100 %	100 %		
			1. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	1 Laporan		
			2. Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	1 Dokumen		
			3. pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	1 Laporan		
			4. Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
			5. Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	1 Dokumen		
			6. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			7. Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	1 Laporan	1 Laporan		
			8. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	1 Dokumen		
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN				
			1. Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan	17 Masjid dan rumah jabatan	17 Masjid dan rumah jabatan	Koordinasi dengan pihak terkait belum maksimal	Melakukan koordinasi yang baik dan maksimal dengan pihak terkait
			2. Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/MTQ Nasional Provinsi Kep Bangka Belitung	30 Orang (100%)	26 Orang (86 %)	Khafilah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada yang menjadi pemenang sehingga dana sebagai bonus bagi pemenang tidak terealisasi.	Meningkatkan lagi pembinaan/ pelatihan untuk peserta
			3. Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	1.255 orang jemaah	1.248 orang jemaah	Kurangnya daya serap disebabkan karena anggaran makan minum yang tidak terpakai. Hal ini disebabkan jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 tepat waktu sebagaimana jadwal yang oleh Kementerian Agama. Mengingat pada tahun sebelumnya keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji tidak tepat waktu sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. Itulah yang menjadi	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						faktor penyebab anggaran makan dan minum tidak terealisasi.	
			4. Pendampingan Jemaah Haji Provinsi Kep.Bangka Belitung	8 orang	6 orang	Karena tahun lalu di Embarkasih Palembang tidak Mengadakan Kegiatan Bimtek Bimbingan untuk Petugas Haji Daerah, Sehingga Tim TPHD dan TKHD Prov Bangka Belitung yang biasanya bergabung untuk mengikuti bimtek di Embarkasih Palembang tidak terlaksana .	Jika di embarkasih Palembang untuk Tahun depan tidak Melaksanakan Bimtek ,Maka Tim Petugas Haji Daerah Bisah diikut sertakan Bimtek di Kementrian Agama Prov Kepulauan Bangka Belitung
			5. Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Provinsi Kep. Bangka Belitung	100%	78,2%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya anggaran pengalihan dari kegiatan lain terkait dengan makan minum dan SPPD; 2. Adanya tambahan fasilitas dari Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 3. Adanya Honorarium Petugas yang tidak dibayarkan seperti Khotib dan Penterjemah/Penceramah Tambahan; 4. Adanya kelebihan pengajuan Honorarium Narasumber Pembinaan Agama bagi Lansia dan Bimbingan Pranikah bagi Siswa SLTA; 	Mengembalikan Anggaran Pengalihan ke kegiatan masing-masing Perencanaan Anggaran yang lebih cermat/teliti

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						5. Adanya penggantian Penceramah Tabligh Akbar yang sebelumnya diperkirakan menggunakan anggaran yang besar (transportasi tim), sehingga biaya transportasi tidak terealisasi maksimal.	
			6. Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	1.255 Jamaah	1.247 Jamaah	1. Mutasi keluar: 4 org 2. Mutasi masuk: 3 Org 3. Meninggal dunia: 2 org 4. Tunda Sakit: 1 org	Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			7. Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Provinsi Kep. Babel	100%	87,07%	-	-
			8. Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS	100%	84,74%	Tidak menentunya harga tiket pesawat dan harga berubah-ubah	Menyediakan anggaran tiket pesawat dengan harga batas tertinggi
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB DAN PEMUDA				
			1. Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kep. Bangka Belitung	100%	50,01%	Untuk Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 mengacu pada jadwal TP UKS Pusat yang mana pada Tahun 2019 ini adanya perbaikan Instrumen Penilaian Lomba	Untuk pelaksanaan kegiatan Rakerda pada tahun berikutnya akan dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian lomba sekolah sehat tingkat provinsi yang telah dilaksanakan tidak menunggu Surat Keputusan ditetapkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						<p>Sekolah Sehat, maka untuk Tahun 2019 ini Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional baru dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Juli 2019 dan minggu ke-4 September Evaluasi sekolah yang masuk nominasi ke tingkat nasional. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru melaksanakan Penilaian Lomba sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu ke-3 bulan Oktober s.d minggu ke-2 November 2019, sedangkan untuk Peserta Kegiatan Rakerda UKS/M adalah Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Tahun 2019 yang mana SK Pengukuhan Pemenang baru di tandatangi pada minggu pertama bulan Desember 2019. Jadi karena sudah dipenghujung tahun anggaran maka kegiatan Rakerda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Tidak dapat dilaksanakan.</p>	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung	100%	93,08%	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
			1. Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah	500 Proposal	300 Proposal	1. Kurangnya dana 2. Lokasi yang berjauhan	1. Memperbanyak proposal yang bakal dievaluasi setiap kali berkunjung 2. Mendahulukan proposal yang telah memenuhi persyaratan untuk dievaluasi menyusun jadwal kunjungan yang searah untuk dievaluasi
			2. Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah	200 Proposal	160 Proposal	1. Terbatasnya Ketersediaan Anggaran 2. Adanya proposal yang tidak mencairkan	1. Memperbanyak Tim Monev Di Lapangan 2. Mempercepat Proses Pencairan Proposal Yang Telah Disetujui
			3. Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21 Rekomendasi	21 Rekomendasi	Belum Sinkronnya Program Dan Kegiatan Kabupaten/Kota Serta Kementrian Agama Dengan Program Dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Memperbanyak Kegiatan Rapat Koordinasi Di Tingkat Kabupaten Dan Kota Seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung
		BIRO PEMBANGUNAN	PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBN	80%	81,22%	-	-
			Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monev APBN	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	2 Laporan	2 Laporan	-	-
			PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD	85 %	84,34%	-	-
			1. Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	1 Laporan	1 Laporan	Efisiensi anggaran	-
			2. Peningkatan Fungsi Sitem E-Monev APBD	1 Laporan	1 Laporan		
			3. Peningkatan Capaian Realisasi APBD	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	-
			4. Peningkatan Fungsi Sismontepa APBD Provinsi, Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-
			PROGRAM PERENCANAAN SETDA	90 %	90,74%	-	-
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	1 (satu) Dokumen Revisi Renstra yang belum dapat direalisasikan	Dokumen Revisi Renstra dibuat menunggu dan berpedoman pada RPJMD Perubahan setelah disahkan
			2. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-
			PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	85 %	98,64%	-	-
			1. Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-
		BIRO EKONOMI	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN				
			1. Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi		
			2. Koordinasi, Monev Koperasi dan UMKM di	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
			3. Monev Analisis Makro Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	Ekonomi Bangka Belitung 2019 masih di bawah rata – rata nasional	Akan di bentuk Tim Terpadu untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi
			4. Monev Promosi Potensi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Belum Tertatanya pelaksanaan Kegiatan Promosi Pariwisata dan Promosi Produk Unggulan Daerah yang dilakukan oleh SKPD teknis Provinsi, Kabupaten ataupun kota	Diadakan Focus Group Discussion (FGD) mengundang OPD Teknis terkait untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan event yang diikuti
			5. Monev UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Dari segi kualitas yang banyak belum di dukung oleh kuantitas dari segi manajemen, teknologi pemasaran dan rendahnya daya saing Terbatasnya modal usaha dari usaha Mikro yang telah mempunyai badan hukum sehingga sulit mengajukan pinjaman dari Bank Lemahnya koordinasi antara instansi terkait dalam pemberdayaan UMKM	
			6. Monev Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) ke Stakeholder yang masih lemah Fasilitas gudang yang belum merata dan memadai serta masih kurangnya SDM	Kesepakatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati dan Walikota Se-Prov Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 08 Agustus 2018 di Kab. Babar Pemerintah Provinsi bersama pemerintah Kabupaten /

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						sebagai pengelola Gudang SRG di Kabupaten/Kota Petani masih menghadapi harga produk pertanian yang fluktuatif dan rendah pada saat panen Belum adanya standarisasi dan Sistem manajemen mutu di tingkat petani sehingga belum maksimal Sistem Pengelolaan SRG dari hulu sampai hilir	Kota mendukung peningkatan produksi lada melalui investasi kegiatan dan dukungan sosialisasi, pengadaan bibit gratis, peningkatan teknologi budidaya dan Sistem Resi Gudang
			7. Forum Pengembangan Ekonomi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM				
			1. Monitoring dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di 7 Kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Kegiatan hanya terfokus pada Distribusi BBM dan Gas yang merupakan hilir dari kegiatan Migas tidak mengkoordinir kegiatan di sektor hulu migas Pengawasan Tentang pembelian BBM Solar Subsidi menggunakan Fuel Card yang berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No : 541/1043/IV/2019 Tanggal 11 November 2019 tidak dapat secara maksimal	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	
			2. Monitoring dan Evaluasi Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Terkendala koordinasi dalam mendapatkan informasi dan data dengan cepat dan akurat antar OPD / Instansi terkait Provinsi / Kab / Kota	Akan turut mengikutsertakan OPD teknis terkait di Provinsi pada saat melaksanakan koordinasi ke kabupaten/kota
			3. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Amdal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
			4. Monitoring dan Evaluasi Penataan Lahan Kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA				
			1. Pembentukan Bank Umum syariah Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Kegiatan ditunda Dikarenakan syarat permodalan Pembentukan Bank Umum syariah Bangka Belitung telah memasuki buku kedua dengan syarat harus memiliki Modal 1,3 Triliun	Dihentikan sementara kerjasama dengan pihak ketiga jasa konsultan "Tazkia".
			2. Koordinasi Program Corporate Social Responsibility di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	Belum tersusunnya Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh perusahaan dalam pelaksanaan program CSR/TJSPL; Beberapa Kabupaten belum membentuk Tim	Mendorong perusahaan untuk dapat menyusun SOP pelaksanaan program CSR/TJSPL. Mendorong Kabupaten/Kota segera membentuk Tim fasilitasi CSR Kabupaten dan Menyampaikan kepada

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Fasilitasi CSR Kabupaten; dan Masih banyak perusahaan yang belum melaporkan data penyaluran dana CSRnya kepada pemerintah secara rutin dan berkelanjutan, sehingga sulit untuk menyusun program CSR secara terarah.	perusahaan agar dapat menyampaikan laporan penyaluran dana CSR nya kepada pemerintah secara rutin dan berkelanjutan.
			3. Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	<p>Belum maksimalnya pengelolaan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan penerima penyertaan modal dan Pemerintah Provinsi sehingga belum dapat memberi kontribusi / Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlalu lamanya penyelesaian Permasalahan di Internal perusahaan (PT.Sumatera Shipping Lines,PDAM, Belitung dan PDAM Pangkalpinang)</p> <p>Belum terealisasinya penyertaan modal Pemprov Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD dan perusahaan karena Pemprov Kepulauan Bangka</p>	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan penerima penyertaan modal

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Belitung belum menerima hasil kajian dari Tim Penasehat Investasi Daerah Prov Kep Bangka Belitung sebagai bahan dasar pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal sehingga Badan Keuangan Daerah Pemprov Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat mencairkan anggaran untuk penyertaan modal tahun 2019 Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal	
			4. Monev Kajian Strategis Penyusunan Perlindungan BCB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Ada beberapa kabupaten yang belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya Belum ada Pemeringkatan Benda cagar Budaya (Tingkat provinsi) sehingga Belum dikelola dengan baik Masih ada BCB yang berada dilokasi hutan lindung/produksi dan lahan pribadi	Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi ke Disbudpar Provinsi/ Kabupaten /Kota serta koordinasi dengan Kemendikbud, dan studi Banding ke BPCB Jambi, Disbud DIY dan DKI Jakarta bersama Disbudpar Prov/Kab/Kota melaksanakan FGD Cagar Budaya dengan mengundang OPD terkait melaksanakan Rapat Koordinasi Cagar Budaya dengan Prov/Kab/Kota
			5. Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Belum adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan	Menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Kepulauan Bangka Belitung			pengawasan dari BUMD, sehingga bisa lebih terarah sesuai dengan prosedur Belum adanya Rencana Bisnis per 5 tahun dan Rencana kerja serta rencana anggaran per 1 tahun dari BUMD sehingga sulit untuk menjadikan BUMD menghasilkan PAD dan Belum adanya target kinerja yang disusun oleh BUMD sehingga sulit untuk membuat BUMD lebih maju dan berkembang.	pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD Menyampaikan kepada BUMD agar dapat menyusun Rencana Bisnis per 5 tahun dan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran per 1 tahun dan Menyampaikan kepada BUMD agar dapat membuat Target Kinerja dari BUMDnya.
		BIRO LAYANAN PENGADAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN				
			1. Peningkatan Penerapan Data dan Informasi Layanan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Sistem belum terintegrasi pada aplikasi LKPP	Koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			2. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyesuaikan dengan Perpres 16 Tahun 2018 dan Perubahan SOTK	Pembentukan Tim Evaluasi Penerapan SOP dan koordinasi dengan OPD terkait segera implementasi Pergun tentang SOTK yang telah diperbaiki
			3. Pengelolaan Data dan Informasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Sistem belum terintegrasi pada aplikasi LKPP	Koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			4. Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	4 Dokumen	4 Dokumen	Penyusunan Cascading/dokumen perencanaan belum ada acuan yang tetap	Harus ada rujukan/ acuan yang pasti
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			1. Peningkatan Pelayanan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa			Belum terpisahnya Anggaran SPPD Operasional Pokja untuk Klarifikasi dengan Anggaran Diklat Struktural dan Fungsional	1. Peningkatan Anggaran Klarifikasi Pokja Pemisahan Anggaran SPPD dan Operasional Diklat baik Fungsional maupun Struktural
			2. Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	12 Bulan	12 Bulan	Fasilitas Kerja, Sarana dan Prasarana Personil yang belum memadai	Peningkatan Fasilitas Kerja, Sarana dan Prasarana Personil
			3. Peningkatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Sosialisasi/ Bintek	2 Sosialisasi	Pengadaan Pelatihan/ Bimtek/ Pendampingan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang tidak terfokus di Biro Layanan Pengadaan (BLP)	Pelatihan dan Pembinaan terkoordinasi di Biro Layanan Pengadaan (BLP)
			4. Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	1 Sosialisasi/ Bintek dan 1 FGD	2 Sosialisasi	Dengan keterbatasan Dana Jadi hanya dapat melaksanakan 2 (dua) kali sosialisasi	Perencanaan dan Anggaran di Tahun berikutnya agar dapat tersedia
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK				
			1. Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan	12 Bulan.	Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Personil LPSE.	
			2. Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	3 Aplikasi	3 Aplikasi	Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Personil LPSE.	-
			3. Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Personil LPSE.	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Personil LPSE.	-
		SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN				
			1. Rapat-Rapat Paripurna	15 Paripurna Istimewa/Biasa	28 Paripurna Istimewa/Biasa		
			2. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel	4 Dokumen /Nota Kesepakatan	4 Dokumen /Nota Kesepakatan		
			3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya	10 Raperda dan 2 Produk Hukum lainnya	13 Raperda dan 1 Produk Hukum lainnya		
			4. Reses	1 Dokumen/ Laporan	-	Sehubungan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri bahwa Reses Anggota DPRD Masa sidang 3 tahun 2019 terhitung tanggal 24 Mei s.d 23 September 2019 tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan .	
			5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	90 Anggota	65 Anggota		
			6. Rapat Koordinasi Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASPSI)	3 Kesepakatan	4 Kesepakatan		
			7. Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	7 Tenaga Ahli dan 5 Kelompok Pakar/Tim Ahli	7 Tenaga Ahli dan 3 Kelompok Pakar/Tim Ahli		
			8. Koordinasi Dan Konsultasi Masalah Hukum dan	5 Laporan/ Dokumen	3 Laporan /Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Administrasi Kesekretariatan				
			9. Kunjungan Kerja Komisi	288 Dokumen/ Dokumen	300 Dokumen/ Dokumen		
			10. Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	6 Dokumen/ Dokumen	6 Dokumen/ Dokumen		
			11. Kunjungan Kerja Badan Anggaran	6 Dokumen/ Dokumen	7 Dokumen/ Dokumen		
			12. Kunjungan Kerja Badan Legislasi/Pembentukan Perda	6 Dokumen/ Dokumen	7 Dokumen/ Dokumen		
			13. Kunjungan Kerja Kehormatan	6 Dokumen/ Dokumen	6 Dokumen/ Dokumen		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN, KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN				
			1. Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	200 Publikasi	233 Publikasi		
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	76%	100%		
		BADAN PENGHUBUNG	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, INFORMASI DAN PELAYANAN SERTA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA				
			1. Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah	22 kali	41 kali	-	-
			2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	12 kali	11 kali	-	-
			3. Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota	2 acara	2 acara	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Organisasi Sosial dan Masyarakat				
			4. Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	100%	100%	-	-
			5. Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	100%	33,33%	Belum ada MOU/perjanjian	Harus melakukan MOU/Perjanjian terlebih dahulu.

An abstract graphic on the left side of the page, featuring several overlapping, curved lines in shades of blue and grey. The lines start from the top left and curve downwards and to the right, creating a sense of motion and depth. The colors transition from a light blue at the top to a darker blue and grey towards the bottom.

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

IV.1 PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah lain agar memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan karena tidak semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dapat menggunakan Asas Desentralisasi.

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui Tugas Pembantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L). Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang

diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

IV.2 INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN DAN JUMLAH ANGGARAN

Instansi Pusat Pemberi Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri 3 (tiga) Kementerian sebagai berikut:

- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- Kementerian Pertanian;
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi;

Pagu anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.744.714.000,-, Kementerian Pertanian sebesar Rp. 49.671.111.000,- dan pagu dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi sebesar Rp. 1.494.701.000,-.

IV.3 SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 61.910.526.000,- dengan realisasi Rp. 61.322.387.000,- yang tersebar pada 3 (tiga) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya sebagai berikut yaitu:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat pada Tabel IV.1 sebagai berikut:

Tabel. IV.1
Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan

No	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Petangkat Daerah Yang Menerima Tugas Pembantuan	Program/ Kegiatan	Fisik		Anggaran	
				Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100	100	8.612.928.000	8.611.543.000
			Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100	100	8.612.928.000	8.611.543.000
			Preservasi dan pemeliharaan jalan	100	100	2.717.946.000	2.717.033.000
			Pemeliharaan Rutin Jalan Sei Liat - Bts. Kota Pangkalpinang; Nama - Bts. Kota Pangkalpinang; Dalam Kota Pangkalpinang	100	100	1.473.691.000	1.473.676.000
			Pemeliharaan Rutin kondisi jalan Bts. Kota Pangkalpinang -	100	100	827.900.000	827.002.000

No	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Petangkat Daerah Yang Menerima Tugas Pembantuan	Program/ Kegiatan	Fisik		Anggaran	
				Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
			Namang; Dalam Kota Pangkalpinang				
			Penunjang/Holding Bts. Kota Pangkalpinang - Namang; Dalam Kota Pangkalpinang	100	100	416.355.000	416.355.000
			Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi jalan	100	100	4.956.549.000	4.956.549.000
			Rehabilitasi minor jalan pulau pelepas	100	100	4.942.349.000	4.942.349.000
			Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)	100	100	8.900.000	8.900.000
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	100	100	5.300.000	5.300.000
			Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100	100	132.268.000	132.230.000
			Monitoring dan Evaluasi	100	100	132.268.000	132.230.000
			Layanan Dukungan Administrasi Satker	100	100	806.165.000	805.733.000
			Administrasi Kegiatan	100	100	741.317.000	741.305.000
			Penyusunan laporan keuangan BMN	100	100	42.098.000	41.702.000
			Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) satuan kerja Kementerian PUPR	100	100	22.750.000	22.726.000
2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	100	100	2.131.786.000	2.075.907.000
			Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA	100	100	2.131.786.000	2.075.907.000
			Jaringan Irigasi permukaan kewenangan Pusat yang diopersikan dan dipelihara	100	100	1.633.407.400	1.633.407.400
			Operasi rutin D.I. Rias Kab. Bangka Selatan	100	100	208.813.000	195.639.700
			Operasi rutin D.I. Selingsing Kab. Belitung Timur	100	100	232.203.000	216.572.050
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Kubur Lama - Saluran Balai Benih D.I Rias Kab. Bangka Selatan	100	100	102.375.000	101.325.000
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Balai Benih - Saluran Temayang D.I Rias Kab. Bangka Selatan	100	100	73.380.000	71.527.800

No	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Petangkat Daerah Yang Menerima Tugas Pembantuan	Program/ Kegiatan	Fisik		Anggaran		
				Target	Realisa si	Pagu	Realisasi	
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Rias Kab. Bangka Selatan	100	100	146.065.000	145.129.000	
			Pemeliharaan Saluran Pembuang Primer D.I. Selingsing Kab. Belitung Timur	100	100	129.248.000	128.548.000	
			Pemeliharaan Rutin D.I. Rias Kab. Bangka Selatan	100	100	347.158.000	339.087.800	
			Pemeliharaan Rutin D.I Selingsing Kab. Belitung Timur	100	100	400.228.000	392.559.250	
			Penilaian Kinerja dan Survey AKNOP Irigasi D.I Rias Kab. Bangka Selatan	100	100	15.625.000	15.373.900	
			Penilaian Kinerja dan Survey AKNOP Irigasi D.I Selingsing Kab. Belitung Timur	100	100	27.945.000	27.644.900	
			Layanan Dukungan Manajemen Satker	100	100	448.746.000	442.499.200	
			Administrasi kegiatan	100	100	437.496.000	433.342.750	
			Sistem Pelaporan e-Monitoring	100	100	11.250.000	9.156.450	
SUB TOTAL						10.744.714.000	10.687.450.000	
3	KEMENTERIAN PERTANIAN	PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	100	100	4.448.899.000	4.421.154.000	
				Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	100	100	2.928.750.000	2.912.846.000
				Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	100	100	32.998.665.000	32.542.469.000
				Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	100	100	1.907.577.000	1.883.674.000
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	100	100	7.387.220.000	7.381.799.000
SUB TOTAL						49.671.111.000	49.149.037.000	
4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI RI.	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 Layanan	1 Layanan	173.836.000	169.246.100	
			Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	1 Laporan	1 Laporan	24.675.000	24.675.000	
			Pengembangan Usaha Transmigrasi	1 KPB	1 KPB	1.113.270.000	1.109.982.500	
			Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	1 SP/ kawasan	1 SP/ kawasan	64.800.000	64.410.000	

No	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Petangkat Daerah Yang Menerima Tugas Pembantuan	Program/ Kegiatan	Fisik		Anggaran	
				Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
			Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	388 Bidang	388 Bidang	118.120.000	117.586.300
SUB TOTAL						1.494.701.000	1.485.900.000
TOTAL						61.910.525.000	61.322.387.000

HAMBATAN/ MASALAH DAN UPAYA MENGATASINYA

- Hambatan

- Data CP/CL yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan seringkali terlambat diterima dari Kabupaten, sehingga untuk percepatan di awal Tahun anggaran membutuhkan waktu lebih lama karena harus berkoordinasi dengan Kabupaten terkait CP/CL yang lokasinya sudah teridentifikasi sesuai dengan spesifikasi dalam program/kegiatan;
- Untuk kegiatan di bidang PSP : Sebagian besar Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/ Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) belum memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan alsintan, sehingga banyak alsintan yang rusak dan tidak bisa diperbaiki juga dengan kondisi keterbatasan perbengkelan dan teknisi;
- Permasalahan utama lahan pertanian pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah merupakan lahan rawa, sehingga penanganannya harus fokus terhadap penanganan tata kelola air. Keterbatasan Dinas Pertanian dalam mengelola tata kelola air adalah bahwa Dinas Pertanian hanya bisa fokus pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Embung (kapasitas 500 m3), long storage, dan perpompaan/perpipaan. Namun yang diperlukan pada lahan terkategorisasi rawa adalah pembangunan irigasi/drainase primer dan sekunder. Kegiatan Pembangunan Irigasi/Drainase primer/sekunder merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.
- Dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan terhambat pada saat akan dilakukan pelaksanaan karena merupakan kegiatan baru sesuai revisi DIPA per tanggal 22 Februari 2019. Pedum baru keluar dan disosialisasikan pada bulan Mei 2019. Dan terjadi revisi kode belanja pada DIPA bulan Oktober 2019 sehingga baru dilakukan pencairan dana pada bulan Oktober – November 2019;
- Kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi di daerah mengenai program dan kegiatan pertanian yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas terutama petani
- Ada belanja sewa tempat yang tidak dapat dicairkan dikarenakan menggunakan balai desa setempat.
- Belanja jasa Profesi tidak dapat dicairkan karena para instruktur telah menerima perjalanan dinas sehingga uang honor tidak dibayarkan.

- Upaya Mengatasinya

- Peningkatan teknologi produksi melalui penerapan Good Agriculture Practices (GAP)/Standart Operating Procedure (SOP), penerapan teknologi budidaya dan teknologi pascapanen/ pengolahan antara lain dengan pengembangan inkubator bisnis;

- b) Pemberdayaan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian melalui penguatan kelembagaan dan usahanya salah satunya dengan pengembangan corporate farming;
- c) Pengembangan penyuluhan pertanian dan SDM Pertanian melalui pemberdayaan penyuluhan pertanian, pelatihan, bimbingan teknis, magang, sekolah lapang;
- d) Pengamanan produksi melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dan penanganan dampak bencana alam dan perubahan iklim;
- e) Upaya Mengatasinya
- f) Diusahakan untuk lebih teliti dalam memahami peraturan yang ada.



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2019 yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pengendalian dan pengawasan.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada hakikatnya merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja eksekutif (Pemerintah Daerah), legislatif (DPRD), masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Selanjutnya perlu dilakukan peningkatan terhadap pencapaian target pembangunan agar target dan sasaran pembangunan dalam tahun berikutnya seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dapat tercapai.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pelaksana pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta aparat keamanan, termasuk jajaran pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Kami memiliki harapan besar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Segala kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019 akan menjadi bahan evaluasi dan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2019 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi dan senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Aamiin ya Robbal 'Aalamiin.



LAMPIRAN
Tabel Capaian Kinerja Tahun
2019

**TABEL CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

NO	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	4,40	3,05	69,31818	Melambatnya konsumsi masyarakat dan investasi serta adanya kontraksi pada ekspor luar negeri serta adanya penurunan kinerja lapangan usaha utama
	Sasaran :						
	1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,90	4,22*	86,12	1. Komitmen /dukungan pemerintah 2. Rasionalisasi anggaran
	2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,85	8,11	210,06	1. Produksi perikanan tangkap meningkat 2. Efek meningkatnya aktifitas penjarahan di perairan Babel
	3	Meningkatnya pengembangan dan Pembangunan pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan domestik	389.009	438.373	112,68	1. Banyak even nasional/internasional yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Harga tiket pesawat udara yang stabil
	4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalan	0,57	0,87	152,63	1. Penurunan jumlah ekspor 2. Mahalnya Investasi pada sektor pertambangan dan penggalan
	5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,65	1,17	44,1	1. Belum optimalnya pengembangan kawasan industri /kawasan peruntukan industri sebagai salah satu kemudahan lokasi dalam berinvestasi 2. Belum optimalnya penguatan pada produk perkebunan dan perikanan yang memiliki daya saing ekspor non timah 3. Dari segi industri 18.377 unit (2019), dari 17.123 (2018) ada kenaikan

NO	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							7,32% tenaga kerja industri secara total 41.685 orang (2019) dari sebelumnya 40.004 orang (2018) ada kenaikan 4.20% 5. Output industri menurun karena daya beli masyarakat berkurang 6. Pertumbuhan ekonomi indonesia turun dari 5,17% pada tahun 2018 menjadi 5,02% pada thn 2019 7. Pertumbuhan ekonomi bangka belitung turun dari 4,45% pada tahun 2018 menjadi 3,32% pada tahun 2019
	6	Terwujudnya kemandirian energi	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan	12,83	6,55	51,05	Investasi dalam pembangunan pembangkit sangat mahal
2		Tujuan : Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan Masyarakat	Pengeluaran Pemerintah Perkapita (dalam ribuan)	1.940	2.058,52	106,1093	Dipengaruhi angka pertumbuhan penduduk
	Sasaran :						
	7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	Persentase pertumbuhan pengeluaran Pemerintah daerah	5,65	15,73	278,41	Dipengaruhi PAD yang meningkat
2		Tujuan : Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan Masyarakat	Pendapatan perkapita, (dalam ribuan)	53.015	50.933,46	71,16707	Nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 (50.051,83) meskipun dari segi persentase capaian menurun
	Sasaran :						
	8	Menurunnya angka Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	5,60	3,62	64,64	Kondisi ekonomi yang menurun, kurang tersedianya lapangan pekerjaan, kurangnya daya saing pencari kerja.
	9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,15	4,50	87,37	Angka kemiskinan Babel nomor 4 terendah se-Indonesia (total penduduk

NO	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							Babel tahun 2019 = 1.488.792) periode September 2018 persentase kemiskinan 4,62
	10	Menurunnya angka Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.31	2,62	41,52	Terkendalnya inflasi bahan makanan seiring dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya dan upaya pengendalian harga oleh TPID dan Tim Satgas Pangan
	11	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,09	1,98	94,73	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian dan imigrasi. 2. Penurunan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanding dengan angka unmetneed bangka belitung yang juga menurun dari 8,8 (2018) menjadi 8,3 (2019). 3. Jumlah kelahiran total di Bangka Belitung mengalami peningkatan dari 2,25 (tahun 2018) menjadi 2,3 (tahun 2019). 4. Peningkatan angka TFR ini antara lain dipengaruhi oleh Angka CPR (contraceptive prevalence rate) yang menurun dari 68,5 (2018) menjadi 65,08 (2019). namun meningkatnya angka kelahiran total (TFR) ini tidak berpengaruh terhadap angka laju pertumbuhan penduduk. terbukti bahwa angka laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru semakin menurun dari 2,03

NO	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							(2018) menjadi 1,98 (2019). hal ini sebanding dengan persentase unmetneed (kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani) yang juga menurun dari 8,8 (2018) menjadi 8,3 (2019)
3		Tujuan : Meningkatnya Instratruktur dankonektivitas daerah yang berkualitas	Pertumbuhan subsector jasa konstruksi	7,00	7,08	101,14	Nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 (5,76).
	Sasaran :						
	12	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.135	1.744	153,65	Realisasi yang tercapai merupakan capaian kegiatan rehabilitasi dan kegiatan peningkatan bukan dari kegiatan pembangunan
			Ketersediaan air baku (m3)	N,A	60.000	100	Adanya dukungan anggaran
	13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase akses jalan lingkungan yang memadai	34%	23, 17 %	68,14	Merubah output sesuai dengan angka optimis anggaran
			Persentase kawasan permukiman yang tertata	38%	15,43 %	17	Merubah output sesuai dengan angka optimis anggaran
			Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	85	80	94,11	Seluruh desa di Kabupaten Belitung sudah tidak termasuk daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar), sehingga tidak menjadi prioritas oleh Kominfo. (dianggap telah maju pada sektor telekomunikasi)
	14	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0.18%	0,19%	105,5	Peningkatan koordinasi antar stake holder perhubungan laut dan meningkatnya konsumsi masyarakat
			Persentase armada pengangkutan	0.34%	0,30	88,23	1. Jumlah angkutan darat berkurang dikarenakan kurangnya penggunaan terhadap angkutan umum

NO	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							2. Jumlah angkutan laut mengalami peningkatan GT kapal yang mengunjungi pelabuhan.
			Persentase jalan kondisi mantap	94,50	92,23	97,59	Anggaran yang ada tidak sesuai target kinerja
4		Tujuan : Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	Rata-rata lama sekolah,	7,83	7,84	100,1277	Peningkatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
	Sasaran :						
	15	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,89 L=12,37 P=12,46	11,94	100,42	Idem (tujuan rata2 lama sekolah) 4 program di Dinas Pendidikan masuk ke sasaran pelayanan publik
5		Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia harapan Hidup,	70,16	65,39	93,20125	
	Sasaran :						
	16	Meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	77,58	88,48	114,05	Nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 (88,35)
6		Tujuan : Terwujudnya Informasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	65,39	73,43	112,2955	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara integrasi pada seluruh Perangkat Daerah 2. Peran agen perubahan belum terlihat dalam upaya membawa perubahan nyata 3. Sebagian besar unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis 4. Hasil pengukuran kinerja individu belum dijadikan salah satu dasar dalam pemberian Reward and Punishment 5. Efektivitas sistem pengawasan internal belum optimal terutama pada penanganan gratifikasi, WBS

NO	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							dan Zona Integritas
	Sasaran :						
	17	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
			Tingkat kematangan Maturitas SPIP	3	3	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring pemantauan dan evaluasi SPIP. 2. Meningkatnya kapabilitas APIP 3. Pelaksanaan kinerja/fisik telah dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala karena saling keterkaitan dan sudah tercakup dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dengan kegiatan pemeriksaan /pengawasan reguler, reviu dan monitoring/evaluasi.
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	70	70,26	100,37	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan AKIP. 2. Telah melakukan perbaikan cascading kinerja. 3. Indikator kinerja telah diturunkan hingga level individu. 4. Telah menyusun peta proses bisnis untuk level pemerintah daerahmaupun masing-masing Perangkat Daerah. 5. Telah melakukan analisis refocusing program dan kegiatan sehingga

NO	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							dapat menghitung nilai efisiensi anggaran. 6. Telah melakukan integrasi aplikasi perencanaan dan pelaporan kinerja.
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	2,78	2.94	105,75	Dukungan data yang lengkap, SDM yang berkualitas.
	18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai rata-rata delapan area perubahan	35	35,48	101,37	1. Implementasi Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara integrasi pada seluruh Perangkat Daerah 2. Peran agen perubahan belum terlihat dalam upaya membawa perubahan nyata 3. Sebagian besar unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis 4. Hasil pengukuran kinerja individu belum dijadikan salah satu dasar dalam pemberian Reward and Punishment 5. Efektivitas sistem pengawasan internal belum optimal terutama pada penanganan gratifikasi, WBS dan Zona Integritas
			Indeks Profesionalitas ASN	67,5	70,18	103,97	Nilai capaian nominal tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 (65)
	19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	5	10	200	1. Komitmen bersama di tingkat unit 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
			Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	B	B	100	Terpenuhinya 6 komponen pelayanan Publik
7		Tujuan : Terwujudnya pembangunan demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	75,24	73,43	97,59436	1. Ancaman kekerasan oleh aparat Pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat 2. Ancaman kekerasan oleh

NO	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							<p>masyarakat karena Gender, Etnis atau terhadap kelompok orang rentan lainnya</p> <p>3. Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan Kab/Kota</p> <p>4. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>5. Persentase alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap total APBD</p> <p>6. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif</p> <p>7. Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah</p> <p>8. Keputusan hakim yang kontroversial</p> <p>9. Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak Inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan</p>
	Sasaran :						
	20	Meningkatnya Kebebasan sipil, hakpolitik dan lembaga demokrasi masyarakat	Skor aspek kebebasan sipil	87,76	80,95	92,24	<p>1. Ancaman kekerasan oleh aparat Pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat</p> <p>2. Ancaman kekerasan oleh masyarakat karena Gender, Etnis atau terhadap kelompok orang rentan lainnya</p>
			Skor aspek hak-hak politik	81,76	73,56	89,97	<p>1. Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota</p> <p>2. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan</p>
			Skor aspek lembaga demokrasi	80,33	63,76	79,37	<p>1. Persentase alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan</p>

NO	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							terhadap total APBD 2. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif 3. Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah 4. Keputusan hakim yang kontroversial 5. Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah Perda yang dihasilkan
8		Tujuan : Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	156	161	103,2051	Penurunan indeks resiko bencana dengan strategi peningkatan indeks capaci (Coping capacity) yang bisa diturunkan melalui aktivitas terukur dengan memperkuat kapasitas Penanggulangan Bencana
	Sasaran :						
	21	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,20	0,24*	120	1. Masih banyak daerah yang belum melakukan penilaian Indeks Resiko Bencana 2. Masih kurangnya pemahaman kajian kapasitas yang terdiri dari 07 fokus prioritas untuk dapat dilaksanakan seperti halnya perkuatan kebijakan dan kelembagaan 3. pengkajian resiko dan Perencanaan terpadu 4. Pengembangan Sistem setiap informasi, Diklat dan Logistik 5. Penanganan Tematik kawasan rawan bencana 6. Peningkatan Efektivitas dan pencegahan Mitigasi Bencana 7. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 8. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 071 indikator pencapaian

NO	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9		Tujuan : Meningkatnya tata kelola Lingkungan Hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (ILKH)	60,96	65,80	108,4154	Dipengaruhi oleh nilai IKA dan IKTL
	Sasaran :						
	22	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air sungai	67,80	76,81	113,28	Realisasi capaian tahun 2018 sebesar 82,50 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 menurun dari tahun 2018
			Indeks kualitas udara	87,86	81,54	92,76	Pemantauan oleh DLHidup dengan menggunakan alat AQMS portabel, yang sebelumnya menggunakan <i>fasiv sampler</i> , walaupun masih dalam rentang IKU yang baik namun nilai ini terjadi penurunan dengan nilai IKU tahun 2018
			Indeks kualitas tutupan lahan	38,26	45,74	119,55	Realisasi capaian tahun 2018 sebesar 46,91 maka secara nilai capaian nominal tahun 2019 menurun dari tahun 2018
			Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	7.280,85	4.343,46	167,62	Realisasi tahun 2019 yang telah mencapai 4.343,46, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 6.047,35 maka tingkat kemajuan telah melampaui sebesar 139,22 %

Ket :

*) Data Tahun 2018



LAMPIRAN
Tabel Program Yang
Mendukung Capaian Kinerja
Tahun 2019

**TABEL PROGRAM YANG MENDUKUNG CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
Misi I. Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah							
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Persentase Pertumbuhan PDRB	4,40	4,45	3,32	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura	DINAS PERTANIAN
						Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Program Pengembangan Perkebunan	DINAS PERTANIAN
						Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	DINAS PERTANIAN
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	DINAS PERTANIAN
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	DINAS PERTANIAN
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	DISNAKER
						Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	DKP
						Program Pengembangan Perikanan Tangkap	DKP
						Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	DKP
						Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	DKP
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	DKP
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	DKP
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	DKP
						Program Pelestarian Budaya	BUDPAR
						Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	BUDPAR

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
							Program Pengembangan Pemasaran Wisata	BUDPAR
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata	BUDPAR
							Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	DINAS KUKM
							Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	DINAS KUKM
							Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	DINAS KUKM
							Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	DINAS KUKM
							Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	DINAS ESDM
							Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	DINAS ESDM
							Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	DISPERINDAG
							Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	DISPERINDAG
2.	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	2.	Pengeluaran pemerintah perkapita, (dalam ribuan)	1.940	1.778	2,058	Program Pengembangan Sumber Daya Energi Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	DINAS ESDM BAKUDA
		3	Pendapatan perkapita, (dalam ribuan)	53.015	50.087	50.933	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	BAKUDA
							Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	DINAS KESEHATAN

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
							Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup	DLH
							Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial	DISNAKER
							Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKER
							Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan kesehatan kerja	DISNAKER
							Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	DISNAKER
							Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKER
							Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
							Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
							Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	DINAS PMPTSP
							Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	DP3ACSKB
							Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	DISKEPORA
							Program Pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL
							Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	DINAS SOSIAL
							Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	DINAS SOSIAL
							Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
							Program Penanganan Fakir Miskin	DINAS SOSIAL
							Program Pembangunan Perumahan Rakyat	DINAS PERKEIM
							Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PENDIDIKAN
							Program Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
							Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan	DINAS PANGAN
							Program Pengembangan Perdagangan	DISPERINDAG
							Program Peningkatan Pelindungan Konsumen dan Kemetrollogian	DISPERINDAG
							Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	DISPERINDAG
							Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil	DP3ACSKB
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas								
3.	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas	4.	Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	7	5,76	7,08	Program Pengembangan Sumber Daya Air	DINAS PUPR
							Program Keciptakarya dan Permukiman	DINAS PERKIM
							Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	DINAS KOMINFO
							Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	DINAS PERHUBUNGAN
							Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	DINAS PERHUBUNGAN
							Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan	DINAS PERHUBUNGAN
							Program Kebinamargaan	DINAS PUPR
							Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	DINAS PUPR
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal								
4.	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	5.	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	7,83	7,78		Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	DINAS PENDIDIKAN
				L=7,94			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	DINAS PENDIDIKAN
				P=6,98			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	DINAS PENDIDIKAN
							Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
							Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	DINAS PENDIDIKAN
							Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	DINAS PENDIDIKAN
							Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	DINAS PENDIDIKAN
							Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	DINAS PENDIDIKAN
							Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	DINAS PENDIDIKAN
							Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	DISKEPORA
							Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN
							Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN
Misi IV. Meningkatnya kesehatan bagi masyarakat								
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6.	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	70,16	70,18		Program Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
				L=68,37			Proram Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	DINAS KESEHATAN
				P=72,12			Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	DINAS KESEHATAN
							Program Pelayanan Teknis Keperawatan	RSUP
							Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	RSJ
							Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	RSUP
							Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza	RSJ
							Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	RSUP
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	RSJ

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
							Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	RSUP
							Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ	RSJ
							Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	DINAS PANGAN
Misi V. Mewujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi								
6.	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	7.	Indeks Reformasi Birokrasi	65,39	67,17		Program Penganggaran Pembangunan Daerah	BAKUDA
							Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan	BAKUDA
							Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	BAKUDA
							Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan	BAKUDA
							Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	INSPEKTORAT
							Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	INSPEKTORAT
							Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	INSPEKTORAT
							Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
							Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPEDA
							Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
							Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	BAPPEDA
							Program Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA
							Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	BIRO PEMBANGUNAN
							Program Pengendalian Pembangunan Daerah	BIRO PEMBANGUNAN
							Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	BIRO PEMBANGUNAN
							Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	BIRO HUKUM

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
							Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	BIRO HUKUM
							Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	BIRO HUKUM
							Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	BIRO ORGANISASI
							Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	BIRO PEMERINTAHAN
							Program Pengembangan Otonomi Daerah	BIRO PEMERINTAHAN
							Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	BIRO PEMERINTAHAN
							Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	BIRO KESRA
							Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	BIRO KESRA
							Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	BIRO KESRA
							Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	BIRO PEREKONOMIAN
							Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	BIRO PEREKONOMIAN
							Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	BIRO PEREKONOMIAN
							Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	BIRO HUMAS
							Program Peningkatan Pelayanan Protokol	BIRO HUMAS
							Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	BIRO HUMAS
							Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	BIRO ORGANISASI
							Program Peningkatan Dan Pengembangan TataLaksana Pemerintah Daerah	BIRO ORGANISASI
							Program Pengadaan Pegawai, Mutasi Promosi, dan Kepangkatan	BKPSDM

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
							Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	BKPSDM
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	BKPSDM
							Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	DINAS KOMINFO
							Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	DINAS KOMINFO
							Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	BIRO PENGADAAN
							Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	BIRO PENGADAAN
							Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	BIRO PENGADAAN
							Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	DINAS PMPTSP
							Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	DINAS KUKM
							7.	Terwujudnya pembangunan demokrasi
Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	KESBANGPOL							
Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP							
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyaraka	SATPOL PP							
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP							
Program Pembinaan Politik dalam Negeri	KESBANGPOL							
Program Penegakan Perda dan Perkada	SATPOL PP							
Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	KESBANGPOL							
Misi VI. Pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup								
8.		9.	Indeks Resiko Bencana	156	157		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanaaaulangan Bencana	BPBD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
	Meningkatnya tata kelola kebencanaan						Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	BPBD
							Program Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana	BPBD
							Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	DINAS PANGAN
9.	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,32	63,07		Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup	DLH
							Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	DINAS KEHUTANAN
							Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan masyarakat	DINAS KEHUTANAN
							Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	DLH
							Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	DINAS KEHUTANAN
							Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas	DLH



LAMPIRAN
Tabel Anggaran dan Realisasi
Perangkat Daerah Tahun
2019

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Belanja Dinas		534.643.043.501,00	587.463.680.922,40	100,00	525.147.205.390,00	89,39	62.316.475.532,40	10,61
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	258.420.540.326,00	288.902.309.020,40	100,00	277.248.407.291,00	95,97	11.653.901.729,40	4,03
	Belanja Tidak Langsung	258.420.540.326,00	288.902.309.020,40	100,00	277.248.407.291,00	95,97	11.653.901.729,40	4,03
II	BELANJA LANGSUNG	276.222.503.175,00	298.561.371.902,00	100,00	247.898.798.099,00	84,21	50.662.573.803,00	14,94
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	20.266.084.575,00	25.379.572.075,00	100,00	22.915.715.626,00	66,49	2.463.856.449,00	22,40
	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.228.194.825,00	3.988.269.825,00	100,00	3.660.269.883,00	91,78	327.999.942,00	8,22
	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.604.180.000,00	1.199.320.000,00	100,00	1.098.264.220,00	91,57	101.055.780,00	8,43
	3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	108.300.000,00	295.900.000,00	100,00	79.250.000,00	26,78	216.650.000,00	73,22
	4 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.475.000,00	125.000.000,00	100,00	105.269.622,00	84,22	19.730.378,00	15,78
	5 Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	5.870.306.000,00	5.267.896.000,00	100,00	4.111.518.119,00	78,05	1.156.377.881,00	21,95
	6 Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi	7.887.050.000,00	12.771.020.000,00	100,00	12.369.842.232,00	0,00	401.177.768,00	0,00
	7 Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	1.400.093.750,00	1.400.093.750,00	100,00	1.281.422.050,00	91,52	118.671.700,00	8,48
	8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.485.000,00	87.472.500,00	100,00	66.272.500,00	75,76	21.200.000,00	24,24
	9 Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah.	0	244.600.000,00	100,00	143.607.000,00	58,71	100.993.000,00	41,29
B	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	26.073.879.500,00	29.194.004.500,00	100,00	28.622.797.462,00	95,74	571.207.038,00	4,26
	1 Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	7.347.500.000,00	7.547.500.000,00	100,00	7.437.928.327,00	98,55	109.571.673,00	1,45
	2 Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	3.742.677.500,00	4.062.802.500,00	100,00	3.881.164.634,00	95,53	181.637.866,00	4,47
	3 Pengembangan Kurikulum SMA	669.025.000,00	769.025.000,00	100,00	703.284.490,00	91,45	65.740.510,00	8,55
	4 Pemberian Beasiswa Siswa SMA	11.760.000,00	2.511.760.000,00	100,00	2.348.700.000,00	93,51	163.060.000,00	6,49
	5 Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	14.302.917.000,00	14.302.917.000,00	100,00	14.251.720.011,00	99,64	51.196.989,00	0,36
C	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	35.182.242.000,00	44.836.815.424,00	100,00	37.530.345.605,00	90,98	7.306.469.819,00	9,02
	1 Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	2.747.540.000,00	5.755.040.000,00	100,00	5.414.943.330,00	94,09	340.096.670,00	5,91
	2 Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	3.801.866.000,00	3.321.946.500,00	100,00	2.892.764.300,00	87,08	429.182.200,00	12,92
	3 Pengembangan Kurikulum SMK	1.002.307.000,00	1.135.999.000,00	100,00	1.064.730.528,00	93,73	71.268.472,00	6,27
	4 Pemberian Beasiswa Siswa SMK	86.060.000,00	1.231.060.000,00	100,00	1.223.140.000,00	99,36	7.920.000,00	0,64
	5 Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	27.544.469.000,00	33.392.769.924,00	100,00	26.934.767.447,00	80,66	6.458.002.477,00	19,34
D	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	5.127.249.100,00	5.902.154.500,00	100,00	5.074.557.270,00	86,75	827.597.230,00	13,25
	1 Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	1.189.200.000,00	1.204.200.000,00	100,00	1.177.500.000,00	97,78	26.700.000,00	2,22

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	1.012.891.500,00	1.081.291.500,00	100,00	989.054.545,00	91,47	92.236.955,00	8,53
	3 Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	569.445.000,00	918.565.000,00	100,00	886.069.145,00	96,46	32.495.855,00	3,54
	4 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	1.135.385.600,00	1.477.771.000,00	100,00	1.237.341.420,00	83,73	240.429.580,00	16,27
	5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Non Fisik)	1.220.327.000,00	1.220.327.000,00	100,00	784.592.160,00	64,29	435.734.840,00	35,71
E	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	2.697.013.500,00	2.615.988.343,00	100,00	1.995.653.575,00	79,57	620.334.768,00	20,43
	1 Peningkatan Mutu PTK SMA	1.089.339.000,00	967.219.643,00	100,00	796.611.167,00	82,36	170.608.476,00	17,64
	2 Peningkatan Mutu PTK SMK	1.069.729.500,00	1.150.823.700,00	100,00	741.263.423,00	64,41	409.560.277,00	35,59
	3 Peningkatan Mutu PTK SLB	537.945.000,00	497.945.000,00	100,00	457.778.985,00	91,93	40.166.015,00	8,07
F	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	33.761.765.000,00	36.315.130.000,00	100,00	30.582.000.200,00	85,01	5.733.129.800,00	14,99
	1 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	12.482.533.000,00	13.519.833.000,00	100,00	12.195.263.589,00	90,20	1.324.569.411,00	9,80
	2 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	1.324.850.000,00	1.328.450.000,00	100,00	763.830.292,00	57,50	564.619.708,00	42,50
	3 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	2.343.520.000,00	2.424.200.000,00	100,00	1.573.061.538,00	64,89	851.138.462,00	35,11
	4 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	1.064.460.000,00	1.644.985.000,00	100,00	1.198.993.400,00	72,89	445.991.600,00	27,11
	5 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	836.200.000,00	886.700.000,00	100,00	873.830.469,00	98,55	12.869.531,00	1,45
	6 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	494.015.000,00	494.015.000,00	100,00	371.333.813,00	75,17	122.681.187,00	24,83
	7 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	935.640.000,00	943.640.000,00	100,00	888.011.949,00	94,10	55.628.051,00	5,90
	8 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	1.038.640.000,00	1.054.540.000,00	100,00	818.247.576,00	77,59	236.292.424,00	22,41
	9 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	1.154.840.000,00	1.212.340.000,00	100,00	1.203.357.620,00	99,26	8.982.380,00	0,74
	10 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	848.720.000,00	878.100.000,00	100,00	639.940.000,00	72,88	238.160.000,00	27,12
	11 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	1.052.550.000,00	1.084.350.000,00	100,00	884.000.000,00	81,52	200.350.000,00	18,48
	12 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	1.457.203.000,00	1.525.683.000,00	100,00	1.118.079.530,00	73,28	407.603.470,00	26,72
	13 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	943.150.000,00	956.350.000,00	100,00	634.358.210,00	66,33	321.991.790,00	33,67
	14 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	402.000.000,00	422.800.000,00	100,00	384.060.000,00	90,84	38.740.000,00	9,16
	15 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	548.200.000,00	605.620.000,00	100,00	546.295.288,00	90,20	59.324.712,00	9,80
	16 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	527.020.000,00	565.420.000,00	100,00	556.026.350,00	98,34	9.393.650,00	1,66
	17 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	310.700.000,00	333.800.000,00	100,00	306.923.500,00	91,95	26.876.500,00	8,05
	18 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	654.530.000,00	735.330.000,00	100,00	693.082.900,00	94,25	42.247.100,00	5,75
	19 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	676.900.000,00	706.100.000,00	100,00	706.100.000,00	100,00	0,00	0,00
	20 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	294.200.000,00	319.880.000,00	100,00	294.194.270,00	91,97	25.685.730,00	8,03
	21 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	525.574.000,00	555.974.000,00	100,00	443.653.725,00	79,80	112.320.275,00	20,20
	22 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	1.018.615.000,00	1.026.615.000,00	100,00	790.626.992,00	77,01	235.988.008,00	22,99

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	594.540.000,00	626.340.000,00	100,00	539.504.800,00	86,14	86.835.200,00	13,86
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	427.360.000,00	471.720.000,00	100,00	470.424.000,00	99,73	1.296.000,00	0,27
25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	1.071.869.000,00	1.162.929.000,00	100,00	885.106.000,00	76,11	277.823.000,00	23,89
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2, Puding Besar	236.536.000,00	305.516.000,00	100,00	302.363.889,00	98,97	3.152.111,00	1,03
27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri, Sungailiat	497.400.000,00	523.900.000,00	100,00	501.330.500,00	95,69	22.569.500,00	4,31
G	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	14.199.335.000,00	14.278.763.000,00	100,00	12.890.182.057,00	89,96	1.388.580.943,00	10,04
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	5.805.245.000,00	5.634.453.000,00	100,00	5.272.893.857,00	93,58	361.559.143,00	6,42
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	1.055.000.000,00	1.081.400.000,00	100,00	827.817.600,00	76,55	253.582.400,00	23,45
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	875.200.000,00	900.400.000,00	100,00	850.657.000,00	94,48	49.743.000,00	5,52
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	1.094.400.000,00	1.105.600.000,00	100,00	1.051.133.900,00	95,07	54.466.100,00	4,93
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	425.600.000,00	429.600.000,00	100,00	429.600.000,00	100,00	0,00	0,00
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	286.000.000,00	326.420.000,00	100,00	315.460.000,00	96,64	10.960.000,00	3,36
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	858.200.000,00	902.200.000,00	100,00	902.149.000,00	99,99	51.000,00	0,01
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	829.600.000,00	882.600.000,00	100,00	852.342.000,00	96,57	30.258.000,00	3,43
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	831.900.000,00	840.300.000,00	100,00	544.176.300,00	64,76	296.123.700,00	35,24
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	557.200.000,00	568.800.000,00	100,00	511.939.600,00	90,00	56.860.400,00	10,00
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	727.240.000,00	734.440.000,00	100,00	469.682.600,00	63,95	264.757.400,00	36,05
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	488.750.000,00	496.750.000,00	100,00	488.030.200,00	98,24	8.719.800,00	1,76
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	365.000.000,00	375.800.000,00	100,00	374.300.000,00	99,60	1.500.000,00	0,40
H	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	32.008.095.000,00	34.415.382.700,00	100,00	29.585.656.746,00	87,50	4.829.725.954,00	12,50
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	12.984.388.000,00	14.851.180.000,00	100,00	13.443.970.294,00	90,52	1.407.209.706,00	9,48
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	726.400.000,00	834.180.000,00	100,00	716.999.300,00	85,95	117.180.700,00	14,05
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	1.169.950.000,00	1.177.150.000,00	100,00	586.914.819,00	49,86	590.235.181,00	50,14
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	1.311.950.000,00	1.317.950.000,00	100,00	503.366.120,00	38,19	814.583.880,00	61,81
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	1.195.200.000,00	1.196.800.000,00	100,00	949.857.375,00	79,37	246.942.625,00	20,63
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	344.000.000,00	374.100.000,00	100,00	374.100.000,00	100,00	0,00	0,00
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	892.800.000,00	900.400.000,00	100,00	739.790.650,00	82,16	160.609.350,00	17,84

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	543.160.000,00	549.960.000,00	100,00	449.795.000,00	81,79	100.165.000,00	18,21
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	541.400.000,00	546.800.000,00	100,00	447.795.250,00	81,89	99.004.750,00	18,11
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	594.200.000,00	603.400.000,00	100,00	593.231.000,00	98,31	10.169.000,00	1,69
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	306.300.000,00	312.700.000,00	100,00	304.309.900,00	97,32	8.390.100,00	2,68
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	723.900.000,00	731.600.000,00	100,00	681.263.112,00	93,12	50.336.888,00	6,88
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	759.700.000,00	798.000.000,00	100,00	798.000.000,00	100,00	0,00	0,00
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	254.100.000,00	262.060.000,00	100,00	261.200.000,00	99,67	860.000,00	0,33
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	308.600.000,00	339.500.000,00	100,00	291.083.000,00	85,74	48.417.000,00	14,26
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	758.775.000,00	764.375.000,00	100,00	600.000.000,00	78,50	164.375.000,00	21,50
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	232.200.000,00	234.600.000,00	100,00	234.480.000,00	99,95	120.000,00	0,05
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	502.200.000,00	504.600.000,00	100,00	485.439.741,00	96,20	19.160.259,00	3,80
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	1.142.370.000,00	1.159.175.700,00	100,00	877.850.000,00	75,73	281.325.700,00	24,27
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	658.322.000,00	707.622.000,00	100,00	707.022.000,00	99,92	600.000,00	0,08
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan	490.950.000,00	557.200.000,00	100,00	514.200.000,00	92,28	43.000.000,00	7,72
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	529.800.000,00	537.800.000,00	100,00	537.800.000,00	100,00	0,00	0,00
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	288.350.000,00	291.550.000,00	100,00	290.455.000,00	99,62	1.095.000,00	0,38
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	1.034.700.000,00	1.094.100.000,00	100,00	946.000.300,00	86,46	148.099.700,00	13,54
25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	485.400.000,00	496.920.000,00	100,00	482.730.000,00	97,14	14.190.000,00	2,86
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	271.950.000,00	274.350.000,00	100,00	200.000.000,00	72,90	74.350.000,00	27,10
27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	2.239.730.000,00	2.275.410.000,00	100,00	1.873.475.000,00	82,34	401.935.000,00	17,66
28	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	368.900.000,00	370.100.000,00	100,00	354.326.297,00	95,74	15.773.703,00	4,26
29	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	348.400.000,00	351.800.000,00	100,00	340.202.588,00	96,70	11.597.412,00	3,30
I	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	22.269.229.500,00	23.494.749.500,00	100,00	19.484.444.192,00	82,90	4.010.305.308,00	17,95
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	8.048.135.000	8.954.195.000,00	100,00	7.748.776.577,00	86,54	1.205.418.423,00	13,46
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	604.400.000	612.800.000,00	100,00	522.803.289,00	85,31	89.996.711,00	14,69

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	625.700.000	627.300.000,00	100,00	456.172.800,00	72,72	171.127.200,00	27,28
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	926.787.000	927.987.000,00	100,00	786.976.170,00	84,80	141.010.830,00	15,20
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	1.005.337.500	1.045.937.500,00	100,00	903.981.641,00	86,43	141.955.859,00	13,57
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	706.825.000	715.625.000,00	100,00	515.943.731,00	72,10	199.681.269,00	27,90
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	282.240.000	282.240.000,00	100,00	236.663.563,00	83,85	45.576.437,00	16,15
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	1.539.587.500	1.543.987.500,00	100,00	1.150.280.389,00	74,50	393.707.111,00	25,50
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	1.140.337.500	1.179.537.500,00	100,00	627.444.363,00	53,19	552.093.137,00	46,81
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	766.500.000	769.300.000,00	100,00	577.444.873,00	75,06	191.855.127,00	24,94
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	427.160.000	439.960.000,00	100,00	370.867.265,00	84,30	69.092.735,00	15,70
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	779.160.000	787.560.000,00	100,00	538.748.622,00	68,41	248.811.378,00	31,59
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	566.400.000	576.640.000,00	100,00	417.546.509,00	72,41	159.093.491,00	27,59
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	889.040.000	912.640.000,00	100,00	875.866.000,00	95,97	36.774.000,00	4,03
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	585.910.000	605.030.000,00	100,00	545.360.000,00	90,14	59.670.000,00	9,86
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	631.760.000	639.180.000,00	100,00	578.006.150,00	90,43	61.173.850,00	9,57
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	759.920.000	788.960.000,00	100,00	612.416.500,00	77,62	176.543.500,00	22,38
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	907.490.000	960.450.000,00	100,00	931.674.000,00	97,00	28.776.000,00	3,00
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	286.700.000	307.980.000,00	100,00	307.980.000,00	100,00	-	0,00
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	364.300.000	383.500.000,00	100,00	347.055.850,00	90,50	36.444.150,00	9,50
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	425.540.000	433.940.000,00	100,00	432.435.900,00	99,65	1.504.100,00	0,35
J	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	84.637.610.000,00	82.128.811.860,00	100,00	59.711.097.254,00	77,21	22.417.714.606,00	24,55
1	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	474.000.000	573.385.167,00	100,00	440.820.000,00	76,88	132.565.167,00	23,12
2	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	234.000.000	234.129.327,00	100,00	214.764.000,00	91,73	19.365.327,00	8,27
3	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	150.000.000	200.102.437,00	100,00	185.802.437,00	92,85	14.300.000,00	7,15
4	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	170.000.000	232.659.537,00	100,00	166.700.955,00	71,65	65.958.582,00	28,35
5	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	156.000.000	160.491.505,00	100,00	145.989.062,00	90,96	14.502.443,00	9,04
6	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	272.000.000	272.008.998,00	100,00	252.960.000,00	93,00	19.048.998,00	7,00
7	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	200.000.000	200.129.896,00	100,00	187.106.500,00	93,49	13.023.396,00	6,51
8	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.318.800.000	1.479.439.948,00	100,00	1.337.435.000,00	90,40	142.004.948,00	9,60
9	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.169.000.000	1.176.144.865,00	100,00	1.046.957.600,00	89,02	129.187.265,00	10,98
10	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.265.600.000	2.061.440.850,00	100,00	1.252.588.850,00	60,76	808.852.000,00	39,24

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	956.200.000	957.484.578,00	100,00	852.389.500,00	89,02	105.095.078,00	10,98
12	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.211.000.000	2.072.204.346,00	100,00	1.304.922.350,00	62,97	767.281.996,00	37,03
13	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	2.212.000.000	3.086.842.101,00	100,00	2.694.302.101,00	87,28	392.540.000,00	12,72
14	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.083.600.000	1.828.984.121,00	100,00	1.133.961.389,00	62,00	695.022.732,00	38,00
15	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	868.000.000	1.075.548.343,00	100,00	939.369.500,00	87,34	136.178.843,00	12,66
16	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	464.800.000	541.634.113,00	100,00	483.016.113,00	89,18	58.618.000,00	10,82
17	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	376.600.000	376.727.982,00	100,00	350.238.000,00	92,97	26.489.982,00	7,03
18	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	753.200.000	1.137.327.223,00	100,00	700.476.000,00	61,59	436.851.223,00	38,41
19	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	726.600.000	806.870.348,00	100,00	605.072.643,00	74,99	201.797.705,00	25,01
20	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	348.600.000	349.409.200,00	100,00	312.273.500,00	89,37	37.135.700,00	10,63
21	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	628.600.000	764.729.465,00	100,00	686.926.745,00	89,83	77.802.720,00	10,17
22	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	1.178.800.000	1.362.903.093,00	100,00	1.247.829.339,00	91,56	115.073.754,00	8,44
23	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	628.600.000	733.871.995,00	100,00	624.841.935,00	85,14	109.030.060,00	14,86
24	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	184.800.000	291.142.777,00	100,00	266.208.168,00	91,44	24.934.609,00	8,56
25	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	555.800.000	929.907.783,00	100,00	516.858.999,00	55,58	413.048.784,00	44,42
26	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	1.272.600.000	1.920.493.851,00	100,00	1.127.771.520,00	58,72	792.722.331,00	41,28
27	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik)	504.000.000	840.701.836,00	100,00	442.570.000,00	52,64	398.131.836,00	47,36
28	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik)	575.400.000	774.852.676,00	100,00	687.487.042,00	88,72	87.365.634,00	11,28
29	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik)	421.400.000	748.052.676,00	100,00	430.032.000,00	57,49	318.020.676,00	42,51
30	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	1.467.200.000	1.679.665.822,00	100,00	1.327.795.620,00	79,05	351.870.202,00	20,95
31	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	946.400.000	1.083.066.685,00	100,00	952.282.000,00	87,92	130.784.685,00	12,08
32	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	910.000.000	911.034.830,00	100,00	843.911.250,00	92,63	67.123.580,00	7,37
33	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	865.200.000	866.690.168,00	100,00	801.122.000,00	92,43	65.568.168,00	7,57
34	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	973.000.000	1.995.351.771,00	100,00	603.334.617,00	30,24	1.392.017.154,00	69,76
35	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	660.800.000	1.245.199.900,00	100,00	597.030.000,00	47,95	648.169.900,00	52,05
36	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	877.800.000	900.037.023,00	100,00	802.001.375,00	89,11	98.035.648,00	10,89
37	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	544.600.000	605.981.110,00	100,00	531.921.585,00	87,78	74.059.525,00	12,22

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	816.200.000	937.618.645,00	100,00	813.873.666,00	86,80	123.744.979,00	13,20
39	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	1.037.400.000	1.842.813.613,00	100,00	907.580.044,00	49,25	935.233.569,00	50,75
40	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	1.013.600.000	1.807.028.594,00	100,00	1.032.710.873,00	57,15	774.317.721,00	42,85
41	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	403.200.000	705.256.244,00	100,00	405.016.650,00	57,43	300.239.594,00	42,57
42	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	935.200.000	1.511.516.919,00	100,00	963.506.750,00	63,74	548.010.169,00	36,26
43	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	677.600.000	1.289.046.633,00	100,00	846.720.000,00	65,69	442.326.633,00	34,31
44	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	597.800.000	619.916.043,00	100,00	578.070.000,00	93,25	41.846.043,00	6,75
45	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	743.400.000	750.333.888,00	100,00	691.311.850,00	92,13	59.022.038,00	7,87
46	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	355.600.000	422.279.291,00	100,00	394.896.500,00	93,52	27.382.791,00	6,48
47	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	859.600.000	1.405.960.393,00	100,00	795.494.000,00	56,58	610.466.393,00	43,42
48	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	673.400.000	770.059.009,00	100,00	674.409.000,00	87,58	95.650.009,00	12,42
49	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	1.111.600.000	1.873.371.625,00	100,00	1.131.000.000,00	60,37	742.371.625,00	39,63
50	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	1.198.400.000	2.087.848.870,00	100,00	673.793.050,00	32,27	1.414.055.820,00	67,73
51	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	1.118.600.000	1.289.400.000,00	100,00	1.167.142.500,00	90,52	122.257.500,00	9,48
52	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	359.800.000	470.830.405,00	100,00	368.646.000,00	78,30	102.184.405,00	21,70
53	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	907.200.000	918.028.454,00	100,00	861.450.429,00	93,84	56.578.025,00	6,16
54	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	263.200.000	433.279.406,00	100,00	409.855.850,00	94,59	23.423.556,00	5,41
55	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	345.800.000	566.535.387,00	100,00	321.594.000,00	56,77	244.941.387,00	43,23
56	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	863.800.000	890.833.378,00	100,00	802.584.000,00	90,09	88.249.378,00	9,91
57	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	215.600.000	324.059.958,00	100,00	304.528.500,00	93,97	19.531.458,00	6,03
58	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	585.200.000	585.971.499,00	100,00	541.772.000,00	92,46	44.199.499,00	7,54
59	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	1.246.000.000	1.748.151.048,00	100,00	1.131.940.210,00	64,75	616.210.838,00	35,25
60	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	673.400.000	686.469.596,00	100,00	639.210.600,00	93,12	47.258.996,00	6,88
61	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	464.800.000	828.061.489,00	100,00	481.043.000,00	58,09	347.018.489,00	41,91
62	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	506.800.000	579.569.403,00	100,00	518.384.000,00	89,44	61.185.403,00	10,56
63	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	219.800.000	397.200.000,00	100,00	220.901.200,00	55,61	176.298.800,00	44,39

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	1.023.400.000	1.611.549.335,00	100,00	1.042.006.455,00	64,66	569.542.880,00	35,34
65	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	464.800.000	817.690.911,00	100,00	485.854.000,00	59,42	331.836.911,00	40,58
66	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	695.800.000	697.555.310,00	100,00	636.489.000,00	91,25	61.066.310,00	8,75
67	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	681.800.000	792.966.200,00	100,00	733.843.100,00	92,54	59.123.100,00	7,46
68	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	1.016.400.000	1.472.079.869,00	100,00	1.017.079.869,00	69,09	455.000.000,00	30,91
69	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	1.043.000.000	1.044.688.935,00	100,00	969.990.000,00	92,85	74.698.935,00	7,15
70	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik)	673.400.000	771.096.179,00	100,00	688.792.000,00	89,33	82.304.179,00	10,67
71	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik)	212.800.000	286.262.794,00	100,00	259.450.000,00	90,63	26.812.794,00	9,37
72	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	1.143.800.000	1.307.982.126,00	100,00	1.169.224.000,00	89,39	138.758.126,00	10,61
73	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	1.314.600.000	1.506.925.581,00	100,00	1.344.648.000,00	89,23	162.277.581,00	10,77
74	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	716.800.000	1.066.331.941,00	100,00	742.852.750,00	69,66	323.479.191,00	30,34
75	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	456.400.000	459.205.058,00	100,00	411.636.000,00	89,64	47.569.058,00	10,36
76	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	922.600.000	1.334.176.178,00	100,00	862.372.615,00	64,64	471.803.563,00	35,36
77	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	648.200.000	748.898.248,00	100,00	618.775.723,00	82,62	130.122.525,00	17,38
78	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	925.400.000	964.811.501,00	100,00	889.255.200,00	92,17	75.556.301,00	7,83
79	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	652.400.000	713.093.650,00	100,00	641.814.000,00	90,00	71.279.650,00	10,00
80	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	177.800.000	401.330.197,00	100,00	178.368.000,00	44,44	222.962.197,00	55,56
81	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	714.000.000	1.631.037.987,00	100,00	780.856.175,00	47,87	850.181.812,00	52,13
82	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	960.400.000	1.508.950.149,00	100,00	960.039.000,00	63,62	548.911.149,00	36,38
83	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	229.600.000	262.569.440,00	100,00	234.848.000,00	89,44	27.721.440,00	10,56
84	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	140.000.000	274.112.135,00	100,00	122.990.000,00	44,87	151.122.135,00	55,13
85	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	85.400.000	97.600.000,00	100,00	82.185.000,00	84,21	15.415.000,00	15,79
86	Pengelolaan Dana BOS di SMA Keberbakatan Olahraga	84.000.000	84.000.000,00	100,00	63.224.000,00	75,27	20.776.000,00	24,73
87	Pengelolaan Dana BOS Afirmasi (DAK Non Fisik)	15.125.000.000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00
88	Pengelolaan Dana BOS Kinerja (DAK Non Fisik)	8.731.810.000	52.810.000,00	0,00	0,00	0,00	52.810.000,00	100,00
K	NON PROGRAM DAN NON KEGIATAN	0,00	0,00	0,00	-493.651.888,00	0,00	493.651.888,00	0,00
1	Belanja Dana BOS SMK Negeri 1 Pangkalpinang	0	0,00	0,00	-272.170.000,00	0,00	272.170.000,00	0,00
2	Belanja Dana BOS SMA Negeri 1 Puding Besar	0	0,00	0,00	20.230.000,00	0,00	-20.230.000,00	0,00

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Belanja Dana BOS SMA Negeri 1 Belinyu	0	0,00	0,00	-8.748.187,00	0,00	8.748.187,00	0,00
4	Belanja Dana BOS SMK 1 Belinyu	0	0,00	0,00	-135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00
5	Belanja Dana BOS SMA Negeri 1 Belinyu	0	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
6	Belanja Dana BOS SMA Negeri 1 Mentok	0	0,00	0,00	139.190.000,00	0,00	-139.190.000,00	0,00
7	Belanja Dana BOS SMA Negeri 1 Tempilang	0	0,00	0,00	61.966.500,00	0,00	-61.966.500,00	0,00
8	Belanja Dana BOS SMK Negeri 1 Kelapa	0	0,00	0,00	-1.045.602,00	0,00	1.045.602,00	0,00
9	Belanja Dana BOS SMK Negeri 1 Mentok	0	0,00	0,00	551.838,00	0,00	-551.838,00	0,00
10	Belanja Dana BOS SMA Negeri 1 Koba	0	0,00	0,00	-12.763.792,00	0,00	12.763.792,00	0,00
11	Belanja Dana BOS SMA Negeri 2 Sungai Selan	0	0,00	0,00	95.995.750,00	0,00	-95.995.750,00	0,00
12	Belanja Dana BOS SMK Negeri 2 Koba	0	0,00	0,00	-499.055,00	0,00	499.055,00	0,00
13	Belanja Dana BOS SMK Negeri 1 Simpang Katis	0	0,00	0,00	-83.982.500,00	0,00	83.982.500,00	0,00
14	Belanja Dana BOS SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok	0	0,00	0,00	-157.266.600,00	0,00	157.266.600,00	0,00
15	Belanja Dana BOS SMA Negeri 1 Pulau Besar	0	0,00	0,00	-108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00
16	Belanja Dana BOS SMK Negeri 1 Badau	0	0,00	0,00	3.239.000,00	0,00	-3.239.000,00	0,00
17	Belanja Dana BOS SMK Negeri 2 Tanjung Pandan	0	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
18	Belanja Dana BOS SMA Negeri 1 Kelapa Kampit	0	0,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
19	Belanja Dana BOS SMA Negeri 1 Simpang Pesak	0	0,00	0,00	-10.140.000,00	0,00	10.140.000,00	0,00
20	Belanja Dana BOS SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	0	0,00	0,00	64.319.160,00	0,00	-64.319.160,00	0,00
21	Belanja Dana BOS SMK Negeri 1 Simpang Renggiang	0	0,00	0,00	-37.297.500,00	0,00	37.297.500,00	0,00
22	Belanja Dana BOS SLB Negeri Mentok	0	0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
23	Belanja Dana BOS SLB Negeri Toboali	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	293.790.982.862,00	286.600.214.284,00	99,16	252.408.655.274,11	88,07	34.191.559.009,89	11,93
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	80.621.361.822,00	85.522.986.724,00	100	79.487.377.920,00	92,94	6.035.608.804,00	7,06
	Belanja Tidak Langsung	80.621.361.822,00	85.522.986.724,00	100	79.487.377.920,00	92,94	6.035.608.804,00	7,06
II	BELANJA LANGSUNG	213.169.621.040,00	201.077.227.560,00	98,31	172.921.277.354,11	86,00	28.155.950.205,89	14,00
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	29.241.965.814,00	29.922.697.522,00	99,47	24.062.427.102,00	80,42	5.860.270.420,00	19,58
1	Pelayanan administrasi perkantoran	21.512.316.914,00	22.413.620.914,00	100	17.287.315.214,00	77,13	5.126.305.700,00	22,87
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.923.785.000,00	3.969.785.000,00	100	3.561.153.860,00	89,71	408.631.140,00	10,29
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.761.500.000,00	1.630.896.000,00	100	1.400.564.586,00	85,88	230.331.414,00	14,12
4	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	168.885.000,00	128.210.000,00	100	102.725.000,00	80,12	25.485.000,00	19,88
5	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27.375.000,00	18.800.000,00	100	11.233.125,00	59,75	7.566.875,00	40,25
6	Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes	1.715.643.900,00	1.628.925.608,00	96,29	1.568.564.408,00	96,29	60.361.200,00	3,71
7	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	132.460.000,00	132.460.000,00	100	130.870.909,00	98,80	1.589.091,00	1,20
B	Program Kesehatan Masyarakat	7.682.100.500,00	7.197.204.300,00	97,76	5.853.343.737,00	81,33	1.343.860.563,00	18,67
8	Peningkatan kesehatan masyarakat	617.179.000,00	617.179.000,00	84,57	469.949.000,00	76,14	147.230.000,00	23,86
9	Upaya peningkatan kesehatan keluarga	928.566.000,00	928.566.000,00	100	824.338.860,00	88,78	104.227.140,00	11,22
10	Penurunan kematian ibu	668.490.000,00	668.490.000,00	100	471.580.200,00	70,54	196.909.800,00	29,46
11	Penurunan angka kematian bayi	576.060.700,00	465.240.700,00	100	407.857.188,00	87,67	57.383.512,00	12,33
12	Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	1.175.640.000,00	1.004.640.000,00	98	724.538.885,00	72,12	280.101.115,00	27,88
13	Peningkatan penyehatan lingkungan	513.312.000,00	364.069.000,00	100	316.884.100,00	87,04	47.184.900,00	12,96
14	Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga	107.932.800,00	54.099.600,00	100	38.081.800,00	70,39	16.017.800,00	29,61
15	BOK provinsi (Dak non fisik)	2.533.500.000,00	2.533.500.000,00	97,31	2.132.080.662,00	84,16	401.419.338,00	15,84
16	Pengadaan Makanan Tambahan Ibu Hamil (DAK Fisik)	561.420.000,00	561.420.000,00	100	468.033.042,00	83,37	93.386.958,00	16,63
C	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.596.242.600,00	1.998.497.600,00	96,90	1.627.129.053,00	81,42	371.368.547,00	18,58
17	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	146.035.000,00	146.035.000,00	100	118.213.900,00	80,95	27.821.100,00	19,05
18	Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV	398.400.000,00	398.400.000,00	96,3	310.629.100,00	77,97	87.770.900,00	22,03
19	Penanganan penyakit menular lainnya (hapatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	377.765.000,00	377.765.000,00	100	313.042.000,00	82,87	64.723.000,00	17,13
20	Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker	78.040.000,00	78.040.000,00	100	68.946.800,00	88,35	9.093.200,00	11,65
21	Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes mellitus)	155.459.600,00	134.309.600,00	100	118.865.928,00	88,50	15.443.672,00	11,50
22	Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa	191.988.000,00	163.963.000,00	100	125.915.400,00	76,80	38.047.600,00	23,20
23	Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus	1.248.555.000,00	699.985.000,00	82	571.515.925,00	81,65	128.469.075,00	18,35
D	Program Pelayanan Kesehatan	22.149.871.236,00	20.651.677.648,00	95,83	16.820.114.826,00	81,45	3.831.562.822,00	18,55
24	Peningkatan pelayanan kesehatan primer	3.039.223.236,00	3.009.150.648,00	93,91	2.768.345.200,00	92,00	240.805.448,00	8,00
25	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	1.060.045.000,00	1.065.645.000,00	89,41	664.347.043,00	62,34	401.297.957,00	37,66
26	Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	18.008.928.000,00	16.535.207.000,00	100	13.364.324.383,00	80,82	3.170.882.617,00	19,18
27	Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	41.675.000,00	41.675.000,00	100	23.098.200,00	55,42	18.576.800,00	44,58

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	2.345.318.820,00	2.301.079.120,00	100	1.886.646.443,00	81,99	414.432.677,00	18,01
28	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan/SDMK	1.662.010.120,00	1.692.810.120,00	100	1.432.716.600,00	84,64	260.093.520,00	15,36
29	Peningkatan pelayanan kefarmasian	600.233.700,00	522.013.000,00	100	369.839.243,00	70,85	152.173.757,00	29,15
30	Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT	83.075.000,00	86.256.000,00	100	84.090.600,00	97,49	2.165.400,00	2,51
F	Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	916.504.370,00	916.504.370,00	99,92	863.103.228,00	94,17	53.401.142,00	5,83
31	Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis Laboratorium Kesehatan	916.504.370,00	916.504.370,00	99,92	863.103.228,00	94,17	53.401.142,00	6,19
G	Program Pelayanan Teknis Keperawatan	1.153.416.200,00	1.053.966.200,00	100	864.936.055,00	82,06	189.030.145,00	17,94
32	Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.093.900.200,00	994.450.200,00	100	814.734.655,00	81,93	179.715.545,00	18,07
33	Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan	7.500.000,00	7.500.000,00	100	7.081.000,00	94,41	419.000,00	5,59
34	Kegiatan Peningkatan Etika Keperawatan	52.016.000,00	52.016.000,00	100	43.120.400,00	82,9	8.895.600,00	17,10
H	Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	22.344.050.000,00	28.855.275.000,00	90	24.962.787.235,00	86,51	3.892.487.765,00	13,49
35	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.094.475.000,00	14.594.475.000,00	100	14.488.703.975,00	99,28	105.771.025,00	0,72
36	Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.979.800.000,00	12.910.200.000,00	85	9.568.600.000,00	74,12	3.341.600.000,00	25,88
37	Kegiatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.251.600.000,00	1.350.600.000,00	85	905.483.260,00	67,04	445.116.740,00	32,96
38	Kegiatan Penyusunan Standar Kesehatan dan Evaluasi Standar Kesehatan	18.175.000,00	Efisiensi					
I	Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	81.823.692.000,00	71.325.431.300,00	98,13	65.597.771.899,55	91,97	5.727.659.400,45	8,73
39	Kegiatan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	6.963.519.000,00	2.388.519.000,00	100	2.177.558.981,00	91,17	210.960.019,00	8,83
40	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	10.217.739.000,00	12.097.739.000,00	100	11.062.850.006,72	91,45	1.034.888.993,28	8,55
41	Kegiatan Pembangunan Gedung B	9.470.820.000,00	8.944.709.300,00	85	5.567.894.400,00	62,25	3.376.814.900,00	37,75
42	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)	40.771.884.000,00	40.771.884.000,00	100	39.851.981.559,15	97,74	919.902.440,85	2,26
43	Kegiatan Pembangunan Pagar Rumah Sakit	2.054.650.000,00	Efisiensi					
44	Kegiatan Perencanaan Gedung C	805.950.000,00	805.950.000,00	100	769.330.000,00	95,46	36.620.000,00	4,54
45	Kegiatan Pembangunan Masjid	2.054.650.000,00	Efisiensi					
46	Kegiatan Pembangunan Gedung Jenazah Rumah Sakit	2.267.850.000,00	Efisiensi					
47	Kegiatan Pembangunan Gedung Laundry Rumah Sakit	2.265.650.000,00	2.265.650.000,00	100	2.240.822.952,68	98,9	24.827.047,32	1,10
48	Kegiatan Pembangunan Gedung Dapur Rumah Sakit	2.568.570.000,00	2.568.570.000,00	100	2.467.966.000,00	96,08	100.604.000,00	3,92
49	Kegiatan Pembangunan IPAL	1.482.410.000,00	1.482.410.000,00	100	1.459.368.000,00	98,45	23.042.000,00	1,55
50	Kegiatan Pembangunan Sumur Bor	900.000.000,00	Efisiensi					
J	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD P	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	90	13.137.037.317,56	87,58	1.862.962.682,44	12,42
51	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	90	13.137.037.317,56	87,58	1.862.962.682,44	12,42
G	Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	5.422.800.000,00	5.490.550.000,00	100	4.815.971.775,00	87,71	674.578.225,00	12,29
52	Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGJ	16.000.000,00	2.900.000,00	100	117.000,00	4,03	2.783.000,00	95,97
53	Penjangkauan Bebas Pasung	15.300.000,00	2.550.000,00	100	104.000,00	4,08	2.446.000,00	95,92
54	Promosi Kesehatan Jiwa	159.800.000,00	159.800.000,00	100	124.155.900,00	77,69	35.644.100,00	22,31
55	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	5.229.800.000,00	5.323.400.000,00	100	4.689.695.150,00	88,10	633.704.850,00	11,90
56	Survey Kepuasan Masyarakat	1.900.000,00	1.900.000,00	100	1.899.725,00	99,99	275,00	0,01
H	Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza	3.189.905.000,00	3.037.790.000,00	100	1.988.350.215,00	65,45	1.049.439.785,00	34,55
57	Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	405.695.000,00	310.830.000,00	100	205.810.800,00	66,21	105.019.200,00	33,79
58	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homesivite	3.950.000,00	3.950.000,00	0	-	-	3.950.000,00	100,00

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Penilaian Akreditasi	259.590.000,00	209.590.000,00	100	195.116.725,00	93,09	14.473.275,00	6,91
60	Jambore Nasional Kesehatan Jiwa	2.503.145.000,00	2.503.145.000,00	100	1.582.932.440,00	63,24	920.212.560,00	36,76
61	Penyusunan Asuhan Keperawatan Anak dan Remaja Psikogeriatrik	3.200.000,00	3.200.000,00	100	1.051.750,00	32,87	2.148.250,00	67,13
62	Audit Mutu Pelayanan Keperawatan dan MPKP	14.325.000,00	7.075.000,00	100	3.438.500,00	48,60	3.636.500,00	51,40
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	9.303.754.500,00	3.326.554.500,00	100	2.754.624.221,00	82,81	571.930.279,00	17,19
63	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	917.075.000,00	917.075.000,00	100	890.387.669,00	97,09	26.687.331,00	2,91
64	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	41.860.000,00	41.860.000,00	100	41.819.500,00	99,90	40.500,00	0,10
65	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II,dan III)	193.075.000,00	193.075.000,00	100	191.615.000,00	99,24	1.460.000,00	0,76
66	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	47.375.000,00	47.375.000,00	100	46.300.000,00	97,73	1.075.000,00	2,27
67	Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	84.750.000,00	84.750.000,00	100	83.546.891,00	98,58	1.203.109,00	1,42
68	Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	94.750.000,00	94.750.000,00	100	93.680.400,00	98,87	1.069.600,00	1,13
69	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	986.312.500,00	986.312.500,00	100	752.824.106,00	76,33	233.488.394,00	23,67
70	Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen	123.000.000,00	123.000.000,00	100	118.772.500,00	96,56	4.227.500,00	3,44
71	Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry, ruang tunggu dll)	190.675.000,00	190.675.000,00	100	128.873.800,00	67,59	61.801.200,00	32,41
72	Pengembangan SIMRS	129.480.000,00	129.480.000,00	100	121.131.225,00	93,55	8.348.775,00	6,45
73	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	515.602.000,00	515.602.000,00	100	284.773.130,00	55,23	230.828.870,00	44,77
74	Pembangunan Gedung Rawat Jalan	5.977.200.000,00	-	0	-	-	-	-
75	Penyusunan Formularium	2.600.000,00	2.600.000,00	100	900.000,00	34,62	1.700.000,00	65,38
J	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100	7.687.034.247,00	76,87	2.312.965.753,00	23,13
76	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100	7.687.034.247,00	76,87	2.312.965.753,00	23,13

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA	332.295.619.550,00	333.205.953.703,00	97,66	317.606.301.428,26	95,32	15.599.652.274,74	4,68
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.368.563.650,00	20.618.840.703,00	100,00	18.694.702.289,00	90,67	1.924.138.414,00	9,33
	Belanja Tidak Langsung	19.368.563.650,00	20.618.840.703,00	100,00	18.694.702.289,00	90,67	1.924.138.414,00	9,33
II	BELANJA LANGSUNG	312.927.055.900,00	312.587.113.000,00	95,32	298.911.599.139,26	95,63	13.675.513.860,74	4,37
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.727.119.500,00	11.473.184.300,00	100,00	8.647.099.467,00	75,37	2.826.084.833,00	24,63
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.969.362.500,00	5.358.727.300,00	100,00	4.654.617.527,00	86,86	704.109.773,00	13,14
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.085.399.000,00	5.442.099.000,00	100,00	3.426.901.204,00	62,97	2.015.197.796,00	37,03
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	101.516.640,00	72,51	38.483.360,00	27,49
4	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	1.705.750,00	44,89	2.094.250,00	55,11
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	528.558.000,00	528.558.000,00	100,00	462.358.346,00	87,48	66.199.654,00	12,52
B	Program Kebinamargaan	279.542.031.200,00	277.332.478.300,00	96,43	269.223.278.289,00	79,65	4.428.200.011,00	20,35
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	3.128.900.000,00	3.246.042.300,00	100,00	3.041.866.300,00	93,71	204.176.000,00	6,29
2	Pembangunan Jalan	169.292.809.800,00	168.130.090.000,00	100,00	167.556.114.553,00	99,66	573.975.447,00	0,34
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	1.000.840.000,00	1.166.167.000,00	50,00	951.660.600,00	81,61	214.506.400,00	18,39
4	Pembangunan Jembatan	10.162.112.200,00	10.073.617.000,00	100,00	10.071.311.300,00	99,98	2.305.700,00	0,02
5	Pengadaan Alat-alat Berat	3.681.000.000,00	3.681.000.000,00	-	-	-	-	-
6	Inspeksi Kondisi jalan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	1.988.000,00	16,57	10.012.000,00	83,43
7	Inspeksi Kondisi jembatan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	497.000,00	4,14	11.503.000,00	95,86
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II	1.544.160.000,00	1.744.160.000,00	100,00	1.059.862.187,00	60,77	684.297.813,00	39,23
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	99.130.000,00	101.930.000,00	100,00	101.629.200,00	99,70	300.800,00	0,30
10	Pembangunan Jalan (DAK)	18.045.419.000,00	18.248.419.000,00	100,00	17.707.279.506,00	97,03	541.139.494,00	2,97
11	Pemeliharaan Berkala jalan	23.340.172.200,00	22.990.370.000,00	100,00	22.981.683.965,00	99,96	8.686.035,00	0,04
12	Legar jalan	600.875.000,00	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Alat-alat Laboratorium	224.301.000,00	224.301.000,00	100,00	169.906.000,00	75,75	54.395.000,00	24,25
14	Pemeliharaan Rutin Jalan	28.886.420.000,00	28.443.490.000,00	100,00	26.845.561.981,00	94,38	1.597.928.019,00	5,62
15	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga	496.800.000,00	-	-	-	-	-	-
16	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.374.211.000,00	1.374.211.000,00	100,00	1.296.441.182,00	94,34	77.769.818,00	5,66
17	Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	17.640.881.000,00	17.884.681.000,00	100,00	17.437.476.515,00	97,50	447.204.485,00	2,50
C	Program Pengembangan Sumber Daya Air	19.581.281.200,00	20.545.231.200,00	100,00	18.990.861.010,00	92,43	1.554.370.190,00	7,57
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir	8.985.932.200,00	9.013.932.200,00	100,00	8.728.236.200,00	96,83	285.696.000,00	3,17
2	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	3.405.895.000,00	3.420.295.000,00	100,00	3.141.113.431,00	91,84	279.181.569,00	8,16
3	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	471.365.000,00	476.965.000,00	100,00	472.109.000,00	98,98	4.856.000,00	1,02
4	Perencanaan Turap/talud/bonjong	300.875.000,00	300.875.000,00	100,00	269.391.750,00	89,54	31.483.250,00	10,46
5	Konservasi Sumber Air	1.044.765.000,00	1.047.165.000,00	100,00	966.476.500,00	92,29	80.688.500,00	7,71

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Pembersihan/rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/kali	2.766.125.000,00	2.782.925.000,00	100,00	2.042.133.700,00	73,38	740.791.300,00	26,62
7	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	260.875.000,00	821.750.000,00	100,00	796.179.676,00	96,89	25.570.324,00	3,11
8	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	1.380.000,00	300.875.000,00	100,00	276.373.530,00	91,86	24.501.470,00	8,14
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	2.344.069.000,00	2.380.449.000,00	100,00	2.298.847.223,00	96,57	81.601.777,00	3,43
D	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	1.929.920.000,00	1.005.920.000,00	75,50	331.577.828,26	32,96	564.142.171,74	56,08
1	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	265.592.000,00	466.642.000,00	100,00	106.318.000,00	-	360.324.000,00	-
2	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	1.300.000.000,00	110.200.000,00	2,00	-	-	-	-
3	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	146.550.000,00	216.550.000,00	100,00	200.230.788,26	92,46	16.319.211,74	7,54
4	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	217.778.000,00	212.528.000,00	100,00	25.029.040,00	11,78	187.498.960,00	88,22
E	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	839.676.000,00	895.271.200,00	100,00	580.869.004,00	64,88	314.402.196,00	35,12
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	159.397.000,00	144.602.000,00	100,00	80.322.000,00	55,55	64.280.000,00	44,45
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	680.279.000,00	750.669.200,00	100,00	500.547.004,00	66,68	250.122.196,00	33,32
F	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	1.307.028.000,00	1.335.028.000,00	100,00	1.137.913.541,00	85,24	193.621.459,00	14,50
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan	1.001.788.000,00	1.029.788.000,00	100,00	957.989.996,00	93,03	71.798.004,00	6,97
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	301.747.000,00	301.747.000,00	100,00	179.923.545,00	59,63	121.823.455,00	40,37
3	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop	3.493.000,00	3.493.000,00	100,00	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No		APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1		3	4	5	6	7	8	9
	Total Belanja Dinas	21.864.669.094,00	22.516.991.649,68	95,98	21.047.755.139,23	93,47	1.430.601.842,72	2,51
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.260.229.051,00	6.500.305.839,68	100,00	5.958.134.145,00	91,66	542.171.694,68	8,34
	Belanja Tidak Langsung	6.260.229.051,00	6.500.305.839,68	100,00	5.958.134.145,00	91,66	542.171.694,68	8,34
II	BELANJA LANGSUNG	15.604.440.043,00	16.016.685.810,00	91,97	15.089.620.994,23	77,22	888.430.148,04	14,75
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.681.763.293,00	3.692.228.147,00	97,78	3.481.310.275,64	66,65	210.917.871,36	31,13
1	Pelayanan Admistrasi Perkantoran	2.168.173.500,00	2.592.888.354,00	100,00	2.464.910.412,00	95,06	127.977.942,00	4,94
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	823.092.793,00	952.592.793,00	100,00	914.926.565,64	96,05	37.666.227,36	3,95
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	252.891.000,00	122.891.000,00	88,89	85.904.098,00	69,90	36.986.902,00	30,10
4	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	-	0,00	2.300.000,00	100,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	435.306.000,00	21.556.000,00	100,00	15.569.200,00	72,23	5.986.800,00	27,77
B.	Program Keciaptakaryaan dan Permukiman	2.570.814.750,00	3.174.024.663,00	78,13	2.493.268.595,27	75,86	680.756.067,73	24,14
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	55.595.000,00	691.295.000,00	12,50	49.173.600,00	7,11	642.121.400,00	92,89
2	Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	1.005.650.000,00	984.702.784,00	100,00	978.250.704,43	99,34	6.452.079,57	0,66
3	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	1.206.240.000,00	1.206.240.000,00	100,00	1.175.389.062,02	97,44	30.850.937,98	2,56
4	Pembangunan/Peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh	303.329.750,00	291.786.879,00	100,00	290.455.228,82	99,54	1.331.650,18	0,46
C.	Program Pembangunan Perumahan Rakyat	9.351.862.000,00	9.150.433.000,00	100,00	9.115.042.123,32	89,14	35.390.876,68	10,86
1	Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni	4.751.110.000,00	4.972.681.000,00	100,00	4.968.601.323,32	99,92	4.079.676,68	0,08
2	Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	4.504.640.000,00	4.081.640.000,00	100,00	4.079.265.000,00	99,94	2.375.000,00	0,06
3	Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	28.328.000,00	28.328.000,00	100,00	28.037.500,00	98,97	290.500,00	1,03
4	Rapat Koordinasi Bidang Perumahan	67.784.000,00	67.784.000,00	100,00	39.138.300,00	57,74	28.645.700,00	42,26

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		22.111.969.892,00	22.741.579.923,00	93,81	20.535.112.868,00	90,30	2.206.467.055,00	9,70
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.470.748.492,00	12.351.413.773,00	100,00	10.967.508.059,00	88,80	1.383.905.714,00	11,20
	Belanja Tidak Langsung	12.470.748.492,00	12.351.413.773,00	100,00	10.967.508.059,00	88,80	1.383.905.714,00	11,20
II	BELANJA LANGSUNG	9.641.221.400,00	10.390.166.150,00	87,62	9.567.604.809,00	92,08	822.561.341,00	7,92
	A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	7.325.048.900,00	8.215.198.650,00	96,41	7.747.407.781,00	94,31	467.790.869,00	5,69
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.443.243.900,00	6.877.806.900,00	100,00	6.651.262.015,00	96,71	226.544.885,00	3,29
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	346.885.000,00	668.791.750,00	100,00	489.727.766,00	73,23	179.063.984,00	26,77
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur	407.920.000,00	535.160.000,00	100,00	516.040.000,00	96,43	19.120.000,00	3,57
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	76.275.000,00	76.275.000,00	78,46	46.766.600,00	61,31	29.508.400,00	38,69
	5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	20.025.000,00	21.365.000,00	100,00	20.782.000,00	97,27	583.000,00	2,73
	6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.700.000,00	35.800.000,00	100,00	22.829.400,00	63,77	12.970.600,00	36,23
	B. Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	292.880.000,00	245.256.000,00	100,00	206.142.365,00	75,53	39.113.635,00	15,95
	1. Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur	114.400.000,00	48.000.000,00	100,00	16.608.000,00	34,60	31.392.000,00	65,40
	2. Pembinaan Peningkatan Personil Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	76.630.000,00	95.406.000,00	100,00	89.035.000,00	93,32	6.371.000,00	6,68
	3. Pembinaan Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja	101.850.000,00	101.850.000,00	100,00	100.499.365,00	98,67	1.350.635,00	1,33
	C. Program Penegakkan Perda dan Perkada	155.695.000,00	161.065.000	91,67	79.612.700,00	53,66	81.452.300,00	46,34
	1. Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kep. Babel	12.930.000,00	5.430.000,00	75,00	3.225.000,00	59,39	2.205.000,00	40,61
	2. Bimtek Pemberkasan PPNS Penegak Perda Se-Provinsi Kep. Babel	-	22.706.000,00	100,00	17.479.000,00	76,98	5.227.000,00	23,02
	3. Rapat Koordinasi Satpol PP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	47.940.000,00	47.940.000,00	100,00	35.288.700,00	73,61	12.651.300,00	26,39
	4. Pemberdayaan Peran dan Tugas PTI (Petugas Tindak Internal)	1.410.000,00	-	-	0,00	-	-	-
	5. Penindakan Yustisial Terhadap Pelanggar Perda dan Perkada	40.750.000,00	44.484.000,00	83,33	0,00	0,00	44.484.000,00	100,00
	6. Pembinaan dan Penindakan non Yustisial terhadap Pelanggar Perda dan Perkada	52.665.000,00	40.505.000,00	100,00	23.620.000,00	58,31	16.885.000,00	41,69
	D. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.379.270.500,00	1.334.920.500,00	50,00	1.147.874.000,00	51,92	187.046.500,00	14,01
	1. Patroli	125.900.000,00	109.100.000,00	100,00	99.750.000,00	91,43	9.350.000	8,57
	2. Gelar Pasukan dalam Rangka Peningkatan Penyelenggaraan tbumtrannmas & linmas serta Kesiapsigaaan Tim Pemadam Kebakaran	113.745.500,00	113.745.500,00	-	26.400.000,00	23,21	87.345.500	76,79
	3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.123.250.000,00	1.098.250.000,00	100,00	1.021.724.000,00	93,03	76.526.000	6,97
	4. Penyelenggaraan Deteksi Dini Pelanggaran Tbumtrannmas	16.375.000,00	13.825.000,00	-	-	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	488.327.000,00	433.726.000,00	100,00	386.567.963,00	71,22	47.158.037	10,87
	1. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	139.116.000,00	139.316.000,00	100,00	121.880.563,00	87,48	17.435.437	12,52
	2. Bimtek Pengamanan Pemilu dan Pemilukada bagi Satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	147.405.000,00	130.954.000,00	100,00	130.829.000,00	99,90	125.000	0,10
	3. Pendidikan dan Pelatihan Bencana dan kebakaran bagi Satlinmas dan Satpol PP	150.676.000	143.676.000	100,00	132.868.400,00	92,48	10.807.600	7,52
	4. Pengurangan Resiko Bencana dan Kebakaran	51.130.000	19.780.000	100,00	990.000,00	5,01	18.790.000	94,99

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		12.069.558.934,06	11.826.682.126,00	100,00	10.988.846.808,00	92,92	837.835.318,00	7,08
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.440.010.454,06	6.140.733.646,00	100,00	5.794.474.967,00	94,36	346.258.679,00	5,64
	Belanja Tidak Langsung	6.440.010.454,06	6.140.733.646,00	100,00	5.794.474.967,00	94,36	346.258.679,00	5,64
II	BELANJA LANGSUNG	5.629.548.480,00	5.685.948.480,00	100,00	5.194.371.841,00	91,35	491.576.639,00	9,46
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.788.718.680,00	2.974.254.680,00	100,00	2.840.981.605,00	95,52	133.273.075,00	4,48
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.335.538.680,00	2.449.254.680,00	100,00	2.360.723.415,00	96,39	88.531.265,00	3,61
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	411.960.000,00	483.780.000,00	100,00	441.092.390,00	91,18	42.687.610,00	8,82
3	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	17.970.000,00	17.970.000,00	100,00	16.168.600,00	89,98	1.801.400,00	10,02
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	22.997.200,00	98,91	252.800,00	1,09
B	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	323.034.000,00	212.898.000,00	100,00	111.690.694,00	52,46	101.207.306,00	90,61
1	Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial Dan Aksi Terorisme Di Bangka Belitung	4.920.000,00	4.920.000,00	100,00	4.885.000,00	99,29	35.000,00	0,71
2	Forum Komunikasi Dan Koordinasi Kominda	61.400.000,00	5.900.000,00	100,00	3.705.000,00	62,80	2.195.000,00	37,20
3	Penguatan Kewaspadaan Dan Deteksi Dini Serta Pengawasan Orang Asing Di Bangka Belitung	32.120.000,00	32.120.000,00	100,00	15.299.800,00	47,63	16.820.200,00	52,37
4	Penyelenggaraan Penanganan Konflik	224.594.000,00	169.958.000,00	100,00	87.800.894,00	51,66	82.157.106,00	48,34
C	Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	1.618.009.000,00	1.618.009.000,00	100,00	1.497.103.650,00	92,53	120.905.350,00	7,47
1	Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	172.700.000,00	172.700.000,00	100,00	124.795.700,00	72,26	47.904.300,00	27,74
2	Pembentukan, Pendidikan Dan Pelatihan Kader Bela Negara	81.345.000,00	81.345.000,00	100,00	71.200.000,00	87,53	10.145.000,00	12,47
3	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (Fpk)	91.450.000,00	91.450.000,00	100,00	65.590.300,00	71,72	25.859.700,00	28,28
4	Forum Dialog Penguatan Ideologi Bangsa (4 Konsensus Kebangsaan) Dalam Rangka Mencegah Budaya Dan Ideologi Yang Bertentangan Dengan Pancasila	20.580.000,00	20.580.000,00	100,00	18.722.600,00	90,97	1.857.400,00	9,03
5	Revolusi Mental Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73.950.000,00	73.950.000,00	100,00	62.141.700,00	84,03	11.808.300,00	15,97
6	Peningkatan Kecintaan Terhadap Nkri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.177.984.000,00	1.177.984.000,00	100,00	1.154.653.350,00	98,02	23.330.650,00	1,98
D	Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	669.980.000,00	669.980.000,00	100,00	564.440.852,00	84,25	105.539.148,00	15,75
1	Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada	113.175.000,00	79.950.300,00	100,00	79.942.300,00	99,99	8.000,00	0,01
2	Monitoring Dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Di Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	11.273.000,00	78,28	3.127.000,00	21,72
3	Workshop Pendidikan Etika Dan Budaya Politik	136.700.000,00	136.700.000,00	100,00	115.579.200,00	84,55	21.120.800,00	15,45
4	Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (Idi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	99.850.000,00	133.074.700,00	100,00	105.361.352,00	79,17	27.713.348,00	20,83
5	Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi Dalam Pembangunan Bidang Politik	69.300.000,00	69.300.000,00	100,00	58.998.200,00	85,13	10.301.800,00	14,87

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Peningkatan Kualitas Peran Dan Fungsi Parpol Dalam Rangka Penguatan Leadership Dan Kaderisasi	24.450.000,00	24.450.000,00	100,00	21.438.200,00	87,68	3.011.800,00	12,32
7	Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan Dan Parpol (Kppp)	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	5.490.500,00	98,93	59.500,00	1,07
8	Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00	4.491.000,00	31,41	9.809.000,00	68,59
9	Sosialisasi Undang-Undang Mengenai Politik	192.255.000,00	192.255.000,00	100,00	161.867.100,00	84,19	30.387.900,00	15,81
E	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Masyarakat	229.806.800,00	210.806.800,00	100,00	180.155.040,00	85,46	30.651.760,00	14,54
1	Evaluasi Dan Verifikasi Data Ormas	3.325.000,00	3.325.000,00	100,00	2.449.440,00	73,67	875.560,00	26,33
2	Forum Komunikasi Dan Kerjasama Antar Umat Beragama	85.921.800,00	85.921.800,00	100,00	76.872.400,00	89,47	9.049.400,00	10,53
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ormas	24.275.000,00	31.275.000,00	100,00	24.709.000,00	79,01	6.566.000,00	20,99
4	Penyuluhan Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba	88.200.000,00	62.200.000,00	100,00	55.792.200,00	89,70	6.407.800,00	10,30
5	Evaluasi Data Dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi Serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako Di Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	2.800.000,00	53,33	2.450.000,00	46,67
6	Workshop Optimalisasi Peran Aparatur, Ormas Dan Masyarakat Dalam Menjaga Seni Dan Budaya	22.835.000,00	22.835.000,00	100,00	17.532.000,00	76,78	5.303.000,00	23,22

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		23.566.251.317,00	23.817.836.412,00	96,42	21.779.037.505,00	91,44	2.038.798.907,00	8,56
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.416.426.617,00	12.429.611.712,00	100,00	11.854.902.263,00	95,38	574.709.449,00	4,62
	Belanja Tidak Langsung	12.416.426.617,00	12.429.611.712,00	100,00	11.854.902.263,00	95,38	574.709.449,00	4,62
II	BELANJA LANGSUNG	11.149.824.700,00	11.388.224.700,00	92,85	9.924.135.242,00	84,03	1.464.089.458,00	15,97
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.908.471.700,00	5.293.226.700,00	98,50	4.893.920.551,00	87,70	399.306.149,00	12,30
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.890.380.700,00	3.165.385.700,00	100,00	2.915.802.357,00	92,12	249.583.343,00	7,88
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.564.550.000,00	1.674.300.000,00	100,00	1.615.952.500,00	96,52	58.347.500,00	3,48
3	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.825.000,00	24.825.000,00	100,00	20.477.400,00	82,49	4.347.600,00	17,51
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	428.716.000,00	428.716.000,00	93,99	341.688.294,00	79,70	87.027.706,00	20,30
B	Program Pemberdayaan Sosial	823.950.000,00	823.950.000,00	97,75	788.944.191,00	94,45	35.005.809,00	5,55
1	Pemberdayaan Keluarga	78.715.000,00	78.715.000,00	100,00	76.815.100,00	97,59	1.899.900,00	2,41
2	Penyuluhan Sosial	80.950.000,00	80.950.000,00	100,00	77.650.000,00	95,92	3.300.000,00	4,08
3	Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	19.390.000,00	19.390.000,00	100,00	19.150.000,00	98,76	240.000,00	1,24
4	Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	105.575.000,00	105.575.000,00	88,75	86.476.000,00	81,91	19.099.000,00	18,09
5	Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Keluarga Pionir	539.320.000,00	539.320.000,00	100,00	528.853.091,00	98,06	10.466.909,00	1,94
C	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	1.082.860.000,00	1.122.060.000,00	98,68	1.055.998.826,00	97,32	66.061.174,00	2,68
1	Pelayanan Psikososial bagi PMKS dipanti Sosial Bina Serumpun	553.200.000,00	562.400.000,00	92,10	508.729.000,00	90,46	53.671.000,00	9,54
2	Peningkatan kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi	190.640.000,00	220.640.000,00	100,00	210.676.610,00	95,48	9.963.390,00	4,52
3	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Warga Binaan Sosial di PSBS	29.200.000,00	29.200.000,00	100,00	29.097.000,00	99,65	103.000,00	0,35
4	Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	64.973.200,00	99,96	26.800,00	0,04
5	Rehabilitasi Ringan Sarana Prasarana Panti	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	99.896.746,00	99,90	103.254,00	0,10
6	Pembangunan Prasarana Panti	144.820.000,00	144.820.000,00	100,00	142.626.270,00	98,49	2.193.730,00	1,51
D	Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	1.632.595.000,00	1.440.820.000,00	94,20	1.146.024.290,00	83,02	294.795.710,00	16,98
1	Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien	36.250.000,00	36.250.000,00	100,00	35.871.000,00	98,95	379.000,00	1,05
2	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti	47.250.000,00	83.500.000,00	90,00	44.556.200,00	53,36	38.943.800,00	46,64
3	Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	692.780.000,00	734.780.000,00	90,00	649.973.500,00	88,46	84.806.500,00	11,54
4	Penyediaan Bantuan UEP bagi eks Penghuni Panti	39.125.000,00	39.125.000,00	100,00	38.325.000,00	97,96	800.000,00	2,04
5	Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti	509.890.000,00	501.890.000,00	85,19	335.390.390,00	66,83	166.499.610,00	33,17

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti	15.050.000,00	45.275.000,00	100,00	41.908.200,00	92,56	3.366.800,00	7,44
7	Pembangunan Prasarana Panti	292.250.000,00	-		-	-	-	
E	Program Rehabilitasi Sosial	1.108.878.000,00	1.111.678.000,00	88,50	924.093.538,00	78,26	187.584.462,00	21,74
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	231.214.000,00	234.014.000,00	100,00	220.888.200,00	94,39	13.125.800,00	5,61
2	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	205.020.000,00	205.020.000,00	91,99	150.943.008,00	73,62	54.076.992,00	26,38
3	Pembinaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	201.190.000,00	201.190.000,00	93,83	177.907.050,00	88,43	23.282.950,00	11,57
4	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	219.450.000,00	219.450.000,00	100,00	211.529.900,00	96,39	7.920.100,00	3,61
5	Pembinaan Sosial Tuna Sosial	139.515.000,00	139.515.000,00	90,00	94.365.880,00	67,64	45.149.120,00	32,36
6	Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA	19.690.000,00	19.690.000,00	70,73	12.990.500,00	65,98	6.699.500,00	34,02
7	Pendampingan dan Advokasi Sosial Klien bagi Anak Berhadapan dengan Hukum	12.549.000,00	12.549.000,00	91,43	10.485.000,00	83,55	2.064.000,00	16,45
8	Optimalisasi Kinerja Komda Lansia	80.250.000,00	80.250.000,00	70,00	44.984.000,00	56,05	35.266.000,00	43,95
F	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.251.490.000,00	1.188.290.000,00	75,65	820.882.146,00	58,09	367.407.854,00	41,91
1	Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam	457.600.000,00	502.400.000,00	100,00	470.400.000,00	93,63	32.000.000,00	6,37
2	Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial	196.950.000,00	196.950.000,00	60,93	76.658.900,00	38,92	120.291.100,00	61,08
3	Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	466.450.000,00	358.450.000,00	75,00	225.750.000,00	62,98	132.700.000,00	37,02
4	Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH	130.490.000,00	130.490.000,00	66,67	48.073.246,00	36,84	82.416.754,00	63,16
G	Program Penanganan Fakir Miskin	341.580.000,00	408.200.000,00	96,67	294.271.700,00	89,34	113.928.300,00	10,66
1	Stimulan Penguatan Ekonomi Keluarga Fakir Miskin di Wilayah Pedesaan	142.000.000,00	142.000.000,00	90,00	110.241.700,00	77,64	31.758.300,00	22,37
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Bantuan Rastra BPNT Kepada Keluarga Miskin	-	66.970.000,00	-	-	-	66.970.000,00	100,00
3	Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan	166.920.000,00	166.920.000,00	100,00	151.920.000,00	91,01	15.000.000,00	8,99
4	Peningkatan Kualitas Dukungan Program Pusat	32.660.000,00	32.310.000,00	100,00	32.110.000,00	99,38	200.000,00	0,62

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		12.395.120.433,97	13.943.013.755,50	100,00	12.813.028.371,00	91,90	1.129.985.384,50	8,10
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.024.701.733,97	5.122.057.555,50	100,00	5.014.836.057,00	97,91	107.221.498,50	2,09
	Belanja Langsung	5.024.701.733,97	5.122.057.555,50	100,00	5.014.836.057,00	97,91	107.221.498,50	2,09
II	BELANJA LANGSUNG	7.370.418.700,00	8.820.956.200,00	100,00	7.798.192.314,00	88,41	1.022.763.886,00	11,59
A	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	2.632.253.700,00	2.881.293.700,00	100,00	2.750.884.617,00	84,92	130.409.083,00	4,53
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.875.040.700,00	2.245.040.700,00	100,00	2.200.160.574,00	98,00	44.880.126,00	2,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	595.743.000,00	510.243.000,00	100,00	453.480.043,00	88,88	56.762.957,00	11,12
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	20.175.000,00	53,80	17.325.000,00	46,20
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.720.000,00	71.260.000,00	100,00	59.819.000,00	83,94	11.441.000,00	16,06
5	Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	17.250.000,00	17.250.000,00	100,00	17.250.000,00	100,00	-	-
B	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.111.600.000,00	2.385.749.000,00	100,00	2.223.972.856,00	92,06	161.776.144,00	6,78
1	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	379.050.000,00	379.050.000,00	100,00	316.650.600,00	83,54	62.399.400,00	16,46
2	Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	162.125.000,00	131.542.000,00	100,00	131.542.000,00	100,00	-	-
3	Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah Aparatur Desa/Kelurahan dan Masyarakat	213.775.000,00	213.775.000,00	100,00	178.440.000,00	83,47	35.335.000,00	16,53
4	Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	160.750.000,00	267.932.000,00	100,00	260.982.000,00	97,41	6.950.000,00	2,59
5	Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.290.150.000,00	100,00	1.241.608.256,00	96,24	48.541.744,00	3,76
6	Kajian Daerah Rawan Bencana di 7 Kabupaten/ Kota	195.900.000,00	103.300.000,00	100,00	94.750.000,00	91,72	8.550.000,00	8,28
C	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	474.215.000,00	401.193.500,00	100,00	231.443.800,00	49,59	169.749.700,00	42,31
1	Bimbingan Teknis Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi	91.330.000,00	91.330.000,00	100,00	63.919.600,00	69,99	27.410.400,00	30,01
2	Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pasca Bencana	88.430.000,00	65.313.500	100,00	56.563.500,00	86,60	8.750.000,00	13,40
3	Pemeliharaan Jembatan Portable	90.425.000,00	45.550.000,00	100,00	16.220.000,00	35,61	29.330.000,00	64,39
4	Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable	115.550.000,00	115.550.000,00	100,00	30.503.400,00	26,40	85.046.600,00	73,60
5	Monitoring dan Evaluasi Pascabencana ke Kabupaten/Kota	2.050.000,00	2.050.000,00	-	0	-	2.050.000,00	-
6	Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Aparatur Provinsi, Kab/Kota	86.430.000,00	81.400.000,00	100,00	64.237.300,00	78,92	17.162.700,00	21,08

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	3.152.350.000,00	3.152.720.000,00	100,00	2.591.891.041,00	83,86	560.828.959,00	17,79
1	Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.361.600.000,00	2.465.200.000,00	100,00	2.027.849.516,00	82,26	437.350.484,00	17,74
2	Pengerahan dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat	151.500.000,00	170.235.000,00	100,00	167.390.912,00	98,33	2.844.088,00	1,67
3	Pengadaan/Penyediaan Logistik Untuk Penanggulangan Bencana	122.650.000,00	108.000.000,00	100,00	86.000.000,00	79,63	22.000.000,00	20,37
4	Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana	143.600.000,00	95.000.000,00	100,00	67.285.000,00	70,83	27.715.000,00	29,17
5	Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	161.200.000,00	161.200.000,00	100,00	90.280.613,00	56,01	70.919.387,00	43,99
6	Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	79.500.000,00	39.520.000,00	100,00	39.520.000,00	100,00	-	-
7	Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132.300.000,00	113.565.000,00	100,00	113.565.000,00	100,00	-	-

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		26.694.114.188,00	27.223.322.463,00	87,37	24.576.421.088,00	90,28	2.646.901.375,00	9,72
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.781.046.814,00	15.901.805.289,00	91,00	14.536.844.707,00	91,42	1.364.960.582,00	8,58
	Belanja Tidak Langsung	15.781.046.814,00	15.901.805.289,00	91,00	14.536.844.707,00	91,42	1.364.960.582,00	8,58
II	BELANJA LANGSUNG	10.913.067.374,00	11.321.517.174,00	83,74	10.039.576.381,00	88,68	1.281.940.793,00	11,32
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	6.093.152.374,00	7.279.842.174,00	80,99	6.525.029.306,00	89,63	754.812.868,00	10,37
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.059.652.174,00	5.536.452.624,00	100,00	5.032.186.159,00	90,89	504.266.465,00	9,11
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.320.000,00	190.319.500,00	100,00	184.882.413,00	97,14	5.437.087,00	2,86
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	683.130.000,00	1.379.570.000,00	100,00	1.269.410.484,00	92,01	110.159.516,00	7,99
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	142.000.000,00	142.000.000,00	4,96	7.050.200,00	4,96	134.949.800,00	95,04
5	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	44.050.200,00	31.500.050,00	100,00	31.500.050,00	100,00	-	-
B	Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial	72.375.000,00	72.375.000,00	100,00	58.314.000,00	75,39	14.061.000,00	24,61
1	Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	27.490.000,00	27.490.000,00	100,00	14.800.000,00	53,84	12.690.000,00	46,16
2	Perlindungan Tenaga Kerja	44.885.000,00	44.885.000,00	100,00	43.514.000,00	96,95	1.371.000,00	3,05
C	Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	62.580.000,00	62.580.000,00	100,00	58.325.000,00	93,20	4.255.000,00	6,80
1	Bimtek Penerapan Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja	62.580.000,00	62.580.000,00	100,00	58.325.000,00	-	4.255.000,00	-
D	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja	31.650.000,00	31.650.000,00	5,18	1.640.000,00	5,18	30.010.000,00	94,82
1	Pengujian Lingkungan Kerja	31.650.000,00	31.650.000,00	5,18	1.640.000,00	5,18	30.010.000,00	94,82
E	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	4.443.840.000,00	3.665.600.000,00	100,00	3.197.748.075,00	87,24	467.851.925,00	12,76
1	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ Kota	778.240.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Pelatihan Pariwisata dan Otomotif Bagi Lulusan SMK	3.665.600.000	3.665.600.000	100,00	3.197.748.075	87,24	467.851.925,00	12,76
F	Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	59.450.000,00	59.450.000,00	100,00	53.450.000,00	89,91	6.000.000,00	10,09
1	pelayanan dan peningkatan produktivitas	59.450.000,00	59.450.000,00	100,00	53.450.000,00	89,91	6.000.000,00	10,09

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
G	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	150.020.000,00	150.020.000,00	100,00	145.070.000,00	97,63	4.950.000,00	2,37
1	Perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi	104.500.000,00	104.500.000,00	100,00	99.550.000,00	95,26	4.950.000,00	4,74
2	peningkatan kapasitas SDM bidang Transmigrasi	45.520.000,00	45.520.000,00	100,00	45.520.000,00	100,00	-	-

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		15.739.673.014,00	16.317.955.087,00	100,00	13.998.035.030,00	85,78	2.319.920.057,00	14,22
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.793.666.414,00	8.353.949.019,00	100,00	7.115.351.015,00	85,17	1.238.598.004,00	14,83
	Belanja Tidak Langsung	7.793.666.414,00	8.353.949.019,00	100,00	7.115.351.015,00	85,17	1.238.598.004,00	14,83
II	BELANJA LANGSUNG	7.946.006.600,00	7.964.006.068,00	100,00	6.882.684.015,00	86,42	1.081.322.053,00	13,58
	A. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	2.223.803.250,00	2.793.803.250,00	100,00	2.480.398.655,00	88,78	313.404.595,00	11,22
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.027.193.250,00	2.591.193.250,00	100,00	2.329.593.555,00	89,90	261.599.695,00	10,10
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.050.000,00	80.050.000,00	100,00	60.022.300,00	74,98	20.027.700,00	25,02
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	16.850.000,00	93,61	1.150.000,00	6,39
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	75.400.000,00	75.400.000,00	100,00	48.602.800,00	64,46	26.797.200,00	35,54
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.160.000,00	29.160.000,00	100,00	25.330.000,00	86,87	3.830.000,00	13,13
	B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	599.802.000,00	749.802.000,00	100,00	634.821.500,00	84,67	114.980.500,00	15,33
1	Pembinaan Organisasi Perempuan	223.320.000,00	178.930.000,00	100,00	168.234.800,00	94,02	10.695.200,00	5,98
2	Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	204.900.000,00	204.900.000,00	100,00	144.410.000,00	70,48	60.490.000,00	29,52
3	Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	84.800.000,00	84.800.000,00	100,00	65.995.200,00	77,82	18.804.800,00	22,18
4	Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumah Tangga Perempuan di Kab/Kota	57.112.000,00	54.612.000,00	100,00	53.167.000,00	97,35	1.445.000,00	2,65
5	Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	22.020.000,00	20.070.000,00	100,00	20.070.000,00	100,00	-	-
6	Pemetaan Industri Rumah Tangga di Kab/Kota	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	7.650.000,00	100,00	-	-
7	Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif		150.000.000,00	100,00	132.437.200,00	88,29	17.562.800,00	11,71
8	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender		48.840.000,00	100,00	42.857.300,00	87,75	5.982.700,00	12,25
	C. PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.208.069.000,00	1.508.069.000,00	100,00	1.198.694.959,00	79,49	309.374.041,00	20,51
1	Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Forum Anak)	186.620.000,00	186.620.000,00	100,00	174.477.509,00	93,49	12.142.491,00	6,51
2	TOT Bagi Aktifis PATBM Tk. Kab/Kota	218.020.000,00	218.020.000,00	100,00	203.601.200,00	93,39	14.418.800,00	6,61
3	Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Kep. Babel	273.475.000,00	273.475.000,00	100,00	206.499.600,00	75,51	66.975.400,00	24,49
4	Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	243.025.000,00	393.025.000,00	100,00	260.603.254,00	66,31	132.421.746,00	33,69
5	Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak/Kota	43.550.000,00	113.550.000,00	100,00	73.913.500,00	65,09	39.636.500,00	34,91
6	Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	214.459.000,00	214.459.000,00	100,00	201.054.474,00	93,75	13.404.526,00	6,25
7	Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	28.920.000,00	28.920.000,00	100,00	20.776.343,00	71,84	8.143.657,00	28,16

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak		80.000.000,00	100,00	57.769.079,00	72,21	22.230.921,00	27,79
	D. PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.066.966.000,00	1.914.966.000,00	100,00	1.671.535.113,00	87,29	243.430.887,00	12,71
1	Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	227.427.500,00	227.427.500,00	100,00	216.033.900,00	94,99	11.393.600,00	5,01
2	Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29.350.000,00	29.350.000,00	100,00	17.731.400,00	60,41	11.618.600,00	39,59
3	Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)	386.000.000,00	386.000.000,00	100,00	334.079.451,00	86,55	51.920.549,00	13,45
4	Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL di Kab/Kota (DAK)	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	102.075.294,00	78,52	27.924.706,00	21,48
5	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	220.691.000,00	220.691.000,00	100,00	194.217.038,00	88,00	26.473.962,00	12,00
6	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	198.103.710,00	99,05	1.896.290,00	0,95
7	Pengembangan Bank Data Kependudukan	42.847.500,00	42.847.500,00	100,00	35.000.000,00	81,69	7.847.500,00	18,31
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota	1.225.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00
9	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	105.650.000,00	28.650.000,00	100,00	19.250.000,00	67,19	9.400.000,00	32,81
10	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	438.271.920,00	87,65	61.728.080,00	12,35
11	Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk		150.000.000,00	100,00	116.772.400,00	77,85	33.227.600,00	22,15
	E. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	847.366.350,00	997.365.818,00	100,00	897.233.788,00	89,96	100.132.030,00	10,04
1	Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga)	258.424.850,00	258.424.850,00	100,00	224.767.000,00	86,98	33.657.850,00	13,02
2	Advokasi dan KIE Program KKBPK	35.012.500,00	33.370.000,00	100,00	33.370.000,00	100,00	-	-
3	Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	158.200.000,00	136.320.668,00	100,00	136.320.588,00	100,00	80,00	-
4	Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	230.870.000,00	404.391.300,00	100,00	359.923.200,00	89,00	44.468.100,00	11,00
5	Pemutakhiran Grand Design Kependudukan	19.950.000,00	19.950.000,00	100,00	1.600.000,00	8,02	18.350.000,00	91,98
6	Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya	144.909.000,00	144.909.000,00	100,00	141.253.000,00	97,48	3.656.000,00	2,52

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		11.886.983.426,00	12.725.794.099,00	100,00	11.803.674.618,00	92,75	922.119.481,00	7,25
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.864.114.926,00	6.064.602.599,00	100,00	6.029.744.146,00	99,43	34.858.453,00	0,57
	Belanja Tidak Langsung	5.864.114.926,00	6.064.602.599,00	100,00	6.029.744.146,00	99,43	34.858.453,00	0,57
II	BELANJA LANGSUNG	6.022.868.500,00	6.661.191.500,00	100,00	5.773.930.472,00	86,68	887.261.028,00	13,32
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.427.217.500,00	2.753.813.000,00	100,00	2.675.397.948,00	97,15	78.415.052,00	2,85
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.968.494.500,00	2.293.010.000,00	100,00	2.263.481.681,00	98,71	29.528.319,00	1,29
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	270.970.000,00	281.700.000,00	100,00	252.350.017,00	89,58	29.349.983,00	10,42
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	133.841.250,00	89,23	16.158.750,00	10,77
4	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.825.000,00	7.825.000,00	100,00	5.525.000,00	70,61	2.300.000,00	29,39
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.928.000,00	21.278.000,00	100,00	20.200.000,00	94,93	1.078.000,00	5,07
B	Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	2.174.403.500,00	1.963.858.000,00	100,00	1.389.162.160,00	70,74	574.695.840,00	29,26
1	Kegiatan Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk Gerakan Makan Sayur, Buah, Kacang-kacangan dan Ayam Merawang (GEMA SABUK AMANG)	98.120.500,00	98.120.000,00	100,00	92.071.500,00	93,84	6.048.500,00	6,16
2	Kegiatan Pengembangan Produk Pangan Lokal Hasil Pertanian (<i>One Village One Product</i>)	303.155.000,00	303.155.000,00	100,00	41.340.000,00	13,64	261.815.000,00	86,36
3	Kegiatan Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	594.122.500,00	486.902.500,00	100,00	363.853.800,00	74,73	123.048.700,00	25,27
4	Kegiatan Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada Kelompok Masyarakat	226.094.500,00	219.669.500,00	100,00	165.631.810,00	75,40	54.037.690,00	24,60
5	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	76.675.000,00	76.675.000,00	100,00	70.367.900,00	91,77	6.307.100,00	8,23
6	Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	283.920.000,00	283.920.000,00	100,00	257.271.400,00	90,61	26.648.600,00	9,39
7	Kegiatan Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	56.639.000,00	56.639.000,00	100,00	44.391.000,00	78,38	12.248.000,00	21,62
8	Kegiatan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tingkat Provinsi	118.577.000,00	118.577.000,00	100,00	73.059.500,00	61,61	45.517.500,00	38,39
9	Kegiatan Penguatan Kerjasama dalam Investigasi Pengawasan Penyelenggaraan Keamanan Pangan Daerah (Tim Jejaring Keamanan Pangan)	117.234.000,00	27.134.000,00	100,00	17.876.250,00	65,88	9.257.750,00	34,12
10	Kegiatan Pemberdayaan Lahan Pekarangan Masyarakat melalui Program Kampung/Desa KRPL	109.638.000,00	107.138.000,00	100,00	80.754.000,00	75,37	26.384.000,00	24,63
11	Penilaian Pelaku Usaha dalam Memperoleh Sertifikat Produk Pertanian (Prima 3, Prima 2 dan Nomor Registrasi PSAT)	190.228.000,00	185.928.000,00	100,00	182.545.000,00	98,18	3.383.000,00	1,82

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	543.989.500,00	1.112.662.500,00	100,00	948.809.464,00	85,27	163.853.036,00	14,73
1	Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	22.029.000,00	20.729.000,00	100,00	12.082.600,00	58,29	8.646.400,00	41,71
2	Kegiatan Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 Hari Kehidupan	183.086.000,00	183.086.000,00	100,00	179.324.000,00	97,95	3.762.000,00	2,05
3	Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan	109.831.500,00	109.831.500,00	100,00	98.661.300,00	89,83	11.170.200,00	10,17
4	Kegiatan Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	53.908.000,00	53.508.000,00	100,00	29.510.900,00	55,15	23.997.100,00	44,85
5	Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	63.669.000,00	60.369.000,00	100,00	58.680.000,00	92,20	1.689.000,00	2,80
6	Kegiatan Penyusunan Data Daerah Rawan Pangan	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00	1.740.000,00	100,00	0,00	0,00
7	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Produktivitas Komoditi Pangan	25.265.000,00	24.465.000,00	100,00	7.465.000,00	30,51	17.000.000,00	69,49
8	Kegiatan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	84.461.000,00	51.541.000,00	100,00	33.684.700,00	65,36	17.856.300,00	34,64
9	Kegiatan Pengembangan Daerah Mandiri Pangan		348.208.000,00	100,00	277.347.714,00	79,65	70.860.286,00	20,35
10	Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan		259.185.000,00	100,00	250.313.250,00	96,58	8.871.750,00	3,42
D	Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan	877.258.000,00	830.858.000,00	100,00	760.560.900,00	91,54	70.297.100,00	8,46
1	Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	118.398.000,00	118.398.000,00	100,00	101.352.300,00	85,60	17.045.700,00	14,40
2	Kegiatan Pengendalian Distribusi Pangan	90.615.000,00	46.425.000,00	100,00	46.076.000,00	99,25	349.000,00	0,75
3	Kegiatan Penyusunan Prognosa Neraca Pangan	12.610.000,00	10.400.000,00	100,00	9.450.000,00	90,87	950.000,00	9,13
4	Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	930.000,00	930.000,00	100,00	930.000,00	100,00	0,00	0,00
5	Kegiatan Batabase Harga dan Stok Pangan di Tingkat Distributor	31.710.000,00	31.710.000,00	100,00	30.547.500,00	96,33	1.162.500,00	3,67
6	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan	535.575.000,00	535.575.000,00	100,00	526.000.000,00	98,21	9.575.000,00	1,79
7	Kegiatan Penindakan Hukum Terhadap Penyimpangan Pangan	32.730.000,00	32.730.000,00	-	-	-	32.730.000,00	100,00
8	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah dan Beras	54.690.000,00	54.690.000,00	100,00	46.205.100,00	84,49	8.484.900,00	15,51

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Belanja Dinas		25.503.529.349,95	19.014.627.865,00	97,56	15.766.709.881,00	82,92	3.247.917.984,00	14,64
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.247.167.725,95	9.215.791.365,00	100,00	7.338.306.404,00	79,63	1.877.484.961,00	20,37
	Belanja Tidak Langsung	9.247.167.725,95	9.215.791.365,00	100,00	7.338.306.404	79,63	1.877.484.961,00	20,37
II	BELANJA LANGSUNG	16.256.361.624,00	9.798.836.500,00	95,12	8.428.403.477,00	86,01	1.370.433.023,00	9,10
A.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.840.478.824,00	5.921.021.200,00	91,67	5.414.564.085,00	69,57	506.457.115,00	30,43
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.858.638.824	4.517.101.200	100,00	4.279.227.544	94,73	237.873.656,00	5,27
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	802.780.000	1.242.280.000	100,00	1.021.051.541	82,19	221.228.459,00	17,81
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000	80.000.000	100,00	50.300.000	62,88	29.700.000,00	37,13
4.	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2.000.000	2.000.000	100,00	1.800.000	90,00	200.000,00	10,00
5.	Penyusunan dan penetapan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup	9.780.000	8.675.000	50,00	-	-	8.675.000,00	100,00
6.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.280.000	70.965.000	100,00	62.185.000	87,63	8.780.000,00	12,37
B	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup	1.644.345.800,00	1.819.700.000,00	100,00	1.688.136.476,00	85,86	131.563.524,00	14,14
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	887.960.000	1.082.824.000	100,00	1.073.877.376	99,17	8.946.624,00	0,83
2	Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	165.658.800	146.149.000	100,00	133.696.100	91,48	12.452.900,00	8,52
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	189.700.000	189.700.000	100,00	181.834.000	95,85	7.866.000,00	4,15
4	Peningkatan Kapasitas SDM UPT Laboratorium Lingkungan	101.027.000	101.027.000	100,00	65.801.800	65,13	35.225.200,00	34,87
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup (DAK)	300.000.000	300.000.000	100,00	232.927.200	77,64	67.072.800,00	22,36
C	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	1.213.118.000,00	670.431.300,00	85,71	487.248.666,00	70,09	183.182.634,00	29,91
1	Penyusunan Dokumen KLHS	345.975.000	240.700.000	100,00	194.324.210	80,73	46.375.790,00	19,27
2	Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup	101.550.000	53.666.300	100,00	45.871.500	85,48	7.794.800,00	14,52
3	Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	3.570.000	1.790.000	100,00	1.458.000	81,45	332.000,00	18,55
4	Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL/UPL serta Penertiban Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	19.275.000	19.275.000	100,00	13.717.400	71,17	5.557.600,00	28,83
5	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota	73.923.000	76.550.000	14,28	19.496.200	25,47	57.053.800,00	74,53
6	Penyusunan Dokumen KLHS Rivi Peninjauan Kembali RTRW	352.875.000	-	-	-	-	-	-
7	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Tanjung Ular	315.950.000	278.450.000	100,00	212.381.356	76,27	66.068.644,00	23,73

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup	394.214.000,00	412.579.000,00	100,00	346.465.650,00	79,42	66.113.350,00	20,58
1	Pengendalian Beban Pencemaran Air	93.950.000	93.950.000	100,00	73.055.000	77,76	20.895.000,00	22,24
2	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	4.900.000	23.310.000	100,00	19.724.000	84,62	3.586.000,00	15,38
3	Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	46.214.000	46.214.000	100,00	45.947.000	99,42	267.000,00	0,58
4	Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	136.650.000	136.650.000	100,00	122.542.050	89,68	14.107.950,00	10,32
5	Penerimaan, Penelahaan, dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat	11.450.000	11.450.000	100,00	5.258.000	45,92	6.192.000,00	54,08
6	Penguatan Upaya Peningkatan Kualitas Air Sungai Berbasis Kinerja Tim Pokja	101.050.000	101.005.000	100,00	79.939.600	79,14	21.065.400,00	20,86
E	Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas	9.164.205.000,00	975.105.000,00	98,21	491.988.600,00	66,59	483.116.400,00	31,62
1	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	13.650.000	23.500.000	100,00	16.109.900	68,55	7.390.100,00	31,45
2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	194.500.000	359.100.000	100,00	231.724.400	64,53	127.375.600,00	35,47
3	Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	26.555.000	26.555.000	92,85	25.113.800	94,57	1.441.200,00	(1,72)
4	Pengembangan dan pengelolaan TPA Sampah Terpadu Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8.929.500.000	565.950.000	100,00	219.040.500	38,70	346.909.500,00	61,30

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		13.748.745.480,00	14.364.664.590,00	100,00	13.747.504.812,00	95,70	617.159.778,00	4,30
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.139.876.417,00	7.152.295.527,00	100,00	7.129.585.016,00	99,68	22.710.511,00	0,32
	Belanja Tidak Langsung	7.139.876.417	7.152.295.527,00	100,00	7.129.585.016,00	99,68	22.710.511,00	0,32
II	BELANJA LANGSUNG	6.608.869.063,00	7.212.369.063,00	100,00	6.617.919.796,00	91,76	593.899.267,00	8,23
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.775.688.563,00	4.062.278.563,00	100,00	3.774.232.929,00	69,55	287.495.634,00	30,45
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.256.218.563,00	3.466.808.563,00	100,00	3.278.153.442,00	94,56	188.655.121,00	5,44
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	445.720.000,00	521.720.000,00	100,00	461.204.787,00	88,40	60.515.213,00	11,60
3	Kegiatan dokumen perencanaan pembangunan	33.200.000,00	33.200.000,00	100,00	15.724.700,00	47,36	17.475.300,00	52,64
4	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	550.000,00	550.000,00	100,00	-	-	-	-
5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	19.150.000,00	47,88	20.850.000,00	52,13
B	Program Pembinaan Pemerintah Desa	659.423.000,00	628.283.000,00	100,00	616.470.110,00	98,84	11.812.890,00	1,16
1	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	26.000.000,00	21.000.000,00	100,00	20.980.000,00	99,90	20.000,00	0,10
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	329.070.000,00	325.105.000,00	100,00	320.210.900,00	98,49	4.894.100,00	1,51
3	Kegiatan Penataan Kewenangan Desa	246.803.000,00	227.328.000,00	100,00	220.429.310,00	96,97	6.898.690,00	3,03
4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa Melalui Sikeudes	57.550.000,00	54.850.000,00	100,00	54.849.900,00	100,00	100,00	-
C	Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	1.478.410.000,00	1.776.460.000,00	100,00	1.588.155.543,00	84,86	188.304.457,00	15,14
1	Kegiatan Pendampingan Kelembagaan Desa	285.860.000,00	295.860.000,00	100,00	241.563.000,00	81,65	54.297.000,00	18,35
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	936.450.000,00	1.224.500.000,00	100,00	1.142.709.643,00	93,32	81.790.357,00	6,68
3	Kegiatan Capacity Building usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa	256.100.000,00	256.100.000,00	100,00	203.882.900,00	79,61	52.217.100,00	20,39
D	Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna	695.347.500,00	695.347.500,00	100,00	597.390.914,00	85,93	97.956.586,00	14,07
1	Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	300.747.500,00	300.747.500,00	100,00	258.944.100,00	86,10	41.803.400,00	13,90
2	Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	394.600.000,00	394.600.000,00	100,00	338.446.814,00	85,77	56.153.186,00	14,23
E	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	50.000.000,00	100,00	41.670.300,00	83,34	8.329.700,00	16,66
1	Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	50.000.000,00	100,00	41.670.300,00	83,34	8.329.700,00	16,66

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		32.927.603.496,00	28.989.357.940,00	99,94	26.158.101.188,26	90,23	2.831.256.751,74	9,77
							-	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.043.291.753,00	7.978.640.697,00	100,00	7.124.944.210,00	89,30	853.696.487,00	10,70
	Belanja Tidak Langsung	8.043.291.753	7.978.640.697,00	100,00	7.124.944.210,00	89,30	853.696.487,00	10,70
II	BELANJA LANGSUNG	24.884.311.743,00	21.010.717.243,00	99,88	19.033.156.978,26	90,59	1.977.560.264,74	9,41
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	7.105.804.618,00	7.992.867.789,00	99,51	6.637.705.326,51	66,51	1.355.162.462,49	53,45
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.600.648.618,00	2.639.406.051,00	100,00	2.351.143.027,00	89,08	288.263.024,00	10,92
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.320.640.000,00	3.762.070.238,00	95,10	3.129.071.479,51	83,17	632.998.758,49	16,83
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00	81.421.980,00	56,15	63.578.020,00	43,85
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	95.345.000,00	3.800.000,00	100,00	692.400,00	18,22	3.107.600,00	81,78
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.040.000,00	7.040.000,00	100,00	-	0,00	7.040.000,00	100,00
6	Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan	7.250.000,00	7.250.000,00	100,00	-	0,00	7.250.000,00	100,00
7	Pengumpulan Data dan Monitoring Pelayanan Jasa Perhubungan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-	0,00	6.000.000,00	100,00
8	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	1.613.200.500,00	1.132.086.000,00	100,00	898.855.512,00	79,40	233.230.488,00	20,60
9	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan	29.540.000,00	29.540.000,00	100,00	23.921.644,00	80,98	5.618.356,00	19,02
10	Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	281.140.500,00	260.675.500,00	100,00	152.599.284,00	58,54	108.076.216,00	41,46
B	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	6.957.468.500,00	2.935.545.000,00	100,00	2.801.319.145,00	88,61	134.225.855,00	52,64
1	Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	2.008.362.500,00	1.962.659.000,00	100,00	1.960.659.000,00	99,90	2.000.000,00	0,10
2	Kegiatan penyelenggaraan penilaian analisis dampak lalu lintas	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-	0,00	1.500.000,00	100,00
3	Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	930.825.000,00	730.825.000,00	100,00	677.988.025,00	92,77	52.836.975,00	7,23
4	Pengadaan dan Pemasangan LPJU	3.776.220.000,00	-	100,00	-	-	-	100,00
5	Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa lalu lintas	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	-	0,00	1.050.000,00	100,00
6	Penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	36.160.000,00	36.160.000,00	100,00	-	0,00	36.160.000,00	100,00
7	Pemilihan dan pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak kendaraan Angkutan Umum Teladan	84.607.000,00	84.607.000,00	100,00	72.943.000,00	86,21	11.664.000,00	13,79
8	Kegiatan penyelenggaraan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	118.744.000,00	118.744.000,00	100,00	89.729.120,00	75,57	29.014.880,00	0,00

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	2.186.920.125,00	2.112.837.125,00	100,00	2.038.470.163,75	95,73	74.366.961,25	4,27
1	DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	406.350.000,00	371.350.000,00	100,00	366.850.000,00	98,79	4.500.000,00	1,21
2	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-pulau kecil	888.950.000,00	849.867.000,00	100,00	840.867.000,00	98,94	9.000.000,00	1,06
3	Penyusunan DED dan SID Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-pulau kecil	744.170.125,00	744.170.125,00	100,00	695.462.500,00	93,45	48.707.625,00	6,55
4	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	147.450.000,00	147.450.000,00	100,00	135.290.663,75	91,75	12.159.336,25	8,25
D	Program Peningkatan Pengendalian,Operasional dan Kebandarudaraan	8.634.118.500,00	7.969.467.329,00	100,00	7.555.662.343,00	87,35	413.804.986,00	8,43
1	Pengawasan dan pengendalian angkutan pada hari-hari besar keagamaan	191.128.500,00	191.128.500,00	100,00	178.265.258,00	93,27	12.863.242,00	6,73
2	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	203.100.000,00	203.100.000,00	100,00	201.014.256,00	98,97	2.085.744,00	1,03
3	Pekerjaan pembangunan jalan akses gedung VIP Bandara Depati Amir	4.289.700.000,00	4.257.512.000,00	100,00	4.257.044.000,00	99,99	468.000,00	0,01
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir	1.486.790.000,00	100.000.000,00	100,00	92.345.000,00	0,00	7.655.000,00	0,00
5	Pengadaan dan pemasangan X-Ray	2.463.400.000,00	2.463.400.000,00	100,00	2.395.800.000,00	0,00	67.600.000,00	0,00
6	Pemeliharaan dan pengoperasian gedung VIP Bandara Depati Amir	-	754.326.829,00	100,00	431.193.829,00	57,16	323.133.000,00	42,84

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		19.140.727.193,00	24.773.209.289,00	94,57	21.708.925.186,00	87,63	3.064.284.103,00	12,37
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.458.647.174,00	7.351.863.074,00	100,00	6.330.871.645,00	86,11	1.020.991.429,00	13,89
	Belanja Tidak Langsung	7.458.647.174,00	7.351.863.074,00	100,00	6.330.871.645,00	86,11	1.020.991.429,00	13,89
II	BELANJA LANGSUNG	11.682.080.019,00	17.421.346.215,00	89,14	15.378.053.541,00	88,27	2.043.292.674,00	11,73
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.564.045.204,00	3.407.495.950,00	89,81	3.102.069.556,00	72,09	305.426.394,00	27,91
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.098.945.204,00	2.894.395.950,00	79,25	2.801.722.056,00	96,80	92.673.894,00	3,20
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	248.000.000,00	307.450.000,00	100,00	230.272.500,00	74,90	77.177.500,00	25,10
	3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	172.500.000,00	172.500.000,00	80,00	38.875.000,00	22,54	133.625.000,00	77,46
	4. Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan	44.600.000,00	33.150.000,00	100,00	31.200.000,00	94,12	1.950.000,00	5,88
B	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.568.030.000,00	5.858.380.000,00	92,00	5.020.327.792,00	90,76	838.052.208,00	9,24
	1. Pengelolaan saluran komunikasi pemerintah daerah dan non pemerintah daerah	946.380.000,00	1.252.380.000,00	90,00	1.112.940.647,00	88,87	139.439.353,00	11,13
	2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.214.000.000,00	1.228.000.000,00	90,00	1.136.199.305,00	92,52	91.800.695,00	7,48
	3. Pengelolaan Kemitraan	333.800.000,00	3.318.150.000,00	88,00	2.711.387.840,00	81,71	606.762.160,00	18,29
	4. Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	73.850.000,00	59.850.000,00	100,00	59.800.000,00	99,92	50.000,00	0,08
C	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	6.020.552.480,00	6.723.552.480,00	96,00	6.196.831.777,00	71,01	526.720.703,00	28,99
	1. Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	5.252.160.000,00	5.848.160.000,00	100,00	5.636.594.377,00	96,38	211.565.623,00	3,62
	2. Layanan Publik dan Pemerintah berbasis e-Government	74.787.480,00	411.787.480,00	100,00	368.616.000,00	89,52	43.171.480,00	10,48
	3. Penguatan jaringan komunikasi data pemerintah	265.325.000,00	265.325.000,00	80,00	39.950.000,00	15,06	225.375.000,00	84,94
	4. Pengawasan dan Pengendalian keamanan sistem informasi	42.500.000,00	92.500.000,00	100,00	79.068.000,00	85,48	13.432.000,00	14,52
	5. Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	385.780.000,00	105.780.000,00	100,00	72.603.400,00	68,64	33.176.600,00	31,36
D	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	529.452.335,00	1.431.917.785,00	78,75	1.058.824.416,00	45,85	373.093.369,00	54,15
	1. Inventarisasi dan Pengelolaan Data sektoral	31.175.000	31.175.000	100,00	8.934.200,00	28,66	22.240.800,00	71,34
	2. Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	312.134.550	-	-	-	-	-	-
	3. Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	89.264.000	1.303.864.000	100,00	989.090.216,00	75,86	314.773.784,00	24,14
	4. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	12.633.785	12.633.785	15,00	1.000.000,00	7,92	11.633.785,00	92,08
	5. Pengembangan, Pengelolaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Data/Informasi/Statistik Daerah	84.245.000	84.245.000	100,00	59.800.000,00	70,98	24.445.000,00	29,02

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		25.069.696.984,00	24.568.773.386,95	100,00	22.564.304.400,00	91,84	2.004.468.986,95	8,16
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.817.414.484,00	7.278.490.886,95	100,00	6.496.041.900,00	89,25	782.448.986,95	10,75
	Belanja Tidak Langsung	7.817.414.484,00	7.278.490.886,95	100,00	6.496.041.900,00	89,25	782.448.986,95	10,75
II	BELANJA LANGSUNG	17.252.282.500,00	17.290.282.500,00	100,00	16.068.262.500,00	92,93	1.222.020.000,00	7,07
A.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.227.536.500,00	5.980.767.500,00	100,00	5.748.503.000,00	96,12	232.264.500,00	3,88
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.501.002.500,00	4.414.648.500,00	100,00	4.241.836.700,00	96,09	172.811.800,00	3,91
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	538.944.000,00	1.353.419.000,00	100,00	1.325.042.900,00	97,90	28.376.100,00	2,10
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	180.000.000,00	100,00	161.850.000,00	89,92	18.150.000,00	10,08
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.590.000,00	32.700.000,00	100,00	19.773.400,00	60,47	12.926.600,00	39,53
B	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	1.309.290.500,00	1.218.276.500,00	100,00	1.081.796.900,00	88,80	136.479.600,00	11,20
1	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	893.936.000,00	857.212.000,00	100,00	758.536.300,00	88,49	98.675.700,00	11,51
2	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	200.383.500,00	178.083.500,00	100,00	156.729.600,00	88,01	21.353.900,00	11,99
3	Pengawasan. Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	214.971.000,00	182.981.000,00	100,00	166.531.000,00	91,01	16.450.000,00	8,99
C	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	1.801.344.500,00	1.205.219.500,00	100,00	985.665.150,00	81,78	219.554.350,00	18,22
1	Pendampingan Pemasaran. Kemitraan. Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	424.713.500,00	222.089.500,00	100,00	180.735.300,00	81,38	41.354.200,00	18,62
2	Pengembangan. Penguatan dan Perlindungan Koperasi	505.516.000,00	380.962.000,00	100,00	326.275.100,00	85,65	54.686.900,00	14,35
	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	871.115.000,00	602.168.000,00	100,00	478.654.750,00	79,49	123.513.250,00	20,51

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	3.340.674.000,00	2.784.850.000,00	100,00	2.546.074.000,00	91,43	238.776.000,00	8,57
1	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	1.396.231.000,00	1.227.076.000,00	100,00	1.107.280.500,00	90,24	119.795.500,00	9,76
2	Pengembangan. Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	1.799.775.000,00	1.113.106.000,00	100,00	1.098.357.100,00	98,67	14.748.900,00	1,33
3	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	144.668.000,00	444.668.000,00	100,00	340.436.400,00	76,56	104.231.600,00	23,44
E	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.851.537.000,00	5.819.903.000,00	100,00	5.486.396.050,00	94,27	333.506.950,00	5,73
1	Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM	544.650.000,00	533.100.000,00	100,00	458.357.600,00	85,98	74.742.400,00	14,02
2	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)	3.630.220.000,00	3.630.220.000,00	100,00	3.626.795.400,00	99,91	3.424.600,00	0,09
3	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	1.676.667.000,00	1.656.583.000,00	100,00	1.401.243.050,00	84,59	255.339.950,00	15,41
F	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	721.900.000,00	281.266.000,00	100,00	219.827.400,00	78,16	61.438.600,00	21,84
1	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	721.900.000,00	281.266.000,00	100,00	219.827.400,00	78,16	61.438.600,00	21,84

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		17.861.218.308,00	18.939.319.874,00	100,00	16.921.968.732,00	89,35	2.017.351.142,00	10,65
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.183.980.358,00	9.028.941.924,00	100,00	7.704.053.531,00	85,33	1.324.888.393,00	14,67
	Belanja Tidak Langsung	8.183.980.358,00	9.028.941.924,00	100,00	7.704.053.531,00	85,33	1.324.888.393,00	14,67
II	BELANJA LANGSUNG	9.677.237.950,00	9.910.377.950,00	100,00	9.217.915.201,00	93,01	692.462.749,00	6,99
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	6.547.940.000,00	6.962.563.246,00	100,00	6.770.163.209,00	97,24	192.400.037,00	2,76
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.591.341.000,00	2.916.193.246,00	100,00	2.813.832.409,00	96,49	102.360.837,00	3,51
2	Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.889.090.000,00	3.981.370.000,00	100,00	3.900.485.500,00	97,97	80.884.500,00	2,03
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.000.000,00	60.000.000,00	100,00	51.400.000,00	85,67	8.600.000,00	14,33
4	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	998.100,00	99,81	1.900,00	0,19
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.509.000,00	4.000.000,00	100,00	3.447.200,00	86,18	552.800,00	13,82
B	Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	988.310.000,00	829.841.754,00	100,00	669.902.416,00	80,73	159.939.338,00	19,27
1	Kegiatan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	28.764.000,00	28.764.000,00	100,00	21.471.100,00	74,65	7.292.900,00	0,00
2	Kegiatan Workshop Pengembangan Usaha Daerah	108.796.000,00	64.946.000,00	100,00	53.088.400,00	0,00	11.857.600,00	0,00
3	Kegiatan Pelaksanaan Macthmaking Daerah	511.465.000,00	402.657.454,00	100,00	375.830.514,00	93,34	26.826.940,00	0,00
4	Kegiatan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Daerah	35.850.000,00	35.850.000,00	100,00	25.708.900,00	0,00	10.141.100,00	0,00
5	Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal daerah (RKP3MD)	25.575.000,00	19.764.300,00	100,00	18.493.500,00	93,57	1.270.800,00	0,00
6	Kegiatan Studi Kelayakan Potensi Investasi	277.860.000,00	277.860.000,00	100,00	175.310.002,00	0,00	102.549.998,00	0,00
C	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	600.430.000,00	613.030.000,00	100,00	556.564.363,00	90,79	56.465.637,00	9,21
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	382.725.000,00	382.725.000,00	100,00	350.949.363,00	91,70	31.775.637,00	8,30
2	Kegiatan Pembuatan Bahan Promosi	121.550.000,00	121.550.000,00	100,00	103.210.000,00	84,91	18.340.000,00	15,09
3	Kegiatan Business Gathering Investment	96.155.000,00	108.755.000,00	100,00	102.405.000,00	94,16	6.350.000,00	5,84

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	589.295.000,00	553.680.000,00	100,00	507.128.460,00	0,00	46.551.540,00	0,00
1	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	464.595.000,00	464.595.000,00	100,00	438.906.060,00	94,47	25.688.940,00	0,00
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terkait Penanaman Modal	46.475.000,00	30.950.000,00	100,00	26.312.200,00	85,02	4.637.800,00	0,00
3	Kegiatan Workshop Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	30.405.000,00	19.565.000,00	100,00	19.565.000,00	100,00	0,00	0,00
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal	47.820.000,00	38.570.000,00	100,00	22.345.200,00	57,93	16.224.800,00	0,00
E	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	951.262.950,00	951.262.950,00	100,00	714.156.753,00	75,07	237.106.197,00	24,93
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	886.056.950,00	886.056.950,00	100,00	671.918.803,00	75,83	214.138.147,00	24,17
2	Kegiatan Rakor Forum PTSP Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	65.206.000,00	65.206.000,00	100,00	42.237.950,00	64,78	22.968.050,00	35,22

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		21.684.291.770,00	21.219.724.217,56	100,00	18.141.763.630,89	85,49	3.077.960.586,67	14,51
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.913.164.508,00	6.308.196.955,56	100,00	5.811.871.921,00	92,13	496.325.034,56	7,87
	Belanja Tidak Langsung	6.913.164.508,00	6.308.196.955,56	100,00	5.811.871.921,00	92,13	496.325.034,56	7,87
II	BELANJA LANGSUNG	14.771.127.262,00	14.911.527.262,00	100,00	12.329.891.709,89	82,69	2.581.635.552,11	17,51
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.397.085.762,00	3.792.180.762,00	100,00	3.579.934.681,00	92,30	212.246.081,00	7,70
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.987.235.762,00	3.193.473.762,00	100,00	3.038.312.646,00	95,14	155.161.116,00	4,86
2	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	239.375.000,00	428.232.000,00	100,00	384.266.700,00	89,73	43.965.300,00	10,27
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	68.630.335,00	91,51	6.369.665,00	8,49
4	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	17.500.000,00	93,33	1.250.000,00	6,67
5	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.375.000,00	8.375.000,00	100,00	7.625.000,00	91,04	750.000,00	8,96
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	68.350.000,00	68.350.000,00	100,00	63.600.000,00	93,05	4.750.000,00	6,95
B	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	2.610.073.500,00	2.660.073.500,00	100,00	2.541.452.917,00	94,20	118.620.583,00	5,80
1	Pemberdayaan Peran Serta Pemuda	126.280.000,00	126.280.000,00	100,00	105.880.000,00	83,85	20.400.000,00	16,15
2	Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berdedikasi dan Berprestasi	31.025.000,00	31.025.000,00	100,00	30.804.400,00	99,29	220.600,00	0,71
3	Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda	2.289.063.500,00	2.339.063.500,00	100,00	2.244.872.548,00	95,97	94.190.952,00	4,03
4	Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	163.705.000,00	163.705.000,00	100,00	159.895.969,00	97,67	3.809.031,00	2,33
C	Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	7.337.548.000,00	7.707.548.000,00	100,00	5.484.652.869,00	61,52	2.222.895.131,00	38,48
1	Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga	1.363.205.000,00	1.505.405.000,00	100,00	1.229.953.414,00	81,70	275.451.586,00	18,30
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.588.931.000,00	2.588.931.000,00	100,00	2.205.252.568,00	85,18	383.678.432,00	14,82
3	Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	792.702.000,00	792.702.000,00	100,00	580.684.500,00	73,25	212.017.500,00	26,75
3	Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	1.872.652.500,00	2.242.652.500,00	100,00	1.143.121.387,00	50,97	1.099.531.113,00	49,03
4	Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	324.545.000,00	479.545.000,00	100,00	313.141.000,00	65,30	166.404.000,00	34,70
5	Bangka Belitung Sport Tourism	395.512.500,00	98.312.500,00	100,00	12.500.000,00	12,71	85.812.500,00	87,29

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1.426.420.000,00	751.725.000,00	100,00	723.851.242,89	81,93	27.873.757,11	18,07
1	Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	1.204.095.000,00	54.400.000,00	100,00	34.855.400,00	64,07	19.544.600,00	35,93
2	Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	209.400.000,00	684.400.000,00	100,00	678.320.842,89	99,11	6.079.157,11	0,89
3	Srandarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga Standar Nasional	12.925.000,00	12.925.000,00	100,00	10.675.000,00	82,59	2.250.000,00	17,41

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		35.963.039.803,95	36.123.158.928,00	98,19	29.587.313.774,00	81,91	6.535.845.154,00	18,09
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.488.064.078,95	9.768.079.403,00	100,00	9.023.902.426,00	92,38	744.176.977,00	7,62
	Belanja Tidak Langsung	8.488.064.078,95	9.768.079.403,00	100,00	9.023.902.426,00	92,38	744.176.977,00	7,62
II	BELANJA LANGSUNG	27.474.975.725,00	26.355.079.525,00	96,38	20.563.411.348,00	78,02	5.791.668.177,00	21,98
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	10.819.821.875,00	10.027.669.375,00	92,74	7.151.427.715,00	71,32	2.876.241.660,00	28,68
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.830.669.675,00	4.732.469.675,00	100,00	4.394.161.792,00	92,85	338.307.883,00	7,15
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.061.500.000,00	2.240.160.700,00	100,00	2.043.633.980,00	91,23	196.526.720,00	8,77
3	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah	326.325.000,00	-	-	-	-	-	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	157.425.700,00	215.425.000,00	66,67	128.731.205,00	59,76	86.693.795,00	40,24
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.864.000,00	225.801.500,00	100,00	209.782.000,00	92,91	16.019.500,00	7,09
6	Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Ekonomi khusus pariwisata pada sekretariat Dewan Kawasan Provinsi Kep. Bangka Belitung	79.900.000,00	63.100.000,00	100,00	14.250.000,00	22,58	48.850.000,00	77,42
7	Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	271.357.500,00	271.357.500,00	100,00	235.225.338,00	86,68	36.132.162,00	13,32
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	66.780.000,00	86.055.000,00	100,00	76.143.400,00	88,48	9.911.600,00	11,52
9	Pembelian Rumah Peninggalan Sejarah	5.000.000.000,00	2.193.300.000,00	75,25	49.500.000,00	2,26	2.143.800.000,00	97,74
B	Program Pelestarian Budaya	5.004.887.500,00	5.500.543.500,00	97,08	4.305.364.916,00	78,27	1.041.717.684,00	18,94
1	Kajian Tradisi Bangka Belitung	105.733.000,00	105.733.000,00	100,00	94.555.200,00	89,43	11.177.800,00	10,57
2	Penulisan Sejarah Bangka Belitung	172.693.000,00	372.693.000,00	100,00	315.427.060,00	84,63	57.265.940,00	15,37
3	Partisipasi dan Penghargaan serta Kerjasama di bidang budaya	1.940.820.000,00	1.902.880.000,00	100,00	1.512.210.480,00	79,47	390.669.520,00	20,53
4	Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	343.016.500,00	343.016.500,00	94,92	314.824.000,00	91,78	28.192.500,00	8,22
5	Pengelolaan Cagar Budaya	115.700.000,00	115.700.000,00	100,00	101.198.640,00	87,47	14.501.360,00	12,53
6	Pendokumentasian dan Publikasi koleksi museum daerah	60.157.000,00	60.157.000,00	100,00	59.545.000,00	98,98	612.000,00	1,02
7	Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung	32.558.000,00	32.558.000,00	100,00	23.930.000,00	73,50	8.628.000,00	26,50
8	Festival Budaya Melayu	930.711.000,00	930.711.000,00	100,00	653.435.036,00	70,21	277.275.964,00	29,79
9	Pentas Seni Budaya	882.750.000,00	882.750.000,00	72,99	633.740.000,00	71,79	249.010.000,00	28,21
10	Pembinaan Drumband Serumpun Sebalai	229.535.000,00	269.535.000,00	100,00	265.150.400,00	98,37	4.384.600,00	1,63
11	Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah	191.214.000,00	484.810.000,00	100,00	331.349.100,00	68,35	153.460.900,00	31,65

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.511.797.000,00	1.259.870.000,00	100,00	962.052.516,00	76,36	262.760.784,00	20,86
1	Penyusunan Paket Wisata	186.400.000,00	186.400.000,00	100,00	151.343.300,00	81,19	35.056.700,00	18,81
2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata	134.411.000,00	134.411.000,00	100,00	114.256.700,00	85,01	20.154.300,00	14,99
3	Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata	145.995.000,00	145.995.000,00	100,00	122.221.875,00	83,72	23.773.125,00	16,28
4	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	98.670.000,00	98.670.000,00	100,00	88.146.100,00	89,33	10.523.900,00	10,67
5	Penyusunan Interpretasi Berbasis Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung	191.597.000,00	-	-	-	-	-	-
6	Pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi	754.724.000,00	694.394.000,00	100,00	486.084.541,00	70,00	208.309.459,00	30,00
7	Sosialisasi Paket Wisata Edukatif dan Kreatif di Desa Wisata Pulau Belitung	-	-	-	-	-	-	-
D	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6.638.233.650,00	6.209.583.650,00	100,00	5.626.476.815,00	90,61	583.106.835,00	9,39
1	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (bahan promosi)	535.835.000,00	911.985.000,00	100,00	867.905.450,00	95,17	44.079.550,00	4,83
2	Pelayanan Informasi Pariwisata	96.001.400,00	496.001.400,00	100,00	402.018.164,00	81,05	93.983.236,00	18,95
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung	72.890.000,00	380.190.000,00	100,00	376.377.411,00	99,00	3.812.589,00	1,00
4	Pembuatan Bahan Publikasi	150.000.000,00	441.400.000,00	100,00	437.398.000,00	99,09	4.002.000,00	0,91
5	Kajian Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung	99.596.250,00	99.596.250,00	100,00	97.526.020,00	97,92	2.070.230,00	2,08
6	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	221.200.000,00	221.200.000,00	100,00	201.264.170,00	90,99	19.935.830,00	9,01
7	Partisipasi Event Promosi Pariwisata	1.932.725.000,00	1.932.725.000,00	100,00	1.707.037.400,00	88,32	225.687.600,00	11,68
8	Pelaksanaan Fam Trip	142.186.000,00	142.186.000,00	100,00	109.155.500,00	76,77	33.030.500,00	23,23
9	Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	2.988.100.000,00	1.005.100.000,00	100,00	947.800.000,00	94,30	57.300.000,00	5,70
10	Pelaksanaan Promosi Geowisata	97.950.000,00	97.950.000,00	100,00	83.972.500,00	85,73	13.977.500,00	14,27
11	Pengembangan promosi wisata edukatif, kreatif dan minat khusus bahari	71.800.000,00	71.800.000,00	100,00	13.894.900,00	19,35	57.905.100,00	80,65
12	Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus	229.950.000,00	409.450.000,00	100,00	382.127.300,00	93,33	27.322.700,00	6,67
E	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan	3.500.235.700,00	3.357.413.000,00	92,06	2.518.089.386,00	75,00	839.323.614,00	25,00
1	Partisipasi Event Festival Nusantara	633.482.700,00	538.882.000,00	53,33	256.934.583,00	47,68	281.947.417,00	52,32
2	Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata	1.205.465.000,00	1.205.465.000,00	99,41	998.905.664,00	82,86	206.559.336,00	17,14
3	Penyelenggaraan Pemilihan Putra - Putri Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	960.436.000,00	936.664.000,00	91,67	722.247.039,00	77,11	214.416.961,00	22,89
4	Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Kuliner	131.301.000,00	131.301.000,00	100,00	115.059.000,00	87,63	16.242.000,00	12,37
5	Pengembangan Industri Perfilman, animasi, video dan fotografi	373.820.000,00	373.820.000,00	100,00	292.008.300,00	78,11	81.811.700,00	21,89
6	Peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah	84.415.500,00	84.415.500,00	100,00	47.966.800,00	56,82	36.448.700,00	43,18
7	Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah	111.315.500,00	86.865.500,00	100,00	84.968.000,00	97,82	1.897.500,00	2,18

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9,00
TOTAL BELANJA DINAS		27.760.414.896,62	12.982.020.167,79	99,58	11.546.507.331,19	88,94	1.435.512.836,60	11,06
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.422.520.198,62	8.430.225.469,79	100,00	7.543.109.527,00	89,48	887.115.942,79	10,52
	Belanja Tidak Langsung	8.422.520.198,62	8.430.225.469,79	100,00	7.543.109.527,00	89,48	887.115.942,79	10,52
II	BELANJA LANGSUNG	19.337.894.698	4.551.794.698	99,15	4.003.397.804	87,95	548.396.894	32,75
A	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	3.461.000.398	3.829.372.348	97,00	3.478.223.216	90,83	351.149.132	15,24
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	2.870.756.658,00	3.053.156.658,00	100,00	2.849.509.028,00	93,33	203.647.630	6,67
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	563.952.800,00	749.924.750,00	85,00	611.903.413,19	81,60	138.021.337	18,40
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Paratur	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	10.700.000,00	53,50	9.300.000	46,50
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.877.240,00	3.877.240,00	100,00	3.697.125,00	95,35	180.115	4,65
5	Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah	2.413.700,00	2.413.700,00	100,00	2.413.650,00	100,00	50	-
B	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	15.342.519.950	276.370.000	98,75	228.873.750	82,81	47.496.250	47,19
1	Penyusunan Bibliografi Induk Daerah Dan Katalog Induk Daerah	12.810.000	12.810.000	100,00	4.300.000	33,57	8.510.000	66,43
2	Pelestarian Dan Pengelolaan Bahan Pustaka	9.650.000	9.650.000	100,00	5.389.000	55,84	4.261.000	44,16
3	Pelayanan Perpustakaan Keliling	31.435.000	31.435.000	100,00	8.525.350	27,12	22.909.650	72,88
4	Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	58.199.950	-	-	-	-	-	-
5	Pengembangan Minat Dan Budaya Baca	222.475.000	222.475.000	95,00	210.659.400	94,69	11.815.600	5,31
6	Pameran Buku	7.950.000	-	-	-	-	-	-
7	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	15.000.000.000	-	-	-	-	-	-
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	112.861.350	112.861.350	100,00	72.636.700	64,36	40.224.650	35,13
1	Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi	43.191.500	43.191.500	100,00	23.807.200	55,12	19.384.300	44,88
2	Penyusunan Profil Perpustakaan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35.680.000	35.680.000	100,00	30.019.750	84,14	5.660.250	15,86
3	Akreditasi Perpustakaan	33.989.850	33.989.850	100,00	18.809.750	55,34	15.180.100	44,66
D	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	140.699.000	140.699.000	100,00	54.828.138	38,97	85.870.862	58,34
1	Arsip Masuk Desa	17.130.000	17.130.000	100,00	12.585.000	73,47	4.545.000	26,53
2	Lomba Kearsipan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	84.819.000	84.819.000	100,00	41.029.238	48,37	43.789.762	51,63
3	Pengawasan Kearsipan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38.750.000	38.750.000	100,00	1.213.900	3,13	37.536.100	96,87
E	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP	280.814.000	192.492.000	100,00	168.836.000	87,71	23.656.000	7,84
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	300.000	300.000	100,00	300.000	100,00	-	-
2	Kegiatan Pameran Arsip Statis Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	81.150.000	81.150.000	100,00	74.499.500	91,80	6.650.500	8,20
3	Kegiatan Penerapan E-Arsip	199.364.000	111.042.000	100,00	94.036.500	84,69	17.005.500	15,31

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		41.976.092.200	41.652.146.291	92,95	28.391.089.333	68,16	13.261.056.958	31,84
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.721.395.960	16.729.570.051	100,00	12.404.650.567	74,15	4.324.919.484	25,85
	Belanja Tidak langsung	16.721.395.960	16.729.570.051	100,00	12.404.650.567	74,15	4.324.919.484	25,85
II	BELANJA LANGSUNG	25.254.696.240	24.922.576.240	85,90	15.986.438.766	64,14	8.936.137.474	35,86
	A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	6.065.798.000	6.494.598.000	100,00	5.703.277.327	83,57	791.320.673	12,18
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.555.017.000	3.977.817.000,00	100,00	3.797.871.907,00	95,48	179.945.093	4,52
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.965.830.000	1.971.830.000,00	100,00	1.439.344.836,00	73,00	532.485.164	27,00
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	260.350.000	260.350.000,00	100,00	194.736.554,00	74,80	65.613.446	25,20
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	260.487.000	260.487.000,00	100,00	252.610.030,00	96,98	7.876.970	3,02
5	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.114.000	24.114.000,00	100,00	18.714.000,00	77,61	5.400.000	22,39
	B. Program Pengelolaan Ruang Laut	1.573.334.000	2.173.334.000	68,00	939.891.100	62,25	1.233.442.900	0,57
1	Kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty	937.500.000	1.537.500.000	35,00	393.008.000	25,56	1.144.492.000	74,44
2	Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	16.820.000	16.820.000	45,00	6.965.000	41,41	9.855.000	58,59
3	Kegiatan Identifikasi dan Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut	100.239.000	100.239.000	60,00	56.165.000	56,03	44.074.000	43,97
4	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	318.775.000	318.775.000	100,00	287.799.100	90,28	30.975.900	9,72
5	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Daerah (DAK)	200.000.000	200.000.000	100,00	195.954.000	97,98	4.046.000	2,02
	C. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	8.719.483.240	7.030.083.240	54,71	2.158.799.115	41,05	4.871.284.125	69,29
1	Kegiatan Fungsi Syahbandar Pelabuhan Perikanan	43.972.000	43.972.000	40,00	14.253.716,00	32,42	29.718.284	67,58
2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1.365.400.000	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	3.033.325.740	2.709.325.740	65,00	1.706.321.200,00	62,98	1.003.004.540	37,02
4	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan PPI	1.954.430.000	1.954.430.000	4,00	70.033.699,00	3,58	1.884.396.301	96,42
5	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Perikanan Tangkap	57.570.500	57.570.500	100,00	46.235.000,00	80,31	11.335.500	19,69
6	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan	144.938.000	144.938.000	100,00	80.612.500,00	55,62	64.325.500	44,38
7	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	45.443.000	45.443.000	60,00	26.580.000,00	58,49	18.863.000	41,51
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap	188.904.000	188.904.000	-	-	-	188.904.000	100,00
9	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (DAK)	1.885.500.000	1.885.500.000	14,00	214.763.000,00	11,39	1.670.737.000	88,61

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D. Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	2.053.490.000	2.311.290.000	100,00	1.177.844.513	59,69	1.133.445.487	49,04
1	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	341.534.000	341.534.000	100,00	287.738.700,00	-	53.795.300,00	0,00
2	Kegiatan Pembinaan Pasar Hasil Perikanan Se-Bangka Belitung	15.582.000	15.582.000	100,00	8.432.000,00	54,11	7.150.000	45,89
3	Kegiatan Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	223.550.000	223.550.000	100,00	196.264.580,00	87,79	27.285.420	12,21
4	Kegiatan Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	48.864.000	48.864.000	100,00	42.978.700,00	87,96	5.885.300	12,04
5	Kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	94.710.000	94.710.000	100,00	94.356.000,00	99,63	354.000	0,37
6	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil ikan	-	257.800.000	100,00	227.654.733,00	88,31	30.145.267	11,69
7	Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	1.329.250.000	1.329.250.000	100,00	320.419.800,00	-	1.008.830.200,00	0,00
	E. Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.110.919.000	1.127.719.000	64,50	825.422.455	59,39	302.296.545	26,81
1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	938.735.000	949.935.000	92,00	754.655.755,00	79,44	195.279.245	20,56
2	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	22.000.000	22.000.000	100,00	22.000.000,00	100,00	0	0,00
3	Kegiatan Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	65.189.000	65.189.000	16,00	9.966.700,00	15,29	55.222.300	84,71
4	Kegiatan Peningkatan Fungsi Boost Centre	84.995.000	90.595.000	50,00	38.800.000,00	42,83	51.795.000	57,17
	F. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	829.623.000	821.903.000	100,00	695.254.069	87,65	126.648.931	15,41
1	Kegiatan Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	601.899.000	594.179.000	100,00	477.308.569,00	80,33	116.870.431	19,67
2	Kegiatan Pembinaan, supervisi dan sosialisasi penerapan standar mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan	26.814.000	26.814.000	100,00	22.945.500,00	85,57	3.868.500	14,43
3	Kegiatan Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan	200.910.000	200.910.000	100,00	195.000.000,00	97,06	5.910.000	2,94
	G. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	2.404.624.000	2.432.624.000	100,00	2.397.579.816	98,95	35.044.184	1,44
1	Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau) Tanjung Krasak	1.669.600.000	1.697.600.000	100,00	1.663.121.316	97,97	34.478.684	2,03
2	Kegiatan Peningkatan Produksi UPTD Balai Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	735.024.000	735.024.000	100,00	734.458.500	99,92	565.500	0,08
	H. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Laut	2.497.425.000	2.531.025.000	100,00	2.088.370.371	60,13	442.654.629	17,49
1	Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut) Tanjung Rusa	1.051.345.000	1.084.945.000	100,00	1.043.983.130,00	96,22	40.961.870	3,78
2	Kegiatan Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	430.080.000	430.080.000	100,00	361.945.141,00	84,16	68.134.859	15,84
3	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan (air Laut) Tanjung Rusa	1.016.000.000	1.016.000.000	100,00	682.442.100,00	-	333.557.900,00	0,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		49.283.109.090,45	55.365.615.113,00	100,00	51.936.534.598,00	93,81	3.429.080.515,00	6,19
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.834.328.015,45	19.515.724.838,00	100,00	17.896.715.475,00	91,70	1.619.009.363,00	8,30
	Belanja Tidak Langsung	17.834.328.015,45	19.515.724.838,00	100,00	17.896.715.475,00	91,70	1.619.009.363,00	8,30
II	BELANJA LANGSUNG	31.448.781.075,00	35.849.890.275,00	100,00	34.039.819.123,00	94,95	1.810.071.152,00	5,05
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	7.558.834.825,00	8.849.248.825,00	100,00	8.444.204.075,00	95,42	405.044.750,00	4,58
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.434.388.825,00	7.238.488.825,00	100,00	7.099.612.303,00	98,08	138.876.522,00	1,92
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	763.338.000,00	1.149.652.000,00	100,00	940.760.826,00	81,83	208.891.174,00	18,17
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	192.365.000,00	292.365.000,00	100,00	286.508.446,00	98,00	5.856.554,00	2,00
4	Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan	81.067.000,00	81.067.000,00	100,00	62.917.000,00	77,61	18.150.000,00	22,39
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	87.676.000,00	87.676.000,00	100,00	54.405.500,00	62,05	33.270.500,00	37,95
B	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultural	964.202.000,00	627.902.000,00	100,00	555.002.000,00	0,00	72.900.000,00	11,61
1	Pengembangan komoditi hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik.	447.737.000,00	334.437.000,00	100,00	302.942.000,00	90,58	31.495.000,00	9,42
2	Pengembangan Komoditi pangan dengan penerapan GP-PTT (padi dan jagung)	410.525.000,00	229.525.000,00	100,00	188.125.000,00	81,96	41.400.000,00	18,04
3	Pengembangan komoditi hortikultura lokal yang unggul	105.940.000,00	63.940.000,00	100,00	63.935.000,00	99,99	5.000,00	0,01
C	Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	4.998.825.500,00	3.976.711.500,00	100,00	3.537.332.875,00	88,95	439.378.625,00	11,05
1	Pembangunan jaringan irigasi tersier	682.924.000,00	682.924.000,00	100,00	667.509.615,00	97,74	15.414.385,00	2,26
2	Pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penyusunan perda	505.200.000,00	505.200.000,00	100,00	472.667.480,00	93,56	32.532.520,00	6,44
3	Pembangunan gudang alsintan	769.820.000,00	769.820.000,00	100,00	764.993.000,00	99,37	4.827.000,00	0,63
4	Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	276.698.000,00	276.698.000,00	100,00	225.833.215,00	81,62	50.864.785,00	18,38
5	Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM Pertanian	962.138.000,00	962.138.000,00	100,00	640.713.000,00	66,59	321.425.000,00	33,41
6	Pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian	50.300.500,00	50.300.500,00	100,00	42.581.850,00	84,65	7.718.650,00	15,35
7	Pemberian asuransi peternakan	108.333.000,00	108.333.000,00	100,00	107.588.000,00	99,31	745.000,00	0,69
8	Fasilitasi asuransi pertanian	181.298.000,00	181.298.000,00	100,00	180.254.000,00	99,42	1.044.000,00	0,58
9	Pengembangan optimasi lahan	1.462.114.000,00	440.000.000,00	100,00	435.192.715,00	98,91	4.807.285,00	1,09
D	Program Pengembangan Perkebunan	4.515.562.000,00	7.867.062.000,00	100,00	7.611.244.670,00	96,75	255.817.330,00	3,25
1	Intensifikasi tanaman perkebunan	3.711.660.000,00	7.259.060.000,00	100,00	7.031.363.420,00	96,86	227.696.580,00	3,14
2	Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	346.280.000,00	278.780.000,00	100,00	275.751.250,00	98,91	3.028.750,00	1,09
3	Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan	240.272.000,00	240.272.000,00	100,00	218.180.000,00	90,81	22.092.000,00	9,19
4	Pelayanan informasi pemasaran hasil perkebunan	217.350.000,00	88.950.000,00	100,00	85.950.000,00	0,00	3.000.000,00	-

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.878.432.750,00	2.878.432.750,00	100,00	2.715.576.778,00	94,34	162.855.972,00	5,66
1	Peningkatan populasi ternak	2.229.172.000,00	2.229.172.000,00	100,00	2.197.018.000,00	98,56	32.154.000,00	1,44
2	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor peternakan	200.856.000,00	200.856.000,00	100,00	150.190.928,00	74,78	50.665.072,00	25,22
3	Peningkatan fungsi pelayanan laboratorium keswan dan klinik hewan	326.552.750,00	326.552.750,00	100,00	261.227.250,00	80,00	65.325.500,00	20,00
4	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan menular strategis zoonosis dan gangguan reproduksi	119.850.000,00	119.850.000,00	100,00	105.140.600,00	87,73	14.709.400,00	12,27
5	Sosialisasi pengawasan mutu hasil ternak sapi di RPH	2.002.000,00	2.002.000,00		2.000.000,00	99,90	2.000,00	0,10
F	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	353.411.000,00	353.411.000,00	100,00	328.122.300,00	92,84	25.288.700,00	7,16
1	Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen	5.270.000,00	5.270.000,00	100,00	3.575.000,00	67,84	1.695.000,00	32,16
2	Sertifikasi benih pertanian/perkebunan	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1.047.900,00	99,80	2.100,00	0,20
3	Penilaian kultivar/varietas unggul lokal	14.730.000,00	14.730.000,00	100,00	1.875.000,00	12,73	12.855.000,00	87,27
4	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB	332.361.000,00	332.361.000,00	100,00	321.624.400,00	96,77	10.736.600,00	3,23
G	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	1.323.491.000,00	1.474.491.000,00	100,00	1.419.725.210,00	96,29	54.765.790,00	3,71
1	Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	153.350.000,00	279.350.000,00	100,00	278.338.135,00	99,64	1.011.865,00	0,36
2	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman	170.141.000,00	195.141.000,00	100,00	182.764.075,00	93,66	12.376.925,00	6,34
3	Pengadaan alat laboratorium Balai Proteksi Tanaman (DAK)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	958.623.000,00	95,86	41.377.000,00	4,14
H	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	8.856.022.000,00	9.572.022.000,00	100,00	9.179.385.015,00	95,90	392.636.985,00	4,10
1	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian	493.403.000,00	493.403.000,00	100,00	433.419.272,00	87,84	59.983.728,00	12,16
2	Penyediaan benih sumber dan benih sebar	719.150.000,00	869.150.000,00	100,00	805.834.786,00	92,72	63.315.214,00	7,28
3	Pengembangan perbibitan ternak ruminansia	1.059.975.000,00	1.059.975.000,00	100,00	1.041.960.110,00	98,30	18.014.890,00	1,70
4	Integrasi Jagung dan Sapi	74.769.000,00	74.769.000,00	100,00	73.243.500,00	97,96	1.525.500,00	2,04
5	Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih	2.283.725.000,00	2.849.725.000,00	100,00	2.747.715.320,00	96,42	102.009.680,00	3,58
6	Pembangunan Kandang Sapi (DAK)	2.523.275.000,00	2.523.275.000,00	100,00	2.453.043.419,00	97,22	70.231.581,00	2,78
7	Pembangunan Gudang Pakan Ternak dan Penyediaan Excavator Mini (DAK)	1.701.725.000,00	1.701.725.000,00	100,00	1.624.168.608,00	95,44	77.556.392,00	4,56
I	Program Penanggulangan Bencana	-	250.609.200,00	100,00	249.226.200,00	99,45	1.383.000,00	0,55
1	Pengendalian Kekeringan di Daerah Persawahan	-	250.609.200,00	100,00	249.226.200,00	99,45	1.383.000,00	0,55

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		31.803.062.946,95	38.240.393.873,00	95,42	34.731.394.731,98	93,28	3.508.999.141,02	2,13
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.739.419.796,95	23.873.111.973,00	100,00	23.544.667.489,00	98,62	328.444.484,00	1,38
	Belanja Tidak Langsung	20.739.419.796,95	23.873.111.973,00	100,00	23.544.667.489,00	98,62	328.444.484,00	1,38
II	BELANJA LANGSUNG	11.063.643.150,00	14.367.281.900,00	91,85	11.186.727.242,98	77,86	3.180.554.657,02	13,98
	Non Program	-	-	-	5.350.000,00	-	-	-
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.678.298.500,00	5.076.992.054,00	90,83	4.464.693.288,00	87,94	612.298.766,00	2,89
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.493.930.000,00	3.577.436.054,00	100,00	3.398.339.818,00	94,99	179.096.236,00	5,01
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	997.790.000,00	1.292.977.500,00	85,00	913.862.905,00	70,68	379.114.595,00	29,32
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	167.445.500,00	167.445.500,00	85,00	119.428.515,00	71,32	48.016.985,00	28,68
4	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.985.000,00	3.985.000,00	75,00	2.450.000,00	61,48	1.535.000,00	38,52
5	Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	6.953.000,00	26.953.000,00	100,00	23.662.050,00	87,79	3.290.950,00	12,21
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	8.195.000,00	8.195.000,00	100,00	6.950.000,00	84,81	1.245.000,00	15,19
B	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	2.179.693.650,00	2.079.635.096,00	98,13	1.948.857.461,98	93,71	130.777.634,02	4,41
1	Pemanfaatan Kawasan Hutan	54.889.150,00	54.889.150,00	100,00	44.930.250,00	81,86	9.958.900,00	18,14
2	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	226.471.500,00	145.280.000,00	85,00	103.995.100,00	71,58	41.284.900,00	28,42
3	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan	97.825.000,00	100.625.000,00	100,00	99.458.600,00	98,84	1.166.400,00	1,16
4	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	64.859.000,00	47.312.000,00	100,00	46.889.200,00	99,11	422.800,00	0,89
5	Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	335.650.000,00	331.529.946,00	100,00	331.191.746,00	99,90	338.200,00	0,10
6	Pengadaan Kendaraan Roda Dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	165.182.500,00	82,59	34.817.500,00	17,41
7	Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	212.315.000,00	212.315.000,00	100,00	211.046.500,00	99,40	1.268.500,00	0,60
8	Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	987.684.000,00	987.684.000,00	100,00	946.163.565,98	95,80	41.520.434,02	4,20
C	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	1.220.127.000,00	1.635.120.000,00	86,43	1.561.253.860,00	81,70	73.866.140,00	4,73
1	Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan	23.560.000,00	23.560.000,00	15,00	2.080.000,00	8,83	21.480.000,00	91,17
2	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	212.932.000,00	156.032.000,00	100,00	152.337.000,00	97,63	3.695.000,00	2,37
3	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	307.160.000,00	307.160.000,00	100,00	305.480.000,00	99,45	1.680.000,00	0,55
4	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	186.740.000,00	186.740.000,00	100,00	181.486.600,00	97,19	5.253.400,00	2,81
5	Tenaga Pendukung Polisi Hutan	458.980.000,00	500.980.000,00	100,00	492.883.600,00	98,38	8.096.400,00	1,62

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	30.755.000,00	30.755.000,00	90,00	23.555.000,00	76,59	7.200.000,00	23,41
7	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-Kehutanan)	-	429.893.000,00	100,00	403.431.660,00	93,84	26.461.340,00	6,16
D	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	2.975.989.000,00	5.575.534.750,00	92,00	3.206.572.633,00	79,01	2.368.962.117,00	12,99
1	Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	68.644.000,00	68.644.000,00	90,00	49.711.500,00	72,42	18.932.500,00	27,58
2	Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	2.555.000,00	2.555.000,00	100,00	2.330.000,00	91,19	225.000,00	8,81
3	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	82.830.000,00	82.830.000,00	90,00	61.104.400,00	73,77	21.725.600,00	26,23
4	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	158.492.000,00	158.492.000,00	100,00	135.878.700,00	85,73	22.613.300,00	14,27
5	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	165.906.000,00	415.906.000,00	100,00	341.433.500,00	82,09	74.472.500,00	17,91
6	Pengembangan Perhutanan Sosial	272.562.000,00	422.562.000,00	75,00	243.628.291,00	57,66	178.933.709,00	42,34
7	Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)	2.225.000.000,00	2.225.000.000,00	35,00	497.478.631,00	22,36	1.727.521.369,00	77,64
8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH-DR KEHUTANAN)	-	299.165.750,00	90,00	227.910.750,00	76,18	71.255.000,00	23,82
9	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR KEHUTANAN)	-	103.355.000,00	100,00	92.703.500,00	89,69	10.651.500,00	10,31
10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR KEHUTANAN)	-	55.895.000,00	-	0	-	55.895.000,00	100,00
11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR KEHUTANAN)	-	342.000.000,00	100,00	278.976.775,00	81,57	63.023.225,00	18,43
12	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR KEHUTANAN)	-	193.670.000,00	100,00	167.489.379,00	86,48	26.180.621,00	13,52
13	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR KEHUTANAN)	-	122.745.000,00	100,00	111.030.000,00	90,46	11.715.000,00	9,54
14	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antar (DBH-DR KEHUTANAN)	-	237.245.000,00	100,00	214.391.100,00	90,37	22.853.900,00	9,63
15	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Belantu Mendanau (DBH-DR KEHUTANAN)	-	430.195.000,00	100,00	397.445.664,00	92,39	32.749.336,00	7,61
16	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR KEHUTANAN)	-	415.275.000,00	100,00	385.060.443,00	92,72	30.214.557,00	7,28
E	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	9.535.000,00	-	-	-	-	-	-
1	Penyelesaian Usulan Perubahan Status Kawasan Hutan/TORA	9.535.000,00	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		33.589.675.580,95	29.321.316.020,95	95,71	22.669.790.020,15	77,32	6.651.526.000,80	22,68
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.799.872.580,95	19.808.205.020,95	100,00	16.159.549.281,00	81,58	3.648.655.739,95	18,42
	Belanja Tidak Langsung	19.799.872.580,95	19.808.205.020,95	100,00	16.159.549.281,00	81,58	3.648.655.739,95	18,42
II	BELANJA LANGSUNG	13.789.803.000,00	9.513.111.000,00	91,42	6.510.240.739,15	68,43	3.002.870.260,85	31,57
A	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN	8.394.009.000,00	8.782.503.000,00	89,62	6.112.140.206,15	64,38	2.404.772.793,85	27,38
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.885.324.000,00	4.541.324.000,00	100,00	3.457.768.463,00	76,14	1.083.555.537,00	23,86
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.402.236.000,00	1.056.130.000,00	85,00	420.980.814,15	39,86	635.149.185,85	60,14
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	9.000.000,00	45,00	11.000.000,00	55,00
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.385.000,00	10.385.000,00	100,00	3.750.000,00	36,11	6.635.000,00	63,89
5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.050.000,00	8.050.000,00	100,00	-	-	-	-
6	Penyebaran data informasi bidang Energi dan sumber daya mineral (ESDM)	108.064.000,00	121.064.000,00	100,00	70.230.363,00	58,01	50.833.637,00	41,99
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	523.590.000,00	544.390.000,00	100,00	384.572.611,00	70,64	159.817.389,00	29,36
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat	519.390.000,00	530.590.000,00	100,00	424.295.286,00	79,97	106.294.714,00	20,03
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung	543.650.000,00	556.050.000,00	100,00	514.364.252,00	92,50	41.685.748,00	7,50
10	DED Pengembangan dan Pembangunan Gedung Kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-	-	-	-
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka	553.640.000,00	564.040.000,00	100,00	420.971.255,00	74,64	143.068.745,00	25,36
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur	562.140.000,00	572.940.000,00	100,00	406.207.162,00	70,90	166.732.838,00	29,10
13	Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD	7.540.000,00	7.540.000,00	80,00	-	-	-	-
B	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	34.070.000,00	34.070.000,00	100,00	12.018.100,00	0,35	22.051.900,00	64,73
1	Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.506.000,00	1.506.000,00	100,00	996.800,00	66,19	509.200,00	33,81
2	Dukungan Percepatan Pembangunan Geopark	14.711.000,00	14.711.000,00	100,00	6.849.000,00	0,00	7.862.000,00	0,00
3	Pembinaan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.863.000,00	2.863.000,00	100,00	1.908.500,00	66,66	954.500,00	33,34
4	Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Air Tanah	1.790.000,00	1.790.000,00	100,00	1.263.800,00	70,60	526.200,00	29,40
5	Survey Geofisika Aplikasi Metoda Geolistrik Untuk Pendugaan Keberadaan Lapisan Akuifer Bawah Permukaan	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	1.000.000,00	7,58	12.200.000,00	92,42

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	19.003.000,00	141.003.000,00	100,00	107.234.528,00	0,76	19.165.472,00	13,59
1	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	4.320.000,00	98,18	80.000,00	1,82
	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	11.488.000,00	11.488.000,00	100,00	-	-	-	-
	Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	845.000,00	845.000,00	100,00	-	-	-	-
	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar (Community Developmen and Carporate Sosial Responsibility/CD-CSR)	510.000,00	510.000,00	100,00	-	-	-	-
	Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	-	-	-	-
	Pembinaan Produksi dan Pemasaran Mineral Logam	510.000,00	510.000,00	100,00	-	-	-	-
	Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan Pertambangan	0	122.000.000,00	100,00	102.914.528,00	84,36	19.085.472,00	15,64
D	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	252.460.000,00	252.460.000,00	100,00	203.341.500,00	80,54	49.118.500,00	19,46
1	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	4.820.000,00	4.820.000,00	100,00	-	-	-	-
2	Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.202.000,00	10.202.000,00	100,00	7.800.000,00	76,46	2.402.000,00	23,54
	Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.950.000,00	7.950.000,00	100,00	-	-	-	-
	Pertemuan Tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	112.878.000,00	112.878.000,00	100,00	98.426.000,00	87,20	14.452.000,00	12,80
3	Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP OP	510.000,00	510.000,00	100,00	-	-	-	-
4	Pelatihan Teknis RKAB	116.100.000,00	116.100.000,00	100,00	97.115.500,00	83,65	18.984.500,00	16,35
E	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	5.090.261.000,00	303.075.000,00	67,50	75.506.405,00	80,53	23.893.595,00	7,88
1	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.716.330.000,00	22.000.000,00	5,00	20.806.405,00	94,57	1.193.595,00	5,43
2	Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	-	-	-	-
3	Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	42.000.000,00	82,35	9.000.000,00	17,65
4	Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	1.900.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00	100,00	-	0,00
5	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.755.000,00	200.755.000,00	0,00	-	-	-	-
6	Penyusunan PERDA dan Sosialisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	117.356.000,00	25.000.000,00	100,00	11.300.000,00	45,20	13.700.000,00	54,80

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		23.636.309.547,00	24.456.586.995,00	98,78	21.942.884.986,82	89,72	2.513.702.008,18	9,06
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.493.158.847,00	13.206.236.295,00	100,00	12.089.520.417,00	91,54	1.116.715.878,00	8,46
	a. Gaji dan Tunjangan	12.072.878.847,00	6.059.008.295,00	100,00	5.620.113.667,00	92,76	438.894.628,00	7,24
	b. Tambahan Penghasilan PNS	420.280.000,00	7.147.228.000,00	100,00	6.469.406.750,00	90,52	677.821.250,00	9,48
II	BELANJA LANGSUNG	11.143.150.700,00	11.250.350.700,00	97,56	9.853.364.569,82	67,86	1.396.986.130,18	29,70
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	5.032.197.200,00	5.371.506.400,00	100,00	5.146.505.485,65	73,17	225.000.914,35	26,83
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	362.220.000,00	759.800.000,00	100,00	682.654.755,65	89,85	77.145.244,35	10,15
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.581.897.200,00	4.543.626.400,00	100,00	4.421.649.930,00	97,32	121.976.470,00	2,68
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00	14.300.000,00	69,42	6.300.000,00	30,58
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	55.230.000,00	35.230.000,00	100,00	22.250.900,00	63,16	12.979.100,00	36,84
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.250.000,00	12.250.000,00	100,00	5.649.900,00	46,12	6.600.100,00	53,88
B	Program Pengembangan Perdagangan	1.165.894.000,00	1.033.662.000,00	97,78	759.266.997,00	61,36	274.395.003,00	36,42
1	Pelaksanaan Pasar Murah	222.865.000,00	222.865.000,00	100,00	181.285.000,00	81,34	41.580.000,00	18,66
2	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	12.280.000,00	12.280.000,00	82,22	11.795.050,00	96,05	484.950,00	3,95
3	Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	310.826.866,00	0,00	89.173.134,00	0,00
4	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	33.570.000,00	33.570.000,00	100,00	19.545.000,00	58,22	14.025.000,00	41,78
5	Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	202.802.000,00	202.802.000,00	100,00	176.744.631,00	87,15	26.057.369,00	12,85
6	Informasi Perdagangan Dalam Negeri	32.665.000,00	32.665.000,00	100,00	25.120.000,00	76,90	7.545.000,00	23,10
7	Pengadaan Gerobak	132.232.000,00	-	-	-	-	-	-
8	Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	122.280.000,00	122.280.000,00	100,00	29.095.000,00	23,79	93.185.000,00	0,00
9	Partisipasi Papper Day	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	4.855.450,00	67,44	2.344.550,00	32,56
C	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	114.060.000,00	114.060.000,00	100,00	86.797.500,00	61,66	27.262.500,00	38,34
1	Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	23.095.000,00	23.095.000,00	100,00	22.710.000,00	98,33	385.000,00	1,67
2	Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	7.850.000,00	7.850.000,00	100,00	350.000,00	4,46	7.500.000,00	95,54
3	Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	28.570.000,00	28.570.000,00	100,00	20.346.000,00	0,00	8.224.000,00	0,00
4	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	4.830.000,00	4.830.000,00	100,00	4.529.000,00	93,77	301.000,00	6,23
5	Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri	42.715.000,00	42.715.000,00	100,00	31.962.500,00	74,83	10.752.500,00	25,17
6	Pendataan Perizinan Industri	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	6.900.000,00	98,57	100.000,00	1,43

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	2.952.648.300,00	2.808.198.300,00	100,00	2.545.129.361,00	77,25	263.068.939,00	22,75
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	256.760.000,00	256.760.000,00	100,00	234.154.200,00	91,20	22.605.800,00	8,80
2	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	523.199.900,00	523.199.900,00	100,00	487.478.200,00	93,17	35.721.700,00	6,83
3	Inkubator Wirausaha Baru	119.045.000,00	-	-	-	-	-	-
4	Pemberdayaan Dekranasda	783.315.000,00	786.115.000,00	100,00	740.612.291,00	0,00	45.502.709,00	0,00
5	Rumah Pengembangan Produk	212.450.000,00	315.250.000,00	100,00	226.195.620,00	71,75	89.054.380,00	28,25
6	Lomba Industri Kreatif	59.995.000,00	59.995.000,00	100,00	49.350.300,00	82,26	10.644.700,00	17,74
7	Promosi/Gelar Produk Industri	719.913.500,00	719.913.500,00	100,00	668.657.550,00	92,88	51.255.950,00	7,12
8	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	61.575.000,00	61.575.000,00	100,00	53.754.400,00	87,30	7.820.600,00	12,70
9	Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	131.005.000,00	-	-	-	-	-	-
10	Fasilitasi Uji Nutrisi	85.389.900,00	85.389.900,00	100,00	84.926.800,00	99,46	463.100,00	0,54
E	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian	346.485.000,00	235.155.000,00	94,17	192.540.400,00	60,56	42.614.600,00	33,60
1	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	22.899.000,00	79,79	5.801.000,00	20,21
2	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	74.590.000,00	74.590.000,00	100,00	69.496.800,00	93,17	5.093.200,00	6,83
3	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	42.180.000,00	42.180.000,00	100,00	41.579.400,00	98,58	600.600,00	1,42
4	Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	47.025.000,00	47.025.000,00	100,00	44.942.200,00	0,00	2.082.800,00	0,00
5	Penyusunan Daftar Jumlah Jenis dan Massa berlaku Standar Ukur	3.090.000,00	-	-	-	-	-	-
6	Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelanggaran dalam rangka Pengawasan	139.200.000,00	30.960.000,00	65,00	4.625.000,00	14,94	26.335.000,00	0,00
7	Pengawasan Tertib Niaga	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	8.998.000,00	76,91	2.702.000,00	1,00
F	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	1.531.866.200,00	1.687.769.000,00	93,40	1.123.124.826,17	73,16	564.644.173,83	20,24
1	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	1.149.569.000,00	1.344.569.000,00	100,00	854.642.776,17	63,56	489.926.223,83	36,44
2	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	32.050.000,00	32.050.000,00	67,00	16.726.400,00	52,19	15.323.600,00	47,81
3	Monitoring Mutu Pengujian	89.350.000,00	89.350.000,00	100,00	73.623.150,00	82,40	15.726.850,00	17,60
4	Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	71.097.200,00	32.000.000,00	100,00	28.400.000,00	88,75	3.600.000,00	11,25
5	Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah	189.800.000,00	189.800.000,00	100,00	149.732.500,00	78,89	40.067.500,00	21,11

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO PEMERINTAHAN

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		2.996.674.075,00	3.358.674.075,00	100,00	3.085.469.960,00	91,87	273.204.115,00	8,13
II BELANJA LANGSUNG		2.996.674.075,00	3.358.674.075,00	100,00	3.085.469.960,00	91,87	273.204.115,00	8,13
A	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	1.518.973.725,00	1.881.795.725,00	100,00	1.677.192.804,00	89,13	204.602.921,00	10,87
1	Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.	209.250.000,00	572.072.000	100,00	511.024.920	89,33	61.047.080,00	10,67
2	Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Internal Biro Pemerintahan.	824.106.725	824.106.725	100,00	817.076.004	99,15	7.030.721,00	0,85
3	Pembinaan Penanganan Masalah Konflik Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	104.100.000	104.100.000	100,00	87.167.560	83,73	16.932.440,00	16,27
4	Penyusunan Sistem Informasi Data Administrasi Kewilayahan.	44.440.000	44.440.000	100,00	4.745.000	10,68	39.695.000,00	89,32
5	Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi.	23.918.000	23.918.000	100,00	9.620.000	100,00	14.298.000,00	59,78
6	Penegasan Batas Daerah.	313.159.000	313.159.000	100,00	247.559.320	79,05	65.599.680,00	20,95
B	Program Pengembangan Otonomi Daerah	747.217.500,00	789.217.500,00	100,00	741.778.578,00	93,99	47.438.922,00	6,01
1	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).	119.637.500	119.637.500	100,00	119.637.500	100,00	-	0,00
2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	160.750.000	160.750.000	100,00	157.824.339	98,18	2.925.661,00	1,82
3	Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov.Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri.	31.080.000	31.080.000	100,00	25.945.683	83,48	5.134.317,00	16,52
4	Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	77.200.000	77.200.000	100,00	46.501.900	60,24	30.698.100,00	39,76
5	Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Legislative dan Pilpres 2019.	6.200.000	6.200.000	100,00	6.200.000	100,00	-	0,00
6	Verifikasi Berkas Calon Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	46.860.000,00	88.860.000	100,00	84.552.140	95,15	4.307.860,00	4,85
7	Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	78.940.000	78.940.000	100,00	77.596.081	98,30	1.343.919,00	1,70
8	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	226.550.000	226.550.000	100,00	223.520.935	98,66	3.029.065,00	1,34
C	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	730.482.850,00	687.660.850,00	100,00	666.498.578,00	96,92	21.162.272,00	3,08
1	Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	375.010.000,00	332.188.000	100,00	328.603.278	98,92	3.584.722,00	1,08
2	Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	91.150.000,00	91.150.000	100,00	90.825.000	99,64	325.000,00	0,36
3	Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	151.150.000	151.150.000	100,00	150.260.000	99,41	890.000,00	0,59
4	Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	56.544.850	56.544.850	100,00	55.369.300	97,92	1.175.550,00	2,08

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Kegiatan Inventarisasi Potensi Kerjasama	23.053.000	23.053.000	100,00	11.558.500	50,14	11.494.500,00	49,86
6	Verifikasi dan Validasi Bantuan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD.	4.250.000,00	14.700.000	100,00	13.545.000	92,14	1.155.000,00	7,86
7	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat.	29.325.000,00	18.875.000	100,00	16.337.500	86,56	2.537.500,00	13,44

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO HUKUM

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		1.793.904.400,00	1.893.904.400,00	97,79	1.713.383.360,00	90,47	180.521.040,00	9,53
II	BELANJA LANGSUNG	1.793.904.400,00	1.893.904.400,00	97,79	1.713.383.360,00	90,47	180.521.040,00	9,53
A	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan	348.025.000	212.950.000	93,37	206.849.700,00	86,46	6.100.300,00	2,86
1	Penyusunan Produk Hukum Daerah	133.850.000	118.850.000	100	118.623.500	99,81	226.500,00	0,19
2	Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	700.000	700.000	100	600.000	85,71	100.000,00	14,29
3	Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	107.300.000	6.700.000	91,67	4.301.200	64,20	2.398.800,00	35,80
4	Penyusunan Propemperda dan Rancangan Peraturan Daerah	106.175.000	86.700.000	81,82	83.325.000	96,11	3.375.000,00	3,89
B	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	337.950.000,00	337.950.000,00	100,00	189.585.700,00	66,50	148.364.300,00	43,90
1	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	103.850.000	103.850.000	100	19.660.000	18,93	84.190.000,00	81,07
2	Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	142.150.000	142.150.000	100	84.693.700	59,58	57.456.300,00	40,42
3	Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.400.000	6.400.000	100	4.609.000	72,02	1.791.000,00	27,98
4	Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.300.000	6.300.000	100	5.490.000	87,14	810.000,00	12,86
5	Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79.250.000	79.250.000	100	75.133.000	94,81	4.117.000,00	5,19
C	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	1.107.929.400,00	1.343.004.400,00	100,00	1.316.947.960,00	98,06	26.056.440,00	1,94
1	Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	1.005.403.400	1.296.178.400	100	1.277.898.260	98,59	18.280.140,00	1,41
2	Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 - 2017 dan Kompilasi Perda dan Pergub Tahun 2017	45.500.000	-	-	-	-	-	0,00
3	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57.026.000	46.826.000	100	39.049.700	83,39	7.776.300,00	16,61

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO UMUM

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	88.159.456.287,00	106.210.038.827,00	100,00	99.548.596.296,00	89,69	6.661.442.531,00	6,27
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	52.136.309.127,00	52.405.791.667,00	100,00	51.289.999.457,00	97,87	1.115.792.210,00	2,13
a	Belanja Tidak Langsung KDH/WKDH	1.461.741.729,00	1.466.878.894,00	100,00	1.459.105.911,00	99,47	7.772.983,00	0,53
b	Belanja Pegawai / PNS Setda (gaji, tunjangan, TPP)	50.674.567.398,00	50.938.912.773,00	100,00	49.830.893.546,00	97,82	1.108.019.227,00	2,18
II	BELANJA LANGSUNG	36.023.147.160,00	53.804.247.160,00	100,00	48.258.596.839,00	89,69	5.545.650.321,00	10,31
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	36.023.147.160,00	53.804.247.160,00	100,00	48.258.596.839,00	89,69	5.545.650.321,00	10,31
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.997.652.000,00	27.469.877.000,00	100,00	25.543.271.314,00	92,99	1.926.605.686,00	7,01
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.549.580.160,00	23.573.345.160,00	100,00	20.413.800.617,00	86,60	3.159.544.543,00	13,40
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	314.390.000,00	362.000.000,00	100,00	350.500.000,00	78,09	11.500.000,00	21,91
4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	2.161.525.000,00	2.399.025.000,00	100,00	1.951.024.908,00	81,33	448.000.092,00	18,67

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		2.729.740.550,00	2.958.790.550,00	100,00	2.885.959.161,00	97,54	72.831.389,00	2,46
II	BELANJA LANGSUNG	2.729.740.550,00	2.958.790.550,00	100,00	2.885.959.161,00	97,54	122.939.017,00	4,16
A	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	1.426.632.050	1.386.882.050	100,00	1.366.525.000	97,38	20.357.050,00	1,47
1	Publikasi Media Massa/Cetak	Rp 801.050.000	Rp 801.050.000	100,00	Rp 796.375.000	99,42	4.675.000,00	0,58
2	Publikasi Media Elektronik/IT	Rp 312.967.850	Rp 312.967.850	100,00	Rp 312.500.000	99,85	467.850,00	0,15
3	Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	Rp 167.364.200	Rp 167.364.200	100,00	Rp 153.975.000	92,00	13.389.200,00	8,00
4	Penerbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi	Rp 145.250.000	Rp 105.500.000	100,00	Rp 103.675.000	98,27	1.825.000,00	1,73
B	Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	145.073.750	204.067.750	100,00	180.074.100	46,01	74.101.278	36,31
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 85.923.750	Rp 85.923.750	100,00	Rp 79.070.000	92,02	74.101.278,00	86,24
2	Workshop Bidang Keprotokolan	Rp 59.150.000	Rp 118.144.000	100,00	Rp 101.004.100	-	17.139.900,00	0,00
C	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	1.158.034.750	1.367.840.750	100,00	1.339.360.061	98,39	28.480.689,00	2,08
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 207.346.200	Rp 192.346.200	100,00	Rp 188.133.500	97,81	4.212.700,00	2,19
2	Pengumpulan, Penyaringan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah dirubah menjadi Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp 385.963.550	Rp 531.594.550	100,00	Rp 527.920.661	99,31	3.673.889,00	0,69
3	Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Rp 64.725.000	Rp 19.400.000	100,00	Rp 19.347.400	99,73	52.600,00	0,27
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp 500.000.000	Rp 624.500.000	100,00	Rp 603.958.500	96,71	20.541.500,00	3,29

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO ORGANISASI

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		1.778.735.350,00	1.778.735.350,00	100,00	1.650.534.901,00	89,87	128.200.449,00	7,21
II	BELANJA LANGSUNG	1.778.735.350,00	1.778.735.350,00	100,00	1.650.534.901,00	89,87	137.848.946,00	7,75
A	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	270.253.400,00	270.253.400,00	100,00	244.708.431,00	90,55	25.544.969,00	9,45
1	Evaluasi Kelembagaan UPTD/Cabdin Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	16.070.000,00	14.070.000,00	100,00	13.155.000,00	93,50	915.000,00	6,50
2	Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.200.000,00	1.800.000,00	100,00	1.510.000,00	83,89	290.000,00	16,11
3	Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19.649.750,00	37.114.500,00	100,00	32.553.478,00	87,71	4.561.022,00	12,29
4	Validasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	109.533.900,00	109.533.900,00	100,00	102.284.885,00	93,38	7.249.015,00	6,62
5	Validasi Standar Kopetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67.150.000,00	59.950.000,00	100,00	48.740.239,00	100,00	11.209.761,00	18,70
6	Validasi evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	53.649.750,00	47.785.000,00	100,00	46.464.829,00	97,24	1.320.171,00	2,76
B	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	302.948.500,00	226.873.500,00	100,00	191.195.562,00	84,27	45.326.435,00	19,98
1	Penyusunan Profil Aparatur Jabatan Struktural	76.075.000,00	-	-	-	-	9.648.497,00	-
2	Forum Sekretariat Daerah Provinsi Babel	14.938.700,00	14.938.700,00	100,00	10.294.350,00	68,91	4.644.350,00	31,09
3	Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00	1.389.500,00	57,42	1.030.500,00	42,58
4	Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	68.150.000,00	68.150.000,00	100,00	66.116.593,00	97,02	2.033.407,00	2,98
5	Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73.390.000,00	73.390.000,00	100,00	72.981.919,00	-	408.081,00	0,00
6	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.045.000,00	25.045.000,00	100,00	19.965.000,00	-	5.080.000,00	0,00
7	Penyusunan Standar Capaian Kinerja Individu ASN	42.929.800,00	42.929.800,00	100,00	20.448.200,00	47,63	22.481.600,00	52,37
C	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	1.205.533.450,00	1.281.608.450,00	100,00	1.214.630.908,00	94,77	66.977.542,00	5,23
1	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	149.550.000,00	149.550.000,00	100,00	134.466.370,00	89,91	15.083.630,00	10,09
2	Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19.624.750,00	19.624.750,00	100,00	18.474.390,00	94,14	1.150.360,00	5,86
3	pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.219.950,00	1.219.950,00	100,00	750.000,00	61,48	469.950,00	38,52
4	Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	45.395.000,00	45.395.000,00	100,00	43.929.889,00	96,77	1.465.111,00	3,23

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19.360.000,00	19.360.000,00	100,00	18.960.000,00	97,93	400.000,00	2,07
6	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	900.000,00	-	230.000,00	0,00
7	Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	909.203.750,00	909.203.750,00	100,00	881.499.851,00	96,95	27.703.899,00	3,05
8	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.050.000,00	136.125.000,00	100,00	115.650.408,00	84,96	20.474.592,00	15,04

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO PEMBANGUNAN

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	1.096.244.300,00	1.096.244.300,00	100,00	957.072.051,00	87,30	139.172.249,00	12,70
II	BELANJA LANGSUNG	1.096.244.300,00	1.096.244.300,00	100,00	957.072.051,00	87,30	139.172.249,00	12,70
A	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	63.600.000,00	63.600.000,00	100,00	41.326.524,00	64,98	22.273.476,00	35,02
1	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monev APBN	29.050.000,00	29.050.000,00	100,00	23.736.524,00	81,71	5.313.476,00	18,29
2	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	34.550.000,00	34.550.000,00	100,00	17.590.000,00	50,91	16.960.000,00	49,09
B	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	170.010.000,00	170.010.000,00	100,00	121.879.500,00	71,69	48.130.500,00	28,31
1	Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	-	-	15.250.000,00	100,00
2	Peningkatan Fungsi Sistem E-Monev APBD	42.660.000,00	42.660.000,00	100,00	26.202.000,00	61,42	16.458.000,00	38,58
3	Peningkatan Capaian Realisasi APBD	82.050.000,00	82.050.000,00	100,00	76.175.000,00	92,84	5.875.000,00	7,16
4	Peningkatan Fungsi Sistem APBD Provinsi, Kabupaten/Kota	30.050.000,00	30.050.000,00	100,00	19.502.500,00	64,90	10.547.500,00	35,10
C	Program Perencanaan Sekretariat Daerah	68.499.500,00	68.499.500,00	100,00	49.724.600,00	72,59	18.774.900,00	27,41
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.849.750,00	35.849.750,00	100,00	23.345.350,00	65,12	12.504.400,00	34,88
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	32.649.750,00	32.649.750,00	100,00	26.379.250,00	80,79	6.270.500,00	19,21
D	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	794.134.800,00	794.134.800,00	100,00	744.141.427,00	93,70	49.993.373,00	6,30
1	Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	794.134.800,00	794.134.800,00	100,00	744.141.427,00	93,70	49.993.373,00	6,30

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		9.452.090.740,00	11.233.853.494,00	94,73	9.588.147.620,00	85,35	1.645.705.874,00	14,65
II	BELANJA LANGSUNG	9.452.090.740,00	11.233.853.494,00	94,73	9.588.147.620,00	85,35	1.645.705.874,00	14,65
A	A. Program Peningkatan Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama	8.517.399.990,00	10.189.781.244,00	96,68	8.717.697.220,00	85,55	1.472.084.024,00	11,13
	1. Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan	507.350.000,00	507.350.000,00	98,32	470.454.000,00	92,73	36.896.000,00	5,59
	2. Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/MTQ Nasional Provinsi Kep Bangka Belitung	887.160.000,00	887.160.000,00	97,07	763.188.457,00	86,03	123.971.543,00	11,04
	3. Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	748.049.700,00	815.009.700,00	99,81	545.075.000,00	78,09	269.934.700,00	21,72
	4. Pendampingan Jemaah Haji Provinsi Kep.Bangka Belitung	520.500.000,00	520.500.000,00	99,84	468.950.000,00	90,10	51.550.000,00	9,74
	5. Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Provinsi Kep. Bangka Belitung	1.484.201.540,00	2.444.201.504,00	96,01	1.910.470.871,00	78,16	533.730.633,00	17,85
	6. Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	3.058.500.000,00	3.609.871.290,00	100,00	3.354.413.792,00	92,92	255.457.498,00	7,08
	7. Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Provinsi Kep. Babel	453.846.000,00	453.846.000,00	91,00	398.516.000,00	87,81	55.330.000,00	3,19
	8. Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS	857.792.750,00	951.842.750,00	91,38	806.629.100,00	84,74	145.213.650,00	6,64
							-	
B	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, dan Pemuda	839.400.750,00	948.782.250,00	87,50	791.989.000,00	83,47	156.793.250,00	4,03
	1. Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	224.209.750,00	224.209.750,00	75,00	112.335.200,00	50,10	111.874.550,00	24,90
	2. Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	615.191.000,00	724.572.500,00	100,00	679.653.800,00	93,80	44.918.700,00	6,20
C	C. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95.290.000,00	95.290.000,00	100,00	78.461.400,00	82,34	16.828.600,00	17,66
	1. Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah	12.590.000,00	12.590.000,00	100,00	10.990.000,00	87,29	1.600.000,00	12,71
	2. Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah	9.125.000,00	9.125.000,00	100,00	9.125.000,00	100,00	-	0,00
	3. Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	73.575.000,00	73.575.000,00	100,00	58.346.400,00	79,30	15.228.600,00	20,70

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO EKONOMI

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		1.871.004.500,00	1.971.004.500,00	100,00	1.873.222.050,00	95,04	97.782.450,00	4,96
II BELANJA LANGSUNG		1.871.004.500,00	1.971.004.500,00	100,00	1.873.222.050,00	95,04	97.782.450,00	4,96
A	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	1.438.722.000,00	1.490.792.000,00	100,00	1.467.475.409,00	98,44	23.316.591,00	1,56
1	Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	23.902.000	53.902.000	100,00	46.036.788	85,41	7.865.212,00	14,59
2	Koordinasi, Monev Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38.050.000	38.050.000	100,00	34.363.300	90,31	3.686.700,00	9,69
3	Monev Analisis Makro Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.199.742.000	1.201.812.000	100,00	1.198.550.703	99,73	3.261.297,00	0,27
4	Monev Promosi Potensi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74.950.000	74.950.000	100,00	74.579.800	99,51	370.200,00	0,49
5	Monev UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	34.426.000	34.426.000	100,00	31.795.200	92,36	2.630.800,00	7,64
6	Monev Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17.350.000	37.350.000	100,00	37.160.000	99,49	190.000,00	0,51
7	Forum Pengembangan Ekonomi	50.302.000	50.302.000	100,00	44.989.618	100,00	5.312.382,00	10,56
B	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	8.807.500,00	6.737.500,00	100,00	6.437.300,00	128,07	300.200,00	4,46
1	Monitoring dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di 7 Kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.900.000	1.900.000	100,00	1.600.000	84,21	300.000,00	15,79
2	Monitoring dan Evaluasi Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.512.500	1.512.500	100,00	1.512.400	99,99	100,00	0,01
3	Koordinasi dan Pengaturan Tata kelolaTimah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.070.000	-	-	-	-	-	-
4	Monitoring dan Evaluasi Perizinan Amdal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.812.500	1.812.500	100,00	1.812.400	99,99	100,00	0,01
5	Monitoring dan Evaluasi Penataan Lahan Kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.512.500	1.512.500	100,00	1.512.500	100,00	-	0,00
C	Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	423.475.000,00	473.475.000,00	100,00	399.309.341,00	267,11	74.165.659,00	15,66
1	Pembentukan Bank Umum syariah Bangka Belitung	174.801.000	37.325.000	100,00	26.528.600	71,07	10.796.400,00	28,93
2	Koordinasi Program Corporate Social Responsibility di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81.227.000	152.200.560	100,00	149.716.960	98,37	2.483.600,00	1,63
3	Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5.150.000	55.150.000	100,00	1.000.000	-	54.150.000,00	0,00
4	Monev Kajian Strategis Penyusunan Perlindungan BCB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	115.045.000	141.845.000	100,00	138.535.993	97,67	3.309.007,00	2,33
5	Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47.252.000	86.954.440	100,00	83.527.788	-	3.426.652,00	0,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO LAYANAN PENGADAAN

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	3.552.177.500,00	4.152.641.000,00	96,00	3.574.318.410,00	86,07	578.322.590,00	13,93
II	BELANJA LANGSUNG	3.552.177.500,00	4.152.641.000,00	96,00	3.574.318.410,00	86,07	578.322.590,00	13,93
A	Program Pengembangan Data Informasi Layanan	1.074.069.500,00	1.074.069.500,00	100,00	889.597.497,00	82,82	184.472.003,00	17,18
1	Peningkatan Penerapan Data dan Informasi Layanan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	8.100.000,00	90,00	900.000,00	10,00
2	Peningkatan Pelayanan Publik	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	13.665.200,00	54,23	11.534.800,00	45,77
3	Pengelolaan Data dan Informasi	175.202.000,00	70.327.000,00	80,00	28.437.600,00	40,44	41.889.400,00	59,56
4	Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	864.667.500,00	969.542.500,00	100,00	839.394.697,00	86,58	130.147.803,00	13,42
B	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	540.920.500,00	1.121.384.000,00	100,00	1.030.944.311,00	91,93	90.439.689,00	8,07
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	445.037.500,00	964.500.000,00	100,00	891.787.698,00	92,46	72.712.302,00	7,54
2	Peningkatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	75.632.000,00	75.632.000,00	100,00	66.150.094,00	87,46	9.481.906,00	12,54
3	Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	20.251.000,00	81.252.000,00	100,00	73.006.519,00	89,85	8.245.481,00	10,15
C	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.937.187.500,00	1.957.187.500,00	95,99	1.653.776.602,00	84,50	303.410.898,00	15,50
1	Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.041.111.500,00	1.061.111.500,00	100,00	952.296.951,00	89,75	108.814.549,00	10,25
2	Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	258.274.000,00	258.274.000,00	85,00	138.556.488,00	53,65	119.717.512,00	46,35
3	Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	110.302.000,00	110.302.000,00	100,00	98.134.063,00	88,97	12.167.937,00	11,03
4	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	527.500.000,00	527.500.000,00	98,96	464.789.100,00	88,11	62.710.900,00	11,89

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		20.312.722.494,00	22.783.204.585,00	102,38	21.119.330.949,00	92,70	1.663.873.636,00	7,30
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.547.069.594,00	14.658.351.685,00	100,00	13.645.289.605,00	47,97	654.103.055,00	6,02
	Belanja Pegawai	12.547.069.594	14.658.351.685	100,00	13.645.289.605	95,93	654.103.055	12,04
II	BELANJA LANGSUNG	7.765.652.900,00	8.124.852.900,00	104,76	7.474.041.344,00	91,99	649.647.556,00	8,00
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.204.705.000,00	3.794.310.100,00	100,00	3.389.254.461,00	89,32	405.055.639,00	10,68
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.048.195.000	2.331.800.100	100,00	2.087.302.240	89,51	244.497.860,00	10,49
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	688.410.000	794.410.000	100,00	753.103.388	94,80	41.306.612,00	5,20
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	460.000.000	660.000.000	100,00	543.870.833	82,40	116.129.167,00	17,60
4	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	3.900.000	3.900.000	100,00	1.953.300	50,08	1.946.700,00	49,92
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100,00	3.024.700	72,02	1.175.300,00	27,98
B	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah dan Aparatur	56.714.300	35.114.300	100,00	14.911.000	42,46	20.203.300	57,54
1	Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3.570.000	3.570.000	100,00	-	-	3.570.000,00	100,00
2	Kegiatan Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4.599.700	4.599.700	100,00	-	-	4.599.700,00	100,00
3	Kegiatan Penanganan Whistle Blower System	350.000	350.000	100,00	-	-	350.000,00	100,00
4	Kegiatan Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.695.000	2.695.000	100,00	-	-	2.695.000,00	100,00
5	Kegiatan Penilaian Internal Zona Integritas	13.699.800	4.699.800	100,00	1.981.000	42,15	2.718.800,00	57,85
6	Kegiatan Monev Laporan Gratifikasi	31.799.800	19.199.800	100,00	12.930.000	67,34	6.269.800,00	32,66
C	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	4.219.213.850,00	4.245.293.750,00	114,29	4.065.375.883,00	95,76	178.753.867,00	4,21
1	Kegiatan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR	50.749.850	35.749.850	100,0	-	-	35.749.850,00	100,00
2	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	3.068.575.000	3.068.575.000	100,0	3.031.899.133	98,80	36.675.867,00	1,20
3	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	37.900.000	101.769.900	100,0	63.540.300	62,44	38.229.600,00	37,56
4	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	593.950.000	575.560.000	100,0	573.739.100	99,68	1.820.900,00	0,32
5	Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	235.790.000	235.790.000	100,0	223.546.700	94,81	12.243.300,00	5,19
6	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	108.040.000	93.040.000	100,0	78.983.200	84,89	14.056.800,00	15,11
7	Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	49.564.000	38.564.000	100,0	37.400.000			

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Monev Laporan Gratifikasi	74.645.000	96.245.000	100,0	56.267.450	58,46	39.977.550,00	41,54
D	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	285.019.750,00	50.134.750,00	100,00	4.500.000,00	8,98	45.634.750,00	91,02
1	Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	45.799.750	45.799.750	100	4.500.000	9,83	41.299.750,00	90,17
2	Kegiatan Konsultasi Audit	350.000	350.000	100	-	-	350.000,00	100,00
3	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	234.885.000	-	-	-	-	-	-
4	Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi SPIP	3.985.000	3.985.000	100	-	-	3.985.000,00	100,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		36.438.272.386,50	42.504.197.255,00	98,56	36.814.650.998,00	86,61	5.689.546.257,00	13,39
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.296.364.063,00	19.220.969.931,00	100,00	15.626.091.271,00	81,30	3.594.878.660,00	18,70
	Belanja Tidak Langsung	15.296.364.063,00	19.220.969.931,00	100,00	15.626.091.271,00	81,30	3.594.878.660,00	18,70
II	BELANJA LANGSUNG	21.141.908.323,50	23.283.227.324,00	97,13	21.188.559.727,00	88,07	2.094.667.597,00	9,00
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	7.826.216.923,50	8.689.426.924,00	100,00	8.302.352.965,00	95,55	387.073.959,00	4,45
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.443.676.923,50	6.399.447.424,00	100,00	6.107.313.267,00	95,44	292.134.157,00	4,56
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.791.225.000,00	1.794.369.000,00	100,00	1.730.772.898,00	96,46	63.596.102,00	3,54
3	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.128.000,00	34.338.000,00	100,00	34.035.600,00	99,12	302.400,00	0,88
4	Kegiatan Penguatan Kelembagaan / Organisasi	43.093.000,00	32.853.000,00	100,00	30.649.000,00	93,29	2.204.000,00	6,71
5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	486.144.000,00	423.469.500,00	100,00	394.641.500,00	100,00	28.828.000,00	6,81
6	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	4.940.700,00	99,81	9.300,00	0,19
B	Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi dan Kepangkatan	1.590.217.000,00	1.902.015.000,00	88,50	1.460.365.105,00	76,78	441.649.895,00	23,22
1	Kegiatan Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya	283.000.000,00	304.400.000,00	54,00	176.012.380,00	57,82	128.387.620,00	42,18
2	Kegiatan Perencanaan ASN	40.015.000,00	58.615.000,00	100,00	49.249.700,00	84,02	9.365.300,00	15,98
3	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	-	-
4	Kegiatan Promosi dan Mutasi ASN	1.266.702.000,00	1.538.500.000,00	100,00	1.234.603.025,00	80,25	303.896.975,00	19,75
C	Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi dan Kesenjangan ASN	4.560.501.000,00	5.205.277.000,00	100,00	4.672.807.607,00	89,77	532.469.393,00	10,23
1	Kegiatan Pembinaan ASN	47.396.000,00	47.396.000,00	100,00	44.261.000,00	93,39	3.135.000,00	6,61
2	Kegiatan Pengembangan Profesi ASN	4.000.000.000,00	4.643.811.000,00	100,00	4.148.768.907,00	89,34	495.042.093,00	10,66
3	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan ASN	250.980.000,00	250.980.000,00	100,00	226.690.000,00	90,32	24.290.000,00	9,68
4	Kegiatan Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	262.125.000,00	263.090.000,00	100,00	253.087.700,00	96,20	10.002.300,00	3,80

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	7.164.973.400,00	7.486.508.400,00	100,00	6.753.034.050,00	90,20	733.474.350,00	9,80
1	Kegiatan Ujian Dinas dan Seleksi Diklatpim III dan IV	187.528.000,00	78.240.000,00	100,00	72.729.400,00	92,96	5.510.600,00	7,04
2	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	2.485.288.000,00	2.485.288.000,00	100,00	2.169.627.600,00	87,30	315.660.400,00	12,70
3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	2.827.189.400,00	3.137.584.400,00	100,00	2.770.406.941,00	88,30	367.177.459,00	11,70
4	Kegiatan Peningkatan Pendidikan Formal	1.590.328.000,00	1.681.506.000,00	100,00	1.646.374.109,00	97,91	35.131.891,00	2,09
5	Kegiatan Peningkatan Mutu Kediklatan	74.640.000,00	103.890.000,00	100,00	93.896.000,00	90,38	9.994.000,00	9,62

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		75.192.811.013,11	88.407.972.993,21	100,00	77.844.379.931,47	88,05	10.563.593.061,74	11,95
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45.785.318.706,11	58.397.412.486,21	100,00	52.807.637.711,01	90,43	5.589.774.775,20	9,57
	Belanja Tidak Langsung	45.785.318.706,11	58.397.412.486,21	100,00	52.807.637.711,01	90,43	5.589.774.775,20	9,57
II	BELANJA LANGSUNG	29.407.492.307,00	30.010.560.507,00	100,00	25.036.742.220,46	83,43	4.973.818.286,54	16,57
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	19.832.633.057,00	19.942.007.257,00	100,00	17.560.732.250,46	88,06	2.381.275.006,54	11,94
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.708.026.807,00	11.274.926.807,00	100,00	10.307.720.498,00	91,42	967.206.309,00	8,58
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.868.232.500,00	8.409.907.500,00	100,00	7.145.191.752,46	84,96	1.264.715.747,54	15,04
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	236.347.950,00	236.347.950,00	100,00	87.050.000,00	36,83	149.297.950,00	63,17
4	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.300.800,00	4.100.000,00	100,00	4.100.000,00	100,00	0,00	0,00
5	Pengelolaan Kehumasan pada Bakuda	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	14.945.000,00	99,63	55.000,00	0,37
6	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.725.000,00	1.725.000,00	100,00	1.725.000,00	100,00	0,00	0,00
B	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	6.577.466.000,00	6.982.981.000,00	100,00	5.578.910.485,00	79,89	1.404.070.515,00	20,11
1	Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	1.181.744.000,00	1.181.744.000,00	100,00	845.335.165,00	71,53	336.408.835,00	28,47
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	280.525.000,00	280.525.000,00	100,00	258.261.000,00	92,06	22.264.000,00	7,94
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	31.268.380,00	82,29	6.731.620,00	17,71
4	Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	17.800.000,00	17.800.000,00	100,00	17.300.000,00	97,19	500.000,00	2,81
5	Sosialisasi Pajak Daerah	187.813.250,00	187.813.250,00	100,00	140.664.000,00	74,90	47.149.250,00	25,10
6	Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	770.774.000,00	808.774.000,00	100,00	683.471.724,00	84,51	125.302.276,00	15,49
7	Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	766.489.750,00	897.879.750,00	100,00	791.072.989,00	88,10	106.806.761,00	11,90
8	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	844.830.000,00	865.080.000,00	100,00	777.070.502,00	89,83	88.009.498,00	10,17
9	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	502.321.000,00	535.321.000,00	100,00	420.647.585,00	78,58	114.673.415,00	21,42
10	Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	550.490.000,00	633.540.000,00	100,00	453.562.256,00	71,59	179.977.744,00	28,41
11	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	601.425.000,00	647.350.000,00	100,00	534.928.596,00	82,63	112.421.404,00	17,37
12	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	645.144.000,00	699.044.000,00	100,00	489.698.288,00	70,05	209.345.712,00	29,95
13	Peningkatan Fungsi pelayanan samsat keliling	190.110.000,00	190.110.000,00	100,00	135.630.000,00	71,34	54.480.000,00	28,66

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	124.399.250,00	124.399.250,00	100,00	52.089.000,00	41,94	72.310.250,00	58,13
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	19.570.000,00	19.570.000,00	100,00	11.000.000,00	56,21	8.570.000,00	43,79
2	Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	35.729.000,00	35.729.000,00	100,00	4.325.000,00	12,11	31.404.000,00	87,89
3	Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	27.499.000,00	27.499.000,00	100,00	17.359.000,00	63,13	10.140.000,00	-
4	Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah	32.576.250,00	32.576.250,00	100,00	17.072.500,00	52,41	15.503.750,00	47,59
5	Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah	9.025.000,00	9.025.000,00	100,00	2.332.500,00	25,84	6.692.500,00	74,16
D	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	1.054.225.000,00	1.101.363.800,00	100,00	745.060.900,00	67,65	356.302.900,00	32,35
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	303.000.000,00	603.500.000,00	100,00	514.074.900,00	85,18	89.425.100,00	14,82
2	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	48.250.000,00	48.250.000,00	100,00	997.200,00	2,07	47.252.800,00	97,93
3	Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	23.200.000,00	23.200.000,00	100,00	0	0,00	23.200.000,00	100,00
4	Penyusunan Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	176.925.000,00	176.925.000,00	100,00	0	0,00	176.925.000,00	100,00
5	Penyusunan KUA dan PPAS	236.400.000,00	103.500.000,00	100,00	84.000.000,00	81,16	19.500.000,00	18,84
6	Penyusunan regulasi/kebijakan bidang anggaran	93.950.000,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	100,00	0,00	0,00
7	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	172.500.000,00	132.488.800,00	100,00	132.488.800,00	100,00	0,00	0,00
E	Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan	411.443.000,00	411.443.000,00	100,00	290.600.000,00	70,63	120.843.000,00	29,37
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	106.568.000,00	106.568.000,00	100,00	96.000.000,00	90,08	10.568.000,00	9,92
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA keuangan	191.000.000,00	191.000.000,00	100,00	160.100.000,00	83,82	30.900.000,00	16,18
3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	69.100.000,00	69.100.000,00	100,00	7.600.000,00	11,00	61.500.000,00	89,00
4	Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	11.125.000,00	11.125.000,00	100,00	2.400.000,00	21,57	8.725.000,00	78,43
5	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33.650.000,00	33.650.000,00	100,00	24.500.000,00	72,81	9.150.000,00	27,19
F	Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	1.109.194.000,00	1.150.234.200,00	100,00	692.103.285,00	60,17	458.130.915,00	39,83
1	Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71.540.000,00	71.540.000,00	100,00	59.542.000,00	83,23	11.998.000,00	16,77
2	Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	252.204.000,00	252.204.000,00	100,00	1.567.800,00	0,62	250.636.200,00	99,38
3	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	17.181.000,00	70,13	7.319.000,00	29,87
4	Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	372.980.000,00	372.980.000,00	100,00	285.429.850,00	76,53	87.550.150,00	23,47
5	Penyusunan laporan barang milik daerah	19.310.000,00	13.310.000,00	100,00	8.200.000,00	61,61	5.110.000,00	38,39
6	Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	49.210.000,00	96.250.200,00	100,00	46.363.760,00	48,17	49.886.440,00	51,83
7	Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	2.413.400,00	50,81	2.336.600,00	49,19
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00	29.200.000,00	98,32	500.000,00	1,68

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	242.205.475,00	84,98	42.794.525,00	15,02
G.	Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	298.132.000,00	298.132.000,00	100,00	117.246.300,00	39,33	180.885.700,00	60,67
1	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)	143.536.000,00	143.536.000,00	100,00	39.175.000,00	27,29	104.361.000,00	72,71
2	Sosialisasi Penata usahaan Keuangan	140.196.000,00	140.196.000,00	100,00	69.371.300,00	49,48	70.824.700,00	50,52
3	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	8.700.000,00	60,42	5.700.000,00	60,42

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		146.047.946.681,95	137.309.551.062,00	100,96	113.568.185.654,72	82,71	23.741.365.407,28	17,29
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	44.760.477.275,95	38.461.007.406,00	100,00	33.870.547.581,00	88,06	4.590.459.825,00	11,94
	Belanja Tidak Langsung	44.760.477.275,95	38.461.007.406,00	100,00	33.870.547.581,00	88,06	4.590.459.825,00	11,94
II	BELANJA LANGSUNG	101.287.469.406,00	98.848.543.656,00	101,92	79.697.638.073,72	80,63	29.394.962.609,84	29,74
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	13.167.452.136,00	12.051.552.136,00	98,75	10.192.926.610,00	77,37	1.858.625.526,00	15,42
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.080.752.136,00	10.937.352.136,00	100,00	9.205.353.874,00	84,16	1.731.998.262,00	15,84
	2. Peningkatan Disiplin Aparatur	972.000.000,00	805.500.000,00	100,00	798.750.000,00	99,16	6.750.000,00	0,84
	3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96.000.000,00	190.000.000,00	93,75	99.330.000,00	52,28	90.670.000,00	47,72
	4. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.800.000,00	56.800.000,00	100,00	46.037.083,00	81,05	10.762.917,00	18,95
	5. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	11.900.000,00	61.900.000,00	100,00	43.455.653,00	70,20	18.444.347,00	29,80
B	Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	82.362.225.270,00	78.666.051.520,00	99,02	61.659.191.928,00	65,60	27.250.916.619,56	563,61
	6. Rapat-rapat paripurna	182.100.000,00	184.800.000,00	186,00	175.926.500,00	95,20	12.903.325.080,00	6982,32
	7. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel	227.500.000,00	127.500.000,00	100,00	87.735.832,00	68,81	39.764.168,00	31,19
	8. Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya	19.179.910.300,00	17.679.910.300,00	116,67	12.445.462.692,00	70,39	5.234.447.608,00	29,61
	9. Reses	7.736.873.500,00	2.689.999.750,00	-	-	-	-	-
	10. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.583.283.000,00	1.933.283.000,00	72,22	663.713.821,00	34,33	1.269.569.179,00	65,67
	11. Rapat koordinasi asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia (ASPSI)	577.000.000,00	420.000.000,00	133,00	216.363.975,00	51,52	203.636.025,00	48,48
	12. Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik	798.091.200,00	753.091.200,00	83,33	626.184.600,00	83,15	126.906.600,00	16,85
	13. Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan	179.826.000,00	179.826.000,00	60,00	135.000.000,00	75,07	44.826.000,00	24,93
	14. Kunjungan Kerja Komisi	45.416.000.000,00	48.916.000.000,00	104,00	43.156.527.027,00	88,23	5.759.472.973,00	11,77
	15. Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	1.193.467.000,00	1.493.467.000,00	100,00	1.268.764.473,00	84,95	224.702.527,00	15,05
	16. Kunjungan Kerja Badan Anggaran	2.516.500.000,00	1.516.500.000,00	116,00	1.463.181.741,00	96,48	53.318.259,00	3,52
	17. Kunjungan Kerja badan legislasi/pembentukan perda	1.849.196.270,00	1.849.196.270,00	116,00	907.906.903,00	49,10	980.894.564,56	53,04
	18. Kunjungan Kerja Kehormatan	922.478.000,00	922.478.000,00	100,00	512.424.364,00	55,55	410.053.636,00	44,45

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan	5.757.792.000,00	8.130.940.000,00	108,00	7.845.519.535,72	96,67	285.420.464,28	3,51
	20. Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1.812.350.000,00	1.937.350.000,00	116,00	1.879.326.617,00	97,01	58.023.383,00	2,99
	21. Peningkatan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat	3.945.442.000,00	6.193.590.000,00	100,00	5.966.192.918,72	96,33	227.397.081,28	3,67

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		15.271.864.540,00	19.832.687.040,00	91,78	15.546.537.022,00	78,39	4.286.150.018,00	13,39
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.140.740.040,00	4.143.740.040,00	100,00	3.175.190.252,00	76,63	968.549.788,00	23,37
	Belanja Tidak Langsung	4.140.740.040,00	4.143.740.040,00	100,00	3.175.190.252,00	76,63	968.549.788,00	23,37
II	BELANJA LANGSUNG	11.131.124.500,00	15.688.947.000,00	83,56	12.371.346.770,00	78,85	3.317.600.230,00	21,15
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	7.127.152.500,00	12.863.352.500,00	78,24	10.118.100.233,00	49,45	2.745.252.267,00	21,34
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.291.390.000,00	5.747.577.500,00	95,72	4.873.986.074,00	84,80	873.591.426,00	15,20
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.656.525.000,00	7.006.725.000,00	99,88	5.207.263.959,00	74,32	1.799.461.041,00	25,68
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.450.000,00	100.450.000,00	22,86	34.150.200,00	34,00	66.299.800,00	66,00
4	Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	72,73	400.000,00	18,18	1.800.000,00	81,82
5	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	2.300.000,00	35,94	4.100.000,00	64,06
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan Untuk Rehabilitasi Berat Asrama Dayang Putri Bangka belitung di Yogyakarta	50.187.500,00	-	-	-	-	-	-
B	Program Peningkatan promosi, Informasi dan Pelayanan serta Hubungan antar Lembaga	4.003.972.000,00	2.825.594.500,00	88,89	2.253.246.537,00	69,95	572.347.963,00	20,26
1	Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah	619.824.000,00	529.824.000,00	100,00	388.719.000,00	73,37	141.105.000,00	26,63
2	Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.933.000,00	94.933.000,00	100,00	61.462.164,00	64,74	33.470.836,00	35,26
3	Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	1.393.450.000,00	1.341.450.000,00	100,00	1.240.446.818,00	92,47	101.003.182,00	7,53
4	Kegiatan Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	1.286.565.000,00	250.187.500,00	100,00	99.990.000,00	39,97	150.197.500,00	60,03
5	Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	564.200.000,00	564.200.000,00	100,00	446.828.555,00	79,20	117.371.445,00	20,80
6	Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	45.000.000,00	45.000.000,00	33,33	15.800.000,00	-	29.200.000,00	-

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		22.388.900.740,00	22.336.509.650,00	99,65	19.569.029.451,23	87,61	2.767.480.198,77	12,39
I,	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.657.079.540,00	10.831.738.450,00	100,00	10.177.217.634,00	93,96	654.520.816,00	6,04
	Belanja Tidak Langsung	11.657.079.540,00	10.831.738.450,00	100,00	10.177.217.634,00	93,96	654.520.816,00	6,04
II	BELANJA LANGSUNG	10.731.821.200,00	11.504.771.200,00	99,31	9.391.811.817,23	81,63	2.112.959.382,77	18,37
A.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	6.722.628.000,00	7.513.939.000,00	100,00	6.842.408.671,23	91,06	671.530.328,77	8,94
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.355.068.000,00	4.969.575.000,00	100,00	4.723.996.268,00	95,06	245.578.732,00	4,94
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.498.920.000,00	1.857.974.000,00	100,00	1.677.866.803,23	90,31	180.107.196,77	9,69
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	198.500.000,00	248.500.000,00	100,00	107.374.200,00	43,21	141.125.800,00	56,79
4	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.750.000,00	7.750.000,00	100,00	6.488.000,00	83,72	1.262.000,00	16,28
5	Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan	578.200.000,00	353.550.000,00	100,00	290.719.500,00	82,23	62.830.500,00	17,77
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.190.000,00	76.590.000,00	100,00	35.963.900,00	46,96	40.626.100,00	53,04
B	Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	2.135.903.000,00	2.199.744.000,00	100,00	1.525.101.549,00	69,33	674.642.451,00	30,67
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	628.900.000,00	628.900.000,00	100,00	591.333.349,00	94,03	37.566.651,00	5,97
2	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	53.150.000,00	53.150.000,00	100,00	33.050.000,00	62,18	20.100.000,00	37,82
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	85.385.000,00	85.385.000,00	100,00	24.015.400,00	28,13	61.369.600,00	71,87
4	Pengembangan sistem informasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	199.150.000,00	233.916.000,00	100,00	173.759.300,00	74,28	60.156.700,00	25,72
5	Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	69.393.000,00	98.468.000,00	100,00	40.644.400,00	41,28	57.823.600,00	58,72
6	Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	1.035.000.000,00	1.051.625.000,00	100,00	613.999.100,00	58,39	437.625.900,00	41,61
7	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	64.925.000,00	48.300.000,00	100,00	48.300.000,00	100,00	-	-
C	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	324.747.000,00	100.791.000,00	100,00	79.012.200,00		21.778.800,00	21,61
1	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	43.171.000,00	43.171.000,00	100,00	38.851.200,00	89,99	4.319.800,00	10,01
2	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	18.850.000,00	26.850.000,00	100,00	17.688.400,00	65,88	9.161.600,00	34,12
3	Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	231.956.000,00	-		-	-	-	-
4	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	24.670.000,00	24.670.000,00	100,00	19.287.600,00	78,18	5.382.400,00	21,82
5	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00	3.185.000,00	52,21	2.915.000,00	47,79

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	435.602.000,00	90.010.000,00	100,00	31.870.208,00	35,41	58.139.792,00	64,59
1	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan SDA I	41.030.000,00	41.030.000,00	100,00	11.126.600,00	27,12	29.903.400,00	72,88
2	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan SDA II	34.225.000,00	34.225.000,00	100,00	17.518.608,00	51,19	16.706.392,00	48,81
3	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	329.392.000,00	-	-	-	-	-	-
4	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Ekonomi dan SDA I	8.670.000,00	8.670.000,00	100,00	450.000,00	5,19	8.220.000,00	94,81
5	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Ekonomi dan SDA II	22.285.000,00	6.085.000,00	100,00	2.775.000,00	-	3.310.000,00	54,40
E	Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	216.365.700,00	216.365.700,00	100,00	90.517.900,00	41,84	125.847.800,00	58,16
1	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	96.377.700,00	96.377.700,00	100,00	42.215.000,00	43,80	54.162.700,00	56,20
2	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	47.320.000,00	47.320.000,00	100,00	24.022.000,00	50,77	23.298.000,00	49,23
3	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	47.324.000,00	47.324.000,00	100,00	18.830.900,00	39,79	28.493.100,00	60,21
4	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	14.394.000,00	14.394.000,00	100,00	2.350.000,00	16,33	12.044.000,00	83,67
5	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	3.100.000,00	28,31	7.850.000,00	71,69
F	Program Penelitian dan Pengembangan	896.575.500,00	1.383.921.500,00	95,83	822.901.289,00	59,46	561.020.211,00	40,54
1	Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	256.721.000,00	256.721.000,00	100,00	138.463.453,00	53,94	118.257.547,00	46,06
2	Penguatan Jaringan Kelitbangan	142.475.500,00	329.675.500,00	100,00	197.035.470,00	59,77	132.640.030,00	40,23
3	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	125.634.000,00	515.780.000,00	100,00	371.858.581,00	72,10	143.921.419,00	27,90
4	Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	371.745.000,00	281.745.000,00	83,33	115.543.785,00	41,01	166.201.215,00	58,99